Kawat Publishing

Senandung Tampoek

Kolom Tuanku Nan Kacau

Khairil Miswar

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT SULTAN ISKANDAR MUDA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH – ACEH – INDONESIA
https://pmiiuinary.wordpress.com

Khairil Miswar

Senandung *Jampoek*

Kolom Tuanku Nan Kacau

Kawat Publishing
JEMBATAN PERADABAN

Senandung *Jampoek*
Kolom Tuanku Nan Kacau

©2020

Penulis : Khairil Miswar
Tata letak : Tim Kreatif
Design cover : Tim Kreatif

ISBN:

cetakan pertama, 2020

Kawat Publishing
JEMBATAN PERADABAN

Kantor Perwakilan
Tibang, Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: kawatpublishing@gmail.com
HP/WA: 085260249240

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pada 2015 lalu, setelah mendirikan media *online* AceHTrend, Bang Risman Rachman mengajak saya untuk menulis di sana. Saat itu beliau menyediakan kolom kecil untuk saya isi dengan tulisan-tulisan ringan terkait fenomena sosial politik di Aceh. Setelah mendapat persetujuan dari Bang Risman, kolom kecil itu kemudian saya namai sendiri dengan *Tuanku Nan Kacau*. Penamaan yang demikian dilatari oleh model tulisan saya yang memang sedikit kacau alias terlihat kurang serius. Sebenarnya saya menulis dengan sangat serius. Cuma saja saya menggunakan pola yang tampak tidak serius untuk membahasa hal-hal serius.

Tulisan-tulisan saya di kolom *Tuanku Nan Kacau* memang sangat berbeda dengan tulisan-tulisan saya di media cetak yang cenderung bersifat formal dan kadang-kadang terlihat kaku. Sebenarnya saya sendiri kurang nyaman dengan pola-pola "kaku" semacam itu, tapi kebanyakan media cetak dan juga media online lainnya memang menghendaki tulisan yang demikian, tulisan yang mirip-mirip akademikus dan filsuf. Akibat prosedur yang demikian saya pun terpaksa mengikuti pola yang dikehendaki media terkait agar tulisan-tulisan saya bisa mendarat di sana. Tapi dalam kondisi tertentu, dengan sangat hati-hati, terkadang saya juga memaksa pola saya sendiri.

Berbeda dengan media lain, di AceHTrend, khususnya di kolom *Tuanku Nan Kacau*, saya bisa menulis sebebas mungkin dan bahkan sesuka hati. Saya sangat berterima kasih kepada

Bang Risman Rachman karena beliau tidak pernah sekali pun "mengedit" tulisan-tulisan saya dan membiarkan tulisan itu apa adanya, meskipun kadang-kadang (mungkin) tidak sesuai dengan harapan beliau. Karena itu, walaupun kepemimpinan AceHTrend tidak lagi berada di bawah Bang Risman – dan digantikan oleh Muhajir Juli, saya masih tetap bertahan menulis di sana sampai dengan saat ini. Tidak terasa sudah lima tahun saya berkicau di AceHTrend melalui kolom *Tuanku Nan Kacau*. Seperti halnya Bang Risman, Muhajir Juli juga memberi ruang bagi saya untuk terus berkicau.

Nah, buku ini adalah kumpulan tulisan saya di kolom *Tuanku Nan Kacau* yang telah tayang di AceHTrend. Dalam buku ini saya mengumpulkan 66 artikel yang ditulis sejak 2015-2017. Karena berisi kumpulan artikel yang ditulis dalam konteks waktu itu, maka pembaca mesti memutar memorinya ke belakang pada saat kejadian-kejadian itu berlangsung. Hal ini penting agar tulisan ini tidak kehilangan konteksnya.

Senandung *Jampoek* adalah salah satu artikel saya yang sudah pernah tayang di AceHTrend. Dengan berbagai pertimbangan saya "terpaksa" menggunakan judul tersebut untuk merangkum keseluruhan topik tulisan dalam buku ini. Meskipun tidak seratus persen bisa mengikat semua tulisan, namun setidaknya judul tersebut mampu mewakili sebagian besar tulisan dalam buku ini.

Dalam bahasa Indonesia, *jampok* dikenal dengan nama burung hantu. Di Aceh istilah *jampoek* ini kerap dilekatkan kepada orang-orang yang suka memuji diri dan bangga dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nantinya dalam buku ini pembaca akan menemukan beberapa fenomena Senandung *Jampoek* yang diperankan oleh sebagian orang Aceh.

Dengan selesainya penyusunan buku ini, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah sudi membantu, baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih saya layangkan kepada Bang Risman Rachman dan Muhajir Juli sebagai pihak yang telah memberi ruang bagi saya untuk terus berkicau di AceHTrend sampai saat ini.

Saya juga berterima kasih kepada rekan saya, Taufik Al Mubarak yang telah sudi menerbitkan tulisan pertama saya di Tabloid SUWA pada tahun 2007. Ucapan terima kasih juga saya sajikan kepada Bang Ariadi B. Jangka yang dulunya pada 2011-2015 telah bersedia menerbitkan puluhan tulisan saya di Harian Aceh dan Harian Pikiran Merdeka. Dua nama tersebut memiliki andil yang cukup besar dalam perjalanan kepenulisan saya yang masih seumur jagung. Dan, tentunya saya juga tidak bisa melupakan jasa guru saya, Bapak Jafar Syamsuddin, guru bahasa Indonesia di MTsN Matangglumpangdua (1993-1996) yang telah menumbuhkan minat saya untuk belajar menulis di masa remaja.

Ucapan terima kasih terbesar saya persembahkan kepada ayahanda saya, Drs. Tgk. H. Ismail Sarong (73 tahun) yang (mungkin) pernah berharap agar saya menjadi penceramah (orator) untuk melanjutkan "keahlian" beliau, tapi ternyata saya tergelincir dalam dunia kepenulisan. Beliau adalah guru pertama bagi saya dan juga teman diskusi yang bersemangat. Sebaris doa juga saya layangkan kepada almarhumah ibunda saya, Hj. Mudiah Affan yang telah mendahului kami. Semoga Allah luaskan kubur beliau dan diampuni dosa-dosanya serta ditempatkan di tempat yang layak di sisiNya. Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada Ummi Yusmala (ibu tiri) yang telah setia menemani ayahanda saya di usianya yang semakin senja.

Selanjutnya ucapan serupa juga saya persembahkan kepada adik-adik saya. Kepada seluruh teman masa sekolah di MIN Cot Bada, MTsN Matangglumpang Dua, MAN Peusangan, Diploma Dua IAIN Ar-Raniry, Jurusan Bahasa Arab IAIN Ar-Raniry, STAI Almuslim, teman-teman di Konsentrasi Pemikiran dalam Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan seluruh teman-teman yang pernah saya kenal, juga saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Terakhir, ucapan terima kasih terindah saya sajikan untuk istri saya, Linda Zahrianur, S. Si yang meskipun dalam kondisi morat-marit tetap setia menemani saya dan juga buah hati, Sameer Al-Qarni, Syahira Fathul Kirami dan Syiza Ghazia Rihani yang selalu menjadi penyemangat bagi saya.

Sebagai penutup, buku ini bukan kitab suci sehingga ia tak lepas dari kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun terlupa. Dengan demikian segala kritik menjadi niscaya.

Bireuen, 21 Januari 2020

Khairil Miswar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii

BAGIAN 1

Stiker dan Dilema Politisi 2
Fenomena *Peublo Cap* di Aceh 7
Merampas Harta Rakyat 10
Istana Wali 13
Senandung *Jampoek* 16
Politik *Burông Boh Leuping* 19
Tu Sop dan Cerminan "Kejenuhan" Ulama 23
Bireuen dalam "Rebutan" 27
Gubernur Hercules 32
Tim Sukses dan Sukses Tim 37
Politik Rebus Telur Hiu 42
Berebut "Paling GAM" 47
Saling Tipu Antara Rakyat dan Politisi 52
Politik Teror Itu Seperti Pedang 56
Politik Aswaja Aceh dalam Teka-Teki 61
Pilih Ulama Atau Juhala? 67
Mimbar Politik dan Politik Mimbar 71
Apa Karya, Irwandi dan "Perang Wacana" 76
Saifannur, Diammu Gunung Berapi 82
Bila Cinta Didusta 90

Woe-Woe, "Manifesto" Yang Gagal? 93
Jurus *Meu-angen* Zaini Abdullah 97
Politik *Keuroekroek* 102
National Of Pruet 106
Para Pemuja dan Akal Yang Tertidur 111
Saudara Kembar "Berebut Tahta" (PA vs PNA)..... 115
Jangan Biarkan Tikus Bunuh Diri..... 120
Ketika Muallem Harus Mengalah..... 124
Ketika Mata Menjadi Hakim..... 128
The Power of Singklet Gaki..... 132
"Duet Maut" dan Identitas Simbolik 141
Dari Kejora Menuju Kecoa 147
Ruslan, Patah Ranting di Ujung Usia..... 151

BAGIAN 2

"Pohon Kohler" dan Sejarawan Dadakan..... 152
Bahasa Kita..... 157
Apa Yang Kita Dapat Dari Tsunami? 161
Pemuda dan Kecerdasan Emosional 164
Mari Buat "Bom" di Kedai Kopi!..... 168
Latah Boleh, Tapi Jangan Terlalu... 171
Dosen *Bek Sok*, Mahasiswa *Bek Ulok* 174
Sampai Kapan Kita Harus Lebay?..... 181
Menculik Kewarasan..... 187
Menjemput Mante 192
Hikayat Penjilat..... 196
Adat dan Akai *Burek Katek* 199
Jangan Seperti Lembu..... 204
Selamat Hari Kacingieng! 208

Agam Gatai 212
Mengusir Kepanikan 216
Intelektual Garis Tombol 220
PLN Tuli Peluit 223
Mahasiswa Genit 227
Menyiram Bunga Kertas di Hari Raya Medsosiah 231
Para "Pemburu" Salib 235
Cambuk Garis Selfi 239
Parade "Kegenitan" 244
Rokoknologi 247
Menyembelih Keangkuhan 252
Agama Bukan Celana Dalam 255
Manusia Setengah Jadi 260
Teungku Landok 264
Maling Berserban 268
Sultan Atau Su Tan? 272
Sajadah, Kepanikan dan Kelatahan 277

TENTANG PENULIS 282

Hadih Maja[1]

Adak idông, idông taloë
Keudéh-keunoë gop hue hila

Alèe tob beulacan
Beurangkapeu takheun malèe tan

Aneuk gajah jak bumö han leungo
Aneuk tulo pô meuhayak dônya

Bèk peujeuet droë umpama cangguek
Taduek diyub bruek lam blang raya

Meunyo hana siwah di blang
Daruet canggang keu panglima

Tajak bak ulèebalang
lagee rangkang hana taloë
Tajak bak imuem
Sabé geukheun laén uroë
Tajak bak teungku
lagee geunuku hana gigoë
Tajak bak keuchik
Lagee pik hana sagoë

Tadeungo su sang jeuleupak
'Oh trôh tajak padé seuneuba

1 Hasjim, MK dkk, *Himponan Hadih Maja (Pusaka Ureung Tuha), (Banda Atjeh: tp, 1968).*

Bagian 1

Stiker dan Dilema Politisi

Baru-baru ini, sebagian pengguna media sosial (medsos), khususnya *facebooker* di Aceh diramaikan dengan ragam komentar terkait sosok "stiker" yang kononnya telah berhasil "menghebohkan" Kabupaten Aceh Jaya. Kisah ini berawal dari komentar Wakil ketua DPRK Aceh Jaya di media yang mempertanyakan stiker listrik gratis berlambang Partai Aceh yang terpasang di sejumlah rumah penerima bantuan. Menurut wakil ketua DPRK Aceh Jaya, listrik gratis tersebut merupakan dukungan dana dari APBK yang dianggarkan sejak 2014 lalu hingga 2015 (aceh.tribunnews.com/01/11/2015).

Pasca pernyataan dari wakil ketua DPRK tersebut, media juga mengabarkan bahwa Ketua Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya mengatakan program listrik gratis di Aceh Jaya untuk warga kurang mampu merupakan program Partai Aceh yang dijanjikan pada masa kampanye dulu. Fraksi Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya juga menegaskan bahwa tidak semua penerima listrik gratis di Aceh Jaya ditempel stiker berlambang Partai Aceh (PA). Penempelan stiker PA di meteran listrik rumah tersebut hanya berlaku untuk pendukung (konstituen) PA saja. Sementara penerima listrik gratis yang dianggap kurang

mendukung, PA tidak menempel stiker tersebut di meteran listrik rumah (aceh.tribunnews.com/03/11/2015). Demikian kabar yang berkembang di media.

Apa Itu Stiker?

Sebelum terlalu jauh melangkah, akan lebih baik jika kita pahami dulu apa itu stiker? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "stiker" didefinisikan sebagai lembaran kertas kecil atau plastik yang ditempelkan. Sebagai masyarakat yang hidup di zaman modern, tentu kita tidak merasa asing dengan sosok "stiker" ini. Bagi kita yang rajin beli kerupuk atau kue anak-anak, sudah pasti sangat akrab dengan sosok "stiker" yang ada dalam bungkusan makanan ringan tersebut.

Hasil penelusuran saya via *google*, kebanyakan sejarawan memperkirakan bahwa awal penggunaan stiker untuk pedagang Eropa bermula di tahun 1880-an. Pada tahapan selanjutnya, stiker merupakan bagian umum dari industri periklanan. Kononnya ide stiker pertama kali digunakan oleh orang Mesir kuno untuk mengiklankan harga produk mereka di pasar (*sweetelvira.com*). Adapun manfaat stiker sebagaimana dirangkum oleh *binasyifa.com*, adalah untuk tanda bukti diri atau simbol; sebagai alat keamanan; alat untuk iklan; keperluan seni; dan sebagai hiasan. Dengan demikian, pahamlah kita, bahwa "stiker" yang "diributkan" beberapa hari lalu bukanlah barang baru.

Sebagai Identitas

Sebenarnya aksi "penempelan stiker" di beberapa rumah penerima bantuan listrik gratis Aceh Jaya adalah tindakan yang wajar saja jika ditinjau dari "neraca politik." Sebagaimana telah diulas di atas bahwa salah satu manfaat stiker adalah sebagai alat iklan. Dalam dunia politik, iklan merupakan medium penunjang yang mampu mendongkrak popularitas sebuah partai politik. Sederhananya, jika tidak mau beriklan, maka jangan berpolitik!

Fenomena "tempel stiker" sebenarnya sudah sangat lazim ditemui di mana-mana. Lihat saja ketika musibah gempa tsunami menimpa Aceh, semua bantuan yang masuk ke Aceh selalu saja dilengkapi dengan stiker sebagai identitas si pemberi bantuan. Bisa dipastikan tidak pernah ada bantuan "misterius" yang datang tanpa stiker.

Selain itu, dalam pergaulan sosial di kampung-kampung, kita pun sudah sangat akrab dengan sosok stiker dalam pengertian yang luas. Lihat saja ketika ada pesta perkawinan di kampung-kampung, tidak ada tamu yang membawa kado misterius tanpa menulis namanya. Penulisan nama pemilik kado dalam arti yang luas memiliki kesamaan dengan stiker ditinjau dari segi tujuan – yaitu sebagai identitas. Demikian pula dengan "budaya" amplop yang diberikan kepada tuan rumah pada acara pesta. Jika isi amplopnya "tebal" bisa dipastikan si pemilik amplop akan menulis namanya dengan spidol besar. Sebaliknya, jika amplopnya "tipis", maka persoalan tulis nama harus dipikir ulang. Begitulah! Bahkan untuk sedekah di masjid pun, terkadang kita meminta agar nama kita diumumkan. Sekali lagi – ini soal identitas! Apa yang terjadi di Aceh Jaya baru-baru ini, tentu tidak keluar dari kategori ini.

Namun demikian, fenomena "tempel stiker" menjadi tidak wajar ketika dana bantuan tersebut berasal dari anggaran publik semisal APBK. Ini adalah pesoalan etika, dan dalam kondisi tertentu adalah "kejahatan". Hal ini sama saja seperti soal amplop dan kado. Bagaimana jadinya jika seorang teman yang berhalangan hadir ke acara pesta menitipkan amplopnya pada kita. Kemudian amplop si teman tersebut kita tuliskan nama kita tersebab kondisi kantong kita pada hari itu yang lagi "kempis" – hanya untuk "gaya" di hadapan tuan rumah. Apakah pantas?

Dilema Politisi

Dalam dunia politik, persoalan bantuan terkadang menjadi semacam dilema, apalagi jika bantuan tersebut bersumber dari anggaran daerah. Adalah wajar (dalam konteks politik) jika seorang politisi berhajat agar bantuan dan program yang digagasnya diketahui publik, khususnya konstituen. Setidaknya hal tersebut menjadi modal politiknya ke depan. Namun di sisi lain, bantuan tersebut memakai anggaran daerah (negara) sehingga "tidak etis" jika ada klaim individual atau kelompok.

Janji-janji politik di masa kampanye memang harus ditepati. Jika tidak ditepati, tentu kepercayaan publik, khususnya konstituen akan hilang. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa aksi penempelan stiker yang dilakukan oleh salah satu partai di Aceh Jaya adalah sebagai bukti realisasi dari janji kampanye mereka. Dalam hal ini, stiker berguna untuk meyakinkan publik, khususnya konstituen bahwa janji itu telah dipenuhi.

Karena ia sebuah dilema, maka biarkan saja identitas dan etika itu berpelukan dan saling menari. (***AT, 03 November 2015***).

Fenomena Peublo Cap di Aceh

Dalam beberapa minggu terakhir ada beberapa "cap" (stempel) yang "laku keras" di Aceh. Cap-cap dimaksud adalah "*pungo*," "pengkhianat," dan "sesat." Ketiga cap ini menjadi topik perbincangan paling hangat akhir-akhir ini. Jika diurut berdasarkan waktu, cap paling tua adalah "pengkhianat." Cap ini sudah beredar luas pada masa kolonial yang ditujukan kepada "antek-antek kafir" (penjajah). Cap "pengkhianat" tidak hilang begitu saja dan terus lestari pada masa-masa selanjutnya, khususnya pada saat konflik bersenjata antara GAM dan RI. Pasca damai Aceh, cap ini juga masih laris manis, khususnya di panggung politik. Saya ingat betul pada pemilu legislatif 2009, cap ini laku keras di Aceh. Demikian pula pada pilkada 2012, cap tersebut juga masih beredar di arena politik. Baru-baru ini, cap "pengkhianat" juga kembali populer. Kali ini cap tersebut disematkan kepada para "penggugat UUPA."

Cap kedua adalah "pungo". Ditinjau dari segi usia, cap ini juga muncul pada masa kolonial, di mana Belanda menyebut masyarakat Aceh sebagai *Aceh Moorden*. Istilah "Aceh Pungo" yang awalnya digunakan oleh Belanda pada masa kolonial, kembali dipopulerkan oleh Taufik Al-Mubarak melalui judul

bukunya yang lumayan "provokatif," "Aceh Pungo". Beberapa waktu lalu, media Serambi Indonesia juga menyajikan satu tajuk berita yang lumayan fenomenal, "APBA Pungo." Kononnya, istilah APBA Pungo tersebut merupakan hasil "ijtihad" dari Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Cap ketiga adalah "jahannam Aceh." Cap ini kononnya lahir pada saat Pilpres 2014 yang saat itu dimenangkan oleh Jokowi-JK. Tentang apa dan bagaimana penafsiran dari cap "jahahannam Aceh" sangat sulit untuk diterjemahkan. Interpretasi yang tepat tentu hanya diketahui oleh "pembuat" cap.

Cap keempat adalah "sesat." Menurut "riwayat" yang berkembang dan kononnya sudah "mutawatir", cap ini merupakan "hasil karya" guru kita Rustam Effendi yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah. Dalam pernyataannya, Rustam Effendi menyebut bahwa aktivis Aceh sudah sesat. Komentar Rustam Effendi ini selanjutnya juga mendapat tanggapan dari salah seorang aktivis Aceh, Muhammad MTA.

Tidak lama berselang, muncul pula cap kelima, yaitu "lebay." Cap ini disusun secara "rapi" dan "sistematis" oleh rekan kita Teuku Kemal Fasya, seorang Antropolog dari Unimal. Pernyataan Teuku Kemal Fasya ini kononnya sebagai reaksi terhadap komentar Rustam Efendi yang menyebut bahwa aktivis sudah "sesat."

Rupanya cap kelima bukanlah cap terakhir. Beberapa menit yang lalu, media mengabarkan bahwa telah muncul cap keenam, yaitu "pahlawan kesiangan." Dalam keterangannya, Rustam Effendi meminta Teuku Kemal Fasya agar tidak menjadi pahlawan kesiangan.

Demikianlah enam cap yang berhasil saya himpun, sembari menunggu munculnya cap-cap terbaru. Enam cap yang telah diuraikan di atas tidak saya beri penafsiran karena saya tidak punya otoritas untuk itu. Namun yang jelas, di antara cap-cap yang beredar, tentu ada yang bernilai positif dan ada pula yang negatif. Dan sebagai sebuah kreativitas ia patut dihargai. (***AT, 12 November 2015***).

Merampas Harta Rakyat

Syaikh Muhammad Al-Ghazali (2005) dalam salah satu bukunya meriwayatkan satu kisah yang patut disimak. Cerita ini mengisahkan tentang ketamakan seorang Dhahir Pipris, wali negeri Syam dan Mesir yang hidup di zaman Imam An-Nawawi. Pada suatu ketika, Dhahir Pipris berkeinginan untuk memerangi tentara Tartar yang saat itu sudah memasuki daerah Syam. Dhahir Pipris meminta kepada para ulama Syam untuk berfatwa agar ia diperbolehkan mengambil harta benda milik rakyat untuk digunakan sebagai bekal dalam peperangan melawan tentara Tartar. Pada saat itu seluruh ulama Syam menyetujuinya, kecuali Imam Nawawi. Ketidaksetujuan Imam Nawawi ini disebabkan oleh kehidupan Dhahir Pipris yang mewah dan berfoya-foya dengan hartanya. Peperangan dengan tentara Tartar hanya dijadikan sebagai alasan untuk merampas harta rakyat.

Ada dua pesan yang dapat diambil dari kisah Pipris dan Imam Nawawi di atas. *Pertama,* ketamakan seorang penguasa yang dengan kekuasaannya ingin merampas harta rakyat dengan alasan *jihad*. Untuk menutup "kebejatannya," si penguasa tersebut terlebih dahulu mencari "asas legalitas" terhadap

aksinya dengan cara meminta para ulama untuk berfatwa sebagai bentuk justifikasi sehingga umat bisa "dibodohi." Dengan adanya "asas legalitas," maka tindakannya akan sah di mata hukum, dan rakyat pun akan tunduk dan patuh.

Kedua, ramainya pendukung tidaklah menjadi bukti bahwa kebenaran ada di sana, dan menyelisihi pendapat mayoritas juga bukan merupakan aib. Tentu sangat tidak patut jika kita menuduh Imam Nawawi sebagai "pengkhianat" hanya karena beliau tidak setuju terhadap tindakan Pipris dan tidak mungkin pula kita menyebut beliau sebagai "pecundang" karena berbeda pendapat dengan mayoritas ulama saat itu.

Jika ditinjau dalam konteks kekinian, tentu jumlah "Pipris" ini lebih banyak, dan sosok "Imam Nawawi" adalah minoritas yang berada di ambang kepunahan. Memang para politisi kita saat ini tidak lagi menggunakan fatwa ulama sebagai alat justifikasi disebabkan kondisi zaman yang telah berubah. Dalam peradaban modern, aksi menipu dan merampas harta rakyat bisa dilakukan dengan melahirkan berbagai regulasi yang sesuai kepentingan penguasa. Ingin menambah gaji tinggal buat aturan, ingin "studi bandit" tinggal buat aturan, ingin tambah tunjangan tinggal lahirkan aturan, ingin jadi "sosok keramat" semisal "wali" tinggal buat qanun, dan seterusnya. Dengan adanya "asas legalitas", maka yang "haram" pun menjadi "halal" di mata hukum. Tentang apakah aturan itu patut dan pantas adalah "tidak penting."

Di zaman ini untuk menguras uang rakyat bisa dilakukan melalui cara terselubung dengan menciptakan program-program yang dalam pandangan awam terlihat pro rakyat sehingga rakyat pun terlena. Keputusan yang dilahirkan tidak lagi berdasarkan manfaat, tetapi berdasarkan pendapat

mayoritas fraksi yang kebanyakan adalah "fraksi Pipris." Ketika palu telah jatuh, maka jalan untuk menguras uang rakyat pun terbuka lebar. Cukup nikmat, bukan? (***AT, 19 November 2015***).

Istana Wali

Sulit dibayangkan bagaimana jadinya hidup ini jika tanpa wali. Tentu kita akan menemui banyak kesukaran dalam kehidupan tanpa sosok wali. Siswa di kelas tentu akan kocar-kacir jika tidak dikawal oleh wali kelas. Jika orang tua kita meninggal, dalam *kikuk* harta warisan pun mesti melibatkan wali. Pernikahan calon pengantin pun akan gagal total jika tanpa restu dan kehadiran seorang wali. Semegah apa pun sebuah kota akan kacau-balau tanpa dipimpin oleh seorang walikota. Bahkan, dunia musik pun akan layu tanpa kemunculan Wali Band. Demikian besarnya peran wali dalam kehidupan ini. Tersebab itulah, jangan menghina, mengejek dan membenci sosok wali.

Mengingat pentingnya peran wali, maka jangan sekali-kali mengecewakan wali, baik wali kelas, wali nikah, wali kota atau pun wali-wali lainnya. Jika para wali kecewa, maka kita akan ditimpa kerugian besar. Durhaka kepada wali kelas, tentu kita tidak bisa naik kelas. Durhaka kepada wali nikah, risikonya tidak jadi kawin. Durhaka pada Wali Band, konser akan batal, atau sekurang-kurangnya tiket jadi mahal, demikian seterusnya.

Wali Nanggroe

Beberapa waktu lalu, sebuah media lokal di Aceh menghadirkan satu kabar menakjubkan terkait istana Wali Nanggroe yang kononnya menghabiskan dana 100 milyar. Harga yang lumayan murah untuk bangunan semegah itu. Saya pernah beberapa kali memandang bangunan itu dari kejauhan, bukan baru-baru ini, tapi satu atau dua tahun lalu. Awalnya saya mengira bangunan itu adalah markas tentara, tetapi seorang teman memberi tahu kepada saya bahwa bangunan itu adalah istana wali. Setelah mendengar penjelasan dari teman tersebut, saya pun berhajat ingin naik ke puncak istana dan berteriak "WOW" – sebagai ekspresi ketakjuban yang tak terbendung.

Baru-baru ini, seperti diriwayatkan oleh media, Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah alias Abu Doto kononnya mengkritik kualitas bangunan yang katanya tidak sesuai harapan, alias jauh dari impian dan rencana awal. Pasca komentar Abu Doto, perbincangan di media sosial pun menjadi ramai. Sebagian kalangan melemparkan kritik atas megahnya bangunan itu di tengah kondisi rakyat yang morat-marit. Sebagian lagi ada yang meminta agar KPK untuk masuk guna memastikan ada tidaknya indikasi korupsi, tanpa mempersoalkan etis tidaknya bangunan itu berdiri di Aceh.

Saya melihat ada dua hal yang penting dipertanyakan. *Pertama,* layakkah bangunan semegah itu berdiri di Aceh di tengah kondisi perekonomian rakyat yang masih labil, di mana masih ada rakyat yang belum memiliki gubuk sekali pun, dan bahkan ada yang terpaksa tinggal di bekas kandang binatang seperti kisah Bang Groen yang pernah dipublis oleh Edi Fadhil via *facebook* beberapa waktu lalu. Kononnya, dana yang sudah terpakai mencapai 100 milyar, dan masih akan bertambah

puluhan milyar lagi hingga bangunan itu selesai. Di mana titik temu antara kemegahan dan kemakmuran itu? Tentunya pertanyaan ini tidak perlu diajukan jika nantinya sebagian bangunan dari istana wali itu dijadikan sebagai rumah kost gratis bagi rakyat, atau minimal dijadikan sebagai "markas" pembagian THR lebaran.

Kedua, persoalan kualitas. Kenapa baru sekarang gugatan itu muncul? Apa baru siuman? Atau karena jatah "kue" yang berkurang? Pak Madi kampung saya saja yang kemarin membangun rumah semi permanen terlihat lebih kritis dari pejabat itu. Pak Madi menyuruh tukang untuk membongkar fondasi gubuk kecilnya hanya karena ada akar kayu yang ukurannya lebih kecil dari ibu jari di bawah fondasi. Pak Madi takut jika nanti akar kayu itu membusuk, maka fondasinya akan bergeser. Nah, bagaimana bisa pejabat kita mengkritik proyek yang sedang menunggu "gunting pita"? Kenapa Pak Madi lebih cerdas dari pejabat itu?

Di akhir tulisan ini saya ingin sampaikan, jangan sampai bangunan itu mengecewakan wali, karena wali itu seperti saya uraikan di atas, punya peran penting! Tapi jangan tanya apa perannya, saya tidak bisa jawab. (***AT, 08 Desember 2015***).

Senandung Jampoek

Dalam keterangannya di media, Zaini Abdullah alias Abo Doto menegaskan bahwa beliau akan kembali mencalonkan diri sebagai cagub pada 2017 mendatang. Dengan adanya pernyataan tersebut telah mempertegas keingian Abu Doto untuk kembali "berkuasa" – yang awalnya dianggap hanya sebagai kabar angin, sekarang berubah menjadi kabar betul. Menurut pengakuannya kepada media (Serambi Indonesia), banyak kalangan yang meminta beliau (Abu Doto) untuk kembali maju guna meneruskan program-program yang sudah digagas dalam kepemipinannya selama ini. Kononnya, akibat dorongan inilah Abu Doto memutuskan untuk maju kembali. Benar tidaknya pengakuan ini *wallahu a'lam*, kita tidak tahu karena kita tidak ikut beliau turun ke daerah, dan beliau tidak pula memperdengarkan rekamannya kepada kita. Tapi kita ber*husnu dhan* sajalah.

Menariknya, keputusan Abu Doto untuk maju kembali sebagai cagub, mendapat respons dan komentar dari kandidat lainnya. Kalau menurut sahabat saya Bung Alkaf, komentar yang cerdas cuma datang dari Irwandi yang menurut Alkaf paling lugas dan mantap, sedang yang lain, kata Alkaf,

agak meukabom meunan (sulit dicari padanan kata untuk diterjemahkan). Kita ambil contoh komentar dari Zakaria Saman yang dikenal dengan sebutan Apa Karya. Menurut Apa Karya, kalau dirinya (Zakaria Saman) tidak terpilih tidak ada masalah, tapi kalau Abu Doto tidak terpilih sangat disayangkan, karena Abu Doto adalah orangtua kita (SI). Namun, kita sulit menafsirkan, makna "orangtua" yang dimaksud oleh Apa Karya. Apakah tua umurnya, pengalamannya, atau tua dalam Partai Aceh? Kalau yang dimaksud tua dalam PA, maka sama saja dengan Apa Karya yang juga telah *dipeutuha* selama ini. Sama-sama disayangkan apabila nantinya tidak terpilih.

Serambi Indonesia juga memuat komentar dari Muzakkir Manaf yang mewanti-wanti Abu Doto agar tidak menjelek-jelekkan cagub lain dalam mencari simpati rakyat (SI). Membaca statemen ini, kita semua tentunya harus bergembira hati dan mengangkat "tabik" kepada Muallem. Ini adalah kabar baik. Kita berharap dalam pilkada mendatang tidak ada lagi yang mengancam akan mengusir orang di Aceh, tidak ada lagi cap pengkhianat untuk lawan politik, tidak ada lagi "peribahasa" *awak pueblo bangsa, lhab darah,* dll terhadap orang-orang yang berseberangan pandangan politik dengan kita. Sekali lagi "tabik!"

Komentar menarik lainnya muncul dari Irwandi Yusuf yang menyebut bahwa ada fenomena lucu antara dua pilgub di Aceh, di mana pada tahun 2012 mereka (PA) mengharamkan jalur independen (SI). Setelah membaca komentar Irwandi, saya justru menilai Irwandi juga lucu, karena pada saat dilakukan *Judicial Review* pasal 256 UUPA pada tahun 2011, Irwandi juga tidak memberikan dukungan kepada para "penggugat" pasal tersebut. Atas dasar ini, saya terpaksa tidak sepakat dengan

pendapat Alkaf di statusnya *facebook*nya yang menyebut komentar Irwandi paling lugas dan mantap.

Ketika itu, Mukhlis Mukhtar SH sebagaimana dicatat oleh Harian Aceh (18/04/11) mengatakan bahwa Irwandi Yusuf tidak layak dan pantas maju melalui jalur independen Aceh disebabkan sejak awal Irwandi tidak mendukung proses *Judicial Review* pasal 256 UUPA. Menurut Mukhlis Mukhtar, dari aspek proses, Irwandi tidak pantas menggunakan jalur independen pada Pemilukada 2011. Kalau dipaksakan, berarti jalur independen sekarang telah dibajak oleh monster politik oportunis yang haus kekuasaan, demikian kata Mukhlis Mukhtar kepada Harian Aceh kala itu.

Setelah mencermati dan menyimak ragam senandung para politisi kita, sekarang terserah kita untuk memberi penilaian. Bagi saya, itu hanya senandung *jampok* yang suka melihat kelemahan orang lain dan selalu memosisikan diri sendiri sebagai pemilik maqam tertinggi. (***AT, 08 Januari 2016***).

Politik Burong Boh Leuping

Kita semua pasti pernah merasakan masa kecil, masa di mana kita hidup tanpa beban. Kerja kita cuma makan, bernyanyi, berlari-lari dan sesekali berenang di irigasi. Jika terjadi masalah, tinggal lapor ayah ibu. Ini adalah kondisi umum, meskipun ada sebagian saudara kita yang merasakan pengalaman berbeda.

Pada masa kecil ini pula berbagai mitos, dongeng dan aneka khurafat "ditanamkan" oleh orang-orang di sekitar kita. Di antara mitos itu adalah tentang *burông boh leuping* yang saat itu menjadi salah satu senjata paling ampuh untuk menakuti anak kecil. Namun dalam praktiknya, tidak hanya anak kecil, tapi mitos ini juga berhasil menakuti orang besar. Di Aceh, ada banyak cerita mistis yang berguna membuat anak berhenti menangis. Selain *burong boh leuping*, ada pula *burong tujoeh* dan *hantu blau*. Dan dua lagi yang lumayan menakutkan adalah *ma'op* dan *geunteut*.

Untuk kali ini, kita hanya akan mengupas tentang *burông boh leuping,* sedangkan aneka *burông* yang lain akan dibahas pada waktunya. Dalam Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, kata "*burông"* diterjemahkan sebagai hantu dalam bentuk wanita

(Aboe Bakar dkk, 1985: 109). Adapun *Boh leuping* adalah kelapa tua yang jatuh karena dimakan tupai (561). Di sebagian daerah di Aceh, *boh leuping* terkadang juga disebut *boh keuteupong* (421). Jika kata *burông* disanding dengan *boh leuping* jadilah ia hantu wanita dalam kelapa tua. Ini dari segi etimologis. Adapun secara terminologis, *burông boh leuping* sering dipahami sebagai hantu yang berwujud *boh leuping*. Menurut versi cerita yang saya dengar sewaktu kecil, tidak ada penyebutan jenis kelamin, apakah *burông boh leuping* tersebut wanita atau laki-laki.

Cerita *burông boh leuping* adalah cerita paling angker yang membuat orang-orang takut berjalan sendiri di malam hari, khususnya malam Jumat Kliwon. Menurut riwayat, jika bertemu dengan *burông boh leuping* kita diminta untuk terus berjalan. Kita dilarang keras untuk menyepak atau pun menendang *burông boh leuping* tersebut. Menurut ahli riwayat, *burông boh leuping* itu berwarna merah dan berbentuk seperti bola api. Jika dibiarkan, dia tidak akan mengganggu, bahkan bisa menjadi tontonan menarik, karena bola api itu bisa meloncat sendiri. Jika kita memaksakan menendang *burông boh leuping* tersebut maka dia akan hancur seperti percikan api, kemudian dia bersatu dan bulat kembali seperti *boh leuping*. Pada saat itulah dia akan mengejar kita. Begitulah riwayat yang berkembang. Di zaman modern seperti sekarang ini, sebagian masyarakat Aceh masih percaya bahwa mitos *burông boh leuping* itu memang benar-benar ada.

Burông Boh Leuping dalam Politik

Kisah *burông boh leuping* sebagaimana telah diurai di atas, meskipun hanya berupa mitos (setidaknya menurut keyakinan saya), namun setidaknya kisah itu telah memberi inspirasi bagi sebagian penulis untuk meramu berbagai cerita bernuansa horor yang memang sangat diminati oleh masyarakat kita. Dalam kaitannya dengan dunia politik, perilaku *burông boh leuping* ini juga tercermin dalam sikap politik sebagian mayarakat di Aceh.

Dalam beberapa artikel tentang politik lokal di Aceh, para penulis cenderung melemparkan kritikan kepada politisi. Ada keyakinan bahwa politisilah yang membuat masyarakat menderita. Politisi mengumbar sejumlah janji yang kemudian diingkari sehingga rakyat harus gigit jari. Tersebab itu, kritikan banyak ditujukan kepada politisi yang sebagiannya memang doyan menipu. Dalam berbagai tulisan, politisi diposisikan sebagai "penjahat", sedangkan rakyat sebagai "*aneuk muda*." Memang tidak ada yang salah, tapi sesekali kita juga harus "mendidik" rakyat melalui kritik, agar mereka punya prinsip sehingga tidak mudah dihipnotis oleh janji-janji manis politisi.

Tulisan ini mungkin kurang populis karena mencoba mengkritik rakyat. Dalam praktik politik sekarang ini, rakyat selalu saja menjadi bulan-bulanan dari politisi. Lihat saja ketika pemilu, baik Pileg maupun Pilkada, rakyat "dipaksa" menjadi sahabat politisi guna mengantar mereka ke tampuk kekuasaan. Tetapi setelah prosesi pemilu selesai, rakyat pun ditinggalkan begitu saja. Tapi anehnya rakyat kita ramai yang *batat* (bandel).

Pada saat mendekati pemilu, setelah dirayu dengan berbagai jurus, rakyat pun memilih si politisi. Setelah pemilu

berakhir, si politisi pun hilang entah ke mana. Akhirnya rakyat kita pun merasa kesal karena tidak satu pun janji kampanye dipenuhi oleh si politisi yang sudah dipilihnya. Kemudian si rakyat bertekad bahwa dalam pemilu selanjutnya dia tidak akan memilih lagi si politisi yang telah menipunya. Namun pada kenyataannya, pada pemilu berikutnya, si rakyat justru memilih kembali si politisi penipu dengan alasan *sige teuk* (sekali lagi). Sama seperti sebelumnya, setelah terpilih, si politisi kembali mengingkari janjinya. Untuk kedua kalinya, si rakyat kembali marah-marah dan bersumpah tidak akan memilih lagi si politisi yang sudah dua kali menipunya. Tapi anehnya, ketika musim pemilu datang, si rakyat kembali terlena dan akhirnya kembali mencoblos si politisi penipu. Dan uniknya, kejadian ini terus terulang, entah disengaja atau tidak.

Jika dicermati, perilaku yang dilakukan oleh sebagian rakyat kita persis akai *burông boh leuping*, ketika disepak dia hancur, tapi tidak lama kemudian dia bersatu kembali. Kemudian ditendang lagi ia kembali pecah seperti percikan api, tapi setelah itu kembali menjadi *boh leuping*. Berapa kali pun ditendang *burông boh leuping* akan terus melakukan hal yang sama. Demikian pula rakyat kita, terus saja melakukan kesalahan yang sama di musim pemilu, tapi pasca pemilu selalu saja marah-marah. Hal inilah yang membuat para politisi semakin tergoda untuk menipu rakyat. (***AT, 11 Maret 2016***).

Tu Sop dan Cerminan "Kejenuhan" Ulama

Kemarin (25/07/16) sewaktu perjalanan pulang dari Samalanga dalam rangka mewawancarai seorang informan untuk kebutuhan penelitian, sesampai di kawasan Blang Bladeh, mobil butut yang saya tumpangi terpaksa berjalan lambat. Maju, berhenti, maju dan berhenti lagi. Seketika itu saya bangun dari "pembaringan" dan melihat jauh ke depan. Ternyata jalanan sedang dilanda macet. Saya berusaha melihat lebih jauh ke depan, samping dan belakang. Saya melihat ramai sekali masyarakat yang umumnya berkostum putih duduk rapi di mobil bak terbuka yang terus berjalan lambat. Sebagian yang lain menggunakan sepeda motor dan juga mobil minibus. Setelah merayap beberapa saat, mobil butut kami terus mendekat ke Lapangan Geulumpang Payong. Sampai di sana, jalanan juga terlihat macet dari arah timur (arah Matangglumpangdua). Setelah berusaha melihat kiri-kanan, saya baru tahu bahwa kemacetan tersebut terjadi akibat melimpah-ruahnya massa yang sama-sama menuju Glumpang Payong – dalam rangka Deklarasi Pasangan Balon Bupati Bireuen, Tu Sop – dr. Pur.

Sebenarnya, saya tidak begitu fokus terhadap perkembangan politik di Bireuen, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, untuk sekadar mengisi waktu kosong, terkadang saya juga berusaha melibatkan diri dalam perbincangan tak penting di kedai kopi terkait beberapa topik hangat yang sedang menjalar di Bireuen *seulawet ini*. Mungkin "konflik" internal Partai Aceh (PA) Bireuen antara pendukung Tuan Khalili *versus* Tuan Ruslan adalah topik paling *hot* dalam beberapa minggu ini – setidaknya paling *hot* menurut saya. Namun demikian, "kegaduhan" itu adalah urusan mereka. Tentunya akan sangat membuang waktu jika kita membincangkan mereka di sini.

Hasil membaca di beberapa media cetak dan online, saya berhasil mendapatkan sedikit informasi tentang beberapa bakal calon bupati yang akan "bertarung" merebut "Pendopo" Kota Juang. Tersebutlah beberapa nama, seperti Haji Saifannur (pengusaha kaya), Amiruddin Idris (Rektor Umuslim), Khalili dari Partai Aceh (saya tidak tahu profilnya), Haji Ruslan (Bupati sekarang), Mustafa A. Geulanggang (mantan Bupati Bireuen), Tgk. M. Yusuf A. Wahab (pimpinan salah satu pesantren di Jeunib dan juga seorang *da'i*) yang dikenal dengan sebutan Tu Sop, dan beberapa nama lain yang tidak begitu populis.

Dari sekian bakal calon yang sudah disebut di atas, kemarin salah satu pasangan telah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pilkada (Pilbub) Bireuen mendatang. Kemarin terlihat jelas bahwa massa pasangan Tu Sop – dr. Pur "melimpah-ruah" dan membuat macet jalanan di seputar Kota Bireuen. Melihat massa yang "membeludak," sebagian masyarakat atau mungkin timses bakal calon – dengan penuh percaya diri membuat status di media sosial: "*Insya Allah Tu Sop Meunang*" dan status-status serupa lainnya. Harapan seperti itu tentunya sah-sah

saja, setidaknya bisa memompa semangat timses dan juga para pendukung untuk terus bekerja maksimal pada prosesi pilkada nantinya. Namun demikian, prediksi kemenangan hanya dengan menggunakan indikator "kerumunan" massa adalah terlalu *naif*.

Pasca Deklarasi Tu Sop – dr. Pur, di beranda media sosial, khususnya *facebook*, juga terdapat beberapa komentar "sinis" terhadap deklarasi tersebut. Dalam dunia demokrasi, tentu hal semacam ini lumrah saja, di mana kita berhak menyatakan suka atau pun tidak suka kepada sosok tertentu. Sebagai insan merdeka, tentunya kita punya kebebasan untuk menyatakan sikap politik. Namun demikian, dalam menilai sosok tertentu, baik politisi atau siapa pun – objektivitas tetap harus dikedepankan. Hasil pengamatan di media sosial dan juga bincang-bincang kedai kopi, dapat disimpulkan bahwa ada sebagian kalangan yang menginginkan Tu Sop untuk memimpin Bireuen ke depan. Hal ini di antaranya disebabkan oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap para politisi dari "partai penguasa." Dalam hal ini, Tu Sop – tentunya dengan berbagai argumen logis diharapkan dapat memberi warna baru dalam perpolitikan dan juga pemerintahan Bireuen ke depan. Namun demikian, ada pula sebagian masyarakat yang tidak ingin Tu Sop – yang *notabene* adalah seorang yang *'alim* melibatkan diri dalam kancah politik praktis. Ketidaksetujuan mereka terhadap keterlibatan Tu Sop dalam dunia politik praktis juga didasari oleh alasan yang berbeda satu sama lain. Ada sebagian kalangan yang mendasarkan ketidaksetujuannya dengan maksud untuk "menyelamatkan" Tu Sop dari dunia politik yang selama ini dianggap telah jauh dari nilai-nilai agama dan moral. Selain itu, ada pula kalangan lain yang

tidak setuju dengan kehadiran Tu Sop tersebab akan menjadi "duri penghalang" bagi calon yang diusungnya. Terserah alasan mana yang mereka pakai, yang jelas semua orang berhak untuk memberi penilaian dari sudut pandangnya sendiri.

Di sebalik itu – dan ini adalah pendapat pribadi, saya melihat kehadiran pasangan Tu Sop – dr. Pur yang merupakan kombinasi ahli agama dan ahli medis patut diapresiasi oleh semua pihak, khususnya masyarakat Bireuen. Kehadiran mereka setidaknya dapat memberi pembelajaran politik bagi masyarakat Bireuen, di mana *piasan* kekuatan politik dominan yang selama ini dianggap "mengecewakan" akan terus ditantang oleh "orang-orang baik." Jika dulu mereka (mungkin) menyatakan dukungannya kepada kekuatan politik tertentu, maka saat ini mereka memilih untuk menyusun kekuatan politik baru guna "menumbangkan" kekuatan lama.

Saya melihat, kehadiran Tu Sop di kancah politik Bireuen merupakan cerminan dari kejenuhan "ulama" terhadap praktik politik selama ini yang "entah bagaimana." Praktik politik yang jauh dari nilai-nilai agama, mulai dari teror, *money* politik dan tindakan-tindakan hina lainnya tentu akan mendorong kaum terpelajar seperti Tu Sop untuk melakukan "perlawanan." Mungkin, kejenuhan yang sudah memuncak inilah yang mendorong Tu Sop untuk maju ke depan. Tentu ada cita-cita besar yang ingin diwujudkan oleh Tu Sop bersama para pendukungnya.

Tapi, apakah Tu Sop akan mampu mewujudkan cita-citanya? Kita hanya bisa berharap dan berdoa. (***AT, 25 Juli 2016***).

Bireuen dalam "Rebutan"

"*Bireuen, uteun ubeut, tapi rimueng jai that*" (Bireuen, hutannya kecil, tapi harimaunya banyak). Kalimat ini dan yang serumpun dengannya sudah sangat sering saya dengar dari mulut para politisi di Bireuen, baik secara langsung maupun dirawikan oleh orang lain. Entah kapan kalimat ini pertama kali muncul, *wallahu a'lam* – belum ada penelitian serius yang coba menyelidik. Masyarakat Bireuen (tentu tidak semuanya) sepertinya sudah akrab dengan kalimat ini. Setiap menjelang Pilkada (Pilbub) kalimat ini kembali ramai diucapkan dari mulut ke mulut. Tanpa butuh pemancar, kalimat ini terus menyebar menembus lorong-lorong kecil di perkampungan dan tidak ketinggalan gang-gang di perkotaan.

Lantas, bagaimana kita memaknai dan menafsirkan kalimat bahwa di Bireuen banyak harimau, sedangkan hutannya kecil? Tentunya tidak ada penafsiran tunggal dan tidak ada satu pun "pakar" yang benar-benar otoritatif yang bisa memonopoli makna kalimat tersebut. Setiap orang bebas saja menafsirkan dan memaknai menurut versinya masing-masing. Pemaknaan kalimat tersebut bisa saja berlabuh pada kesimpulan positif,

dan sebaliknya juga bisa dipahami sebagai sesuatu yang negatif, tergantung dari sudut mana ia melihat.

Jika kalimat tersebut berdiri sendiri secara mandiri tanpa dikaitkan dengan politik, maka dapat dimaknai bahwa Bireuen adalah tempat berkumpulnya insan-insan kreatif. Artinya "lahan" yang kecil tidak menghambat kreativitas masyarakat untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya dan daerahnya. Istilah "harimau" dalam kalimat itu, secara positif dapat saja diterjemahkan sebagai pengusaha sukses, masyarakat yang rajin, pejabat-pejabat berprestasi atau pun pemuda-pemuda kreatif. Dengan demikian, kalimat Bireuen hutannya kecil, tetapi harimau banyak dapat dideskripsikan sebagai sebuah kondisi yang membanggakan, di mana keterbatasan lahan, lapangan kerja dan kurangnya sumber daya alam tidak membuat masyarakat Bireuen bermalas-malasan dan hidup dalam keterpurukan. Artinya, segala bentuk keterbatasan itu telah mendorong masyarakat Bireuen untuk menjadi "harimau-harimau" yang kreatif. Banyaknya "harimau" di Bireuen menjadi salah satu indikator bahwa kreativitas dalam berpikir, bekerja, beramal dan cita-cita untuk bangkit telah tumbuh di Bireuen. Meskipun terkesan apologis, tapi penafsiran semacam ini bisa menjadi salah satu tawaran pemaknaan yang tidak melukai siapa pun, termasuk saya – dan penguasa khususnya.

Berbeda dengan ulasan di atas, jika kalimat tadi dikaitkan dengan politik, maka akan melahirkan penafsiran yang negatif atau mungkin pemaknaannya akan berbentuk peyoratif. Artinya, dalam perspektif politik kalimat itu hendak menggambarkan suatu kondisi yang serba pelik, di mana telah terjadinya benturan "keangkuhan" demi merebut pengaruh. Secara khusus, jika dikaitkan dengan praktik politik praktis,

dapat dipahami bahwa para harimau yang dalam pengertian positif ditafsirkan sebagai insan kreatif – mengalami pergeseran makna menjadi para politisi yang haus kuasa. Tegasnya, banyak "harimau" yang ingin menguasai "hutan" Bireuen – entah karena hasil "hutannya" yang kaya, atau hanya karena ingin dipanggil dengan sebutan "raja."

Harimau-harimau politik ini tentunya memiliki segudang argumen untuk kemudian digunakan sebagai modal dalam rangka meraih simpati publik. Harimau-harimau yang rakus ketika berkuasa nantinya akan menggunakan segenap kekuatannya untuk menguras hasil hutan – dan bahkan tidak segan-segan melenyapkan lawan-lawannya. Sebaliknya, harimau-harimau terhormat akan melindungi hutan yang dikuasainya demi kesejahteraan para penghuni hutan.

Para "Harimau" Menjelang Pilkada 2017

Jika dihubungkan dengan kondisi saat ini, maka kalimat *Bireuen, uteun ubeut, tapi rimueng jai that* adalah sesuai dengan kenyataan. Saat ini setidaknya sudah muncul enam pasangan bakal calon bupati yang akan bertarung pada pilbub mendatang. Di antara "harimau" yang telah muncul adalah Khalili-Yusri; Ruslan-Jamaluddin; Amiruddin Idris-Ridwan Khalid; Yusuf A. Wahab-Purnama; Saifannur-Muzakkar dan Husaini-Azwar.

Dari keenam bakal calon yang telah muncul tersebut hampir dapat dipastikan bahwa kesemuanya masuk dalam kategori "harimau", di mana mereka punya kekuatan yang nyaris sama. Saya tidak melihat ada "singa" dari calon-calon tersebut. Artinya, dari calon-calon yang telah muncul tidak

terlihat ada kekuatan yang domiman. Semuanya berpotensi untuk menang dan pastinya juga berpotensi untuk kalah.

Namun demikian, sebagai salah satu penghuni "hutan" tentunya saya dan siapa pun punya hak untuk menebak "harimau" mana yang akan berkuasa nantinya. Jika dilihat dari struktur organisasi politik, maka pasangan Khalili-Yusri adalah pasangan yang memiliki struktur paling lengkap di Bireuen, di mana kekuatan Partai Aceh tentunya akan bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan ini. Tetapi, sebagaimana telah sama-sama kita ketahui bahwa konsentrasi dukungan kader Partai Aceh (khususnya mantan GAM) nantinya juga akan terbelah ke dalam tiga penjuru. Ada pun ketiga penjuru itu adalah Khalili, Ruslan M. Daud dan Husaini alias Teungku Batee.

Selain pasangan Khalili-Yusri, pasangan Ruslan M. Daud-Jamaluddin juga memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan – bahkan cukup kuat. Sebagai *incumbent*, tentunya Ruslan akan menggerakkan segenap kekuatannya untuk meraih kemenangan. Dalam hal ini, semua "perangkat" yang dimilikinya akan bekerja maksimal. Selain itu, diakui atau tidak Ruslan juga mendapat dukugan dari sebagian kader PA (mantan GAM). Kekuatan lainnya yang bisa diandalkan oleh Ruslan adalah kekuatan santri. Saya punya dugaan kuat bahwa mayoritas santri di wilayah "Barat" akan melabuhkan dukungannya kepada Ruslan. Kekuatan santri ini juga akan datang dari kubu Jamaluddin yang saat ini menjadi pasangan Ruslan ditambah lagi kedudukan Jamaluddin sebagai mantan "petinggi" di Kemenag Bireuen. Bukan tidak mungkin jalur ini juga akan "dimainkan."

Pasangan lainnya yang juga patut diperhitungkan adalah Yusuf A. Wahab-Purnama. Kaum santri juga akan menjadi basis utama dari pasangan ini ditambah lagi dengan majelis-majelis pengajian yang selama ini diisi oleh Tgk. Yusuf A. Wahab. Kekuatan lain dari pasangan ini adalah "anak-anak muda" yang selama ini berada di belakang Purnama.

Menurut tebakan awam saya, ketiga pasangan inilah yang akan menjadi "pemain" di pentas Pilbub 2017 nantinya. Ada pun tiga pasangan lainnya tampaknya tidak akan mampu menyaingi kekuatan yang dimiliki oleh tiga pasangan yang disebut pertama. Namun demikian, kondisi ini akan terus berubah sesuai perjalanan waktu. Artinya, bukan tidak mungkin pasangan Saifannur-Muzakkar akan mampu melampaui kekuatan-kekuatan tersebut. Sementara pasangan Husaini-Azwar dan Amiruddin-Ridwan Khalid tampaknya masih jauh dari harapan.

Di akhir tulisan ini, saya hendak menegaskan bahwa apa yang telah diuraikan di atas hanyalah dugaan-dugaan semata dan bukan hasil survey sehingga jauh dari kesan ilmiah. Apa yang saya tulis ini hanyalah hasil diskusi *cilet-cilet* di kedai kopi. Akhirnya kita hanya bisa berharap agar Bireuen ke depan dipimpin oleh "harimau" terhormat yang mampu menjaga hutan, bukan "harimau" rakus yang memangsa segalanya. (***AT, 21 Agustus 2016***).

Gubernur Hercules

Tersiar kabar bahwa beberapa calon pemimpin di Aceh, baik bacalon Gubernur, walikota dan bupati beserta bacalon wakilnya tengah dilanda duka yang mendalam – luka yang menusuk ulu hati. Sedih! Begitulah suasana hati yang mendera beberapa tokoh yang punya cita-cita besar untuk menjadi pemimpin di *tanoh indatu*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesedihan itu muncul. *Pertama,* faktor administratif seperti kurangnya alat dukungan (ktp) bagi calon independen atau pun minimnya dukungan parpol bagi calon dari partai politik. *Kedua,* faktor "malas mengaji" sehingga mengakibatkan "keguguran" pada saat diuji di hadapan publik. *Ketiga,* faktor kesehatan, baik jasmani maupun rohani yang menyebabkan sebagian bakal calon "*putoeh teuraje*" (seperti layangan putus tali) sehingga akhirnya "tersungkur" ke tanah – dan tak bisa bangkit lagi.

Beberapa faktor tersebut di atas akhirnya membuat mereka terpaksa "menangis" yang diikuti oleh "gerbong" di belakang mereka (timses) dengan melantunkan irama yang sama – irama kesedihan yang sungguh memilukan. Tulisan singkat ini tidak punya cukup waktu untuk mengupas seluruh faktor

yang membuat para bakal calon itu terjungkal. Dengan segala keterbatasannya, tulisan ini hanya mencoba melirik faktor terakhir terkait dengan kesehatan bakal calon.

Menjadi sehat adalah dambaan setiap orang. Berbagai upaya akan kita lakukan agar jiwa dan raga tetap sehat. Namun demikian, sakit tidak selamanya berarti bencana, terkadang ia juga menjadi media penghapus dosa. Tapi sayangnya, ada sebagian manusia yang entah belajar di mana dengan congkaknya melakukan "diskriminasi" terhadap orang-orang sakit.

Dalam sebuah khutbah Jumat, saya pernah mendengar seorang khatib yang dengan garangnya berteriak-teriak bahwa sekarang banyak sekali penyakit kutukan, seperti stroke dan diabetes. Orang-orang yang mengalami stroke dan diabetes itu adalah orang yang diazab oleh Allah, demikian pernyataan si khatib yang jika diperhatikan lebih mirip "berandalan." Seandainya bukan di mesjid, maka saya akan meludah ke hadapan si khatib. Bukankah kalau mengalami mimpi buruk kita disarankan untuk meludah ke kiri tiga kali?

Pemimpin dan Kesehatan

Pemimpin itu memang harus sehat jasmani dan rohaninya. Seseorang yang mengalami kelumpuhan misalnya, tentu tidak akan mampu memimpin. Demikian pula dengan orang gila, tidak mungkin menjadi pemimpin dalam kondisi sedarurat apa pun.

Muncul pertanyaan, apakah pemimpin tidak boleh sakit? Tentu boleh. Kalau memang pemimpin tidak boleh sakit, maka sampai kapan pun kita tidak akan memiliki pemimpin. Artinya,

kita tidak mungkin melakukan demonstrasi untuk menurunkan pemimpin hanya karena si pemimpin itu terserang flu, batuk, demam atau menceret.

Pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang kuat fisiknya dan stabil jiwanya, seperti mampu berdiri, duduk, berbicara, melihat, mampu berpikir serta mampu mengambil keputusan dalam kondisi sesulit apa pun. Tentu sangat berlebihan jika kita menafsirkan sehat jasmani itu seperti Hercules dan sehat rohani seperti Dimas Kanjeng Ta'at Pribadi.

Kita tidak mungkin memimpikan sosok pemimpin yang mampu mengangkat batu-batu besar, atau pun mampu menghancurkan tembok dengan tangannya. Mustahil rasanya mengharapkan pemimpin yang mampu berenang tanpa alat melintasi samudera. Kita pun akan dianggap "gila" jika mengharapkan sosok pemimpin yang mampu mematahkan pedang dan melempar lawan-lawannya ke awan. Model-model serupa itu hanya dimiliki oleh sosok Hercules. Jika pun kita jumpai pemimpin semacam itu, maka dapat dipastikan dia bukan pemimpin sehat, tapi pemimpin kelainan.

Selama tidak mengidap penyakit berat yang dapat mengganggu kinerjanya dalam mengurus rakyat, maka tidak ada halangan bagi seseorang untuk menjadi pemimpin.

"Menggugat" Tes Kesehatan

Berembus kabar bahwa salah satu bakal calon Bupati Bireuen atas nama Saifannur dinyatakan tidak lulus tes kesehatan. Media AJNN (01/10/16) meriwayatkan bahwa Saifannur gugur karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat secara jasmani. Pasca berkembangnya informasi tersebut,

Modus Aceh (02/10/16) mengabarkan bahwa Saifannur menolak hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter RSUZA tersebut. Tidak hanya penolakan, tim sukses dan para pendukung Saifannur sebagaimana dilansir Serambinews.com (03/10/16), juga mendatangi kantor Panwaslih Aceh guna melaporkan hal tersebut. Sementara itu, seperti dilaporkan AceHTrend (02/10/16), sebagian kalangan tampak terkejut dengan kabar gugurnya Saifannur, padahal elektabilitas yang bersangkutan semakin meningkat.

Tidak hanya Saifannur, bakal calon Bupati Aceh Jaya, Safriantoni yang dikenal dengan Pang Toni pun mengalami nasib serupa – tidak lulus tes kesehatan. Di Aceh Utara sebagaimana dilaporkan Serambinews.com (29/09/16) Sulaiman Ibrahim (balon Bupati) dan Ibn Hajar (balon wabup) juga tidak lulus tes kesehatan. Hal serupa juga dialami oleh Abu Hanifah, bakal calon wakil bupati Nagan Raya. Nasib menyedihkan juga dialami oleh Sofyan, bakal calon walikota Lhokseumawe yang dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis (pelita8.com).

Alhasil, keputusan yang dikeluarkan oleh tim dokter RSUZA pun dilanda protes dari para bakal calon. Secara psikologis, keputusan yang tidak menguntungkan ini tentunya akan berimplikasi pada tekanan mental para bakal calon. Bayangkan saja, mereka sudah menghabiskan banyak rupiah untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon pemimpin, tapi justru gagal hanya karena tes kesehatan. Kepedihan paling parah dialami oleh bakal calon yang maju melalui jalur independen. Entah berapa banyak energi mereka yang telah terbuang sia-sia. Dengan gugurnya tes kesehatan, maka "punahlah" harapan mereka!

Menyikapi tahapan pilkada saat ini yang rawan menimbulkan kerugian materi dan juga menyebabkan tekanan psikologis plus gejolak sosial dari pihak yang merasa dirugikan, saya kira status *facebook* yang ditulis oleh sahabat kita Bung Junaidi patut dipertimbangkan. Dalam statusnya, Bung Junaidi menawarkan agar tahapan pilkada dimulai dengan tes baca Alquran dan tes kesehatan. Dua tes ini harus didahulukan karena kedua bentuk tes ini tidak dapat diperbaiki. Hal ini penting diperhatikan agar para bakal calon tidak *meujungkat aki u langet* (terjungkal).

Kita tentu tidak ingin melihat saudara-saudara kita *tahe gante* akibat tidak lulus tes kesehatan. Tidak sekadar kehabisan uang, tapi yang paling menyakitkan adalah punahnya harapan sebelum bertanding. Bahkan Hercules pun akan menangis jika tidak lulus tes kesehatan. Tapi kita mesti ingat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (***AT, 03 Oktober 2016***).

Tim Sukses dan Sukses Tim

Istilah tim sukses lazim dipakai dalam kegiatan suksesi politik, baik dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Namun demikian, istilah ini tidak terbatas pada dua momen itu saja. Hampir setiap kegiatan berbau politik selalu saja melibatkan tim sukses. Seorang siswa yang ingin menjadi ketua OSIS saja butuh kepada tim sukses guna menciptakan kondisi agar dirinya terpilih. Seorang *keuchik* di *gampong* juga "dijamin" tidak akan menang tanpa kerja keras tim sukses. Demikian pula dengan jabatan *teungku imum* atau bahkan *Imum Syik* – yang meskipun sakral, tetap saja dibayangi oleh berbagai trik tim sukses.

Untuk dapat menjadi ketua ormas kita pun dituntut bekerja sama dengan tim sukses. Begitu juga dengan jabatan sebagai ketua partai politik, kita juga harus mampu melakukan "servis" terbaik terhadap tim sukses. Tanpa tim sukses, semuanya akan kacau. Mungkin cuma jabatan kepala keluarga yang tidak butuh kepada tim sukses, karena organisasi keluarga tidak berbasis politik.

Tim sukses memegang peranan penting dalam kontestasi politik, baik untuk memenangkan calon yang diusungnya, atau pun sebaliknya membuat calon tersebut terjungkal. Idealnya,

tim sukses adalah cerminan dari calon yang diusungnya, namun dalam realitas, sebagian tim sukses justru menjadi "rayap" yang membuat pesona kandidatnya hancur di mata publik. Tim sukses serupa ini – yang merusak citra kandidat lebih layak disebut sebagai sukses tim. Artinya, kesuksesan hanya berada di pihak mereka (tim), bukan di pihak kandidat. Kesuksesan dimaksud bisa berupa aliran dana dan fasilitas yang mereka nikmati selama kegiatan suksesi. Sedangkan sang kandidat hanya bisa gigit jari.

Diakui atau pun tidak, pada umumnya sosok kandidat dalam dunia politik itu ibarat orang yang sedang karam di tengah lautan. Dengan bahasa yang lebih halus, seseorang yang ingin meraih kemenangan di pentas politik itu akalnya tinggal setengah, sedangkan setengah lagi adalah gumpalan-gumpalan khayali yang senantiasa meliputi. Jika otak para kandidat itu dibelah, maka kita akan mendapat bongkahan harapan yang kian menggurita. Dalam kondisi inilah, tim sukses akan bertindak sebagai "dewa penyelamat."

Kandidat yang sedang karam di tengah lautan akan diselamatkan dengan rupa-rupa mantra oleh tim sukses. Demikian pula bongkahan harapan yang ada di otak kandidat akan disangga oleh otot-otot kuat tim sukses sehingga harapan tersebut dapat terwujud. Di musim-musim politik, kandidat dan tim sukses ibarat pinang tak terbelah – keduanya menyatu dan mesra, sebut saja seperti Romeo dan Juliet. Tapi, ketika pemilu telah usai, kandidat dan tim sukses berganti peran sebagai *Tom and Jerry*.

Sukses Tim

Seperti telah diulas di atas, tim sukses adalah sekumpulan orang yang dengan segenap tenaga melakukan berbagai manuver dan propaganda agar kandidat yang diusungnya memperoleh kemenangan. Sebaliknya, sekumpulan orang yang dengan segala kelihaian dan basa-basinya – yang melakukan berbagai trik agar kandidat terpengaruh dengan mantera palsunya – sehingga si kandidat memberikan segala fasilitas kepadanya – dengan harapan beroleh kemenangan, maka mereka adalah sukses tim, bukan tim sukses. Keduanya (tim sukses dan sukses tim) tampak mirip sehingga ramai kandidat yang terkecoh.

Sebagaimana telah disinggung, tim sukses akan bertindak sebagai "dewa penyelamat" ketika kontestasi politik digelar. Sedangkan sukses tim akan memanfaatkan segala keadaan guna meraup keuntungan untuk timnya. Sukses tim dengan segala keahliannya juga akan memanfaatkan kegalauan kandidat dengan menjual harapan-harapan yang menjulang, sehingga kandidat terpana dan rela mengeluarkan sejumlah biaya demi terwujudnya harapan itu.

Ketika pesta politik usai, jika kandidatnya menang, maka tim sukses akan bereuforia untuk beberapa lama – dan seiring perjalanan waktu akan terdengar tangisan-tangisan kecil dari mereka dan akhirnya tangisan itu akan berevolusi menjadi sebuah ledakan dahsyat – dan lahirlah perlawanan terhadap kandidat yang diusungnya tersebab banyak janji yang tak terpenuhi. Dalam kondisi ini, si kandidat akan berubah menjadi hantu yang sulit ditemui dan tim sukses pun akan meramu sejumlah mantra guna menghujat si kandidat yang dulu dibelanya mati-matian. Adapun jika kandidat yang

diusungnya kalah, tim sukses pun akan berurusan dengan pasal utang-piutang. Dalam sebagian kasus, si kandidat akan mencari tempat-tempat sunyi guna menyepikan diri dari kejaran tim sukses.

Berbeda halnya dengan tim sukses, sukses tim akan bernasib lebih mujur jika kandidatnya menang. Dia akan terus melagukan *hikayat ular* guna melilit kandidatnya yang telah beroleh kejayaan. Meskipun si kandidat berusaha melupakannya, namun sukses tim tersebut tidak akan pernah berduka, karena selama suksesi politik berlangsung, dia telah meraup keuntungan yang berlimpah, berupa makan minum, *peng pulsa*, *peng minyeuk* dan segenap fasilitas lainnya. Demikian pula jika kandidatnya kalah, sukses tim akan bersegera meninggalkan kandidatnya tersebut dalam kesendirian – sambil melambaikan tangan sembari melenggok girang.

Lantas bagaimana caranya mengidentifikasi seorang tim sukses? Secara sederhana, ada beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai alat ukur, di antaranya: bekerja sesuai fungsi dan jabatannya; menjaga perilaku dalam berkampanye sehingga kandidatnya tidak tercemar; melaporkan kenyataan di lapangan sesuai dengan fakta; menasihati kandidatnya jika melakukan kesalahan; menggunakan anggaran dari kandidat sehemat-hematnya; menutupi aib kandidatnya; bekerjasama dengan tim lainnya dan tidak membuat faksi sendiri; dan terakhir tidak menjadikan kandidatnya sebagai ATM.

Adapun sukses tim dapat diidentifikasi dengan beberapa ciri berikut: sering membawa kabar gembira bahwa seisi kampung sudah *klop* untuk mendukung; sering melapor bahwa anggaran harus ditambah; sering memuji kandidatnya dengan

senandung menidurkan; sering menjelekkan lawan politik di depan kandidatnya; memastikan bahwa kandidatnya akan menang mutlak; suka merendahkan anggota tim; meminta fasilitas berlebihan seperti mobil operasional, *peng pulsa, peng minyeuk,* dan *peng kupi*.

Setelah memahami ulasan di atas, saya menyarankan kepada tim sukses untuk hati-hati agar tidak ditipu oleh kandidat. Demikian pula kandidat harus pandai-pandai memilih tim agar tidak ditipu oleh sukses tim. Kandidat, tim sukses dan sukses tim biasanya akan saling bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling lihai menipu. (***AT, 06 Oktober 2016***).

Politik Rebus Telur Hiu

Dunia politik tidak selamanya identik dengan keseriusan, sama halnya dengan bunga, ia memiliki rupa-rupa warna. Terkadang politik itu penuh dengan kesedihan, *kedegilan*, kekacauan, bahkan ketakutan. Politik juga sebuah komedi yang penuh dengan lawakan dari para pelakunya. Tersebab politik itu penuh warna, maka berbeda-beda pula tipikal para politisi itu, tergantung kekuatan nalar dan mental masing-masing mereka.

Jika kita menemukan politisi yang kerjanya hanya menciptakan keharuan publik dengan berbagai rekayasa yang memosisikan dirinya sebagai korban konspirasi, maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan memiliki permasalahan mental. Para politisi semacam ini masuk dalam kategori politisi cengeng yang mengandalkan air mata buaya untuk memikat publik. Politisi serupa ini sangat gemar mengumbar kesedihan di panggung politik agar pemilihnya larut dalam emosi kesedihan. Politisi macam ini selalu memosisikan dirinya sebagai korban kesalahan sejarah masa lalu. Ketika terpilih, biasanya politisi seperti ini akan berubah wujud menjadi sosok otoriter dan bengis.

Selain politisi cengeng, kita pun sering menyaksikan politisi *kurangkham* (keras) yang kerjanya hanya marah-marah di depan publik. Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah sosok yang tegas dan tidak suka main-main. Padahal jika ditilik, dia adalah sosok yang tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, sehingga ia terus saja dibalut oleh kekesalan tiada akhir. Kekesalan yang telah membuncah ini kemudian bermetamorfosis menjadi energi negatif sehingga berpengaruh pada tingkah laku dan lisannya. Kalau ada politisi yang kerjanya memaki dan mencaci lawan politik, maka tidak perlu ragu dan bimbang, yakinlah bahwa politisi tersebut tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya.

Model lainnya adalah politisi yang suka membuat kekacauan. Dia selalu hadir bersama kekacauan. Politisi model ini jika terpilih sebagai eksekutif, maka akan melahirkan berbagai kebijakan yang mengacaukan. Demikian pula jika terpilih sebagai legislatif juga akan menggagas berbagai rupa regulasi yang kacau, bahkan kekacauan ini akan terlihat pada saat penyusunan anggaran sehingga lahirlah APBA *pungo*, misalnya – seperti pernah dituding oleh Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. Politisi seperti ini adalah mereka yang mengalami kekacauan hidup di masa kecil, sehingga endapan-endapan kekacauan itu muncul kembali ketika mereka menjadi publik figur.

Model yang tidak kalah populer adalah politisi yang senantiasa menebar ketakutan guna menciptakan kegalauan di benak rakyat. Biasanya politisi semacam ini suka memainkan "politik karung." Kemana pun dia melangkah selalu saja ditemani oleh karung. *Han kapileh kamo kupaso lam eumpang* (tidak

pilih kami, kalian aku masukkan karung). Jika politisi semacam ini terus dibiarkan, maka negara kita akan mengalami defisit karung, sehingga pemerintah harus melahirkan kebijakan untuk mengimpor karung, tentu kondisi ini sangat berbahaya.

Tidak hanya main karung, politisi model ini juga hobi mengusir orang. Jika dia tidak menang maka dia akan mengancam mengusir seisi kampung, padahal jika ditilik, dia sendiri (si pengusir) masih tinggal di tanah waqaf. Ironis memang!

Dalam kampanye beberapa tahun lalu media kita pernah merilis berita tentang seorang orator yang mengatakan bahwa siapa saja yang tidak memilih partainya harus keluar dari Aceh. Munculnya politisi ini tidak terlepas dari suasana kehidupan si politisi itu sendiri. Bisa jadi, ketika masih kecil si politisi tersebut sering diancam oleh ayahnya untuk dimasukkan karung karena mencuri telur tetangga. Atau mungkin pula dia pernah diancam usir oleh ibunya karena suka korupsi uang jajan milik adiknya. Entahlah. Yang jelas politisi semacam itu masih banyak berkeliaran di Aceh.

Merebus Telur Hiu

Sampai dengan detik ini saya belum pernah sekali pun melihat wujud dari telur hiu. Tapi sejak kecil saya sering mendengar orang-orang menyebut sebuah kalimat unik *"boh ye*." Istilah *boh ye* ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna telur hiu. Kalimat ini adalah sebuah bentuk ledekan terhadap perbuatan konyol yang dilakukan oleh seseorang. Kalimat ini juga sering dilontarkan kepada

mereka yang suka mengumbar omongan kosong yang dikenal dengan *broh putoeh* (sampah putus).

Jika dicermati, sampai dengan detik ini banyak politisi di Aceh yang menggunakan metode ini untuk meraih dukungan masyarakat. Si politisi tersebut tidak merasa malu atau pun segan mengarang cerita-cerita konyol guna meyakinkan masyarakat. Kita tentu ingat dengan omongan seorang orator di musim kampanye yang menjanjikan untuk mendirikan kantor PBB di Aceh. Kita juga ingat janji sepasang politisi yang berjanji mengangkut masyarakat Aceh ke Makkah dengan kapal laut. Dan segudang janji-janji konyol lainnya.

Baru-baru ini, media sosial juga diramaikan dengan "kampanye" seorang senator (DPD) asal Aceh yang katanya menjadi kandidat kuat ketua DPD RI. Ketika membaca berita itu – tanpa bermaksud merendahkan siapa pun, saya hanya bisa tertawa. Bukannya saya tidak percaya dengan pengaruh si senator tersebut, tapi entah kenapa di pikiran saya terlintas bahwa mereka sedang merebus telur hiu. Hal ini kemudian terbukti pasca beredarnya berita bahwa sosok yang bersangkutan hanya mendapatkan satu suara dalam pemilihan.

Sebagai orang Aceh, tentunya saya sedih membaca berita duka ini. Tapi apa boleh buat, sudah takdirnya begitu. Kononnya tiga orang senator asal Aceh lainnya juga melabuhkan dukungannya kepada sosok lain. Sebagai negara demokrasi, tentunya sikap tiga senator tersebut harus dihargai. Namun di sisi lain, muncul tanda tanya besar. Ada apa? Tentu hanya mereka yang tahu jawabannya.

Kesimpulan tulisan ini adalah, jangan jadi politisi cengeng, politisi *kurangkham*, politisi kacau dan politisi karung. Yang

terakhir, jangan suka merebus telur hiu di depan masyarakat – kecuali jika Anda mau disebut sebagai politisi *boh ye*. (***AT, 12 Oktober 2016***).

Berebut "Paling GAM"

Guru saya, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, dalam salah satu artikelnya dengan tajuk *Menyoal Eskalasi Konflik Keagamaan* di Harian Serambi Indonesia beberapa waktu lampau telah mengupas satu topik menarik terkait fenomena keagamaan di Aceh. Gejala sosial kegamaan yang sedang melanda Aceh itu menurut guru saya telah melahirkan paradigma baru dalam beragama: "Berebut paling siap mati." Dalam artikel itu, guru saya mengupas tentang berbagai problem keagamaan dan juga kasus-kasus intoleransi antarumat beragama di Aceh. Sebelumnya, juga pernah muncul berbagai tulisan dari penulis lainnya, terkait gejala sosial keagamaan dengan topik dan tajuk hampir serupa: "Berebut Paling Saleh."

Karena kata "berebut" ini lumayan seksi, maka saya pun "merebut" tajuk di atas untuk kemudian saya "*blender*" sehingga lahirlah tulisan ini dengan tajuk "Berebut Paling GAM." Saya terpaksa "menjiplak" tajuk yang belum dipatenkan itu, tersebab redaksi semacam itulah yang paling sesuai dengan maksud tulisan ini. Jika beberapa tajuk artikel sebelumnya membidik persoalan keagamaan, maka tulisan ini sama sekali tidak terkait dengan persoalan kegamaan. Dalam tulisan ini, saya mencoba

untuk membidik GAM, sebuah kekuatan politik bersenjata – yang sejak 15 Agustus 2005 telah bermetamorfosis menjadi partai politik di bawah "ketiak" Republik.

GAM yang kita bicarakan di sini adalah GAM yang dulunya di era 1976-2004 memproklamirkan diri sebagai "pejuang kemerdekaan Aceh" dan saat ini telah seayun selangkah membangun Aceh bersama Republik guna menciptakan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan, kesehatan, kecerdasan, kenikmatan, dan "ke-an-ke-an" lainnya di Aceh.

Kemesraan antara GAM dan RI yang telah memasuki usia sebelas tahun ini tentunya tidak terlepas dari iktikad baik kedua belah pihak yang difasilitasi oleh *awak luwa* (orang luar negeri), sebuah istilah keren yang sampai saat masih sering disebut-sebut. Oleh sebagian kalangan istilah *awak luwa* masih dikeramatkan sampai dengan saat ini. Kita tentu masih ingat dengan kasus Din Minimi yang juga meminta keterlibatan *awak luwa* ketika hendak menyerahkan diri kepada Sutiyoso.

Kembalinya GAM ke pangkuan Ibu Pertiwi telah memberikan ruang kepada mantan kombatan untuk kemudian melibatkan diri dalam ajang politik praktis di Aceh. Pra damai, ide-ide perjuangan yang diembuskan oleh GAM hanya berupa semboyan semu dan tidak menemukan wujudnya. Pasca damai, kondisi ini berubah, semboyan yang dulunya dikampanyekan ke sana ke mari telah menemukan ruangnya. Tapi apakah mereka berhasil mewujudkan mimpinya itu? *Wallahu A'lam* adalah jawaban paling aman.

Siapa Paling GAM?

Empat dari enam pasangan calon gubernur yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh adalah mantan GAM. Mereka adalah Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Muzakkir Manaf dan Irwandi Yusuf. Di masa konflik, keempat tokoh ini saling dukung, saling sokong dan sama-sama meneriakkan kata-kata"merdeka." Dalam organisasi GAM pra damai, Zaini Abdullah dan Zakaria Saman menduduki posisi penting sebagai petinggi GAM, masing-masing menduduki jabatan Menteri Kesehatan dan Menteri Pertahanan GAM. Selain menduduki posisi "sakral", keduanya juga orang terdekat Hasan Tiro, pelopor GAM itu sendiri. Ketika perang berkecamuk di Aceh, kedua tokoh ini memilih menetap di luar Aceh, sehingga mereka aman dari incaran peluru.

Dua tokoh lainnya, Muzakkir Manaf dan Irwandi Yusuf yang ketika konflik sedang memuncak, mereka memilih bertahan di Aceh sehingga tidak pernah aman dari incaran musuh. Keduanya memainkan peran strategis dalam konflik Aceh, masing-masing sebagai Panglima Perang dan juru propaganda GAM. Meskipun memiliki kontribusi besar dalam "perjuangan", dapat dipastikan bahwa keduanya tidak terlalu dekat dengan Hasan Tiro, jika dibandingkan dengan Zaini Abdullah dan Zakaria Saman. Zaini Abdullah dan Zakaria Saman adalah generasi tua di tubuh GAM yang dididik langsung oleh Hasan Tiro. Adapun Muzakkir Manaf dan Irwandi Yusuf adalah generasi muda GAM.

Walaupun mereka menduduki posisi yang berbeda dalam struktur GAM, namun keempatnya adalah tokoh GAM yang punya pengaruh. Dalam perkembangannya, akibat lemahnya sistem komando di tubuh GAM (sekarang KPA) pasca damai,

mengakibatkan keempat tokoh ini "bercerai" di arena politik. Kondisi ini tentunya juga sangat dipengaruhi oleh mulai tumbuhnya "ketegangan" internal dalam tubuh KPA.

Dalam beberapa waktu ke depan, keempat tokoh ini akan terjun ke arena dan melakukan berbagai usaha guna mendulang suara pada Pilkada 2017 nantinya. Selain berlomba dalam adu visi, misi dan program, tampaknya keempat tokoh ini juga akan berlomba mencitrakan diri sebagai "yang paling GAM." Setidaknya, strategi ini akan dimainkan oleh para tim sukses mereka melalui berbagai *wasilah* seperti media sosial. Bagi sebagian kalangan, mencitrakan diri sebagai paling GAM adalah sangat penting guna meraih kedudukan sebagai "pewaris Tiro" yang sebenarnya.

Bagi sebagian kalangan, citra sebagai pewaris Tiro memiliki arti penting guna melanjutkan perjuangan di masa damai. Bagi mereka, visi, misi dan program hanyalah bumbu dan pemanis semata. Yang terpenting adalah siapa "yang paling GAM" di antara mereka. Kedudukan sebagai "yang paling GAM" akan menjadi penentu apakah mereka bisa mengawal MoU Helsinky atau tidak. Setidaknya, begitulah yang dipahami oleh sebagian kalangan di Aceh, khususnya di kampung-kampung.

Mencermati kondisi politik saat ini, saya melihat pencitraan diri sebagai "yang paling GAM" adalah sangat tidak penting dan bahkan tidak akan berdampak pada perolehan suara. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang sudah semakin tercerdaskan dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling penting ke depan bukan siapa yang paling GAM, tapi siapa yang paling siap mewujudkan cita-cita GAM sebagaimana digagas Hasan Tiro. Bukan justru menabur khayal kepada

publik dan menjual nama GAM. Selamat bertarung! (***AT, 29 Oktober 2016***).

Saling Tipu Antara Rakyat dan Politisi

Agama melarang keras menipu. Banyak sekali teks-teks agama yang menjadi dasar hukum dilarangnya menipu. Perbuatan menipu adalah perbuatan yang keji. Menipu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Pada dasarnya menipu adalah sebuah perbuatan yang jika terus diulang-ulang maka ia akan menjadi satu sifat yang melekat pada diri seseorang.

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk menipu. Sebagian orang menipu karena terpaksa, seperti konsumen barang kredit yang menipu karena belum memiliki uang untuk membayar tagihan. Sebagian yang lain menipu dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu, seperti kita yang menyodorkan sejumlah budget kepada orang tua dengan alasan kebutuhan kuliah, padahal untuk traktir cewek di kedai kopi. Ada pula yang menjadikan aksi tipu sebagai hobi, tiada hari tanpa tipu sehingga dia mendapatkan kenikmatan tersendiri ketika aksi tipunya berhasil. Dan masih banyak lagi.

Seorang yang agamis sekali pun sering terjebak dengan aksi tipu ini, baik disadari atau pun tidak. Seorang *'alim* yang mungkin karena kelelahan "terpaksa" menipu tamunya

bahwa ia sedang tidak ada di tempat, padahal tidur. Seorang pejabat terkadang harus menipu istrinya bahwa agenda kerja padat, padahal nongkrong. Demikian pula seorang guru yang terkadang terpaksa menipu muridnya untuk menutupi ketidaktahuannya. Demikianlah, aksi tipu ini terus menjadi "sahabat" kita sehari-hari. Terlepas ada tipu yang dibolehkan, yang jelas tipu tetaplah tipu dan sampai selamanya akan menjadi tipu.

Politik Tipu

Bagi sebagian orang, politik dianggap identik dengan menipu. Orang serupa ini tidak sadar bahwa ia telah tertipu oleh kerangka pikirnya sendiri. Namun demikian, lahirnya keyakinan ini juga tidak terlepas dari kondisi sosial yang dialaminya. Kondisi sosial yang penuh tipuan inilah yang kemudian menggiringnya untuk beranggapan demikian. Dan ini adalah gejala yang wajar. Untuk mengubah keyakinan ini tentu sangat sulit, di mana perubahan ini baru akan terjadi jika kita mampu menghadirkan kondisi baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya.

Pada prinsipnya politik bukanlah ilmu atau pun alat untuk menipu. Adalah salah jika kita berkeyakinan bahwa politik itu untuk menipu dan beranggapan bahwa politisi adalah penipu. Para politisi juga punya peran besar dalam memerdekakan negeri ini. Orang-orang yang berada di BPUPKI dan PPKI itu politisi semua, meskipun berasal dari berbagai latar belakang. Apakah kemudian kita harus menyebut mereka sebagai penipu?

Siapa Menipu Siapa?

Satu fakta yang tidak dapat diingkari adalah bahwa dulunya, ketika demokrasi diperkenalkan di Indonesia, ada sejumlah politisi (politisi busuk) yang kerjanya hanya menipu dan menipu. Ketika pemilu tiba, si politisi melakukan *tour* ke sana ke mari guna mengampanyekan sejuta janji kepada rakyat. Bahkan terkadang janji yang ditaburnya itu telah diyakininya tidak akan mungkin terlaksana, tetapi karena didorong oleh nafsu yang membara maka terpaksa ditaburnya pula dengan harapan rakyat akan memilihnya.

Bagi sebagian politisi, janji adalah senjata yang sangat efektif untuk menyasar kepercayaan rakyat. Akibat janjilah rakyat menaruh harapan dan juga impian kepada para politisi. Tetapi janji yang tidak pernah ditepati itu akhirnya menjadi bumerang bagi si politisi itu sendiri. Semakin ditipu, tentunya rakyat akan semakin cerdas. Kecerdasan ini pun terbagi dua. *Pertama,* kecerdasan untuk bertahan, di mana rakyat akan menganggap semua politisi itu sebagai penipu sehingga janji-janji itu akan mendapat cibiran dari rakyat. Kondisi ini akan menjadikan rakyat kebal terhadap janji-janji di kemudian hari. Dalam kondisi ini, janji para politisi sudah tidak lagi mampu memengaruhi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya.

Kedua, kecerdasan untuk balik menipu. Ini adalah kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat, di mana tidak hanya bertahan, tetapi rakyat juga akan melakukan gerakan perlawanan dengan jurus serupa, jurus menipu. Jika dulu politisi menipu rakyat, maka sekarang kondisinya berubah, rakyat menipu politisi. Gejala sosial ini sudah mulai muncul di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Kita tentu sering mendengar satu kredo yang berkembang saat ini:

dijok peng kacok ju, tapi jih bek katop (kalau diberi uang kamu ambil, tapi kamu jangan pilih dia).

Menipu Politisi

Munculnya perlawanan rakyat terhadap politisi busuk melalui gerakan tipu politisi adalah fenomena yang wajar. Tentunya, politisi tidak bisa menyalahkan sebagian rakyat yang saat ini "gemar" menipu politisi. Kondisi ini tidak lahir dengan sendirinya, karena para politisi busuk punya kontribusi besar dalam memprakarsai lahirnya gerakan ini.

Sudah berpuluh tahun rakyat ditipu oleh politisi busuk. Dengan demikian sudah sepatutnya jika rakyat melakukan aksi balas dendam. Aksi balas dendam ini tentunya sulit dibendung dan akan memakan korban tanpa tebang pilih. Artinya, politisi baik pun tidak luput dari aksi balas dendam ini.

Jika dulu rakyat menaruh harapan kepada politisi agar janji-janji itu ditepati, sekarang sebaliknya, justru politisi yang menaruh harapan kepada rakyat agar benar-benar memilihnya alias tidak ditipu. Tampaknya gerakan tipu politisi ini akan semakin meluas seiring meningkatnya kecerdasan rakyat dari masa ke masa. Sebagaimana halnya para politisi busuk di masa lalu yang menipu rakyat tanpa beban, sekarang rakyat pun dengan santai saja menipu politisi sembari berucap*"cok lieh*."

Kalau sudah begini mau apa lagi? Walau bagaimana pun ini adalah kenyataan yang harus diterima. Anggap saja ini takdir, kalau pun bukan takdir, maka seperti kata Hasan Bandung, anggap saja giliran. Para politisi busuk sudah kenyang menipu rakyat, sekarang giliran rakyat menipu politisi. (***AT, 11 November 2016***).

Politik Teror Itu Seperti Pedang

Pemilu Legislatif 2009 adalah pemilu pertama pasca MoU Helsinky untuk memilih calon legislator yang akan duduk di kursi parlemen. Ketika Pileg tersebut digelar, konflik Aceh dengan Pemerintah Pusat baru saja berakhir. Tahun 2009 adalah tahun keempat terciptanya kedamaian di Aceh. Kedamaian dimaksud adalah damai tanpa perang, bukan damai tanpa gaduh. Artinya, meskipun Aceh kala itu berada dalam kondisi damai, namun kegaduhan-kegaduhan politik masih saja berlangsung di hampir seluruh pelosok Aceh.

Sebelumnya, penting dipertegas bahwa tulisan ini tidak berbasis riset ilmiah, dan bukan pula klaim buta tanpa bukti. Tulisan ini adalah penggalan-penggalan pengalaman yang penulis lihat, dengar dan rasa sendiri. Meskipun tulisan ini nantinya jauh dari tradisi ilmiah, namun tidak berarti bahwa tulisan ini hanya bualan belaka. Apa yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah fakta yang "sekalian alam" mengetahuinya.

MoU Helsinky yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 dalam salah satu poinnya telah memberikan hak kepada segenap masyarakat Aceh untuk membentuk partai-partai politik lokal di Aceh. Sayangnya, oleh kekuatan politik dominan

saat itu, pasal ini diterjemahkan secara keliru, entah sengaja atau tidak – sehingga lahirlah penafsiran buta, bahwa MoU Helsinky hanya mengizinkan lahirnya satu partai politik lokal tunggal. Penafsiran tentang partai politik lokal tunggal ini kemudian dianggap oleh sebagian kalangan sebagai penafsiran *mu'tabar* dan *mu'tamad* sehingga penafsiran lainnya dianggap sebagai "menyimpang." Kondisi inilah yang kemudian mendorong kekuatan politik dominan saat itu yang diikuti oleh sebagian masyarakat *muqalidin* melahirkan satu stigma kurang sedap yang ditujukan terhadap sesama anak bangsa sebagai "pengkhianat."

Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) yang didirikan oleh aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) pada tahun 2007 adalah partai lokal pertama di Aceh yang disebut sebagai partai "pengkhianat" oleh segelintir pihak dari kekuatan politik dominan saat itu. Ada dugaan penyebutan Partai SIRA sebagai partai "pengkhianat" disebabkan oleh kenyataan bahwa SIRA juga lahir dari rahim perjuangan. SIRA adalah gerakan sipil Aceh yang menginginkan penyelesaian konflik Aceh dengan cara-cara beradab.

Dalam perkembangan selanjutnya, stigma pengkhianat tersebut tidak hanya disematkan kepada SIRA, tetapi stigma tersebut terus beranak-pinak dan menyasar kubu-kubu politik lainnya di Aceh. Karena berbeda sikap politik, Irwandi Yusuf pun pernah dicap sebagai "pengkhianat." Jika dirunut secara kronologis, Irwandi Yusuf bersama Partai Nasional Aceh (PNA) adalah "pengkhianat" kedua setelah SIRA. Dulu, ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa selain kelompok politik dominan adalah pengkhianat. Namun, seiring perjalanan waktu dan tumbuhnya kedewasaan politik, stigma pengkhianat

ini sudah mulai ditinggalkan. Hal ini terbutkti, ketika Zaini Abdullah dan Zakaria Saman memilih keluar dari kubu politik dominan, stigma pengkhianat sudah tidak lagi terdengar, seperti halnya pada pemilu legislatif 2009 dan pemilukada 2012.

Teror

Tidak berlebihan rasanya jika kita menyebut pemilu legislatif 2009 adalah pemilu paling "panas" pasca damai. Seingat penulis, ketika itu partai SIRA mengalami tekanan yang luar biasa, sehingga partai tersebut nyaris tidak memperoleh kursi di parlemen, kecuali di beberapa kabupaten. Untuk level provinsi (DPRA), SIRA sama sekali "gagal" menempatkan wakilnya.

Pemilu legislatif 2009 penuh dengan aksi teror, di mana ada beberapa calon legislatif dari Partai SIRA yang diteror sehingga membuat daya juang mereka menjadi lemah. Beberapa unit kantor sekretariat Partai SIRA saat itu juga terbakar (atau dibakar?). Beberapa atribut dan kenderaan (mobil) juga menjadi sasaran teror. Bahkan beberapa kader Partai SIRA juga mengalami tindakan intimidasi. Sebagian dari aksi teror ini terekam dengan baik melalui beberapa media saat itu. Sayangnya berbagai bentuk tindakan teror tersebut nyaris tidak mampu diungkap oleh pihak keamanan.

Pada pemilukada 2012, aksi teror dan intimidasi ini masih berlangsung di beberapa daerah dan sebagian besar kasus-kasus tersebut juga direkam oleh media. Namun seiring perjalanan waktu aksi teror dan intimidasi ini terus berkurang. Hal ini setidaknya dapat kita saksikan pada pemilu legislatif 2014,

di mana ketegangan-ketegangan sudah mulai hilang secara perlahan.

Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya aksi teror dan intimidasi dalam praktik politik praktis di Aceh. *Pertama,* tumbuhnya kedewasaan politik di kalangan politisi Aceh. Dengan tumbuhnya kedewasaan politik ini, maka akan berdampak pada terbangunnya peradaban politik, sehingga aksi-aksi "primitif" seperti teror dan aksi *kheun keu gop* dengan stigma pengkhianat akan hilang dengan sendirinya. Namun apakah para politisi Aceh sudah cukup dewasa? Pertanyaan ini tentu masih sulit untuk dijawab. Tapi setidaknya jalan ke arah tersebut sudah mulai terbuka.

Kedua, para peneror dan pelaku intimidasi telah menyadari bahwa aksi teror yang digunakan selama ini sudah tidak lagi efektif alias *hana lagoet le* (tidak laku lagi), sehingga strategi ini mau tidak mau harus ditinggalkan. Mereka tentu sangat paham bahwa menggunakan strategi yang telah terbukti gagal adalah sebuah "kejahilan." Dalam redaksi yang lebih religius, mungkin dapat diduga bahwa para peneror sudah mulai bertaubat kepada Allah. Dengan adanya "taubat massal" dari para peneror ini maka secara otomatis praktik teror dan intimidasi ini akan hilang dengan sendirinya.

Ketiga, munculnya "perlawanan" dari rakyat. Jika dikomparasikan, maka akan terlihat adanya perbedaan mencolok dalam pemilu legislatif 2009 dan pemilukada yang akan digelar pada 2017. Suasana pemilu legislatif 2009 dan juga pemilukada 2012 penuh dengan ketegangan, di mana hegemoni kekuatan politik dominan terlihat cukup kuat. Kondisi tersebut berbeda dengan suasana hari ini, di mana telah munculnya berbagai aksi perlawanan dari pihak-pihak yang dulunya

"tertindas." Jika dalam pemilu sebelumnya kekuatan politik dominan masih dianggap sebagai satu-satunya singa, maka pada hari ini kondisi telah mulai berubah dengan lahirnya singa-singa baru yang lebih "buas."

Dengan berubahnya kondisi politik dan semakin cerdasnya rakyat, maka aksi teror yang di masa lalu menjadi senjata ampuh telah kehilangan fungsinya. Di masa lalu, ketika menghadapi teror masyarakat akan berkata "ampun" sebagai simbol ketakutan, tetapi sekarang ketika teror datang, masyarakat akan berkata "awas" sebagai bentuk perlawanan.

Akhirnya, penulis ingin membuat satu kesimpulan sederhana, bahwa teror itu seperti pedang, semakin dipakai maka dia akan semakin tumpul. Dan sejarah telah membuktikan itu. (***AT, 06 Januari 2017***).

Politik Aswaja Aceh dalam Teka-Teki

Teka-teki sering kali menghadirkan kebingungan dan kebimbangan. Tepatnya, teka-teki adalah dilema bagi pikiran. Untuk menjawab teka-teki tidak cukup hanya mengandalkan kepintaran dan kecerdasan, tapi butuh kecerdikan. Dalam teka-teki, lengah berarti "mati," karena dalam satu kedipan mata saja kita bisa tertipu. Tidak hanya itu, bahkan teka-teki terkadang menarik kita dalam pusaran ambiguitas. Teka-teki tidak mengenal kebenaran absolut dan kita hanya akan terpenjara dalam kemungkinan-kemungkinan.

Dalam teka-teki, sesuatu yang rasional dalam satu sudut pandang bisa irrasional dalam sudut pandang lain. Logika dan rasionalitas bukanlah senjata ampuh untuk menjawab teka-teki. Sebuah teka-teki hanya bisa dijawab dengan memahami metode "cocoklogi." Hidup dalam teka-teki adalah hidup dalam ketidakjelasan, kebingungan dan ketidakpastian. Kehidupan dalam dalam teka-teki akan mengurung kita dalam dunia prasangka yang tidak berkesudahan. Teka-teki adalah misteri.

Kita bisa menemukan teka-teki hampir dalam setiap ruang kehidupan. Mungkin teka-teki yang paling familiar adalah *teka-teki silang* yang banyak terpajang di toko-toko buku.

Bahkan teka-teki pun sering pula diselipkan dalam buku-buku pelajaran formal di sekolah-sekolah. Namun demikian, teka-teki dalam tulisan ini adalah teka-teki dalam pengertian yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada kolom-kolom kosong yang harus diisi secara silang sampai mata *br'at br'eut* (kabur).

Teka-teki dapat kita temukan dalam kehidupan keluarga, komunitas dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan secara luas. Seorang pejabat bisa saja kebingungan dalam teka-teki ketika berhadapan dengan berbagai regulasi yang tampak berbenturan. Seorang panglima perang pun sering terperangkap dalam teka-teki ketika berhadapan dengan musuh dalam pertempuran. Bahkan seorang ulama pun tidak terlepas dari teka-teki ketika menemukan dalil-dalil *dhanni* dalam penetapan hukum sehingga melahirkan hasil ijtihad yang berbeda satu sama lain.

Sebagaimana telah disinggung bahwa teka-teki menyelinap dan merayap hampir dalam setiap lini kehidupan. Dunia politik yang penuh dengan "hiruk-pikuk" pun tidak bisa membebaskan diri dari teka-teki. Salah satu teka-teki "terbesar" dalam dunia politik Aceh akhir-akhir ini adalah sikap politik Aswaja Aceh. Penamaan Aswaja dalam tulisan ini merujuk pada cara pandang fenomenologi, dalam hal ini nama tersebut berasal dari mereka sendiri, bukan penamaan dari kelompok lain.

Teka-Teki Aswaja

Dalam sudut pandang sosiologis, kehadiran Aswaja dalam pentas politik Aceh bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang. Kemunculan Aswaja dalam politik Aceh tentunya telah diawali oleh "negosiasi-negosiasi

sunyi" – yang tidak semuanya terekam media. Meskipun negosiasi tersebut berlangsung dalam keadaan sunyi, tapi sebagiannya juga meletup melalui fenomena-fenomena yang dapat diamati dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kita juga punya keyakinan bahwa dalam kehidupan insani tidak ada yang namanya *tiba-tiba*, karena kemunculan fenomena itu sendiri sangat dipengaruhi oleh beragam faktor.

Fenomena kemunculan Aswaja Aceh di panggung politik praktis 2017, baik langsung atau pun tidak telah turut menyumbangkan "kebingungan" sehingga menghasilkan persepsi publik yang beragam. Kubu pasangan cagub Muzakkir Manaf-TA Khalid misalnya, mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan Aswaja. Bahkan klaim ini turut dipertegas oleh Tu Bulqaini yang disebut-sebut Ketua Aswaja Aceh. Dalam pemberitaan yang dilansir beberapa media, Tu Bulqaini dengan "gerbong" Aswajanya menyatakan telah berkomitmen untuk memberi dukungan kepada Muzakkir Manaf (Muallem). Bahkan informasi terakhir yang berkembang menyebut bahwa relawan Aswaja sudah siap memenangkan Muallem.

Pada awalnya, klaim dukungan Aswaja hanya dimainkan oleh pihak Muallem. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, klaim ini mulai "melemah" setelah kehadiran Abu Tumin dalam Kampanye Akbar Irwandi-Nova di Lapangan Blang Asan Matangglumpangdua Bireuen. Kehadiran Abu Tumin dalam kampanye tersebut tidak hanya sekadar melakukan prosesi *peusijuek*, tetapi "terjun" langsung dalam orasi politik yang secara tegas meminta masyarakat Aceh untuk memilih Irwandi-Nova.

Dua sampel di atas, meskipun sama-sama mendapat dukungan Aswaja, namun terdapat perbedaan mencolok

dalam praktik pengungkapan dukungan. Redaksi bahasa yang digunakan Tu Bulqaini adalah dengan cara mengasosiasikan keputusan politiknya dengan *jumhur* Aswaja Aceh. Artinya, Tu Bulqaini tidak hanya menyatakan dukungan secara personal kepada Muallem, tetapi dukungan yang bersifat kolektif dengan melibatkan ulama Aswaja lainnya. Secara lebih tegas dapat disimpulkan bahwa Tu Bulqaini "melakukan klaim" bahwa Aswaja Aceh mendukung Muallem.

Sementara itu, pengungkapan dukungan politik yang dipraktikkan oleh Abu Tumin kepada Irwandi lebih bersifat personal dengan menyebut keputusannya sebagai "maklumat." Di sini terlihat jelas "kebijaksanaan" politik seorang Abu Tumin, di mana beliau tidak membawa "gerbong" Aswaja untuk mendukung Irwandi-Nova. Padahal, jika diselisik, Abu Tumin adalah ulama Aswaja paling senior dan paling tua di Aceh. Mungkin kenyataan inilah yang kemudian membuat Abu Tumin tampil percaya diri dalam memberikan dukungan politik tanpa harus membawa-bawa nama besar Aswaja – karena sosok Tumin telah dikenal luas sebagai guru besarnya Aswaja Aceh.

Kemudian, jika diselisik lebih cermat, dukungan Aswaja Aceh tidak hanya "mendarat" pada dua pasangan calon kandidat gubernur (Muallem dan Irwandi), tetapi dukungan tersebut merata kepada kandidat lainnya, meskipun tidak dominan. Tarmizi Karim misalnya, melalui performa kesalehan yang dibangunnya selama ini pun akan menarik faksi-faksi kecil dari Aswaja Aceh untuk memberi dukungan politik. Statusnya sebagai seorang doktor lulusan Tafsir Al-Quran cukup menjadi modal baginya untuk menarik perhatian Aswaja Aceh – tentunya dalam gerakan senyap.

Zakaria Saman yang populer dengan panggilan Apa Karya – mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka pun tidak luput dari lirikan Aswaja Aceh. Bukan tidak mungkin Aswaja "arus bawah" semisal *teungku rangkang, teungku imuem gampong* dan *imum chiek* juga memberikan dukungan politik kepada Apa Karya. Demikian pula dengan Abdullah Puteh dengan statusnya sebagai mantan Gubernur Aceh pun tidak tertutup kemungkinan mendapat dukungan Aswaja Aceh. Dalam redaksi yang lebih ringan, *sekhek-khek*nya (seburuk-buruknya) mantan Gubernur tentu memiliki relasi dengan komunitas-komunitas dayah yang *notebene* adalah lumbungnya Aswaja Aceh.

Sosok kandidat lainnya yang juga memiliki peluang dilirik oleh Aswaja Aceh adalah Zaini Abdullah alias Abu Doto. Selama menjabat sebagai Gubernur Aceh, Abu Doto juga memiliki hubungan lumayan baik dengan kalangan dayah yang tentunya juga pejuang-pejuang Aswaja. Meskipun tidak membawa "embel-embel" Aswaja, dapat diyakini bahwa ada beberapa "gelintir" faksi-faksi kecil dari Aswaja yang melabuhkan dukungan politiknya kepada Abu Doto.

Uraian singkat di atas hendak memperjelas kepada kita semua, bahwa tidak benar klaim bahwa 100 persen Aswaja Aceh memberikan dukungan politik kepada salah satu calon gubernur. Organisasi Himpunan Ulama Dayah sebagai wadah bernaungnya ulama-ulama Aswaja Aceh juga tidak secara resmi mengeluarkan intruksi untuk memilih kandidat tertentu dalam Pilkada 2017. Meskipun *jumhur* Aswaja Aceh memberikan dukungan kepada Muallem, namun sampai dengan detik ini belum ada "*ijmak*" (konsensus) dari Aswaja Aceh terkait keputusan politik ini.

Uraian di atas juga menjelaskan kepada kita semua bahwa meratanya dukungan Aswaja Aceh kepada seluruh kandidat gubernur, meskipun terdapat perbedaan kuantitas, namun perbedaan dukungan politik tersebut adalah sebuah teka-teki yang sampai saat ini belum terjawab. Teka-teki ini akan tetap menjadi misteri selama kontestasi berlangsung. Tidak ada jawaban absolut untuk menjelaskan fenomena ini – yang ada hanya gumpalan-gumpalan prasangka yang akan lebur dengan sendirinya ketika kontestasi usai.

Negosiasi-negosiasi sunyi yang terjadi antara Aswaja Aceh dan faksi-faksinya dengan para kandidat gubernur dalam prosesi Pilkada kali ini akan terungkap dengan sendirinya ketika ada pihak yang merasa dikecewakan. Dan curahan kekecewaan ini hanya akan terjadi setelah permainan usai. Pada saat itulah, noumena-noumena yang saat ini terendam dalam sunyi akan menggelinding ke zona empiris sehingga muncullah fonemana-fenomena baru yang tidak pernah terduga sebelumnya. Selamat menikmati teka-teki! (***AT, 10 Januari 2017***)

Pilih Ulama Atau Juhala?

Sebelum terlalu jauh, baiknya diingatkan di awal, bahwa tulisan ini hadir bukan sebagai kampanye politik, tapi hanya ekspresi keresahan atas sikap "galau" segelintir politisi di Aceh, khususnya di Bireuen – tempat lahir beta. Beberapa hari lalu, (16/01/17) saya sempat membaca sebuah artikel menarik yang ditulis oleh Pimpinan Redaksi AceHTrend, Muhajir Juli dengan tajuk "Cara Kautsar Melihat Manusia." Judul artikel tersebut sempat membuat saya penasaran sehingga saya ingin cepat-cepat mengetahui siapa Kautsar yang dimaksud dalam tulisan itu. Apakah dia seorang filsuf besar, seperti Nietzsche? Atau dia seorang psikolog seperti Freud? Atau dia seorang ulama besar seperti Ibn Taimiyah? Pertanyaan serupa ini terus mendesak saya untuk sesegera mungkin membaca artikel tersebut.

Rasa penasaran yang terus memuncak itu tentu tidak aneh. Karena telah menjadi satu kelaziman bahwa hanya tokoh-tokoh besar yang pikiran-pikirannya menarik untuk ditulis. Dengan demikian, tentu tidak berlebihan jika Kautsar yang namanya terpampang di judul tulisan Muhajir Juli adalah sosok besar. Jika tidak, tentu Muhajir Juli tidak akan membuang-buang waktu untuk menulis. Saya pun membaca tulisan tersebut baris

demi baris, sampai tuntas. Akhirnya, saya pun paham siapa Kautsar yang dimaksud. Dengan demikian dugaan saya tentang sosok semisal Nietzsche, Freud dan Ibn Taimiyah pun gugur dengan sendirinya. Kautsar adalah politisi! Bukan pemikir!

Dalam tulisannya tersebut Muhajir Juli telah mencoba melakukan penafsiran terhadap kalimat-kalimat yang disajikan oleh Kautsar dalam status *facebook*nya. Meskipun saya telah membaca tuntas tulisan Muhajir, tapi saya belum percaya bahwa kalimat-kalimat itu keluar dari sosok Kautsar. Secara khusus, saya memang tidak kenal dengan sosok Kautsar, demikian juga sebaliknya. Tapi, saya masih terkenang-kenang ketika dulu masa konflik sempat "*peuplung karton*" (bawa poster) dan "*gokgok pageu Polres*" (menggoyang pagar Polres) ketika Kautsar ditahan pihak keamanan. Pada era 1999-2003, sebagai anak muda saya juga terlibat *cilet-cilet* dalam berbagai aksi demonstrasi di Banda Aceh. Kalau tidak salah ingat, saya juga sempat bertemu dengan Kautsar di sebuah LP di Banda Aceh pada saat mengunjungi seorang teman. Ingatan-ingatan inilah yang membuat saya tidak percaya Kautsar mengeluarkan pernyataan seperti dikutip Muhajir Juli.

Kemudian saya pun mencoba melacak status Kautsar sebagai sumber primer tulisan Muhajir Juli. Dan saya pun bertemu langsung dengan kalimat-kalimat itu. Akhirnya saya percaya, bahwa status tersebut milik Kautsar.

Menyimak Kalimat Kautsar

Saya akan mencoba membagi tulisan Kautsar di status *facebook*nya ke dalam beberapa bagian berikut: *Pertama,* "Di Bireuen sedang ada perdebatan tentang ulama yang

berkeinginan menjadi umara." Kalimat ini benar tetapi tidak tepat. Benar karena memang perdebatan tersebut sempat berlangsung di Bireuen, tetapi hanya sebatas "diskusi facebok" dan tidak lebih dari itu. Tidak tepat karena, perdebatan itu terjadi pra penetapan. Artinya pasca penetapan calon oleh KIP, perdebatan ini sudah selesai. Artinya kalimat yang diajukan Kautsar sudah kedaluarsa.

Kedua, "sebagian ada yang setuju dan sebagian lagi beranggapan ulama ialah ulama dan bukan umara; tidak boleh mencampuri diantara [sic] keduanya". Kalimat ini bermasalah. Kalimat yang benar adalah "sebagian setuju dan sebagian tidak setuju." Kemudian muncul pula pertanyaan, bagaimana kita memahami terminologi ulama? Apakah ulama itu profesi seperti dokter atau tukang pangkas rambut? Atau ulama itu sebuah kondisi (keadaan) seperti "cerdas" dan "bodoh." Jika kita memahami ulama sebagai sebuah profesi sehingga ia tidak boleh menjadi umara, maka kita juga harus sepakat bahwa dokter, petani, nelayan, pengurus parpol dan profesi lainnya pun tidak boleh menjadi umara, karena mereka terhalang oleh profesi. Demikian pula jika kita memahami ulama sebagai sebuah kondisi (keadaan), maka kita telah menghalangi orang-orang pandai untuk menjadi umara. Artinya, jika kita tidak sepakat ulama (orang pandai) menjadi umara, maka kita telah membuka pintu kepada juhala (orang bodoh).

Kemudian, jika ulama dan umara tidak boleh dicampur (memakai istilah Kautsar), lantas bagaimana nasib Umar bin Abdul Aziz misalnya. Bukankah dia umara sekaligus ulama? Atau contoh yang lebih dekat Teungku Muhammad Daud Beureueh (pernah menjabat Gubernur Aceh), bukankah beliau

seorang umara dan juga ulama? Tentunya fakta-fakta sejarah ini perlu dijelaskan secukupnya oleh Kautsar.

Ketiga, "Kalau saya setuju saja jika ada ulama berkeinginan menjadi umara. Silakan, biar semua kita tahu bahwa ulama juga manusia biasa: *Need to power* dan punya potensi untuk korup." Sepintas, kalimat ini cukup "moderat", tapi "menusuk." Moderat karena si empunya kalimat tidak menutup ruang bagi siapa pun untuk menjadi umara. Adapun "menusuk" karena di kalimat terakhir, justru terkesan melekatkan perilaku korup pada umara. Pola generalisasi semacam ini tentunya sangat tidak cerdik apalagi dilakukan oleh seorang cendikiawan.

Namun demikian, kita sepakat bahwa siapa pun punya potensi untuk korup, tidak terkecuali ulama. Nah, jika ulama saja punya potensi untuk korup, bagaimana pula dengan juhala? Bukankah praktik korup itu sendiri terjadi karena kejahilan? Sekarang, terserah kita, apakah kita ingin menyerahkan kepemimpinan kepada ulama atau kepada *juhala*? (***AT, 18 Januari 2017***).

Mimbar Politik dan Politik Mimbar

"*Aceh Nanggroe Teuleubeh Ateuh Rueng Donya*" (Aceh negeri terlebih di muka bumi). Kalimat ini tentu tidak asing bagi telinga masyarakat Aceh. Kalimat ini terus diulang-ulang dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Dari mana kalimat ini berasal, siapa yang meriwayatkannya, dan sejak kapan kalimat ini muncul, bukanlah persoalan penting bagi masyarakat kita. Buktinya, kalimat ini terus berpindah dari satu bibir ke bibir lainnya, tanpa pernah diketahui siapa yang pertama sekali mengucapkannya.

Sudah menjadi kebiasaan, nalar kita akan mati ketika berhadapan dengan sesuatu yang dianggap menguntungkan. Sebaliknya, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang merugikan, nalar kritis pun menggelora tak terbendung. Kalimat "*Aceh Nanggroe Teuleubeh Ateuh Rueng Donya*" adalah kalimat yang menguntungkan sehingga ia luput dari kritik. Sampai dengan detik ini, belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap klaim tersebut!

Sepintas, jika dikorelasikan dengan kehidupan sosial masyarakat Aceh, kalimat di atas dalam kondisi tertentu ada benarnya. Ada banyak kejadian-kejadian unik yang mungkin

hanya terjadi di Aceh. Kita tentu masih ingat dengan aksi rebut tongkat pada prosesi shalat Jumat di Nagan Raya (2013). Kita juga belum lupa dengan aksi *peuplueng Mimbar* (menculik Mimbar) di Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen (2013). Demikian pula dengan aksi "hajar khatib" di Pidie (2011) juga masih terbayang-bayang di mata. Baru-baru ini, di Aceh Utara kembali digelar "sinema" berebut jadi khatib (2017).

Mencermati beberapa praktik "aneh" di atas, maka saya sepakat kalau Aceh disebut sebagai *nanggroe teuleubeh*, sebab kejadian-kejadian unik ini hanya terjadi di Aceh. Penyerangan mesjid di Palestin misalnya, tidak bisa dijadikan sebagai pembanding, karena mereka (orang-orang Palestin) berhadapan dengan Israel. Adapun beberapa kasus yang terjadi di Aceh adalah fenomena "kita" melawan "kita", bukan "kita" melawan "mereka" sebagaimana di Palestin.

Mimbar Politik

Dalam perspektif sekular, politik cenderung melenggang bebas tanpa nilai. Bicara politik adalah bicara tentang dunia yang benar-benar profan. Paradigma politik sekular secara tegas menutup diri dari pengaruh sakralitas. Dengan demikian, baik tidaknya gagasan, konsep dan gerakan politik sekular berada di bawah otoritas si pelaku politik. Neraca agama sama sekali tidak laku di sini. Sudut pandang serupa ini memberi kebebasan kepada pelaku politik untuk bertindak sebebas-bebasnya. Agama dilarang bicara!

Mimbar politik dalam paradigma sekular harus dimaknai seluas-luasnya. Dalam Mimbar ini pelaku politik boleh bicara apa saja dan dilarang menyebut-nyebut nama Tuhan.

Sebagaimana diakui sendiri oleh Nurcholis Madjid (1998) bahwa puncak sekularisme adalah atheisme, sebuah dunia tanpa Tuhan. Atau, "Tuhan telah mati" seperti kata Nietszshe (Levine, 2013). Tegasnya, agama dan Tuhan dilarang berada dalam ruang politik.

Dalam pengertian yang lebih luas, segala bentuk penipuan (janji palsu) melalui mimbar politik dan juga segala tindakan "anarkis" dalam praktik politik adalah manifestasi dari ideologi sekular, seperti kata Madjid, sekularisme adalah sumber dari segala imoralitas. Demikian juga dengan rupa-rupa *black campaign* dan *money politic* pun dapat dikategorikan sebagai wujud dunia politik tanpa Tuhan, meskipun dilakukan oleh orang-orang beragama. Orang-orang serupa itu bibirnya beriman, tapi lakunya "atheis."

Dengan beberapa pengecualian, panggung-panggung kampanye, di mana pun ia berada, siapa pun oratornya, apa pun topiknya, dan bagaimana pun dikemas adalah mimbar-mimbar politik yang cenderung mengadopsi gaya-gaya sekular. Praktek *kheun keu gop* dan pelestarian *teumeunak* di beberapa panggung kampanye semakin mempertegas pengadopsian dari gaya-gaya sekular.

Politik Mimbar

Ada sebagian pihak yang menduga bahwa "tragedi mimbar" yang terjadi baru-baru ini di Aceh Utara sebagai bagian dari politik mimbar. Dugaan ini bisa benar dan bisa salah. Untuk menentukan sebuah tindakan masuk kategori politik mimbar atau tidak, sangat ditentukan oleh posisi si pelaku. Namun

demikian, untuk tragedi Aceh Utara, sulit dikomentari sebab masih tebalnya "hijab" dan kacaunya informasi.

Bagi yang sepakat agama dan politik tidak terpisahkan, maka penggunaan mimbar sebagai corong kampanye politik adalah sah-sah saja. Sebaliknya, bagi pihak yang menganggap agama tidak boleh masuk ruang politik, maka penggunaan mimbar sebagai fasilitas kampanye adalah sebuah pelanggaran. Di sini, para empunya pendapat dituntut untuk konsisten.

Lantas bagaimana dengan politisasi mimbar? Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa praktik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi keseharian si pelaku. Memang sudah menjadi semacam epidemi, ketika musim kampanye tiba, banyak politisi yang tiba-tiba menjadi saleh dan bahkan sangat saleh. Namun demikian, kita harus benar-benar cermat dalam menilai. Artinya, ada kesalehan semu yang cuma muncul di musim kampanye, dan ada pula kesalehan hakiki. Kesalehan semu sifatnya sementara (musiman), sedangkan kesalehan hakiki ia abadi (dalam pengertian insani).

Cara mendeteksi "penyakit" ini cukup mudah. Sebagai contoh, ada politisi yang kesehariannya seperti (maaf) "*beulaga*", tetapi ketika musim politik tiba, ia pun "berubah" menjadi imam yang setia memimpin shalat lima waktu. Dan sesekali menjadi khatib musiman di beberapa mesjid, tentunya setelah "main mata" dengan pengurus mesjid. Di hadapan publik dia terus bertakbir "Allahu Akbar", tapi di belakang melakukan teror. Ketika pemilu usai, ia pun kembali menjelma sebagai (maaf) "*beulaga*." Politisi semacam ini dapat dipastikan mengidap epidemi kesalehan semu. Politisi seperti inilah yang sering melakukan politisasi mimbar untuk kepentingan politiknya.

Adapun politisi yang dalam kesehariannya memang benar-benar saleh (dalam pengamatan empiris), maka dia akan terselamatkan dari praktik politisasi mimbar. Sebagai contoh, seorang politisi yang dalam kesehariannya juga sering menjadi khatib dan imam shalat, ketika musim kampanye tiba ia pun menggunakan mimbar dalam mengisi rutinitas (non musiman), maka tindakannya tersebut bukan bagian dari politisasi mimbar. Bagi politisi ini, agama dan politik benar-benar tidak terpisahkan, karena iman bukan sekadar persoalan "kognitif", tapi ia harus diwujudkan melalui praktik, termasuk dalam politik. Hal ini dibuktikan ketika pesta politik berakhir, ia tetap konsisten dengan kesalehannya. Sebab itulah kesalehannya disebut kesalehan "abadi" bukan kesalehan semu. (***AT, 24 Januari 2017***).

Apa Karya, Irwandi dan "Perang Wacana"

Berita bukanlah peristiwa, tetapi ia adalah sesuatu yang diserap setelah peristiwa, dan ia tidak identik dengan peristiwa, demikian dikatakan Sobur (2015) dalam salah satu bukunya. Kutipan singkat ini mengajarkan kita untuk tidak bertindak "buru-buru" dalam menyimpulkan sebuah pemberitaan yang dihadirkan media. Benar, media adalah pusat informasi, tetapi media bukanlah sumber kebenaran. Paul Watson (Sobur, 2015) mengatakan bahwa konsep kebenaran yang dianut media bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Dan Nimmo (2005) juga mengingatkan bahwa berita harus dibedakan dari kebenaran.

Sementara itu, dalam memaknai sebuah peristiwa, media dapat menghadirkan berita yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang, ideologi dan kecenderungan politik media tersebut. Sebuah penafsiran terhadap peristiwa yang dilakukan oleh media sangat tergantung pada *framing* (bingkai), karena setiap pemaknaan yang muncul tidak akan terlepas dari *framing* tersebut. Sebuah kisah yang diceritakan Noam Chomsky seperti dikutip Sobur tentang bajak laut dan armada pasukan laut

misalnya, telah menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dimaknai berbeda-beda, di mana bajak laut disebut sebagai perompak, sementara armada laut disebut sebagai pahlawan, padahal keduanya sama-sama "mengambil upeti."

Sobur juga mengingatkan bahwa media tidak berada dalam ruang vakum, karenanya media tidak dapat melepaskan diri dari realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang beragam. Memang harus diakui bahwa salah satu tujuan mulia media adalah menyampaikan kebenaran, tetapi seperti disebut Kovach dan Rosentiel (2006) bahwa orang-orang berselisih paham tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran. Namun demikian Kovach dan Rosentiel berkeyakinan bahwa jurnalisme bisa sampai kepada kebenaran dengan cara menyingkirkan desas-desus, olok-olok, hal yang tak penting dan pelintiran serta berkonsentrasi pada apa yang benar dan penting.

Kemudian, seperti dikemukakan Badara (2014), bahasa dan kosakata yang digunakan dalam sebuah berita juga akan berdampak pada penggambaran realitas. Artinya, bahasa yang berbeda akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika dihadapkan pada khalayak. Selain itu, dalam penulisan sebuah berita juga sering terjadi upaya "pemarginalan" terhadap salah satu pihak seperti labelisasi yang menggunakan bahasa ofensif kepada pihak tertentu agar citranya menjadi buruk. Penting juga diketahui bahwa sebuah teks dalam berita tidak bisa dipahami ketika teks tersebut dipisahkan dari konteks yang menyertainya.

Ulasan singkat di atas hanya sebagai pengantar guna memahami "tragedi buat anak" yang melibatkan Apa Karya dan Irwandi dalam ajang Debat Kandidat Gubernur baru-

baru ini. Sebuah peristiwa "kecil" di ajang debat tersebut telah mendorong beberapa media untuk saling bersaing dalam melakukan rekonstruksi realitas atas peristiwa dimaksud dengan *framing* masing-masing.

Perang Wacana

Pasca Debat Calon Gubernur di Amel Convention (31/01/17) kita disuguhkan beberapa berita yang dalam pengamatan saya sangat tidak berimbang dan terkesan menyudutkan satu pihak. Kalimat Irwandi Yusuf yang ditujukan kepada Zakaria Saman (Apa Karya): "*...Tapi yang lebih mudah lagi bikin anak. Tapi Apa Karya gak bisa (melakukan) itu*" – telah "dipolitisir" sedemikian rupa sehingga memarginalkan salah satu pihak.

Media AJNN merilis sebuah berita bertajuk "Irwandi Sindir Apa Karya, Zaini: Itu Bukan Jawaban Cerdas." Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan kepada media ini adalah: apa yang menjadi motif AJNN mengutip statemen Zaini Abdullah terhadap "tragedi" Irwandi dan Apa Karya? Bukankah ketiganya (Irwandi, Apa Karya dan Zaini) adalah kandidat? Bukankah gaya penyajian berita semacam ini akan semakin memperuncing masalah yang seharusnya bisa terselesaikan hanya antara Irwandi dan Apa Karya, tanpa melibatkan Zaini Abdullah? Lagi pula, pasca debat tersebut tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Apa Karya keberatan dengan statemen Irwandi. Tudingan justru datang dari pihak luar, dalam hal ini Zaini Abdullah sebagaimana dirilis AJNN.net (31/01/17). Parahnya lagi, Apa Karya dan Irwandi selaku objek yang diberitakan justru tidak diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi. Akibatnya, publik sebagai pembaca berita akan terjebak dalam strategi wacana yang dimainkan oleh media.

Inilah yang kita maksud dalam uraian di awal tulisan ini, bahwa berita bukanlah kebenaran.

Sementara itu, kutipan pernyataan Zaini Abdullah via AJNN: "Anak itu titipan ilahi..." jika dianalisis secara cermat akan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa posisi Irwandi dalam berita tersebut telah termarginalkan. Kalimat "Anak itu titipan ilahi" adalah sebuah strategi asosiasi yang tidak pada tempatnya. Kalimat ini memberi kesan bahwa Irwandi telah "menghina" seluruh manusia yang tidak punya anak, padahal kalimat Irwandi hanya ditujukan kepada Apa Karya. Pola asosiasi semacam ini dimaksudkan agar setiap pembaca (yang tidak memiliki anak) merasa tergugah dan terbawa emosi sehingga mereka akan menyimpulkan bahwa Irwandi tidak mampu menjaga perasaan saudaranya. Di sisi lain, tudingan Zaini Abdullah bahwa kata-kata Irwandi merupakan "ejekan" adalah gaya identifikasi yang tidak tepat. Dapat diasumsikan bahwa strategi identifikasi melalui kata "ejekan" dimaksudkan agar terbangun sebuah imajinasi di pikiran pembaca bahwa kehadiran Irwandi di panggung debat hanya untuk "mengejek" Apa Karya, padahal kenyataannya tidak demikian. Inilah yang kita maksud bahwa berita bukanlah peristiwa.

Portalsatu.com (01/02/17) dalam pemberitaannya juga mengangkat judul yang lumayan "membingungkan." Portalsatu.com menggunakan judul "Tak Etis, Irwandi Kenapa Sindir Masalah Pribadi Apa Karya?" Kata-kata "Tak Etis" dalam potongan judul berita portalsatu dalam kajian analisis wacana adalah strategi identifikasi, di mana kata-kata Irwandi kepada Apa Karya digambarkan sebagai sesuatu yang tidak etis alias tercela. Strategi identifikasi tersebut telah menempatkan Irwandi dalam posisi marginal dengan menggunakan frasa

"tidak etis." Di sinilah bahayanya ketika media tidak melakukan rekonstruksi berita secara komprehensif atas sebuah peristiwa. Namun demikian, penyajian berita portalsatu juga patut diapresiasi karena turut memuat klarifikasi dari Irwandi.

Dalam berita yang dirilis portalfia.com, juru bicara Zakaria Saman – T. Alaidinsyah juga membuat pernyataan yang lumayan "brutal" dengan menyebut kalimat Irwandi terhadap Apa Karya sebagai "Serangan yang paling brutal dan tidak bermoral." Kalimat tersebut adalah model identifikasi subjektif yang akan berdampak pada munculnya persepsi buruk dari publik terhadap Irwandi sehingga Irwandi kembali termarginalkan dalam pemberitaan. Padahal, Apa Karya sendiri dalam beberapa kesempatan juga menggunakan kalimat yang hampir serupa (bernada ejekan), tetapi anehnya kalimat tersebut tidak pernah diidentifikasi sebagai "tidak baik" dan justru sering diidentifikasi sebagai "sekadar humor."

Beberapa potongan berita di atas hanya sekadar contoh bagaimana media memainkan strategi wacana guna memengaruhi publik sebagai pembaca. Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana sebuah peristiwa yang sama tetapi mampu diberitakan melalui *framing* yang berbeda. Kata-kata gurauan Apa Karya dalam berbagai kesempatan selalu saja dipahami sebagai hanya candaan dan humor belaka, meskipun terkadang juga melukai orang lain. Sebaliknya, kata-kata Irwandi yang hanya sekali ucap justru dibingkai sebagai sebuah tindakan tercela, tidak etis dan tidak beradab. Dalam situsi semacam inilah, terkadang media disebut sebagai "pengontrol" kebenaran.

Di tengah gencarnya arus informasi yang "maha hebat" saat ini, kita sebagai pembaca dituntut untuk jeli dan hati-hati.

Sudah saatnya kita membedakan antara "*brus putus*" (hoax) dengan berita. Bahkan sebuah berita pun harus dianalisis secara cermat agar kita tidak terjebak dalam "perang wacana" sehingga kebenaran tenggelam. Jangan membonsai diri sebagai pembaca tipe *muqallidun* yang menelan bulat-bulat semua berita yang berkembang, tapi jadilah pembaca kritis yang tidak segan-segan menggunakan akal sehat untuk berpikir. Yakinlah bahwa berita bukanlah peristiwa, tetapi hanya sebuah rekonstruksi peristiwa yang ditulis berdasarkan ideologi, sudut pandang dan *framing* tertentu. (***AT, 03 Februari 2017***).

Saifannur, Diammu Gunung Berapi

"Tidak kusadari diammu gunung berapi.
Tiba-tiba saja meledak membinasakan semua."
(Exist)

Kutipan di atas adalah penggalan lirik lagu bertajuk "Diammu Gunung Berapi" yang sempat populer di Malaysia dan Indonesia pada era 90-an. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Ezad dari group band Exist asal Malaysia. Lagu ini bahkan telah dihafal dengan baik oleh para remaja di era 90-an. Saya pribadi sangat menikmati lagu ini ketika pulang dari sekolah. Saat itu, lagu ini hampir setiap hari terdengar mengalun di terminal Kota Matangglumpangdua.

Setiap kita bebas saja menafsirkan lirik lagu tersebut dengan menggunakan paradigma masing-masing. Namun demikian, penggunaan tradisi literalisme dalam menafsirkan penggalan lirik lagu ini hanya akan mengurung kita dalam baris-baris kalimat sehingga maknanya menjadi kering. Untuk memahami teks secara mendalam, mungkin pendekatan hermeneutik akan sangat membantu. Dalam tradisi hermeuneutik paling ringan misalnya, kita sebagai penafsir harus menempatkan diri secara objektif dan subjektif dalam posisi pengarang (penulis). Artinya, proses pemaknaan tidak hanya terpaku pada teks

semata tetapi juga terkait dengan kondisi sosial politik ketika teks itu diproduksi.

Ulasan singkat di atas hanyalah sebatas pengantar alias basa-basi yang mungkin bermanfaat agar pembaca tidak salah menafsirkan tulisan ini. Artinya, seperti diulas di atas, bahwa tulisan ini hadir juga tidak terlepas dari kondisi sosial politik di tempat penulis bermukim. Tentunya akan sangat berbahaya jika teks dipisahkan dari konteks yang melingkupinya. Pemisahan teks dari kontek akan melahirkan penafsiran yang jauh panggang dari api.

Politik Diam

Dalam pengertian yang dipersempit, penggalan lirik lagu Exist sebagaimana tercantum di awal tulisan ini, mengingatkan kita agar tidak sekali-kali meremehkan pihak lain yang berada di luar kita. Dalam konteks politik, aksi diam yang dilakukan oleh pihak "lawan" tidak bisa ditafsirkan sebagai potret kelemahan. Demikian pula sebaliknya, aksi *show of force* yang dilakukan politisi tertentu pun tidak bisa ditafsirkan sebagai simbol kekuatan.

Aksi *show of force* (unjuk kekuatan) yang sering digunakan politisi dalam kampanye dengan maksud sebagai serangan psikologis terhadap lawan merupakan sebuah strategi klasik yang sangat mudah diobservasi sehingga mudah pula dicarikan penangkalnya. Sebaliknya, gerakan senyap tanpa suara yang di permukaan tampak pasif justru lebih berbahaya karena ia tidak pernah terdeteksi.

Kemenangan Saifannur dalam kontestasi Pilkada Bireuen pada 15 Februari 2017 versi *quick count* adalah sebuah contoh

konkret, di mana gerakan senyap telah mengalahkan strategi *show of force* yang populer di zaman klasik. Dalam beberapa *Quick Count*, suara pasangan Saifannur-Muzakkar jauh melejit meninggalkan pasangan lainnya. Hanya pasangan Tu Sop-dr. Pur yang tampak mengejar dan mengimbangi suara Saifannur, sedangkan pasangan lainnya *meuprek-prek, meukuwin* dan *phak luyak* dengan persentase suara yang memprihatinkan. Media sosial semisal *facebook* yang dulunya ramai dan garang berisi komentar tim sukses seketika berubah layaknya pusara di pedalaman – sepi dan diam membisu.

Di awal kehadirannya di kancah politik praktis Bireuen, Saifannur cenderung dipandang sebelah mata oleh pasangan lain. Anggapan ini turut didukung dengan "kejatuhan" Saifannur di awal pergerakannya, di mana KIP Bireuen saat itu menyatakan Saifannur tidak lolos seleksi kesehatan. Hebatnya, "kejatuhan" yang menyakitkan itu tidak membuat Saifannur patah arang. Dengan segenap daya dan upaya, Saifannur terus bergerak senyap dengan satu keyakinan bahwa "Sengsara akan membawa nikmat." Diagnosa *neurobehavior* oleh tim kesehatan KIP tentu sangat menyakitkan bagi Saifannur dan gerbong politiknya. Tapi, semangat untuk bangkit terus mendorongnya sehingga kesuksesan pun diraih, dan akhirnya Saifannur kembali mendapat kesempatan bertarung dalam kontestasi politik Bireuen.

Ada dua kesuksesan yang dicapai Saifannur. *Pertama,* sukses mempertahankan statusnya sebagai seorang yang sehat *wal afiat* sekaligus meruntuhkan diagnosa *neurobehavior* sehingga dia pantas menjadi salah satu calon kandidat Bupati Bireuen. *Kedua*, sukses memenangkan pertarungan sehingga memperoleh suara dengan persentase yang mengagumkan.

Bahkan Partai Aceh yang dulunya mendominasi dinamika politik Bireuen pun menerima dengan ikhlas kemenangan Saifannur. Sebuah sikap kesatria yang patut diberi seribu jempol.

Tragisnya, pasangan petahana yang aktif melakukan pergerakan politik dalam segala lini pun *meutumpok* dan harus mengurut dada. Harapan mengulang kejayaan dan menuju singgasana pun punah seketika. Para tim sukses yang dulunya garang, sekarang telah berubah menjadi pendiam. Segala harapan di masa kampanye telah *meuhamboe*, *meusipreuk* dan kini hanya bisa meratap.

Lantas, apa *ibrah* yang dapat diambil dari kemenangan Saifannur? Dalam politik, jangan pernah meremehkan potensi lawan sekecil apa pun. Diam tidak berarti lemah, garang tidak bermakna kuat. Jika laut menunjukkan kekuatannya lewat gelombang, maka gunung berapi memilih diam tak bergerak sembari menyusun kekuatan di perut bumi. Sekarang, mari melakukan evaluasi sembari berucap, "Saifannur, diammu gunung berapi, tiba-tiba saja meledak membinasakan semua." (***AT, 17 Februari 2017***).

Bireuen Tanah Kita!

Sebagaimana telah lazim kita amati, bahwa politik selalu saja menghadirkan hal-hal yang tidak terduga dan cenderung di luar prediksi. Dalam politik, para peramal pun harus menutup muka ketika ramalannya meleset jauh. Kemenangan Saifannur di Bireuen misalnya, adalah sesuatu yang berada di luar dugaan. Kemenangan Abu Syik di Pidie pun demikian, meskipun telah terjadi berbagai upaya "penggagalan," tapi kenyataannya Abu

Syik menjadi jawara. Demikian pula dengan aura kemenangan Irwandi pun berada di luar prediksi, di mana struktur politik Partai Aceh tampak lebih lengkap dan merata di seluruh Aceh, tapi nyatanya Irwandi mampu mendominasi perolehan suara. Mawardi Ismail menyebut fenomena ini sebagai *silent power,* dan sebagai orang kampung saya lebih suka menyebutnya "gunung berapi."

Terlepas siapa yang menjadi pemenang, yang jelas pemilu adalah pesta demokrasi, pesta rakyat. Dan lazimya sebuah pesta sudah selayaknya menghadirkan kegembiraan, bukan kemurungan. Pesta adalah media untuk saling tegur sapa dan mengikat persahabatan, bukan sebaliknya saling hujat dan caci maki. Dan di Aceh, khususnya di Bireuen, pesta demokrasi itu telah pun usai. Yang menang tak perlu *gok-gok droe* dan yang kalah pun tak perlu *poh-poh droe*.

Satu hal yang amat disayangkan adalah ketika pesta demokrasi menyisakan "kotoran" yang "menjijikkan." "Kotoran itu berupa caci-maki dan hujatan yang sambung menyambung tidak berkesudahan. Munculnya *laqab* Bireuen sebagai Kota Uang dan Kabupaten Seratus Ribu adalah salah satu contoh "kotoran" yang sangat mengganggu harga diri dan marwah masyarakat Bireuen. Ironisnya lagi, laqab ini justru dimunculkan oleh orang Bireuen sendiri.

Kita paham, dan bahkan sangat paham bahwa munculnya laqab dimaksud tentu tidak terlepas dari kondisi politik di Kabupaten Bireuen yang baru saja melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan. Laqab tersebut dimaksudkan sebagai sebuah curahan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kondisi politik praktis di Bireuen yang kononnya sarat dengan permainan *money politik*. Tapi sayangnya, curahan kekecewaan

tersebut dilakukan dengan cara yang sama sekali tidak bijak – untuk tidak menyebut "keji." Terkait adanya pasangan calon Bupati Bireuen yang menurut "kabar burung" melakukan *money politik,* itu adalah kesalahan personal, sehingga sangat tidak bijak jika kesalahan personal kemudian dibebankan kepada *jama'ah* (masyarakat Bireuen secara umum) dengan melakukan pola generalisasi.

Laqab Bireuen Kota Uang yang diplesetkan dari Kota Juang merupakan tindakan penistaan terhadap tanah tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Dan bahkan laqab tersebut adalah penistaan terhadap sejarah, di mana gelar Kota Juang tidak diperoleh secara gratis, tapi dengan pengorbanan besar para pendahulu sehingga plesetan Kota Juang menjadi Kota Uang adalah tindakan penistaan terhadap para pendahulu. Seharusnya, jika ada masyarakat luar Bireuen yang menuding Bireuen sebagai Kota Uang, kita sebagai masyarakat Bireuen sudah semestinya mengajukan keberatan sebagai tanda bahwa marwah itu masih ada.

Jika pun *money politik* itu benar adanya, maka langkah yang harus dilakukan adalah upaya hukum bukan justru memproduksi isu "menjijikkan" yang merugikan masyarakat Bireuen secara umum. Adalah tidak pada tempatnya Bireuen disebut sebagai Kota Uang hanya karena ada kandidat yang diduga melakukan praktik *money politik*, sebab tidak semua orang Bireuen sepakat dengan *money politik*. Penyelesaian praktik *money politik* secara beradab semestinya dilakukan melalui jalur hukum, bukan justru menabur garam di atas luka dengan melakukan generalisasi terhadap mayoritas masyarakat Bireuen yang *notabene* menolak praktik *money politik*. Menyebut Bireuen sebagai Kota Uang atau Kota Seratus Ribu

sama saja kita telah menuduh seluruh masyarakat Bireuen bisa dibeli dengan uang. Dan tuduhan ini tentunya bertentangan dengan kenyataan.

Seandainya seluruh masyarakat Bireuen sepakat dengan *money politik,* maka perolehan suara kandidat yang disebut-sebut "bermain uang" akan mencapai angka 100% atau setidaknya 80%. Tapi kenyataannya tidak demikian. Artinya tidak ada satu pun pasangan calon Bupati Bireuen yang memperoleh suara di atas 50%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat Bireuen yang tergoda dengan *money politik*. Jika demikian adanya, lantas argumen apa yang digunakan untuk memberi laqab Bireuen sebagai Kota Uang atau Kota Seratus Ribu?

Dengan memberi laqab Bireuen sebagai Kota Uang dan Kota Seratus Ribu berarti kita telah menumpuk kesalahan personal ke pundak seluruh masyarakat Bireuen yang mayoritasnya menolak praktik *money politik*. Bagi yang telah telanjur menyebut Bireuen sebagai Kota Uang dan Kota Seratus Ribu silakan berapologi bahwa tindakan tersebut sebagai gerakan melawan *money politik*, tapi tanpa disadari gerakan tersebut justru terkesan menuduh seluruh rakyat Bireuen menerima *money politik*.

Tentu sangat tidak bijak, jika kita menyebut Mesir sebagai negeri terkutuk hanya karena Fir'aun seorang, padahal kita tahu bahwa di sana juga ada Musa. Demikian pula dengan penyebutan Bireuen sebagai Kota Uang dan Kabupaten Seratus Ribu adalah tindakan *salah jeb ubat* dan bahkan "keji," karena kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Bireuen menolak dan bahkan anti kepada *money politik*.

Bireuen adalah tanah kita, jangan dinistakan hanya karena kepentingan politik praktis yang sesaat itu! Mari tolak *money politik* dengan cara-cara beradab, bukan biadab. (***AT, 20 Februari 2017***).

Bila Cinta Didusta...

"*Bila cinta didusta*
Hati mulai gelisah
Hilang kekasih hati
Hidup jadi merana"
(Screen)

Tajuk tulisan ini sengaja saya copot dari judul lagu yang dinyanyikan oleh group band Screen asal Malaysia yang sempat populer dalam belantika musik Indonesia pada era 90-an. Lagu tersebut dinyanyikan dengan begitu syahdu oleh G-Mie, vocalis Screen yang berambut panjang dan berdahi lebar. Alunan gitar yang dipetik Wan juga terdengar mendayu-dayu ketika lagu ini didendangkan. Saya pribadi sebagai penikmat lagu-lagu Malaysia pun terpaksa *peuduk jaroe ateuh dhoe* guna memulai sebuah lamunan ketika syair-syair itu dilagukan.

Lagu ini secara keseluruhannya mengisahkan tentang dunia percintaan sehingga ramai remaja 90an yang terpikat dengan kesyahduan lirik dan melodi yang dimainkan. Lantunan syairnya menggetarkan hati dan membuat lamunan remaja kala itu melambung tinggi menembus batas. Dengan mata terpejam, bibir tersenyum, sebuah panorama percintaan yang indahnya tiada tara pun seolah hadir menemani hati para remaja kala itu. Seandainya lagu ini diputar kembali pada tahun 2017, maka

mereka-mereka yang pernah menjadi penikmat lagu ini pada era 90an akan kembali mengulang khayal.

Meskipun lagu ini berkisah tentang percintaan yang gagal dan dikhususkan untuk muda-mudi, namun bait-bait lagu ini juga sangat relevan jika dikaitkan dengan kontestasi politik yang dalam beberapa hal memiliki kemiripan dengan dunia percintaan. Lagu ini mencoba mengantarkan sebuah pesan moral, bagaimana pahitnya ketika cinta itu didustai dan diabaikan sehingga melahirkan sebuah kekecewaan yang mendalam. Ketika cinta itu didustai, maka kita akan merasa gelisah dan kemudian membuat hidup menjadi merana, demikian kira-kira pesan utama yang disampaikan Screen dalam lagunya tersebut.

Ketika membaca hasil pleno KIP Aceh yang menetapkan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai gubernur terpilih pada Pilkada 2017 dan pasangan Muzakir-T.A Khalid pada posisi kedua, saya langsung teringat kepada bait-bait lagu Screen yang mendayu-dayu itu. Tentu ada kegelisahan besar di hati mereka yang belum beruntung dalam kontestasi politik tahun ini. Kegelisahan itu sendiri disebabkan oleh hilangnya kekasih hati, yaitu rakyat. Kegelisahan ini jika tidak mampu dikelola dengan baik tentunya akan berdampak pada terciptanya kehidupan yang merana sebagaimana digambarkan oleh Screen dalam lagunya.

Keputusan KIP Aceh yang menetapkan kemenangan Irwandi-Nova kemudian memaksa saya untuk menafsirkan bait-bait lagu Screen menggunakan pendekatan politik. Cinta yang diimpikan (kekuasaan) akhirnya putus di tengah jalan (kekalahan dalam pilkada). Insan jadi idaman (rakyat) kini dimilik orang (pemenang/ Irwandi). Bila hati dah jemu

(kekecewaan rakyat), mula berpaling tadah (memberikan dukungan kepada pihak lain).

Bait-bait terakhir lagu Screen juga sangat menyentuh jika ditafsirkan dengan pendekatan politik. "Andainya ditakdirkan cintamu didustai, pastinya kau mengerti siksanya perpisahan, hanyalah ditemani sesalan." Bait ini mencoba mengantarkan pesan bahwa "kedustaan" yang selama ini kita embuskan kepada rakyat telah membuat rakyat sadar sehingga rakyat pun mendustai kita. Bentuk "kedustaan" tersebut adalah hilangnya dukungan rakyat yang sebelumnya begitu menggelora.

Kedustaan yang kita tabur di masa lalu berupa janji-janji palsu telah dibalas oleh rakyat dengan memalingkan dukungannya kepada sosok lain yang menurut mereka lebih patut dicintai. Tentu kita tidak bisa menyalahkan rakyat, karena mungkin saja selama ini kita telah menyia-nyiakan kepercayan mereka. Akhirnya kita hanya bisa meratap sayu. Dan masa tak mungkin terulang. (***AT, 26 Februari 2017***).

Woe-Woe, "Manifesto" Yang Gagal?

Pesta demokrasi telah usai dengan berakhirnya prosesi Pilkada 2017. Komisi Independen Pemilihan (KIP), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota sebagai pihak penyelenggara pilkada juga telah mengetuk palu di sidang pleno sebagai pertanda permainan telah berakhir. Hasil pleno KIP yang digelar beberapa waktu lalu telah menetapkan para pemenang. Tentunya keputusan KIP ini tidak akan mampu memuaskan semua pihak, karena kursi kepala daerah hanya tersedia untuk dua orang; gubernur/ bupati/ walikota dan satu orang wakilnya. Bagi yang belum beruntung tidak perlu gundah dan gelisah, teruslah berusaha dan berdoa. Seperti kata A. Hasan (ulama Persis), jika tidak percaya kepada takdir, maka anggap saja kenyataan ini sebagai giliran.

Meskipun Pilkada 2017 telah berakhir, namun banyak hal unik yang penting dikupas agar ia tidak terbenam dalam lumpur sejarah. Mengupas hal-hal menarik yang pernah muncul di musim pilkada untuk kemudian kita ambil hikmahnya bukanlah perbuatan dosa dan tidak pula terlarang, baik dari sudut pandang undang-undang maupun sudut pandang *syara'*. Dengan demikian, adalah tidak bijak jika ada pihak-pihak yang

menyebut ulasan ini sebagai membuka kembali luka lama atau pun memperparah kesedihan pihak yang kalah, karena di sinilah kesabaran itu diuji.

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud menggunjing pihak yang kalah dan tidak pula memuji pihak yang menang, tapi hanya sebatas kajian dari sudut pandang awam, sebagai pengganti diskusi kedai kopi. Apa yang saya tulis dalam tulisan ini hanyalah hasil perbincangan kedai kopi dan hasil diskusi *jambo jaga* (pos jaga) yang sampai saat ini masih terus mengalir. Tentunya tidak ada yang aneh jika topik ini terus menjadi perbincangan, karena sudah menjadi semacam tradisi, jika isu-isu politik selalu saja menarik perhatian dan dibahas terus menerus, baik di pusat-pusat perkotaan maupun di pojok-pojok *ateung blang* (pematang sawah).

Woe-Woe

Salah satu kata-kata "hiburan" yang sempat populer dalam berbagai panggung kampanye Pilkada 2017 adalah *woe-woe*. Dalam Kamus Aceh-Indonesia yang disusun oleh Aboe Bakar, dkk (1985), Kata *woe* bermakna "pulang kembali kepada tempat bertolak semula." Adapun kata *wo* (tanpa huruf "e") bermakna sesat atau berkelana. Kata yang hampir serupa adalah *wot* (dengan tambahan huruf "t") yang diartikan sebagai mengacau atau mencari kemana-mana. Pemaknaan kata *wot* sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam kalimat. Kata lainnya yang memiliki kemiripan bunyi adalah *won-won* yang biasanya dimaknai sebagai perbuatan mengigau secara tidak sadar. Kata *won-won* juga sering dilekatkan kepada orang-orang yang mengalami sakit pikun. Satu kata lagi yang memiliki

kedekatan dalam segi ucapan adalah *wet* atau *wet-wet* yang artinya memutar-mutar.

Kembali kepada kata *woe*. Dalam penggunaanya, kata *woe* bisa bermakna ajakan, seperti kalimat *keuno kawoe,* dan bisa pula dimaknai sebagai bentuk penolakan, seperti *kajak woe keudeh*. Dengan demikian, penggunaan kata *woe-woe* yang lumayan marak dalam kampanye Pilkada 2017 bisa dimaknai secara berbeda oleh para pendengarnya. Kata *woe-woe* pada awalnya digunakan oleh pasangan calon yang didukung oleh Partai Aceh dengan maksud mengajak para kadernya yang sudah memihak kepada kandidat lain untuk segera *woe* (kembali) kepada Partai Aceh.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, kata *woe-woe* juga digunakan oleh pasangan kandidat lainnya, entah ingin meniru atau meminjam istilah Irwandi Yusuf, kata tersebut hanya sekadar candaan "tingkat dewa." Yang jelas, penggunaan kata *woe-woe* sebagai jargon politik tidak hanya terdengar di panggung kampanye Partai Aceh, tetapi kata-kata tersebut juga bergema di beberapa panggung kampanye kandidat lainnya.

Akhirnya, kata *woe-woe* menjadi semacam maklumat yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk kembali kepada sikap politik awal. Dan bahkan kata tersebut telah melahirkan persaingan yang ketat antar kandidat dengan berebut *pakat woe* (ajak pulang). Karena kata *woe-woe* bias makna, maka para pendengar kata-kata tersebut pun memaknainya secara berbeda. Bagi mereka yang menafsirkan kata-kata tersebut sebagai ajakan pulang (*keuno kawoe*), maka mereka pun pulang (*woe*) ke tempat asal. Sebaliknya, mereka yang memahami kata tersebut sebagai bentuk penolakan (*keudeh kawoe*) maka tidak

ada pilihan lain, mereka pun keluar dari tempat asal untuk kemudian memberikan dukungan politiknya kepada pihak lain.

Dalam beberapa kasus, kata *woe-woe* (pulang-pulang) justru membuat sebagian masyarakat *meu wet-wet* (berputar-putar) alias kebingungan. Sebagian lainnya juga ada yang *meu wot-wot* (mencari kemana-mana) alias tidak tahu kemana harus pulang. Adapun bagi masyarakat yang apatis terhadap politik, ketika mendengar kata *woe-woe,* mereka justru mengalami *won-won* (mengigau secara tidak sadar). Kondisi *won-won* ini tentunya tidak terlepas dari kekecewaan mereka terhadap janji manis para kandidat yang tidak pernah terpenuhi.

Dan, hasil pleno KIP Aceh beberapa waktu lalu telah menjawab semuanya. Masyarakat telah menentukan sendiri, kemana mereka harus *woe*. Hasil pleno juga memperlihatkan kepada kita, seberapa banyak masyarakat yang *meu wet-wet, meu wot-wot* dan *won-won* akibat menerjemahkan kata *woe-woe*. Akhirnya kita harus sepakat, bahwa seruan *woe-woe* sebagai manifesto politik telah gagal dengan sendirinya. *Wallahul Musta'an*. (***AT, 02 Maret 2017***).

Jurus Meu-angen Zaini Abdullah

Ada beragam rasa dan komentar yang bermunculan di media sosial ketika tiba-tiba saja Gubernur Zaini Abdullah memainkan jurus "mematikan" menjelang akhir jabatannya. Sebuah jurus yang membuat sebagian kalangan terkejut-kejut dan sebagian lagi tersenyum-senyum sambil terpingkal-pingkal. Pihak yang terkejut adalah mereka yang pada awalnya tidak pernah menduga bahwa Zaini Abdullah akan melakukan aksi nekat karena telah ada larangan dari Mendagri. Ada pun pihak yang tersenyum adalah mereka-mereka yang berada di belakang Zaini Abdullah, karena "mantra" yang disembur telah berhasil dan sukses.

Bagi pihak-pihak yang dilantik pada Jumat 10/03/17 tentu akan tertawa riang atau setidaknya tersenyum sendiri karena mendapat hadiah "*boh manok mirah*." Sebaliknya, pihak yang kena "lantak" terpaksa mengerutkan dahi dan tepuk jidat karena "*kue bohlu*" diambil orang. Munculnya dua sikap dari dua kalangan berbeda nasib ini adalah sebuah kewajaran. Tentu sangat jarang seorang pejabat yang menangis terisak ketika disodorkan "*boh manok mirah*" (jabatan). Demikian

pula sungguh sangat langka seorang pejabat yang tersenyum riang ketika "*kue bohlu*"nya diambil orang.

Ada pun mereka-mereka yang berada di luar lingkaran "terlantik" dan "terlantak" bebas saja menyampaikan tanggapannya, mengingat tidak ada beban yang mereka pikul. Yang memiliki hubungan emosional atau pun hubungan lainnya dengan Zaini Abdullah selaku Gubernur tentu harus menyebut keputusan tersebut sebagai sebuah prestasi gemilang. Sebaliknya, bagi pihak-pihak yang selama ini bertentangan atau kurang *syur* kepada Zaini Abdullah, dengan penuh semangat akan menyebut tindakan mutasi tersebut sebagai menabrak aturan, tindakan orang pikun, balas dendam, stress dan sebutan-sebutan serumpun lainnya.

Akibat tindakannya tersebut Zaini Abdullah pun menjadi "bulan-bulanan" di media sosial dan memunculkan berbagai perbincangan di kedai-kedai kopi. Beberapa pengamat menyebut tindakan Zaini Abdullah merombak kabinet pejabat SKPA sebagai perbuatan melawan hukum dan bahkan menurut si pengamat, Zaini Abdullah bisa diberhentikan dari jabatannya. Dalam pengakuannya kepada media, Zaini justru menyebut tindakannya sebagai upaya membersihkan jentik nyamuk.

Sejumlah pejabat yang diberhentikan alias "*dilantak*" mengaku sangat tersinggung dengan pernyataan Zaini Abdullah karena mereka ditamsilkan sebagai jentik-jentik nyamuk, yang jika tidak dibersihkan akan menetas menjadi nyamuk dewasa dan akhirnya akan menggigit. Hebatnya lagi, berkat usaha Zaini Abdullah, istilah jentik-jentik nyamuk ini pun berhasil menemukan popularitasnya melalui puluhan atau mungkin ratusan komentar dan status *netizen* via *facebook*.

Tidak puas disebut sebagai nyentik nyamuk, seorang pejabat yang kena "lantak" pun berkomentar bahwa jika mereka disebut sebagai jentik nyamuk, maka induk nyamuknya adalah Gubernur Zaini sendiri. Secara tidak langsung pernyataan ini terkesan menegaskan bahwa para pejabat yang kena "lantak" memang jentik nyamuk dan induknya nyamuk adalah Gubernur Zaini sebagai tukang "lantak." Dengan demikian aksi debat istilah sudah adil.

Uniknya, seorang pejabat yang "terlantak" mengatakan bahwa ia membuka kartu semasa masih menjabat sebagai "jentiknya" Zaini. Si pejabat tersebut mengaku pernah menolak beberapa perintah Gubernur Zaini yang menurutnya akan berdampak pada masalah hukum di kemudian hari. Aksi jujur semacam ini tentunya patut diapresiasi, meskipun baru muncul sekarang ketika *kue bohlu* diambil orang. Di satu sisi, tindakan "melantak" yang dilakukan Gubernur Zaini juga memiliki hikmah tersendiri, di mana kartu-kartunya mulai terbuka perlahan. Seandainya Zaini menunda "melantak" tentunya kartu ini akan tersimpan rapi dan bahkan mungkin akan dibawa mati.

Tapi, kejujuran buka kartu tersebut tentunya akan lebih berharga jika dilakukan pada saat "*boh manok mirah*" masih di tangan. Artinya, jika memang benar Zaini pernah memberikan beberapa perintah yang tidak sesuai aturan, maka sungguh elok rasanya jika si pejabat tersebut dengan gagah berani menyatakan mundur dari jabatannya. Bukankah kejujuran itu lebih penting dari sebutir "*boh manok mirah*"?

Jurus *Meuangen*

Namun demikian, jika kita mau jujur, tindakan Zaini Abdullah merombak kabinetnya baru-baru ini memang sedikit aneh. Pasalnya, ketika beberapa waktu lalu tersebar informasi terkait akan adanya mutasi, sang Gubernur justru menepis dengan menyebutnya sebagai *berita angen*. Kalimat *berita angen* ini tentunya bisa melahirkan berbagai penafsiran. Bisa saja kalimat *berita angen* tersebut dimaksudkan bahwa berita tersebut bukan berasal darinya sehingga disebutlah *angen*. Bisa pula istilah *berita angen* tersebut sebagai bentuk penegasan dari Zaini Abdullah bahwa dalam beberapa waktu ke depan dia akan menabur angin dan memainkan *jurus meuangen*.

Akhirnya, penafsiran *berita angen* telah terjawab dengan tindakan "melantik" dan "melantak" yang dilakukan Gubernur Zaini beberapa hari lalu. Artinya, Zaini Abdullah benar-benar sudah "*meuangen*" sehingga terpaksa mengeluarkan *jurus meuangen* yang berdampak pada menetasnya "*boh manok mirah*" bagi sebagian pejabat dan hilangnya *"kue bohlu*" dari pejabat lainnya.

Akibatnya, para pejabat yang kena "lantak" kononnya akan melaporkan tindakan Gubenur Zaini kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) di Jakarta dengan dalih ingin mencari kebenaran. Kita sebagai masyarakat, tentu harus mendukung para pejabat yang hendak melapor ke Jakarta, karena setiap tindakan untuk mencari kebenaran tentunya harus kita dukung dan bahkan kita apresiasi. Cuma terkadang terlintas sebuah pertanyaan di benak kita semua, "Seandainya pada Pilkada lalu Zaini Abdullah berhasil menjadi jawara, apakah para pejabat kita ini juga akan melapor tindakan Zaini ke Jakarta?" Tentu hanya para pejabat dimaksud yang bisa menjawab.

Di sisi lain, kejadian ini juga memiliki hikmah tersendiri bagi masyarakat kita dan khususnya bagi jawara Pilkada 2017 yang akan memimpin Aceh pada periode mendatang. Bukan tidak mungkin kejadian yang sama juga akan menimpa Gubernur baru nantinya, khususnya menjelang akhir jabatan. Bukankah orang kuat itu disegani dan ditakuti karena kekuatannya, dan ketika kekuatan itu hilang, hilanglah ketakutan orang di sekelilingnya. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Jangan sampai lahir Gubernur jentik dan pejabat jentik di kemudian hari. (***AT, 13 Maret 2017***).

Politik Keuroekroek

Rupanya istilah "kalah menang itu biasa" sudah tidak lagi relevan dengan dunia politik Aceh yang semakin hari semakin membingungkan. Hal ini dapat kita saksikan sendiri dengan ragam berita yang muncul pasca Pilkada 2017 lalu. Pernyataan siap kalah dan siap menang ternyata hanya bualan belaka. Buktinya, banyak pihak yang sampai dengan saat ini tidak siap menerima kekalahan. Namun demikian, dalam negara demokrasi, kita mendukung penuh segala upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kalah untuk mendapatkan hak politiknya.

Beberapa waktu lalu salah seorang anggota DPR Aceh meminta pemerintah pusat untuk menghargai kekhususan Aceh dengan UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh). Pemerintah pusat diminta untuk menggunakan UUPA dalam penyelesaian sengketa pilkada di MK. Bahkan, anggota DPRA bersangkutan menyatakan siap mundur bila UUPA tidak dihargai. Aksi ancam mundur ini juga disampaikan oleh beberapa anggota DPR lainnya. Ancaman mundur ini kemudian mendapat tanggapan dari seorang pengamat yang menyebut ucapan tersebut sebagai gertak sambal. Menurut

sang pengamat, ancaman mundur hanyalah sebuah strategi politik lama guna memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di MK terkait sengketa Pilkada.

Akhirnya aksi berbalas pantun tidak dapat dihindari dan aksi *seu-oet samboet* pun dimulai. Mungkin karena geram dengan komentar pengamat, salah seorang anggota DPRA kemudian menantang sang pengamat untuk *koh punyok* (potong telunjuk) dan membuat perjanjian di notaris. "Kalau saya tidak mundur saya siap dipotong telunjuk, kalau saya mundur telunjuk mereka dipotong," demikian bunyi tantangan dari anggota DPRA kepada para pengamat. Namun sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi dari para pengamat apakah mereka bersedia melayani aksi potong telunjuk, atau mungkin akan dinegosiasikan dan diturunkan satu tingkat menjadi potong kuku. Kita tunggu saja balasan dari pengamat.

Sembari menunggu konfirmasi dari pengamat, baiknya kita mencoba menganalisis beberapa gejala aneh dalam menyikapi aksi ancam mundur yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR Aceh. Adi Maros, Ketua Aceh Human Foundation (AHF), sebagaimana dilansir Ajnn.net justru menyambut ancaman mundur anggota DPRA dengan tantangan yang cukup bombastis. Adi Maros berjanji akan loncat dari menara Masjid Raya Baiturrahman apabila seluruh kader Partai Aceh mundur dari kursi DPR. Namun sayangnya, Adi Maros tidak menjelaskan secara detail apakah aksi lompatnya dilengkapi dengan payung atau lompat gaya batu.

Tanggapan unik lainnya datang dari seorang *netizen* yang jika saya berjumpa dengannya akan saya traktir segelas kopi. *Netizen* dimaksud menawarkan tantangan yang cukup *bahenol* dan bahkan mampu mengalahkan tantangan Adi Maros. Di

status *facebook*nya dia menulis: "*Meunyo jadeh dimundur mandum anggota DPR dari Partai Aceh, Ilong ngen kolor kujak dari Darussalam trok u Masjid Raya*" (kalau benar anggota DPR dari Partai Aceh mundur dari jabatannya, saya akan berjalan pakai kolor dari Darussalam ke Masjid Raya). Menurut saya, tantangan ini terbilang cukup berani dan bahkan mampu mengalahkan tantangan potong telunjuk yang ditawarkan oleh anggota DPR Aceh. Namun demikian, sama halnya dengan Adi Maros, si *netizen* juga tidak menjelaskan secara detail tentang aksi jalan pakai kolor, apakah dilengkapi pakai sarung di luar atau memang "bulat-bulat."

Nah, kira-kira pelajaran apa yang dapat diambil dari dua tanggapan yang disampaikan oleh Adi Maros dan *netizen* yang *notabene* adalah bagian dari rakyat? Dalam pemahaman awam saya, ancaman mundur dari jabatan yang disuarakan oleh anggota DPR Aceh adalah sikap "frustasi" sehingga mendapat perlawanan dari rakyat dengan komentar yang juga bernada frustasi. Jika anggota DPRA mungkin merasa "frustasi" karena kepentingan politik, maka rakyat merasa "frustasi" melihat wakilnya yang "sedikit-sedikit ancam mundur," "sedikit-sedikit minta merdeka" dan "sedikit-sedikit naik gunung." Rakyat yang sudah semakin cerdas tentunya merasa kecewa terhadap wakil yang telah dipilihnya karena hanya pandai membual.

Kekecewaan itulah yang kemudian mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap wakilnya melalui cara mereka masing-masing, baik dengan ancaman melompat dari menara maupun "aksi parade kolor." Padahal, seharusnya setiap aksi yang dilakukan oleh DPR mendapat dukungan dari rakyat, tapi kenyataannya justru *dipeunyek-nyek* (diolok) oleh rakyat. Dengan demikian, sudah saatnya anggota DPR Aceh bercermin

dan bertanya kepada diri sendiri sebelum bertindak, apakah tindakannya tersebut merupakan aspirasi rakyat atau hanya sekadar hajat pribadi.

Untuk ke depan kita berharap agar anggota DPR Aceh benar-benar membawa aspirasi rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita juga berharap agar anggota DPR Aceh bersikap dewasa dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat, jangan sedikit-sedikit ancam mundur. Sikap "kekanak-kanakan" semacam ini justru akan membuat Aceh larut dalam kemunduran dan akan jauh tertinggal dari daerah lain. Lagi pula yang benar-benar konsisten mundur itu cuma *keuroek-roek* (undur-undur). Dia memang diciptakan oleh Tuhan untuk mundur. Dengan demikian, tidak sepatutnya DPR Aceh menggunakan politik *keuroek-roek* yang hanya akan merugikan masyarakat Aceh. (***AT, 19 Maret 2017***).

National Of Pruet

Di masa konflik, nama Zakaria Saman telah menjadi semacam legenda bagi masyarakat Aceh. Namanya begitu populer masa itu, tetapi tidak semua orang Aceh mengenal rupa dan wujudnya. Jabatannya sebagai Menteri Pertahanan GAM juga turut mengangkat namanya sebagai sosok yang paling ditakuti dan dicari oleh tentara Republik. Di masa perang, Zakaria Saman juga dikenal sebagai sosok "sangar" dan misterius.

Pada masa pra damai, publik hanya mengenal Zakaria Saman sebagai petinggi GAM yang serius, keras dan tegas. Tentunya penggambaran Zakaria Saman serupa ini sangat cocok dengan kondisi perang yang sedang berkecamuk kala itu. Adapun sisi lain Zakaria Saman baru menyeruak dan diketahui publik pada masa pasca damai, ketika perang telah berhenti. Di masa perang, sisi-sisi lain Zakaria Saman hanya diketahui secara terbatas oleh internal GAM, sebagai pihak yang selalu dekat dengan beliau.

Salah satu sisi lain Zakaria Saman yang "bertus" (meminjam istilah Guree Hasan Basri M. Nur) adalah sifatnya yang humoris, suka bercanda dan gemar melawak. Sifat inilah yang kemudian

mengubah potret seorang Zakaria Saman yang dulunya dikenal sangar dan bahkan menakutkan menjadi sosok yang ceria. Statemen-statemen bernada humoris *made in* Zakaria Saman terus bermunculan dan menjadi topik perbincangan di kedai-kedai kopi – yang merupakan tempat berkumpulnya para "intelektual terlantar."

Pada masa kampanye lalu, humor politik ala Zakaria Saman menemukan momentumnya, di mana beberapa koran lokal mengutip mentah-mentah statemen Zakaria Saman dalam bahasa Aceh. Sontak saja, statemen serius tapi humoris yang keluar dari mulut Zakaria Saman disambut dengan gelak tawa oleh mayoritas masyarakat Aceh. Sebelum kehadiran Zakaria Saman dalam pentas politik praktis, irama politik Aceh kala itu terbilang cukup tegang dan menakutkan. Tapi Zakaria Saman berhasil mengubah berbagai ketegangan dalam politik dengan candaan khasnya sehingga wajah muram masyarakat berubah menjadi tawa.

Tidak hanya gaya humoris, Zakaria Saman juga terkenal dengan konsistensinya untuk menggunakan bahasa Aceh dalam setiap perbincangan. Bukan hanya dalam diskusi-diskusi internal dan terbatas, Zakaria Saman juga tidak segan-segan menggunakan bahasa *indatunya* dalam forum-forum resmi sekali pun. Hal ini telah kita saksikan sendiri dalam debat kandidat calon gubernur beberapa waktu lalu yang ditayangkan secara nasional. Zakaria Saman telah berhasil mengampanyekan kosa kata Aceh sehingga ia bertaburan di udara. Kata-kata *Janeng* misalnya, yang telah dilupakan oleh sebagian masyarakat Aceh pun kembali populer berkat Zakaria Saman.

Penggunaan bahasa yang *lagee na ju* dan *crah beukah* juga menjadi ciri khas tersendiri bagi Zakaria Saman. Dengan demikian, tentu tidak berlebihan jika kita menyebut bahwa komunikasi ala Zakaria Saman-lah yang paling mudah dipahami oleh *jumhur* masyarakat Aceh. Sebagaimana telah kita lihat bahwa penggunaan istilah-istilah asing dalam komunikasi, meskipun terkesan intelek, tapi pada kenyataannya istilah-istilah itu cenderung digunakan sebagai sebuah strategi untuk menipu pendengar. Penggunaan istilah asing bernuansa akademis dalam komunikasi cenderung membigungkan audien. Dan kehadiran Zakaria Saman telah berhasil menawarkan pola komunikasi baru yang lebih mencerahkan, sehingga dapatlah kita menyebut Zakaria Saman sebagai salah satu pintu masuk untuk memahami karakter masyarakat Aceh.

Kemarin, sebagaimana dilansir Serambi Indonesia (25/04/17), Zakaria Saman kembali hadir dengan kesyahduannya melalui komentar yang tetap humoris. "*Ureung geutanyoe hana pike national interest, dipike keu droe jih sagai, yang dipike national of pruet*." Dalam komentar Zakaria Saman kali ini kita kembali menemukan kosa kata baru yang cukup menohok, "*National of pruet*."

Statemen Zakaria Saman kali ini muncul dalam rangka menyikapi rencana Gubernur terpilih, Irwandi Yusuf yang berkeinginan menyatukan partai-partai politik guna membentuk koalisi baru dalam DPR Aceh. Rencana ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya mempermulus jalan untuk bersama-sama membangun Aceh dalam pemerintahan Irwandi-Nova. Meskipun Zakaria Saman mendukung rencana ini, namun ia juga meragukan jika nantiya upaya itu akan berjalan sesuai harapan.

Salah satu sebab keraguan Zakaria Saman adalah kecenderungan "*national of pruet*" yang ada di benak sebagian orang Aceh (mungkin DPRA?). Sebenarnya istilah "*national of pruet*" yang disandingkan dengan "*national interest*" kurang tepat. Istilah *national interest* bermakna kepentingan nasional, sedangkan *national pruet* justru bermakna perut nasional. Seharusnya Zakaria Saman menggunakan istilah *pruet interest* alias kepentingan perut. Namun demikian, Zakaria Saman dengan *cagok* khasnya tetap memiliki keunikan tersendiri sehingga istilah *national of pruet* tetap *keren* di telinga masyarakat.

Penyakit *national of pruet* sebagaimana disebut Zakaria Saman tidak hanya mewabah di Aceh, tetapi penyakit ini telah menjadi semacam epidemi di tingkat nasional. Munculnya perilaku korupsi misalnya, baik di tingkat nasional maupun daerah salah satunya disebabkan oleh penyakit *national of pruet*. Lahirnya aksi perampokan, pembunuhan dan bahkan berbagai rupa teror di pentas politik juga disebabkan oleh *national of pruet*. Aksi pungli, baik yang dilakukan oleh preman ilegal maupun preman-preman yang dilindungi konstitusi juga bagian dari penyakit *national of pruet*. Demikian pula dengan sogok-menyogok dalam segala tingkatnya juga disebabkan oleh *national of pruet*.

National of pruet adalah penyakit berbahaya yang bisa merusak akal sehat, mematikan nalar dan membutakan hati. Penyakit ini tidak hanya menyerang politisi dan pejabat negara. Tetapi ia bisa menyasar siapa saja, tidak hanya si jahil, si *'alim* pun bisa mengidap penyakit serupa dalam berbagai variannya. Jika si jahil mengidap *national of pruet* karena

kejahilannya (ketidaktahuan), maka si *'alim* justru disebabkan oleh kecerdasannya.

Sebagai insan beriman yang lahir di *tanoh auliya* sudah semestinya kita melakukan taubat massal guna mendapat kesembuhan dari penyakit *national of pruet* sebagaimana dikhawatirkan oleh Zakaria Saman. *National of pruet* adalah virus yang dapat merusak keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan bahkan agama. (***AT, 25 April 2017***).

Para Pemuja dan Akal Yang Tertidur

Ahbib habiibaka haunan ma 'asa an yakuuna baghiidhaka yauman ma, wabghidh baghidhaka haunan ma 'asa an yakuuna habiibaka yauman ma (cintailah kekasihmu sekadarnya saja, bisa jadi orang yang kamu cintai itu akan menjadi orang yang kamu benci di kemudian hari. Dan bencilah musuhmu sekadarnya juga, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai).

Kata-kata ini sudah sangat populer dan dihafal oleh sebagian kita. Sebagian kalangan menyandarkan perkataan ini kepada Ali bin Abi Thalib ra, dan sebagian lainnya menyandarkan kepada Nabi Saw. Dan Syaikh Al-Albani menyatakan riwayat ini sahih (dalam *Sahih Al-Jami'i*).

Meskipun kutipan di atas tampak biasa saja, tapi ia memiliki makna yang mendalam. Dan makna ini hanya akan ditemukan oleh mereka-mereka yang akalnya masih terjaga. Ada pun bagi insan-insan yang akalnya telah tertidur, ia tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali teks-teks yang mati.

Cinta dan benci adalah dua sisi rasa yang datang silih berganti. Ketika cinta berlalu, benci pun menghampiri. Demikian pula sebaliknya, ketika benci berakhir, cinta pun menyapa. Dalam kondisi tertentu, dua rasa ini pun saling bercumbu sehingga cinta dan benci bercampuraduk. Dalam dunia remaja, mungkin kita sering mengalami perasaan cinta tapi benci kepada pujaan hati. Rasa yang datang bersamaan ini membuat para remaja menjadi galau, dan tidak sedikit pula yang justru kacau balau.

Karena cinta dan benci itu persoalan rasa, maka berlebih-lebihan akan berbuah petaka. Cinta yang berlebihan akan menidurkan akal sehingga lahirlah berbagai perangai lebay. Demikian pula sebaliknya, benci yang tak terperi pun akan menutup hati sehingga muncullah dendam kesumat. Oleh sebab itu, kedua rasa ini (cinta dan benci) harus mampu dikawal agar ia tidak meledak-ledak. "Sedang-sedang saja" kata Vety Vera, dan "Jangan terlalu" kata Roma Irama.

Cinta dan benci bukan hanya milik kalangan remaja, tetapi ia adalah milik seluruh manusia. Jika ada manusia yang tidak memiliki rasa cinta dan benci, maka ia bukan manusia, tapi hanya patung yang berwujud manusia.

Para Pemuja

Dalam dunia politik, rasa cinta berlebihan akan melahirkan para pemuja dan dalam kondisi ekstrem bisa menciptakan penjilat. Sebaliknya, rasa benci dalam pentas politik akan melahirkan para pendengki dan dalam kondisi ekstrem akan menciptakan provokator.

Sebagai contoh, dalam pentas Pigub DKI beberapa waktu lalu kita disuguhkan dengan berbagai perilaku unik para tim sukses. Tim sukses Ahok misalnya, ada yang berani mempertaruhkan "kaleng susunya" demi kecintaannya kepada Ahok. Dia tidak sadar bahwa rasa cinta berlebihan tersebut telah menidurkan akalnya. Demikian pula dengan sikap sebagian pendukung Anis yang larut dalam euforia pasca kalahnya Ahok, seolah-olah surga sudah di depan mata. Dan akibat kebencian yang memuncak terhadap Ahok, muncullah meme-meme kocak yang sepintas tampak estetis, tapi tak etis.

Para pemuja Ahok dikabarkan ada yang stres akibat kekalahan yang tak pernah terduga. Demikian pula dengan segelintir pemuja Anis yang larut dalam kekaguman tiada henti. Kekaguman dan kecintaan berlebihan terhadap sosok tertentu pada akhirnya akan berbuah kecewa. Seiring perjalanan waktu, kekecewaan akan mengakibatkan si pemuja itu meratap. Dan ratapan ini akan berujung pada caci maki. Harapan yang dahulunya dipancang menjulang telah berganti dengan wajah penyesalan. Akhirnya, bunga-bunga cinta pun berguguran, dan api kebencian pun menyala-nyala.

Dalam dunia remaja, jika cinta dikhianati maka benci pun menusuk hati. Demikian pula halnya dalam politik. Hari ini para pemuja Anis masih bisa bersorak-sorai menepuk dada karena kemenangan telah diraih. Tapi nanti, seiring perjalanan waktu, bukan tidak mungkin sorak-sorai itu akan berubah menjadi caci maki ketika Anis gagal memenuhi harapan para pemuja.

Hari ini, sebagian kita (khususnya warga Jakarta) dengan penuh semangat mencela Ahok akibat tindak-tanduknya selama menjabat Gubernur DKI. Tapi bukan tidak mungkin,

suatu masa nanti, para "pencela" justru akan menganggap Ahok sebagai tokoh legendaris yang sukses membangun Jakarta. Bukan tidak mungkin, pada suatu ketika nanti, Ahok akan menjadi Anis, dan Anis menjadi Ahok.

Dalam konteks Aceh, kita juga sudah cukup berpengalaman melihat fenomena cinta yang berubah menjadi benci. Dulu, pada awal-awal kemunculannya, Partai Aceh begitu dicintai oleh sebagian besar masyarakat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan mereka dalam Pileg 2009 dan Pilgub 2012. Tapi, kemudian apa yang terjadi? Ketika harapan yang diimpikan tidak kesampaian, cinta pun meredup – untuk tidak menyebut padam. Buktinya, hasil yang dicapai Partai Aceh pada Pileg 2014 tidak semeriah hasil Pileg 2009. Demikian pula dengan kemenangan pada Pilgub 2012 telah berganti dengan kekalahan pada Pilgub 2017.

Kecintaan dalam politik adalah kecintaan semu yang selalu berganti wajah. Lihat saja berapa banyak para pendukung Irwandi pada 2012 yang kemudian melompat dalam kubu Muzakir Manaf pada 2017. Sebaliknya, berapa banyak para pendukung Muzakir Manaf yang juga berhijrah dalam kubu Irwandi. Dan bahkan ada pula yang kerjanya melompat-lompat sehingga tiada hari tanpa lompat.

Hari ini, Irwandi Yusuf telah memenangkan pertarungan dan sebentar lagi akan menduduki "kursi raja." Semoga saja tidak lahir para pemuja yang akalnya tertidur, karena menidurkan akal sama artinya dengan mengundang kecewa. Kita juga berharap tidak ada lagi yang "mencaci" Partai Aceh dengan kebencian yang menyala-menyala, karena kebencian itu tidak pernah kekal. Pertarungan telah selesai. Yakinlah bahwa cinta dan benci akan datang silih berganti. (***AT, 27 April 2017***).

Saudara Kembar "Berebut Tahta" (PA vs PNA)

Sebelum terlalu jauh, penting ditegaskan bahwa tulisan ini sama sekali tidak bermaksud mempertentangkan Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) yang *notabene* berasal dari satu "kandang." Tapi hanya sebuah upaya menjenguk masa lalu demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Para pendiri kedua partai ini (PA dan PNA) sama-sama berasal dari kombatan dan juga sipil Gerakan Aceh Merdeka. Sebagaimana telah kita saksikan, pasca ditandatanganinya MoU Helsinky, GAM telah meninggalkan pola perlawanan bersenjata dan beralih ke panggung politik.

Berdasarkan poin 1.2.1 MoU Helsinky, Pemerintah RI dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatangan nota kesepahaman tersebut (15 Agustus 2005) dituntut untuk memfasilitasi pembentukan partai-partai politik lokal di Aceh. Kemudian, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang disahkan pada 1 Agustus 2006, dalam Bab XI pasal 75 ayat 1 disebutkan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.

Salah satu tujuan umum pembentukan partai politik lokal sebagaimana diatur dalam pasal 78 UUPA adalah sebagai media untuk mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI. Dalam PP Nomor 20 Tahun 2007, partai politik lokal didefinisikan sebagai sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh.

Meskipun segudang aturan telah ditetapkan sebagaimana terurai di atas, namun pada periode awal pembentukan partai politik lokal di Aceh sempat dihiasi dengan berbagai ketegangan. Pada saat itu, terdapat keyakinan di benak segelintir oknum Partai Aceh bahwa hanya Partai Acehlah yang sesuai dengan MoU Helsinky, sedangkan partai lokal lainnya tidak sesuai dengan MoU Helsinky sehingga mereka harus bersabar ketika dilabel sebagai "pengkhianat." Padahal, tidak ada satu lembar aturan pun kala itu yang melarang pembentukan partai politik lokal bagi masyarakat non-GAM. Sebaliknya undang-undang justru memberi peluang kepada seluruh warga Aceh untuk mendirikan partai politik lokal.

Di tengah ketegangan dan upaya monopoli penafsiran MoU Helsinky kala itu, lahirlah beberapa partai politik lokal di Aceh; Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Bersatu Aceh (PBA) dan Partai Aceh (PA). Pasca kelahiran partai-partai tersebut, sebagaimana telah kita lihat, khususnya dalam pileg 2009 muncullah berbagai bentuk kekerasan dan teror di panggung politik Aceh. Dan pertarungan politik kala itu dimenangkan oleh Partai Aceh dengan perolehan kursi yang cukup fantastis. Sementara

beberapa partai lokal lainnya harus rela gulung tikar karena gagal mendapatkan suara.

Pada pileg 2014, kekerasan serupa juga masih mewarnai perjalanan politik di Aceh. Saat itu dua kekuatan besar, PA dan PNA terlibat aktif dalam "kegaduhan" politik. Akhirnya berbagai insiden pun terus bermunculan, mulai dari penurunan bendera parpol, pemukulan terhadap lawan politik, pembakaran dan perusakan alat peraga kampanye. Aksi teror meneror pun datang silih berganti. "Konflik" antara PA dan PNA waktu itu terus meluas di lapisan bawah sehingga mendapat tanggapan serius dari Kapolda Aceh yang kemudian melaporkan kepada Kapolri bahwa akan ada potensi konflik antara PA dan PNA. Menyikapi ketegangan PA dan PNA yang terus memanas pada 2014, Pangdam Iskandar Muda juga sempat membuat imbauan kepada PA dan PNA agar tetap menjaga perdamaian.

Sebelumnya, "pertarungan" kedua tokoh besar, Muzakkir Manaf dan Irwandi Yusuf juga sempat menemani perjalanan demokrasi Aceh pada Pilgub 2012, di mana ketegangan arus bawah (pendukung) juga cukup mengkhawatirkan. Dan pertarungan "merebut kuasa" saat itu berhasil dimenangkan oleh kubu Muzakkir Manaf yang didukung oleh kekuatan politik Partai Aceh. Sedangkan Irwandi Yusuf harus rela menerima kekalahan dari saudara ideologisnya, Muzakkir Manaf.

Pada Pilgub 2017, dua anak didik Hasan Tiro ini (Muzakkir Manaf dan Irwandi Yusuf) kembali berhadapan dan saling berlomba meraih simpati publik. Meskipun kedua tokoh ini tampak harmonis di depan publik, tapi gesekan antar pendukung di arus bawah terus berlangsung dan tak dapat dihalau. Dan akhirnya, pertarungan berhasil dimenangkan oleh Irwandi Yusuf yang kemudian disambut dengan gugatan dari

pihak Partai Aceh. Dalam perkembangan selanjutnya seiring gagalnya gugatan, Muzakkir Manaf dan Partai Aceh harus rela menelan pil pahit kekalahan.

Meskipun Muzakkir Manaf kalah dalam pertarungan politik Pilgub 2017, namun GAM tetap memperoleh kemenangan dengan terpilihnya Irwandi Yusuf sebagai Gubernur periode mendatang. Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh adalah dua saudara kembar yang dilahirkan dari rahim perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Muzakir Manaf dan Irwandi Yusuf adalah anak-anak ideologis Hasan Tiro.

Dengan demikian, tentu sangat disayangkan jika kedua saudara kembar ini abadi dalam pertentangan hanya karena perebutan tahta – sesuatu yang tidak pernah diajarkan Hasan Tiro. Sebagai "pewaris Hasan Tiro," Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh harus mampu bersatu membangun Aceh yang benar-benar beradab. Warisan-warisan kolonial harus segera ditanggalkan demi tercapainya cita-cita perjuangan yang pernah digagas di rimba Tuhan 41 tahun lalu.

Semoga saja Kongres PNA I yang digelar di Banda Aceh pada 1-2 Mei 2017 dapat menjadi awal terbangunnya harmonisasi PA-PNA demi Aceh yang gemilang. Sejalan dengan itu berbagai bentuk pertentangan dan label-label murahan semisal "pengkhianat" dan "*lhab darah*" harus dikubur dalam-dalam. Sudah saatnya kedua saudara kembar (PA dan PNA) kembali bergandeng tangan dan tidak lagi bersangar muka.

Partai Nasional Aceh sesuai namanya, meskipun berjuang di lingkup lokal, tapi harus mampu memosisikandiri secara tepat di panggung nasional agar terbangun hubungan yang

elegan dengan Jakarta demi kebaikan Aceh lima tahun ke depan. Akhirnya selamat berkongres! (***AT, 30 April 2017*).**

Jangan Biarkan Tikus Bunuh Diri

Dulu, pada sekira tahun 2013, saya sempat membaca sebuah status menarik dari akun *facebook* yang menamainya dirinya sebagai "Status Suka-Suka Gue." Si pemilik akun menulis: "Ribuan tikus terindikasi bunuh diri, diduga tak tahan selalu disamakan dengan koruptor." Pada 2016 saya kembali menemukan sebuah twitan sejenis dari akun twitter @ Liputan9. Dan, kemarin (29/04/17), ketika memantau beranda *facebook*, status serupa kembali muncul. Kali ini diposting oleh kakanda kita, Ampuh Devayan dengan tampilan yang lebih kreatif: "*Breaking News*: Seekor tikus ditemukan gantung diri. Diduga ia nekat mengakhiri hidupnya karena malu disamakan dengan koruptor."

Setelah membaca postingan Ampuh Devayan, tiba-tiba saja saya merasa tertarik untuk mengulasnya lebih jauh karena ini adalah persoalan moral yang mesti ditanggapi serius. Terkait kesamaan koruptor dan tikus, di antaranya telah diulas oleh *hariansobek.com* dengan penjelasan yang cukup menarik, yaitu: sama-sama suka nyolong, keduanya sama-sama susah ditangkap, keduanya hidup membaur dalam masyarakat dan keduanya bermuka busuk. Penjelasan *hariansobek.com* ini

sudah cukup memadai guna menemukan benang merah antara koruptor dan tikus.

Memang sudah menjadi semacam tradisi bagi kita untuk menyamakan tingkah laku tercela dan perilaku buruk dengan menggunakan simbol binatang. Kebodohan sering diidentikkan dengan monyet, penjilat diserupakan dengan anjing, kotor dihubungkan dengan babi dan pencuri disamakan dengan tikus. Beberapa waktu lalu, saya juga sempat menyebut beberapa perilaku anak manusia yang minus akal dengan simbol lembu. Tentunya analogi serupa ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Bahkan dalam Alquran, Allah menyimbolkan orang Yahudi dengan keledai. Dalam surat Al-Jumu'ah misalnya: "*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka (kitab suci) Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar dan tebal. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah...*" Sementara dalam surat Luqman ayat 19, Allah berkalam bahwa "*Seburuk-buruk suara adalah suara keledai*."

Memang sepintas terlihat tidak adil ketika setiap keburukan dan kelemahan disimbolkan dengan binatang, karena kita (manusia) dan mereka (binatang) adalah sama-sama makhluk Allah. Pada titik ini, kita terkesan bersikap diskriminatif terhadap binatang. Tapi, sebelum membuat kesimpulan, baiknya kita memahami perbedaan manusia dan binatang. Saya sebut dua saja. *Pertama*, manusia diberi akal sedangkan binatang tidak, sehingga ia memiliki kemerdekaan penuh dalam berekspresi. *Kedua,* manusia memiliki masa depan (akhirat), sedangkan binatang tidak punya masa depan dan tidak pernah dihisab amalannya di akhirat kelak. Dan tampaknya, kita juga tidak akan dituntut karena menjadikan

binatang sebagai simbol kejahilan, asalkan dilakukan dengan adil.

Tikus dan Koruptor

Seperti disinggung di awal, bahwa dalam peradaban kita saat ini, perilaku koruptif sering diidentikkan dengan sifat tikus yang suka nyolong, bermuka busuk, hidup di tengah masyarakat dan susah ditangkap. Akibat perilaku koruptif yang terus merajalela di seluruh pelosok negeri, akhirnya muncullah berbagai komentar satire seperti ditulis Ampuh Devayan. Terlepas siapa orang pertama yang membuat cerita unik ini, tapi saya melihat ada pesan moral yang dititip dari cerita tersebut.

Sampai dengan detik ini (mungkin karena kurang membaca) saya belum pernah menemukan satu hikayat pun yang menyebut seorang koruptor bunuh diri karena disamakan dengan tikus. Dan amat jarang pula seorang koruptor menangis atau pun berwajah muram ketika predikat koruptor disandangkan di pundaknya. Sebaliknya, mereka justru semakin murah senyum sambil melambaikan tangan layaknya pahlawan besar yang baru saja mengalahkan musuh. Amat sedikit pula koruptor yang bermuka busuk seperti halnya tikus. Para koruptor di negeri kita umumnya berwajah rupawan dan bahkan menggoda.

Tapi, kenapa pula para tikus memilih bunuh diri karena disamakan dengan koruptor? Satu-satunya tawaran jawaban yang mendekati kebenaran adalah kerusakan moral para koruptor yang semakin dahsyat. Tikus mencuri hanya untuk sekadar mengisi perut agar ia tidak mati kelaparan. Sedangkan

koruptor yang menguras uang negara bermilyar-milyar itu bukanlah si "busung lapar," tetapi si "buncit berengsek" yang serakah. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan tikus-tikus *hakiki* merasa malu dan terhina disamakan dengan koruptor.

Untuk menyelamatkan tikus-tikus *hakiki* dari kematian, maka sudah saatnya perumpamaan "koruptor seperti tikus" diganti dengan "tikus seperti koruptor." Artinya, koruptor lebih jahat dari tikus sehingga ia lebih layak dijadikan sebagai simbol pencuri. Jika sekarang berkembang cerita satire tentang tikus gantung diri karena disamakan dengan koruptor, maka ke depan kita berharap ada koruptor kesatria yang benar-benar gantung diri karena disamakan dengan tikus. (***AT, 30 April 2017***).

Ketika Muallem Harus Mengalah

Baru-baru ini netizen Aceh dihebohkan dengan beredarnya sebuah video berdurasi 1 menit 18 detik yang diposting seorang netizen di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil CRV putih berplat BK 1603 ET yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (Muallem). Mobil tersebut dipaksa oleh masyarakat setempat untuk "balik kanan" karena berlawanan arah.

Seperti dikabarkan AceHTrend, rombongan Wakil Gubernur yang datang dari arah Banda Aceh "memaksa" masuk melalui jalur berlawanan yang semestinya hanya dilewati oleh kendaraan dari arah Medan. Untuk kendaraan yang datang dari arah Banda Aceh sudah disediakan jalur lain melalui jalan pinggiran sungai Kuta Blang (*Krueng Tingkeum*). Tapi, jarak melalui jalan ini lumayan panjang dan berdebu, sehingga ramai pengendara yang mencoba menerobos jalur di simpang *Gle Kapai* yang lumayan pendek dan beraspal. Sebenarnya, jika diperhatikan, tidak hanya mobil Wagub yang memaksa "menerobos" arus berlawanan, tetapi sebagian pengendara lain juga melakukan hal yang sama.

"*Balek-balek, harus balek, hana wagub-wagub*" (putar-putar, walaupun Wagub tetap harus balik). Demikian terdengar teriakan sebagian masyarakat yang mencoba mengadang mobil yang ditumpangi Muzakkir Manaf, mantan Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka yang sempat menjadi legenda di masa konflik.

Akhirnya, tidak ada pilihan lain bagi pria berpostur tinggi dan berjambang lebat itu kecuali memutar haluan. Karismanya sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) ternyata tidak mampu membuat "amarah" warga meredam. Sebaliknya, kekesalan warga justru semakin memuncak ketika mengetahui yang melanggar aturan tersebut adalah orang nomor dua di Aceh, yang semestinya memberi teladan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Untuk itu, salam tabik kita berikan kepada masyarakat Kuta Blang yang tidak pandang bulu dalam menerapkan aturan. Jika yang "berbulu" saja dihardik, apalagi yang tak berbulu.

Namun, di sebalik itu, kita juga patut mengacungi jempol kepada Muallem yang sigap dalam merespons amarah publik dengan memilih berputar haluan, meskipun (mungkin) dia merasa "dipermalukan" oleh rakyatnya sendiri. Dalam video tersebut juga tidak terlihat Muallem turun untuk menenangkan massa, padahal dia cukup ahli dalam mengendalikan pasukan bersenjata (AGAM) ketika konflik berkecamuk.

Gelar Muallem yang disandangnya pun bukan gelar "murahan," tapi sebuah *maqam* terhormat dalam lingkungan GAM yang mungkin sepadan dengan gelar Mursyid dalam tarikat-tarikat sufi. Tapi, di sini Muallem justru menitip pelajaran berharga kepada masyarakat Aceh, bahwa arus massa tidak bisa dilawan, meskipun kekuasaan ada di tangan. Artinya,

Muallem lebih memilih untuk mengalah daripada bertegang urat saraf dengan rakyatnya sendiri. Untuk itu, tabik pula untuk Muallem.

Ada dua pelajaran penting yang dapat dipetik dari kejadian ini. *Pertama,* ketegasan rakyat dalam menjaga kenyamanan umum sehingga seorang pemimpin pun harus tunduk pada aturan yang sudah disepakati. *Kedua,* kecerdasan pemimpin yang cepat sadar akan kesalahannya dan kemampuannya dalam memahami kehendak rakyat. Jika dua hal ini bisa dijaga dengan konsisten, maka hubungan rakyat dan pemimpin akan tetap harmonis.

Selain itu, dalam video singkat tersebut, saya dan mungkin kita semua, juga sempat memperhatikan plat mobil yang ditumpangi Muallem. Mobil berwarna putih itu berplat Sumatera Utara (BK). Tentunya hal ini sangat kita sayangkan dan bahkan patut ditangisi ketika seorang Wakil Gubernur justru tidak memberikan teladan kepada rakyatnya. Di tengah aksi "diskriminasi BL" yang dilakukan oleh oknum polisi di Sumatera Utara, Wagub Aceh yang seharusnya marah justru terkesan "bangga" menggunakan plat BK.

Apa yang dilakukan oleh Wagub Aceh ini juga tampak kontradiktif dengan kebijakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang telah melakukan pemutihan biaya mutasi plat non BL ke BL dengan tujuan menambah penghasilan pajak yang tentunya akan berdampak pada kelanjutan pembangunan di Aceh. Seharusnya, Wagub selaku orang nomor dua di Aceh menjadi pelopor dalam keberpihakan pajak untuk Aceh, bukan justru menjadi "promotor" pajak untuk Sumatera Utara.

Namun demikian, kita mencoba berhusnuzan saja. Boleh jadi mobil yang ditumpangi Wagub tersebut bukan miliknya, tapi hanya tumpangan sementara milik sejawat yang tentunya tidak mungkin ditolak. (***AT, 04 Mei 2017***).

Ketika Mata Menjadi Hakim

Dalam KBBI, kata 'melihat' dimaknai sebagai sebuah tindakan menggunakan mata untuk memandang suatu objek. Sementara kata 'memperhatikan' diartikan sebagai kegiatan melihat dalam jangka waktu lama dan teliti. Dengan demikian, melihat dan memperhatikan selain memiliki persamaan, juga terdapat perbedaan. Kegiatan melihat hanya terjadi sepintas, sedangkan memperhatikan membutuhkan waktu lama dan tidak hanya melibatkan mata, tetapi juga pikiran, hati, dan kejelian.

Dalam keseharian, kita cenderung hanya melihat dan jarang memperhatikan. Hal ini terbilang wajar sebab aksi melihat tidak membutuhkan penggunaan otak (pikiran). Di samping itu, banyaknya objek juga menyebabkan kita cenderung hanya melihat, atau bahkan cuma melihat-lihat (santai). Sementara aksi memperhatikan hanya kita lakukan dalam kondisi tertentu, ketika terdapat objek yang benar-benar penting.

Sebagai contoh, ketika ada seekor kucing melintas, biasanya kita hanya melihat dan tanpa perlu proses perenungan kita akan segera tahu bahwa itu adalah kucing. Kondisinya akan berbeda

ketika sepasang kucing bersenggama di hadapan kita. Tentunya aksi melihat tidak *meumada,* sehingga kita pun "terpaksa" memperhatikan film "Si Unyil" yang dipraktikkan si kucing. Perbedaan sikap ini disebabkan oleh penting tidaknya objek tersebut sehingga berbeda pula cara menyikapinya. Kucing berjalan adalah kejadian biasa, sementara film "Si Unyil" yang dipraktikkankucing adalah sesuatu yang menarik.

Sebagai insan beriman yang telah dianugerahi akal, seharusnya kita tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga harus rajin memperhatikan. Karena aksi melihat yang cuma menggunakan mata cenderung menipu. Hakikat sesuatu objek tidak akan terjawab hanya dengan praktik melihat.

Sebagai contoh, sepasang kekasih yang duduk di pinggir danau dengan posisi saling membelakangi dan diam tanpa bicara akan kita tafsirkan sebagai sebuah kondisi ketidakharmonisan. Dengan hanya melihat sepintas, kita bisa saja berkesimpulan bahwa mereka lagi mogok bicara karena salah satunya ketahuan selingkuh. Tapi, kesimpulan tersebut akan berubah jika kita memperhatikan gerak-gerik mereka secara utuh. Posisi saling membelakangi yang mereka lakoni justru memiliki kesyahduan tersendiri, di mana sepasang kekasih itu bisa secara bebas membangun khayal tanpa harus saling memandang. Karena cinta yang telah memuncak membuat kita tak kuasa memandang.

Dengan hanya bermodal bola mata akan membuat kita cenderung menjadi hakim terhadap orang lain. Tanpa pikir panjang kita telah terbiasa menghukumi orang lain dengan begitu sadis. Pandangan-pandangan liar minus akal telah membuat kita terperosok pada kesimpulan keliru. Kita terlalu cepat memainkan palu sehingga fitnah pun bertaburan. Dan

kita terlalu mudah mengukur badan orang lain dengan pakaian kita.

Baru-baru ini, beredar sebuah video di alam maya yang diunggah *acehvideo.tv* (03/06/17). Dalam video dimaksud tampak Muallem (Muzakkir Manaf) tidak duduk bersila seperti halnya jamaah lain pada saat menghadiri buka puasa bersama Panglima TNI, Gatot Nurmantyo di Makodam Iskandar Muda. Posisi duduk "santai" yang dipraktikkanMuallem ini kemudian ditanggapi secara kontroversial oleh para netizen di media sosial.

Ada sebagian netizen yang tanpa penelitian, langsung memvonis bahwa Muallem telah bersikap tidak sopan dengan posisi duduk *wa tu oet* (memeluk lutut). Kita paham bahwa dalam pandangan mainstream, posisi duduk serupa itu memang tak layak, apalagi di hadapan tamu-tamu agung. Namun demikian, tentu sangat tidak pantas jika kita langsung menancapkan palu di jidat Muallem dengan label tidak sopan, tidak tahu tata karma, gaya preman, dll.

Seorang teman yang juga mantan pasukan tempur GAM di masa konflik menceritakan kepada saya bahwa Muallem pernah tertembak di paha bagian atas (*lungkik pha*). Kondisi ini membuat Muallem tidak bisa duduk bersila dalam posisi lama sehingga ia harus berganti-ganti posisi agar rasa sakit tidak muncul. Cerita-cerita serupa ini tentunya tidak akan kita temukan jika hanya mengandalkan sepasang bola mata. Sebab itu berhentilah menjadi hakim yang memainkan palu secara membabi buta.

Sudah saatnya dendam-dendam politik di masa Pilkada itu dibuang jauh-jauh. Sudah waktunya *akai burek katek* dikubur

dalam-dalam. Adalah aneh, ketika Muallem sedang berjaya, ia dipuja-puji, tapi ketika ia terjatuh justru dicaci maki. Sampai-sampai posisi duduk pun jadi viral. Mari perbaiki kewarasan! (***AT, 04 Juni 2017***).

The Power of Singklet Gaki

Mungkin tidak berlebihan jika ada segelintir pihak yang menuding kita sebagai bangsa peniru. Kita boleh saja tidak sepakat dengan tudingan ini, tapi hampir setiap waktu kita berhadapan dengan realitas *teumiree* (meniru). Contoh paling aktual mungkin dapat kita saksikan sendiri dalam dunia musik Aceh. Dengan pengecualian beberapa kelompok musik etnik, hampir sebagian besar lagu-lagu Aceh merupakan *copy paste* dari musik India dengan hanya mengubah syair dalam bahasa Aceh. Sehingga tidak heran jika seorang penyanyi bisa mengeluarkan empat sampai lima album dalam setahun.

Perilaku *teumiree* tentu tidak hanya terjadi dalam dunia musik Aceh, tetapi juga merambah dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat kita. Sepintas, memang tidak ada yang salah dengan kebiasaan *teumiree*, apalagi jika yang *ditiree* (ditiru) tersebut sesuatu yang baik. Tetapi jika dikaji "beberapa pintas," tradisi ini justru dapat menghilangkan identitas – karena tanpa sadar kita telah menjelma menjadi sosok yang lain – yang pada hakikatnya bukan lagi kita. Dan juga menghalangi kreativitas. Padahal kita telah diberikan akal sebagai penuntun agar tidak terjebak dalam kebiasaan *temire*.

Di Aceh sendiri berkembang sejenis *hadih maja*: *"hanjeut temire tapi meuguree*" (tidak boleh hanya meniru, tapi harus berguru). *Hadih maja* ini berisi pesan moral bahwa kebiasaan meniru secara membabi buta akan mengurung kita dalam ketidaktahuan yang abadi. Oleh sebab itu kita diarahkan untuk *meugure* agar kita memperolah sebuah pemahaman yang utuh.

HAMKA dalam salah satu tulisannya juga pernah berpesan agar kita tidak menjadi Pak Turut yang kerjanya hanya menurut (meniru), karena pada hakikatnya Pak Turut adalah binatang ternak. Perumpamaan binatang ternak yang digunakan HAMKA bermakna *jahil*, karena proses menurut dan meniru cenderung menepikan peran akal.

Secara psikologis, kekaguman seseorang terhadap idolanya dapat memunculkan sikap meniru guna memperteguh sebuah kekaguman. Dengan demikian, tidak heran ketika ada sebagian *da'i* yang sampai saat ini masih meniru gaya bicara Zainuddin MZ. Demikian pula dengan para tokoh muda yang "menjiplak" gaya orasi Soekarno. Bahkan dalam kondisi ekstrem, ada sebagian pengagum yang rela melakukan operasi plastik agar wajahnya mirip dengan sang Idola. "Kegilaan" ini di antaranya pernah dilakukan oleh seorang warga Filipina, Herbert Chavez yang menghabiskan dana puluhan juta agar wajahnya mirip Superman.

Baru-baru ini, jagad maya Aceh juga sempat dihebohkan dengan praktik *teumiree* yang dilakukan oleh sebagian *netizen* di media sosial. Dalam seminggu terakhir, banyak beredar foto dari beberapa *netizen* dengan gaya *singklet gaki* (menyilangkan kaki). Kononnya, "kelatahan massal" ini muncul dalam rangka meniru gaya yang dilakukan oleh Gubernur Aceh terpilih (Irwandi Yusuf) dan juga wakilnya (Nova Iriansyah).

Bahkan riwayat tentang *singklel gaki style* sempat diberitakan secara khusus oleh Serambi Indonesia (04/07/17). Dalam ulasannya, SI menyebut kehebohan *singklet gaki style* tersebut dipopulerkan oleh Irwandi Yusuf. Akhirnya, dengan bantuan peradaban maya, *singklet gaki style* menjadi viral dan ditiru oleh para pengagumnya. Seperti telah disinggung di atas bahwa fenomena ini adalah sebuah perwujudan kekaguman yang telah memuncak.

Aboe Bakar dkk (1985: 885) dalam Kamus Aceh-Indonesia menjelaskan bahwa kata *singklet* berarti sengkelit, membelit dan sengkarut. Dengan demikian, *singklet gaki* dapat dipahami sebagai perbuatan menyilangkan kaki. *Singklet gaki* ini sendiri tidak hanya dilakukan dalam posisi berdiri sebagaimana dipraktikkanIrwandi Yusuf, tetapi bisa pula dilakukan dalam posisi duduk.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, praktik *singklet gaki* sering dilakukan dalam keadaan santai atau sedang beristirahat. Kita tentu sering menyaksikan para penghuni kedai kopi yang menikmati suasana santai dengann *singklet gaki*.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang Aceh melihat *singklet gaki*? Pada umumnya aksi *singklet gaki* yang dilakukan di hadapan teman-teman sebaya tidak memunculkan kesan apa-apa dan cenderung dipandang biasa saja, apalagi jika kita sama-sama melakukan *singklet gaki bareng*.

Kondisi ini akan berbeda ketika aksi *singklet gaki* dipraktikkan di hadapan orang tua atau pun orang-orang terhormat. Aksi *singklet gaki* di hadapan orang-orang dimaksud cenderung dianggap tidak sopan, apalagi jika dilakukan dalam

posisi duduk. Tidak jarang kita akan "diteror" jika melakukan *singklet gaki* di hadapan mereka. "*Kaputren gaki, bek hana adab*" (turunkan kaki, tidak ada adab), demikian kalimat "teror" yang sering kita dengar ketika aksi *singklet gaki* dilakukan di tempat yang salah.

Bahkan ketika masih kecil, sebagian kita sering diperingatkan agar tidak *singklet gaki* ketika tidur. Ada satu keyakinan dari sebagian masyarakat Aceh bahwa *singklet gaki* ketika tidur akan mengundang petaka. Di antara contoh yang sering diajukan, ketika bermimpi dikejar hantu, kita tidak bisa berlari karena *gaki meusingklet*.

Dari sini, dapat dipahami bahwa aksi *singklet gaki* cenderung multi tafsir. Terkadang *singklet gaki* sering disimbolkan sebagai sikap tenang. "*Bek le kasingklet gaki, teuntra kaditamong* (jangan santai lagi, tentara sudah masuk). Aktivitas *singklet gaki* juga sering dimaknai sebagai kondisi ketidakwaspadaan dan bermalas-malasan. "*Ujeun raya, pu lom kasingklet gaki, kakuet laju padee*" (hujan lebat, jangan lagi santai, cepat kumpulkan padi). Dan dalam kenyataan sosial masyarakat Aceh, *singklet gaki* cenderung dimaknai secara negatif dan sering dihubungkaitkan dengan nilai-nilai kesopanan.

Nah, terlepas dari *khilafiyah* pemaknaan, kira-kira ada apa di sebalik *the power of singklet gaki* Irwandi? Tentu ada ragam jawaban yang akan muncul ketika pertanyaan ini diajukan. Dan yang pasti, penafsiran terhadap *singklet gaki* ala Irwandi hanya diketahui oleh Irwandi sendiri, sementara kita hanya bisa menebak-nebak dengan ragam asumsi.

Kita hanya bisa berharap, pasca dilantik hari ini (05/07/17), Irwandi akan menggunakan segenap kekuatan dan keunikan yang dimilikinya untuk membangun Aceh lima tahun ke depan. Semoga saja gaya *singklet gaki* yang sempat menjadi viral tersebut hanya sekadar hiburan belaka dan bukan simbol "kemalasan" atau pun "sinyal" untuk bersantai ria. Dan jika merujuk kepada pola kepemimpinannya pada periode 2006-2011, maka hampir dapat disimpulkan bahwa Irwandi bukan tipikal *beu-o seu-iet* (malas-jinak?), tapi ia adalah seorang pekerja.

Dengan *gaki meusingklet,* Irwandi harus terus berpacu dengan waktu agar janji-janji di musim kampanye dapat terealisasi sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Dan sebaliknya, pasca pelantikan hari ini, para tim sukses justru harus meninggalkan aksi *singklet gaki* sebagai sebuah "*tabiat*" dan tidak lagi memosisikan diri sebagai benalu yang merusak harapan masyarakat Aceh. Selamat bertugas Kapitan! (***AT, 04 Juli 2017***).

"Duet Maut" dan Identitas Simbolik

Senior saya Risman Rachman, dalam catatan redaksi AceHTrend dengan tajuk "Style Aceh, *Dok Takhem*" mencoba mengulas tentang munculnya berbagai style pakaian yang digunakan kepala daerah di Aceh. Dari hasil pantauannya di media sosial, Risman menyebut ada tiga style yang sedang "viral" saat ini, yaitu *meusingklet gaki*, *meugantung gaki* dan *meusarong gaki*.

Dari ketiga style tersebut, hanya dua style yang sengaja dimunculkan dengan kesadaran penuh, yaitu *singklet gaki* ala Irwandi dan *sarong gaki* ala Waled Husaini. Adapun style *meugantung* gaki yang "menimpa" Aminullah Usman lebih layak disebut sebagai kecelakaan alias tragedi yang tentunya di luar kesadaran pelakunya. Dengan demikian, style *singklet gaki* dan *sarong gaki* patut dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Sebaliknya, style *meugantung* gaki justru masuk dalam kategori kelucuan yang tidak pada tempatnya, sehingga layak "ditangisi."

Dari tiga style ini, salah satunya sudah pernah saya ulas melalui kolom ini dengan tajuk "*The Power of Singklet Gaki*."

Mengingat fenomena ini muncul hampir bersamaan, maka dua bentuk style lainnya juga menarik untuk dikupas. Namun demikian, seperti disinggung di awal bahwa style *meugantung gaki* hanyalah sebuah tragedi sehingga mengulas style tersebut justru akan menambah "duka." Untuk itu, kita hanya akan mengulas style *meusarong gaki* yang dipopulerkan oleh Wabub Aceh Besar yang menurut riwayat berasal dari unsur dayah.

Lintasaceh.com menyebut pakaian yang dipakai oleh Wabub Aceh Besar tersebut sebagai pakaian Arab. Menurut lintasaceh.com, style baju gamis yang "dikawinkan" dengan jas resmi tersebut digunakan untuk mempertahankan budaya santri dayah di Aceh. Penggunaan style yang nampak "janggal" ini juga turut dibenarkan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Putih sebagai upaya menjaga dan melestarikan budaya santri.

Menyikapi beredarnya foto style pakaian Wabub Aceh Besar, para netizen di media sosial juga terlibat dalam diskusi serius yang tentunya berujung pada pro-kontra. Sebagian kalangan mengamini dan bahkan mengapresiasi style *meusarong gaki*, dan sebagian lainnya justru memandang model busana tersebut sebagai sesuatu yang janggal.

Bahkan ada sebagian kalangan yang mencoba mengaitkan pakaian Wabub Aceh Besar tersebut dengan pakaian tokoh-tokoh ulama di masa lalu yang tetap mempertahankan *ija kroeng* sebagai identitas kedayahannya. Dalam tinjauan historis – memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian politisi muslim di masa lampau, khususnya di Aceh tetap mempertahankan busana khasnya ketika berada di ruang politik atau pun dalam pertemuan resmi kenegaraan.

Teungku Hasan Krueng Kalee misalnya, beliau tetap mempertahankan pakaian khasnya dalam pertemuan-pertemuan resmi dengan menggunakan serban. Demikian pula dengan Syeh Mudawali Al-Khalidy. Tidak hanya ulama Aceh, tokoh-tokoh ulama nasional dari kalangan Nahdiyin juga demikian. Sampai saat ini mereka masih tetap menggunakan sarung dan peci guna mempertahankan identitasnya seperti KH. Ma'ruf Amin yang terlihat menggunakan sarung plus peci ketika berpidato di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa style *meusarong gaki* yang digunakan Wabub Aceh Besar adalah sebuah upaya menjaga identitas kedayahannya sehingga harus dihargai dan bahkan diapresiasi. Untuk itu kita berharap kepada masyarakat untuk tidak memperolok-olok style *meusarong gaki* karena menjaga identitas itu penting. Ketika identitas itu hilang, maka dengan sendirinya kita telah menjadi orang lain.

Namun demikian, untuk menampilkan busana yang ideal semestinya pihak terkait melibatkan desainer agar model busana tersebut tidak terkesan janggal sehingga tidak memenuhi standar estetis. Untuk menjaga keterpaduan, penyerapan simbol-simbol identitas dalam pakaian resmi juga harus dilakukan secara penuh, tidak bisa sepenggal.

Menyerap unsur jubah dengan meninggalkan peci adalah model penyerapan sepenggal sehingga berdampak pada performa yang kurang manis. Demikian pula perkawinan antara jubah dengan Pakaian Dinas Upacara (PDU) plus topi pet adalah perkawinan yang tidak sekufu (sepadan) sehingga mirip "duet maut." Seharusnya, topi pet diganti dengan peci sehingga identitas kedayahan semakin kuat. Jika pun dipaksakan harus menggunakan topi, maka pelibatan desainer

dalam style *meusarong gaki* adalah sebuah keniscayaan agar style tersebut menjadi padu.

Dengan tetap menghormati style *meusarong gaki* ala Wabub Aceh Besar, kita berharap kepada masyarakat Aceh agar tidak terlena dalam identitas simbolik sehingga melupakan substansi dari identitas tersebut. Menjaga identititas simbolik penting, tapi mempertahankan substansi identitas "kedayahan" dalam menggerakkan pembangunan jauh lebih penting.

Namun di sebalik itu, kita dihadapkan pada satu kekhawatiran besar ketika pola penyerapan identitas simbolik ini dilakoni oleh para kepala daerah yang berasal dari ragam profesi, seperti petani, nelayan dan tukang parkir.

Apa jadinya jika seorang mantan petani kemudian mendapat kesempatan menjadi bupati? Apakah mereka juga harus mengombinasikan jas PDU dengan menggunakan tudung guna mempertahankan indentitas kepetaniannya? Bagaimana pula ketika mantan nelayan terpilih menjadi gubernur? Apakah akan lahir PDU dengan jala di bahu agar identitasnya tidak hilang? Dan kondisi akan semakin parah ketika kepala daerah dijabat oleh tukang parkir. Kita tentu tidak sanggup membayangkan betapa bisingnya pendopo akibat tiupan peluit sang bupati, hanya demi sebuah identitas.

Untuk itu kita harus sepakat bahwa simbol hanyalah bentuk penegasan bagi identitas, dan ia bukan sebuah nilai yang harus dipertahankan mati-matian. (***AT, 10 Juli 2017***).

Dari Kejora Menuju Kecoa

Ada satu keyakinan di sebagian benak masyarakat kita bahwa mulut politisi tidak bisa dipercaya. Keyakinan semacam ini tentunya tidak lahir dengan sendirinya, tetapi ia dilatari oleh segudang pengalaman yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Keyakinan ini sendiri bisa benar, dan bisa salah. Ini adalah sebuah penilaian ala publik yang tentunya tidak bisa diremehkan.

Namun demikian, kita tidak akan pernah sepakat jika keyakinan ini digeneralisasi. Artinya, politisi juga manusia yang selalu saja menghadirkan dua sisi dalam kehidupannya – kebaikan dan keburukan. Seperti kata Madjid (1987), bahwa "Manusia bukanlah makhluk kebaikan saja seperti malaikat, tapi juga bukan makhluk kejahatan saja seperti setan. Manusia berada di antara keduanya, dan tarik menarik antara keduanya itulah yang membuat manusia menjadi makhluk moral. Artinya, makhluk yang selalu dihadapkan pada tantangan untuk berbuat baik dan godaan untuk berbuat jahat."

Penjelasan Madjid ini semakin mempertegas bahwa kebaikan dan kejahatan adalah dua sisi yang senantiasa menyertai perjalanan hidup seorang manusia. Alquran

juga memberi keterangan yang jelas terkait hal ini, di mana manusia yang beriman dan bermoral akan ditempatkan di surga, sementara manusia-manusia bejat akan dicampak ke neraka. Untuk merealisasi keputusannya ini, Allah SWT selaku penguasa yang sesungguhnya juga memberikan kekuatan (potensi) kepada manusia untuk memilih – apakah berbuat baik atau jahat.

Berpijak pada penjelasan di atas, maka adalah sebuah kewajaran jika dalam dunia politik kita dihadapkan pada dua tipikal politisi. Politisi-politisi jahat (pembohong) akan terus ada dan politisi-politisi baik juga akan terus bermunculan. Dalam dunia demokrasi yang semakin liar seperti sekarang ini, kita tidak mungkin "memusnahkan" politisi busuk seluruhnya, karena demokrasi itu sendiri memberi ruang kepada politisi-politisi bandit untuk merebut kursi kekuasaan. Namun setidaknya, kita harus terus berupaya agar keberadaan politisi busuk tidak sampai merusak tatanan sehingga berdampak pada punahnya harapan rakyat.

Seperti disinggung di awal, munculnya keyakinan sebagian masyarakat bahwa mulut politisi tidak bisa dipercaya – seiring perjalanan waktu telah berevolusi menjadi semacam stereotip. Tidak ada yang bisa mengubah stereotip ini, kecuali oleh politisi itu sendiri. Akibat ulah segelintir politisi bandit ini, akhirnya politisi baik pun terkena getahnya.

Kemunculan politisi bandit dalam dunia politik di abad demokrasi memang sulit dihindari. Hal ini ditambah dengan kondisi dunia politik itu sendiri yang penuh dengan godaan. Seorang mujahid dari Anatolia yang menjadi penentang gerakan sekularisme Turki oleh Mustafa Kemal Attaturk, Bediuzzaman Said Nursi pernah berkata (Wami, 1995): "Aku berlindung

kepada Allah dari godaan setan dan politik." Pernyataan Nursi ini tentunya dilatari oleh pengamatan dan pengalamannya sendiri ketika bersentuhan dengan dunia politik yang semakin suram. Meskipun politik dapat menghadirkan kebaikan, tapi akibat ulah segelintir politisi bandit, dunia politik pun semakin tercemar.

Seperti telah kita saksikan bersama, di musim-musim kampanye, para politisi cenderung mencitrakan diri layaknya kejora yang mengedipkan secercah cahaya di puncak angkasa. Dalam orasi-orasi liarnya, sebagian politisi sering melagukan rupa-rupa hikayat agar dirinya terpilih. Dan rakyat pun terpedaya dengan syair-syair yang mengalun lembut dari mulut politisi.

Tapi tragisnya, segelintir politisi yang dulunya diharapkan menjadi kejora justru berubah wujud menjadi kecoa. Jika kejora identik dengan harapan, maka kecoa adalah simbol kerusakan yang menebar penyakit dan berbau busuk. Kenyataan-kenyataan inilah yang kemudian melahirkan pandangan kurang sedap terhadap sebagian politisi di tanah air.

Hari ini (29/07/17), Serambi Indonesia meriwayatkan bahwa sebanyak 17 orang wakil Aceh di DPR RI menjadi bahan olok-olok dan tertawaan dalam FGD yang digelar di Unsyiah pada Jumat (28/07/17). Dalam FGD tersebut di antaranya membicarakan pernyataan Nasir Djamil yang menyebut dirinya bukan tidak tahu tentang pencabutan dua pasal dalam UUPA, tetapi dirinya tidak dilibatkan dalam Pansus RUU Pemilu sehingga tidak tahu. Pernyataan Nasir Djamil ini kemudian menjadi bahan tertawaan sebagian masyarakat Aceh, tidak terkecuali DPR Aceh yang juga merasa kecewa terhadap kinerja anggota DPR RI asal Aceh tersebut.

Menyimak pernyataan anggota DPR RI asal Aceh yang terkesan lugu (mungkin lebih tepat – *lhok gong*), maka hampir dapat disimpulkan bahwa keberadaan mereka di lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia sama sekali tidak mampu mewarnai diskusi-diskusi legislatif di tingkat nasional. Mungkin mereka hanya berperan sebagai "*tukang pok jaro*" (tukang tepuk tangan) atau *tukang leung jaro* yang hanya pandai mengamini, tanpa mampu mengkritisi.

Padahal, dalam pentas politik, kedudukan DPR RI pasca pemilu lebih aman dan nyaman jika dibandingkan dengan DPRK dan DPRA yang hampir setiap hari berhadapan dengan konstituen. Adalah "wajar" jika kerja-kerja DPRK dan DPRA terkadang kurang maksimal akibat kesibukan mereka yang tidak hanya fokus dalam kerja-kerja parlemen, tetapi juga disibukkan dengan kerja-kerja "mengurus" konstituen.

Bayangkan saja posisi seorang DPRK yang mungkin hampir setiap hari dikunjungi oleh tim sukses untuk (maaf) minta uang rokok, ngajak ngopi bareng, minta pulsa, lapor anaknya sakit, dan bahkan ada yang minta bantuan dana untuk operasi *geutut* (kutil). Demikian pula dengan DPRA yang di tengah kesibukannya "mengurus" kepentingan rakyat di parlemen juga terpaksa berhadapan dengan beberapa oknum yang saban hari menyodorkan proposal. Kenyataan-kenyataan sosial yang dihadapi oleh DPRK dan DPRA ini tentunya akan berdampak pada tidak maksimalnya kerja-kerja mereka di parlemen.

Kondisi ini tentunya berbeda dengan posisi seorang anggota DPR RI yang bisa duduk manis di gedung parlemen tanpa tersibukkan mengurus konstituen. Berbeda dengan DPRK dan DPRA, anggota DPR RI cenderung lebih santai dan bisa ketawa-ketiwi sesamanya tanpa harus khawatir ada

masyarakat yang minta pulsa atau ngajak ngopi. Jika pun bertemu konstituen, itu biasanya hanya sekali dalam setahun ketika pulang kampung. Dan bahkan, mungkin ada yang baru pulang kampung di tahun kelima menjabat sebagai anggota DPR RI, itu pun untuk kepentingan kampanye belaka. Dengan demikian, tentu sangat "kurang ajar" jika mereka "gagal fokus" terhadap fungsinya.

Seharusnya, kondisi aman dan nyaman yang selama ini dirasakan oleh anggota DPR RI dapat dimanfaatkan untuk tetap fokus pada kerja-kerja parlemen guna menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya. Bukan justru berkata "saya tidak tahu" ketika kepentingan daerah yang diwakilinya terganggu. Jika pun mereka tersilap atau mungkin "tertidur" ketika rapat-rapat parlemen digelar, maka pilihan terbaik adalah diam. Dalam menyikapi "tragedi mengerikan" yang menimpa daerahnya, maka diam adalah emas.

Aksi diam ini tentunya akan mengesankan "hanya ada satu kesalahan", yaitu "tidak tahu." Tapi ketika aksi tidak tahu ini kemudian "diberi tahu" kepada publik, maka dengan sendirinya, kesalahan telah tergandakan; *pertama,* "tidak tahu, *kedua*, mengatakan "tidak tahu," dan *ketiga,* mungkin dia "tidak tahu" bahwa dirinya "tidak tahu". Untuk itu, ke depan kita berharap agar anggota DPR RI dapat berhati-hati dalam melemparkan statemen jika tidak ingin diolok-olok dan ditertawakan oleh publik.

Di akhir tulisan ini kita berharap agar "ketidaktahuan" yang melanda anggota DPR RI asal Aceh tidak lagi berlanjut pada kasus-kasus berikutnya. Anggap saja "ketidaktahuan" hari ini hanya sebatas lawak belaka. Tetapi, jika lawak ini terus dilanjutkan, maka jangan salahkan rakyat jika label kejora

yang selama ini disematkan bagi anggota DPR RI diturunkan pangkat menjadi kecoa. (***AT, 29 Juli 2017***).

Ruslan, Patah Ranting di Ujung Usia

Kali ini, khususnya di Bireuen, hampir setiap bibir sebagian *netizen* tampak begitu fasih mengucapkan kata "Pajero Sport" – jenis mobil lumayan mewah dengan harga mencapai 500 juta rupiah per-unitnya. Mobil dengan tampilan gagah ini telah sukses menghebohkan jagat maya, khususnya di kalangan *netizen* Bireuen.

Kanalaceh.com (02/08/17) mengabarkan bahwa Bupati Bireuen, Ruslan M. Daud telah membeli 4 unit mobil jenis Pajero Sport yang kemudian dibagikan kepada empat instansi vertikal di Kabupaten Bireuen, terdiri dari Dandim 0111 Bireuen, Kapolres Bireuen, Kejari Bireuen dan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen. Mobil-mobil tersebut kabarnya berstatus hibah dari Pemda Bireuen yang "katanya" didasarkan pada kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif Bireuen. Tapi anehnya, seperti dirilis AceHTrend, ketua DPRK Bireuen justru mengaku tidak tahu menahu dengan bantuan hibah tersebut.

Menyimak dua informasi yang saling bertubrukan ini, tentu sangat sulit bagi kita untuk menebak siapa sebenarnya yang

berbohong. Tapi yang jelas, Pajero Sport telah mengundang kegaduhan di kalangan publik. Ragam komentar miring pun bermunculan dan memenuhi beranda *facebook*.

Anehnya, sebagian pihak penerima mobil hibah ini justru merasa "riang gembira." "Kegembiraan" ini di antaranya ditunjukkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen yang mengaku bersyukur atas bantuan tersebut, sebab menurutnya, dari pusat tidak ada anggaran untuk mobil operasional (tribunbarat.com). Mendengar penjelasan ini, kita hanya bisa menyisir-nyisir kumis. Begitu miskinnya instansi pusat sehingga harus dibantu oleh pemerintah daerah – yang untuk mengurus masyarakatnya sendiri saja masih kewalahan.

Keputusan Ruslan untuk membagi-bagikan "kado" berupa Pejero Sport di akhir pemerintahannya pun menuai kritik dari berbagai pihak. Sebagian kalangan menduga bahwa "kado" tersebut adalah sebuah "trik" dengan maksud tertentu. Asumsi liar ini muncul karena para penerima Pajero Sport adalah lembaga vertikal yang berada dalam lingkungan penegakan hukum. Kecuali Dandim (TNI) – Polres, Kejaksaan dan Pengadilan adalah instansi yang memiliki otoritas dalam menegakkan hukum di negeri ini.

Dalam keterangannya yang dirilis modusaceh.co (02/08/17), Ruslan berdalih bahwa penyerahan mobil tersebut karena adanya permohonan. Alasan ini memang cukup syahdu. Hanya karena ada permohonan, maka Pajero pun melaju. Anehnya, Dandim 0111 Bireuen justru membantah telah meminta mobil operasional kepada Bupati (lintasnasional.com).

Secara prinsip, kita sepakat saja bahwa memenuhi permohonan memang perbuatan mulia. Tapi yang menjadi

pertanyaan selanjutnya, apakah semua permohonan dari rakyat juga sudah dipenuhi? Seharusnya, kepala daerah bernegosiasi dengan pemerintah pusat guna membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang dipimpinnya, bukan justru "menyedekahkan" milik daerah untuk instansi pusat. Menyerahkan bantuan hibah kepada instansi vertikal adalah salah satu bentuk negosiasi terbalik yang sama sekali tidak menguntungkan daerah.

Akhirnya, akibat kebijakannya ini, Bupati Ruslan pun menjadi bulan-bulanan yang "diserang" dari kiri dan kanan – depan dan belakang. Dan Ruslan pun *hana meuho kinip* (tidak mampu mengelak) akibat kritik yang bertubu-tubi. Mencermati gerakan kritik yang menimpa Ruslan kali ini, saya berhasil menangkap dua tipe kritikus yang terlihat begitu gencar melakukan "serangan" terhadap "penguasa" yang sebentar lagi akan lengser.

Kritikus pertama adalah mereka-mereka yang memang dari sejak awal terlihat konsisten melakukan pengawalan terhadap berbagai kebijakan Ruslan selama menjadi bupati – yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Artinya, aksi kritik yang mereka lakukan telah berlangsung jauh sebelum munculnya "tragedi" Pajero Sport. Mereka adalah para aktivis yang tetap menjaga konsistensi mereka dalam menyikapi setiap tindak-tanduk pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Kritikus serupa ini patut dihargai dan bahkan diapresiasi sebab gerakan yang mereka lakukan tidak didasari oleh kepentingan politik tertentu.

Adapun kritikus kedua, terdiri dari para penjilat yang ketika Bupati Ruslan Berjaya, mereka tampak menjadi "pengekor" setia dan bertepuk tangan atas setiap kebijakannya. Tapi ketika

sang Bupati berada di akhir jabatannya – dan gagal meraih kemenangan pada pilkada lalu – para penjilat ini justru ikut-ikutan menjulurkan lidah dan menusuk sang bupati dari belakang. Para kritikus penjilat ini dengan semangat menyala-nyala turut melemparkan kritik dengan pola *meu unyet-unyet* (mengejek) terhadap sang bupati yang dulu mereka sanjung dan puja. Kritikus serupa ini adalah para penjilat yang berpura-pura bertaubat guna mengubah wajah agar aksi jilat-menjilat dapat dengan mulus berpindah pada bupati baru nantinya.

Akibat kritikus penjilat ini, akhirnya Ruslan pun gugur layu terkulai, *meutumpok* dan *payah raba abee*. Ruslan Ibarat orang yang jatuh tertimpa tangga – dan kena tahi lagi. Di ujung usia kepemimpinannya Ruslan seperti kehilangan pendukung, karena para penjilat telah beralih profesi menjadi kritikus. Tepuk tangan yang selama ini bergemuruh penuh gelora – berganti caci maki dan sumpah serapah.

Akhirnya, dengan meminjam judul lagu yang pernah dinyanyikan Saleem Iklim bertajuk "Patah Ranting di Cermin Usia", saat ini Ruslan mungkin juga mengalami hal yang sama – rantingnya patah di ujung usia. Salam Pajero Sport! (***AT, 03 Agustus 2017***).

Bagian 2

"Pohon Kohler" dan Sejarawan Dadakan

Dalam dua hari terakhir, lidah kita semakin fasih mengucapkan kata-kata yang sebenarnya "asing" bagi mayoritas masyarakat Aceh. Kata-kata itu adalah "Pohon Kohler". Kabarnya pada 19 November 2015 pohon tersebut yang awalnya berada di pekarangan Masjid Raya terpaksa ditebang karena terkena proyek perluasan masjid. Kononnya pohon tersebut ditanam oleh Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, untuk mengenang tewasnya Kohler pada perang Aceh 1873.

Pasca penebangan "Pohon Kohler," beragam tanggapan dan komentar pun bermunculan, mulai dari akademisi, pejabat, tokoh masyarakat dan publik pada umumnya. Pro dan kontra tidak dapat dielakkan. Bahkan Walikota Banda Aceh mengaku terkejut dengan penebangan tersebut sehingga tanpa sadar terucap kalimat "*astagfirullah*" – satu kalimat suci yang tidak pada tempatnya. Ada pula yang menyebut pemerintah Aceh tidak mampu menghargai sejarah hanya karena "Pohon Kohler" terkena "gergaji." Tidak hanya itu, ada juga sebagian komentator yang meyakini bahwa keberadaan "Pohon Kohler" itu lebih

penting dari payung-payung yang akan dibangun. Ada lagi pendapat lain yang tidak kalah menarik, katanya "Semestinya arsitektur menyesuaikan dengan situs yang ada, bukan situs menyesuaikan arsitektur" – satu kalimat yang hanya benar secara konseptual tapi sulit diaplikasikan. Uniknya lagi, ada pihak yang "mengancam" akan menghentikan proyek perluasan Masjid Raya karena dinggap melanggar etika dan kearifan lokal Aceh. Mereka menyebut bahwa proyek Masjid Raya dilaksanakan di kawasan bernilai sejarah yang seharusnya tidak ada pembangunan apa pun. Luar biasa.

Sementara itu, di media sosial juga banyak bermunculan "sejarawan dadakan" pasca robohnya "Pohon Kohler". Ramai pengguna *facebook* di Aceh yang memosting foto-foto "Pohon Kohler" hasil *googling* sebagai tanda "berkabung." Riwayat-riwayat tentang pohon itu bertebaran di media sosial berkat kerja keras "sejarawan dadakan". Disebut "dadakan" karena kemunculannya yang tiba-tiba.

Jika dipikir-pikir, sebenarnya kita harus berterima kasih kepada penebang pohon ini karena berkat aksi merekalah (para penebang) nama pohon tersebut semakin populer, khususnya di media sosial. Akhirnya kita pun menjadi akrab dengan "Pohon Kohler" tersebut. Seandainya pohon tersebut tidak ditebang, mungkin pohon itu tidak akan sepopuler hari ini. Berkat penebang itulah, kecintaan kita terhadap sejarah bangkit kembali, meskipun sebagian kita mungkin hanya mengikut tren sesaat, yang dalam beberapa hari ke depan (yakin atau pun tidak) kecintaan kita kepada sejarah itu akan kembali hilang dalam ketiadaan.

Sejarah dan Masa Depan

Sejarah yang gemilang itu pastilah menjadi kebanggan setiap bangsa yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebaliknya sejarah yang kelam akan terus menjadi "mimpi buruk" yang sebisa mungkin ditutupi. Kematian Kohler di pekarangan Masjid Raya pada 1873 adalah salah satu kebanggan sejarah bagi masyarakat Aceh sehingga patutlah kejadian itu dikenang. Salah satu media untuk mengenang tewasnya Kohler adalah pohon dan prasasti.

Keberatan yang diajukan oleh beberapa pihak atas ditebangnya "Pohon Kohler" dalam batas-batas tertentu memang dapat dimengerti, mengingat pohon tersebut adalah satu bukti kebanggan sejarah – sebuah simbol kemenangan, meskipun hanya duplikasi dari pohon terdahulu yang sudah punah dimakan usia. Saya juga tidak tahu apakah waktu itu ada yang marah kepada Tuhan ketika pohon itu "dimatikan." Apakah ada yang menyebut bahwa Tuhan tidak paham sejarah, padahal Tuhan dengan kekuasaan-Nya yang Maha Agung bisa saja membuat pohon itu kekal abadi?

Warisan sejarah memang patut dijaga dan sejarah itu sendiri juga patut diwariskan kepada anak cucu, tidak hanya sebagai sebuah cerita romantis, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan mampu menjadi spirit untuk menata masa depan yang lebih baik. Aksi penebangan "Pohon Kohler" untuk kepentingan perluasan masjid bukanlah satu kejahatan yang harus dicaci. Lagi pula, menurut informasi yang berkembang, prasati kematian Kohler itu akan diletakkan di tempat semula ketika proyek perluasan masjid sudah selesai. Dengan demikian, tidak ada sejarah yang hilang sehingga tidak perlu disikapi dengan latah dan *lebay*.

Terkadang pengambil kebijakan memang dihadapkan pada kondisi dilematik yang serba sulit. Kita ambil contoh perluasan Masjidil Haram di Makkah yang juga tidak sepi dari kritik karena dianggap telah menghilangkan situs sejarah. Di satu sisi kaum muslimin setiap tahun meminta penambahan kouta haji dan berharap agar ritual tahunan itu bisa berjalan lancar dan nyaman. Tetapi ketika pemerintah Saudi melakukan pembangunan dan perbaikan di sana sini yang tentunya dalam kondisi tertentu juga harus mengorbankan situs sejarah, maka kritik dan kecaman pun beterbangan. Hampir seluruh sudut Makkah itu bernilai sejarah, lantas haruskan kondisi ini dipertahankan seperti masa Nabi Muhammad agar situs sejarah tidak terganggu? Tidak bolehkah kita berbenah untuk menata masa depan demi kemaslahatan umat?

Kadang-kadang kita itu aneh. Sampai-sampai ada ledekan dalam bahasa Aceh: "*Lon hana peurle pajoh bu, yang peunteng troe*" (saya tidak perlu makan yang penting kenyang). Entah bagaimana caranya kalimat ini dipahami. Padahal salah satu cara menuju kenyang adalah dengan makan. Menafikan kegiatan makan sembari berharap kenyang adalah kegilaan yang sulit dimengerti. Proyek perluasan masjid pun begitu.

Di satu sisi, (meskipun dalam hati kecil) kita tentu sepakat dengan perluasan Masjid Raya demi kenyamanan dan juga keindahan, meskipun bermegah-megah itu tidak dianjurkan. Tapi di sisi lain kita justru melemparkan kritik yang tidak pada tempatnya. Semoga saja, ketika proyek perluasan mesjid itu selesai, para "Kohler Mania" tidak melakukan aksi *selfie* di payung-payung itu karena akan dianggap sebagai penistaan terhadap sejarah. (***AT, 23 November 2015***).

Note: *Maaf jika tulisan ini membingungkan, karena saya menulis pun dalam keadaan bingung.*

Bahasa Kita

Tindakan salah ucap yang mungkin tanpa sengaja telah dipraktikkan oleh guru kita Syaikh Muda Tuanku Samunzir bin Husein pada perayaan Milad GAM ke 39 beberapa waktu lalu, telah memberi inspirasi bagi banyak penulis di Aceh untuk mencurahkan isi kepalanya melalui tulisan yang beraneka rupa. Ada penulis yang secara "ikhlas" melakukan pembelaan, dan bahkan seperti membenarkan kata-kata itu berhamburan di udara dengan dalih untuk menaikkan semangat pendengar. Ada juga penulis yang membelanya secara kritis alias memuji sambil mengkritik (yang baik dipuji, yang tidak baik dikritik). Di luar itu ada pula yang menyerang sang ustaz habis-habisan tanpa ampun dengan menggunakan kata-kata yang serupa alias *teunak* dibalas *teunak*, model ini banyak dilakukan oleh para penulis status *facebook* dan "pabrik" pembuat *meme*. Dengan demikian sudah sewajarnyalah para penulis itu mengucapkan "terima kasih" kepada Samunzir, karena berkat ucapan beliaulah tulisan-tulisan itu lahir. Yang belum pernah menulis, *Alhamdulillah* sudah bisa menulis. Yang kehilangan ide ketika berhadapan dengan pena (laptop), *Alhamdulillah* sudah dapat ide, dan seterusnya.

Beberapa kalimat di atas cukuplah sebagai basa-basi alias *muqaddimah* tulisan ini. Dalam tulisan ini, kita tidak lagi memperbincangkan Samunzir, apalagi beliau sudah mengaku *khilaf* via Tabloid Modus Aceh. Penting pula dicatat, bahwa tulisan-tulisan terdahulu yang kita tujukan kepada beliau, bukanlah untuk menghakimi atau pun menyudutkan, tetapi hanya menjalankan perintah agama dan juga pesan *endatu*.

Tentang Bahasa

Dulu, ketika masih kecil, nenek dan orang tua melarang saya untuk bicara *kah-ke* – katanya kalau bicara *kah-ke* nanti *timoh ikue jeut kea see* (bicara *kah-ke* tumbuh ekor jadi anjing). Sekali saja mulut saya mengeluarkan kata *kah-ke* di hadapan ayah atau *paknek* (kakek), maka kumpulan lima jari itu akan mendarat di bibir, tanpa aba-aba – *p'am*! Lain lagi kalau kata-kata *kah-ke* terdengar oleh almarhum ibu dan *mami* (nenek) saya, maka saya akan dieksekusi dengan hukuman *peucapli* (mulut disumpal cabe). Beda orang beda hukuman, kalau kata itu didengar oleh paman saya, maka hukumannya adalah *geu ikat bak eumpueng seureungga* (diikat di sarang serangga) – sadis memang, sama sadisnya dengan kata-kata *kah-ke* itu sendiri, setidaknya di telinga kami dan di telinga orang-orang Peusangan pada umumnya.

Bahkan kalau ada orang tua yang bicara *kah-ke* maka akan di olok-olok oleh orang tua lain dengan kalimat *bek kapeugah haba kah-ke dikeu ke*. Kadang-kadang juga diolok dengan ejekan *kah mak, droneuh asee* (kau ibu, Anda anjing). Artinya untuk ibunya dia memakai kata kasar, tapi untuk binatang dia sopan. Begitulah kira-kira.

Meskipun bahasa *kah-ke* terdengar tidak sopan di telinga orang Peusangan, tapi bisa jadi di daerah lainnya kata-kata tersebut dianggap biasa saja. Pada saat masih remaja, ketika masih sekolah, saya sempat kebingungan mendengar bahasa kawan-kawan saya yang dengan enteng berujar *hai pak kabi bola siat* atau kalimat *long singeh hana kujak sikula*. Meskipun demikian, tentunya saya tidak bisa menyebut mereka tidak sopan, karena ukuran kesopanan itu, apalagi terkait bahasa memiliki standar yang berbeda-beda. Dengan demikian, tentang bahasa *kah-ke* ini mungkin masih berada dalam lingkungan "*khilafiyah*."

Lantas bagaimana dengan *teumeunak*? Apakah ia juga *khilaf*? Tulisan yang ditulis oleh saudara kita Zahlul Pasha di *Aceh Trend* dengan tajuk " Narasi Tabu Aceh " sudah cukup memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Secara umum, mungkin bisa "disepakati" meskipun dalam tanda kutip, bahwa tidak ada *khilaf* tentang tercelanya perbuatan *teumeunak*. Kita boleh saja menyisipkan kata-kata *teumeunak* itu dalam senda-gurau, tapi aroma kata-kata itu tetap tidak sedap di telinga.

Bagi orang-orang Peusangan pada umumnya, perbuatan *teumeunak* adalah pantangan besar. Kalau kata-kata ini didengar oleh teungku-teungku kami sewaktu mengaji di dayah, tentu kami akan dijatuhi hukuman *peugleh peuluncôt* (mencabut peluncut) di halaman dayah, atau diberi tugas *uet kulah* (membersihkan tempat wudhu). Kalau masih diulang juga maka kami harus siap-siap berhadapan dengan *bak rante kinyet* (sejenis alat sebat). Kalau aktivitas *teumeunak* ini kami dilakukan di rumah, maka hukumannya adalah *paleut* (tamparan), *peucapli* (disumpal cabe) atau *eumpueng seureungga* (sarang serangga). Pilih mana?

Bahkan orang-orang tua dulu, khususnya di Peusangan, meyakini bahwa kebiasaan *teumeunak* akan menjadikan pelakunya *papa* (miskin). Sewaktu masih kecil, saya juga dilarang oleh nenek dan kakek saya untuk *teumeunak* di depan burung merpati. Mereka meyakini bahwa kebiasaan *teumeunak* akan membuat merpati-merpati itu pergi, dan tidak lagi kembali. Kita boleh saja menyebut keyakinan ini sebagai mitos atau bahkan *khurafat*, karena tidak ada sandaran dalilnya. Tapi, begitulah orang tua dulu menasihati kita agar meninggalkan perbuatan sia-sia semisal *teumeunak*. (***AT, 15 Desember 2015***).

Apa Yang Kita Dapat Dari Tsunami?

Kemarin (26/12/15) dan juga hari ini, beranda *facebook* masih dipenuhi oleh beragam status dengan topik yang sama – tsunami. Hampir semuanya bercerita tentang duka yang terjadi sebelas tahun lalu, tepatnya 26 Desember 2004. Harian Serambi Indonesia hari ini (27/12/15) juga memasang foto seorang gadis yang sedang menitikkan air mata, pas di halaman depan koran itu. Saat itu, Aceh dilanda gempa hebat dan disusul dengan gelombang tsunami yang dahsyat. Saya banyak mendengar cerita tentang keganasan gelombang tsunami dari beberapa teman saya yang selamat. Saya sendiri tidak sempat menyaksikan bencana hari itu, karena pada 26 Desember saya berada di Bireuen. Saya berangkat ke Banda Aceh pada 27 Desember, sehari setelah tsunami. Saat itu saya masih sempat menyaksikan tumpukan-tumpukan mayat dan wajah kota yang hancur. Saya menyaksikan kerusakan yang luar biasa, yang tidak pernah terduga sebelumnya. *Alhamdulillah* keluarga saya selamat dan tidak ada yang menjadi korban hari itu. Tapi saya kehilangan beberapa teman dan sahabat terbaik. *Allahummagfirlahum*.

Pada 26 Desember 2015, genap sebelas tahun (menurut ukuran tahun Masehi) peristiwa dahsyat itu telah berlalu. Di sebagian tempat dilakukan peringatan untuk mengenang tragedi tsunami tersebut. Baik sengaja atau pun tidak, kisah pilu sebelas tahun lalu kembali dikenang dan disebut-sebut. Padahal, seiring perjalanan waktu, luka tsunami itu sudah mulai mengering. Di satu sisi, upacara peringatan tragedi tsunami tersebut akan mendorong sebagian kita untuk merenung sejenak atas musibah yang menimpa orang-orang yang kita sayangi, kita mendoakan mereka agar diampuni dosanya dan diterima di sisi-Nya. Namun di sisi lain, upacara peringatan yang dilakukan setiap tahun, diakui atau pun tidak akan mengguris luka lama, dan kita pun kembali larut dalam duka, tanpa sengaja air mata pun kembali menetes pada setiap 26 Desember. Kondisi ini akan terus terulang dari tahun ke tahun, tidak berkesudahan.

Lantas apa yang kita dapat dari musibah tsunami? Jika pertanyaan ini diajukan ke hadapan kita, tentu kita akan memberikan jawaban yang berbeda. Seorang (maaf) "pengusaha" barang bekas (*broek-broek*) akan menjawab bahwa barang bekas milik korban tsunami yang berserakan, khususnya di Banda Aceh telah berhasil memberinya rupiah. Bahkan dalam *siklep siklap* (seketika) ada yang kaya-raya dengan hasil *broek-broek*. Jika pertanyaan ini kita ajukan kepada sebagian masyarakat, mungkin ada yang menjawab bahwa dia telah mendapatkan rumah dan aneka bantuan, meskipun "mungkin" dia sendiri tidak termasuk korban tsunami. Kita tanya kepada anak-anak muda "cerdas," jawabannya berkat tsunami mereka bisa kerja di NGO asing dengan gaji yang *wah*. Begitu pula jika pertanyaan ini kita ajukan kepada Martunis, tentunya dia punya

jawaban sendiri. Demikian seterusnya. Hanya itu? Adakah yang lain?

Kita yakin bahwa ketika gelombang tsunami itu datang dan menghantam apa saja yang ada di depannya, semua orang larut dalam tasbih dan takbir. Semua terlihat lemah dan tidak berdaya menghadapi takdir yang berlaku. Pada hari itu, pelaku kejahatan pun bertakbir dan koruptor juga larut dalam zikir. Sekarang, mari kita bertanya , sudahkah para pelaku kejahatan itu bertaubat? Sudahkah para koruptor berubah?

Beberapa waktu lalu, kononnya sejumlah muda-mudi melakukan pesta miras di salah satu hotel di Banda Aceh. Bos sabu-sabu juga semakin ramai saja di Aceh. Aksi pembunuhan juga masih terjadi di beberapa tempat. Lalu pelajaran apa yang kita dapat dari musibah tsunami yang setiap tahun kita peringati? Setiap 26 Desember kita hanya mengguris luka dan mengenang yang telah pergi, sedang kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Jika begitu, sia-sia saja. (***AT, 27 Desember 2015***).

Pemuda dan Kecerdasan Emosional

Gardner sebagaimana dikutip Hamzah B. Uno (2009) menyebut bahwa seseorang memiliki berbagai rupa kecerdasan, seperti kecerdasan logis matematis, kecerdasan bahasa, kecerdasan musical, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetis, kecerdasan naturalis, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Selain itu, dalam dunia pendidikan juga dikenal istilah kecerdasan emosional yang dalam pandangan Salovey dan Meyer masuk dalam lingkup kecerdasan sosial (Aunurrahman, 2012). Salah satu bentuk kualitas emosional yang penting bagi keberhasilan seseorang menurut Salovey dan Meyer adalah kemampuan mengendalikan amarah.

Aunurrahman menjelaskan bahwa kekuatan emosi seringkali mengalahkan kekuatan nalar, sehingga ada suatu perbuatan yang secara nalar tidak mungkin dilakukan, tetapi karena kekuatan emosi perbuatan tersebut bisa saja dilakukan. Karena emosi merupakan suatu kekuatan yang dapat mengalahkan nalar, maka diperlukan upaya untuk mengendalikan, mengatasi dan mendisiplinkan emosi.

Dari ulasan singkat di atas, pahamlah kita bahwa kecerdasan emosional punya peran penting dalam menunjang kesuksesan seseorang, baik akademisi, politisi, birokrat, agamawan, pengusaha dan juga tokoh masyarakat. Seseorang yang mampu mengendalikan emosinya, baik rasa senang maupun rasa marah, maka dia telah cerdas secara emosional. Sebaliknya, orang-orang yang tunduk begitu saja kepada emosi, maka tanpa sengaja dia telah membunuh nalarnya.

Pemuda dan Emosi

Baru-baru ini, seorang tokoh muda di Aceh yang entah sengaja atau tidak telah mengeluarkan sebuah statement yang lumayan "genius," tapi "sangat tidak cerdas". Portalsatu.com meriwayatkan bahwa ketua KNPI Aceh, Jamaluddin mengatakan bahwa untuk memberantas narkoba harus dilakukan serius dengan membakar rumah bandar narkoba. Menurut Portalsatu.com, Jamaluddin mengaku sudah beberapa kali menyerukan untuk membakar rumah bandar narkoba. Hal tersebut juga disarankannya kepada aparat penegak hukum, termasuk saat pertemuan dengan Kapolda Aceh dan Gubernur Aceh di Meuligoe beberapa waktu lalu. Jamaluddin sangat optimis jika "sikap tegas" itu dipraktikkanmaka peredaran narkoba di Aceh akan terjepit dan hilang. Uniknya, Jamaluddin sadar bahwa aksi membakar rumah menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun jika merujuk terhadap bahaya narkoba yang akan mengancam generasi muda dan penurus bangsa, Jamal menilai sudah saatnya aksi itu dilakukan (portalsatu.com, 31/01/16).

Jika statement Jamaluddin di atas dianalisis dengan menggunakan konsep kecerdasan emosional, maka rasanya

tidak ada keraguan untuk menyebut ucapan tersebut sebagai tindakan yang "menginjak" nalar. Kita sepakat dengan Jamaluddin bahwa narkoba harus dibasmi. Kita pun setuju dengan Jamaluddin bahwa Bandar narkoba harus dihukum seberat-beratnya. Kita juga yakin, bahwa tidak ada *khilaf* tentang bahaya narkoba. Apalagi beberapa waktu lalu media mengabarkan bahwa di Lhoksemawe pengaruh narkoba telah menjalar pada pelajar. Tapi ajakan Jamaluddin untuk membakar rumah Bandar narkoba tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun, kecuali jika ditinjau dari perspektif "barbarian."

Di satu sisi, saya paham betul kenapa seorang Jamaluddin yang kononnya adalah tokoh pemuda sampai mengeluarkan pernyataan yang bernuansa "primitif" semacam itu. Ucapan tersebut merupakan bentuk kekesalan seorang Jamal terhadap narkoba yang sudah sangat meresahkan. Namun di sisi lain, seruan Jamal untuk membakar rumah bandar narkoba mengindikasikan bahwa Jamal tidak mampu mengelola amarah yang merupakan salah satu aspek kecerdasan emosional. Padahal, sebagai seorang tokoh pemuda, Jamal harus memiliki kecerdasan emosional.

Kita benci narkoba sebagaimana kita membenci kejahatan-kejahatan yang lain. Ajakan Jamal untuk membakar rumah bandar narkoba kononnya disebabkan karena tindakan mereka sudah sangat meresahkan. Tapi, bukankah kita juga benci koruptor yang telah memakan uang rakyat? Lantas patutkah kita berseru kepada khalayak untuk mengeluarkan parang, keris, pedang dan tombak untuk membacok para koruptor di negeri ini? Kita juga benci pemimpin-pemimpin politik yang seumur hidupnya menipu rakyat. Tapi apakah kita harus

mengajak orang-orang untuk melepaskan bom hidrogen ke rumah mereka agar mereka dan keluarga mereka punah? Tentu tidak. Di sinilah dibutuhkan kecerdasan emosional agar tindakan yang kita lakukan tidak membelakangi nalar. Jika kita dengan sengaja menginjak nalar, lantas apa bedanya kita dengan *tukang piep sabe* yang sudah bercerai dengan kewarasan?

Akhirnya, saya cuma bisa mengatakan bahwa Jamaluddin benar dalam tujuan, tapi keliru dalam ucapan. Saya juga menganjurkan kepada Jamaluddin untuk belajar membedakan antara tegas dan beringas. Mari lawan narkoba dengan kewarasan! (***AT, 01 Februari 2016***).

Mari Buat "Bom" di Kedai Kopi!

"Di dunia ini hanya di Aceh yang 80 persen generasi muda menghabiskan waktu di warung kopi siang dan malam. Ini musibah yang lebih besar dari bom atom di Jepang."

Kutipan di atas adalah potongan komentar guru saya, Profesor Farid Wajdi, Rektor UIN Ar-Raniry di surat kabar Serambi Indonesia (22/03/16). Pasca terbitnya komentar tersebut – seperti biasa – dengan menggunakan pisau analisis yang berbeda para pengguna media sosial pun terlibat dalam pro kontra. Ada sebagian kalangan yang mendukung komentar tersebut dengan berbagai argumen yang terkadang irrasional tapi dipaksa menjadi rasional. Sementara pihak yang kontra juga tidak tinggal diam, dengan berbagai gaya mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk melempar kritikan balik kepada sang Rektor. Di luar itu, ada pula sebagian kecil yang berusaha netral dengan cara *menakwilkan* statemen Pak Rektor dengan berbagai "ilmu alat" yang dimilikinya sehingga si penafsir pun berada di arena abu-abu alias tidak jelas "kakinya" berada di mana.

Sebagai salah seorang generasi kedai kopi, tentunya saya juga punyak hak untuk mengomentari pernyataan Pak Rektor. Dari satu sisi, pernyataan Prof Farid tentunya bernilai positif, di mana beliau mengajak generasi muda untuk tidak lalai.

Dalam hal ini, "kedai kopi" yang beliau maksud bisa *ditakwilkan* sebagai sebuah bentuk kelalaian. Artinya, duduk di kedai kopi sama dengan lalai, malas, tidak kreatif dan sebagainya. Artinya, kedai kopi yang dipahami oleh Prof Farid bersifat negatif. Dari sudut pandang ini, pernyataan Prof Farid bisa dibenarkan dalam tanda kutip. Artinya beliau berharap agar generasi muda tidak lalai dan bermalas-malasan.

Namun demikian di sisi lain, dalam statemen tersebut Prof Farid menggunakan perumpamaan yang sudah "kedaluarsa." Kedai kopi pasca tsunami tentu berbeda dengan kedai kopi tahun 90-an, di mana pada waktu itu kedai kopi mirip "bioskop kecil," tempat berkumpulnya orang-orang untuk nonton film-film terbaru atau pun nonton bola (kaki). Pasca tsunami, kedai kopi telah berevolusi sehingga menjadi multi fungsi, tidak hanya sekadar tempat nonton. Dengan adanya berbagai fasilitas seperti internet (wifi) dan ruang rapat, kedai kopi telah menjadi sarana untuk menembus dunia. Banyak ide-ide kreatif yang muncul di kedai kopi – bahkan ada satu slogan menarik entah siapa penemunya – *jep kupi nak bek pungo* (minum kopi agar tidak gila).

Jika diteliti dengan cermat hampir dapat disimpulkan bahwa banyak hal positif yang lahir di kedai kopi. Tentang fungsi kedai kopi pasca tsunami, mungkin uraian dalam tulisan Muhajir Juli sudah cukup detail. Singkatnya, orang-orang yang duduk di kedai kopi adalah orang-orang yang kreatif dan bahkan cerdas. Namun di sebalik itu ada pula segelintir *aneuk manyak* (anak kecil) – dengan fasilitas wifi – yang mungkin melakukan hal-hal negatif semisal judi online atau pun nonton video "si Unyil" di kedai kopi. Tapi hal ini tidak bisa menjadi dalil untuk menyebut generasi kedai kopi sebagai musibah

layaknya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ini analogi yang tidak tepat.

Istilah bom atom Jepang yang digunakan oleh Prof Farid dalam statemennya adalah tidak pada tempatnya. Justru – seperti diurai oleh banyak penulis – Jepang bangkit dan menjadi bangsa maju bermula pasca bom atom. Artinya kehancuran Jepang akibat bom atom hanya sementara saja, di mana kemudian mereka bangkit dan maju. Berdasarkan pengalaman ini, jika memang kedai kopi diibaratkan sebagai bom atom, maka saya mengajak siapa pun untuk beramai-ramai membuat "bom atom" di kedai kopi, agar kita bisa maju seperti Jepang. Mari mengaji di kedai kopi, mari membaca di kedai kopi, mari dikusi di kedai kopi, mari menulis di kedai kopi, mari kita ledakkan "bom atom" di kedai kopi agar kebodohan itu hancur berkeping-keping dan kemudian berserak-serak. Yang penting jangan melakukan rapat tikus di kedai kopi untuk menguras uang rakyat, ini adalah bom hydrogen – bahayanya melebihi bom atom.

Terakhir, dalam statemennya Prof Farid menyatakan bahwa 80 persen generasi muda menghabiskan waktu di kedai kopi. Terkait angka ini saya menilai pernyataan tersebut sangat "tidak akademis," apalagi pak Prof tidak mencantumkan nama lembaga survei yang melahirkan angka tersebut. Tentunya akan lebih baik jika penyebutan angka atau pun persentase disertai dengan data yang lengkap sehingga publik tidak terkejut dan terheran-heran. Artinya dalam persoalan angka kita "dilarang" main tebak-tebakan. Namun demikian, seperti diulas di atas, selama kedai kopi digunakan dalam hal positif, jangankan 80 persen, angka 100 persen pun masih kurang. (***AT, 23 Maret 2016***).

Latah Boleh, Tapi Jangan Terlalu...

Kemarin malam (27/09/16) ketika sedang menunggu bus untuk meluncur ke Kuta Raja, seperti biasa saya "utak-atik" *facebook* – untuk menghilangkan kejenuhan karena bus yang ditunggu tak datang-datang. Begitu layar *facebook* terbuka, terpampanglah sebuah foto – yang rupanya sedang menghebohkan jagat maya di Aceh. Dalam foto itu, Tgk. H. Usman Ali yang dikenal dengan Abu Kuta Krueng – tampak sedang mencium (dengan kening) tangan Gubernur Aceh (Zaini Abdullah) sembari tangan kirinya memegang "kunci besar."

Mungkin karena terlihat tidak lazim, maka berbagai komentar pun bermunculan di *facebook*. Pro-kontra pun meledak meletus. Masing-masing *netizen* membuat penafsiran yang beragam. Ada yang menyebut Abu Doto "tidak punya adab" karena dia tidak merendahkan kepalanya ketika tanggannya dicium Abu Kuta Krueng. Ada pula yang berpendapat – seharusnya Abu Doto-lah yang mencium tangan Abu Kuta Krueng. Sebagian yang lain justru terkesan menyalahkan Abu Kuta karena mencium tangan Abu Doto hanya karena "diberi

mobil." Dan segudang penafsiran lainnya yang tidak mungkin diuraikan di sini.

Setelah membaca berbagai rupa komentar di *facebook*, saya pun membuat sebuah status – yang sebenarnya tidak terlalu serius, dan bukan pula main-main. Menurut pendapat awam saya, apa yang terpampang di foto tersebut adalah pemandangan biasa yang bisa kita jumpai di mana saja. Lagi pula kita semua tahu bahwa Zaini Abdullah adalah sosok umara (gubernur) di Aceh, sedangkan Abu Kuta dikenal sebagai ulama. Lagi pula dari segi usia, tampaknya Zaini Abdullah lebih tua dari Abu Kuta. Dengan demikian aksi cium tangan yang dilakukan oleh Abu Kuta tidak-lah merendahkan derajat beliau. Demikian pula dengan Zaini Abdullah yang "mengizinkan" tangganya dicium Abu Kuta tidaklah bermakna bahwa Zaini Abdullah "kurang adab."

Saya melihat apa yang terpampang di foto tersebut hanyalah sebuah suasana keakraban – di mana lain orang lain pula caranya. Ada orang yang menunjukkan keakrabannya dengan saling peluk – tanpa harus mempermasalahkan siapa yang duluan memeluk. Ada juga yang menciptakan keakraban dengan saling lempar senyum – tanpa harus diperiksa siapa yang senyumnya paling lebar. Tentu setiap orang memiliki strategi tersendiri untuk mengekspresikan suasana hatinya – tanpa perlu intervensi pihak lain.

Lagi pula, foto penyerahan mobil bantuan, tepatnya mobil pinjaman – sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa sumber kepada para tokoh agama tersebut bukanlah satu-satunya foto yang bisa ditafsirkan sesuka hati. Maksudnya, di *facebook* juga banyak beredar foto lain yang sebagiannya menujukkan bahwa tidak hanya Abu Kuta yang mencium tangan Zaini Abdullah,

tetapi Zaini Abdullah pun sempat mencium tangan Abu Kuta. Cuma saja foto tersebut kurang diminati oleh sebagian *netizen* – mungkin karena terlihat biasa saja. Kan kita suka yang aneh-aneh?

Di musim-musim politik seperti sekarang ini, apa pun bisa dijadikan isu demi kepentingan politik masing-masing. Foto yang terlihat biasa saja bisa disulap menjadi sesuatu yang "luar biasa." Seorang kandidat yang hanya berfoto di podium kosong pun – dengan berbagai kreasi – bisa dibuat sebagai alat propaganda, dengan mengampanyekan bahwa si kandidat tersebut sedang berpidato di gedung PBB. Bahkan uniknya lagi, dulu ada seorang politisi yang kononnya akan membuka kantor PBB di Aceh. Bahasa kerennya, semua bisa "diolah" demi kepentingan politik.

Namun sayangnya, terkadang kita terlalu latah. "Tragedi" foto Abu Kuta dan Abu Doto sebagaimana telah disinggung di atas adalah salah satu bentuk "kampanye politik" yang tanpa disadari telah "mencemarkan" harga diri orang lain. Namun demikian, tulisan ini bukanlah "ruang pengadilan," sehingga siapa yang telah "bermain" dalam "tragedi" foto tersebut adalah tidak penting untuk dibahas – apalagi dihakimi. Yang jelas, tentu ada yang "terluka" dengan ulah sebagian kita yang terkadang "kebablasan."

Padahal, politik itu juga punya etika. Latah boleh, tapi jangan "terlalu", seperti kata Bang Roma. (***AT, 28 September 2016***).

Dosen Bek Sok, Mahasiswa Bek Ulok

Saat ini *netizen* Aceh sedang larut dalam keasyikan apologis dalam menyikapi kasus mahasiswa versus dosen di Universitas Negeri Malikussaleh (Unimal). Sebagian kalangan dengan berbagai rupa kampanye emosional terlihat begitu bersemangat menggalang dukungan untuk si mahasiswi. Sedangkan sebagian kalangan lagi dengan segala daya dan upaya juga melakukan "jihad argumen" guna membela sang dosen. Ketika kabar kontroversial ini bergulir, saya berusaha menyimak setiap argumen yang saling berbenturan di media sosial.

Saya sangat bersyukur kepada Allah karena saya tidak mengenal kedua sosok yang sedang "naik daun" itu. Kondisi ini tentu akan menjadi modal utama bagi saya untuk menjaga netralitas sehingga saya tidak terperosok ke dalam salah satu lubang yang sedang menganga. Menjaga agar tidak terperosok ke dalam lubang-lubang gelap adalah sangat penting, karena kita tidak tahu lubang mana yang berisi ular dan lubang mana berisi telur ayam. Jangan sampai semangat yang menyala-

nyala itu menghalangi pandangan kita sehingga *meubalek cak meutuka cok*. Niat hati hendak mengambil telur, akhirnya tangan dipatuk ular. Sial, bukan?

Dalam tulisan ini, saya tidak akan masuk dalam ruang konflik antara mahasiswi vs dosen yang saat ini sedang berkecamuk hebat. Biarlah konflik tersebut difasilitasi oleh mereka-mereka yang paham masalah dan mampu bersikap bijak. Tulisan ini hanya akan mengulas sekilas tentang maqam-maqam dosen dan maqam-maqam mahasiswa (i) serta usaha guna menciptakan hubungan yang harmonis antara keduanya. Saya kira penjelasan ini penting guna menghindari konflik antara dosen dan mahasiswa. Kita tentu sangat yakin bahwa konflik itu tidak menyenangkan.

Maqam-Maqam Dosen

Pemilihan kata maqam dalam tulisan ini hanya untuk mempermudah kita dalam mengingat, karena istilah ini lazim dipakai dalam kajian sufisme, di mana para sufi itu memiliki maqam yang berbeda satu sama lain. Ada yang berada di maqam bawah, maqam sedang (pertengahan) dan maqam puncak. Ada pun nama dari maqam-maqam itu pun berbeda-beda pula.

Penting pula diingatkan bahwa tulisan tidak berdasarkan penelitian ilmiah, tapi hanya didasarkan pada pengamatan parsial dan pengalaman yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk melakukan penilaian terhadap pihak-pihak dimaksud. Dengan demikian, tulisan ini tentunya tidak kebal terhadap kritik tersebab lemahnya kerangka metodologis.

Untuk penyederhanaan, saya membagi maqam dosen ke dalam tiga tingkatan. *Pertama,* Dosen Ideal. Dosen serupa ini tentunya sangat sulit ditemukan, meskipun tidak *utopis*. Dosen ini memiliki kemampuan akademik yang mumpuni – tentunya di atas kemampuan rata-rata mahasiwa. Selain otak yang cemerlang, dosen ini juga memiliki akhlak yang mulia, di mana tidak seorang mahasiwa (i) pun yang dizaliminya, baik persoalan nilai maupun perkara administratif lainnya.

Dosen ideal mampu menghargai setiap mahasiswanya dan tidak merasa takut disaingi. Setiap pendapat dan kritikan mahasiswa akan didengarnya dengan pikiran terbuka dan setiap keluhan akan ditampung semampunya. Meskipun dia memiliki kecerdasan tinggi, tapi dia tidak memosisikan diri sebagai "paling tahu" yang dengan sendirinya akan menjadikan mahasiswa sebagai pihak yang paling tidak tahu. Yang jelas, dosen ideal akan menjadi idola bagi para mahasiswa (i).

Kedua, Dosen Abangan alias sedang-sedang saja. Dosen model ini tidak identik dengan kemampuan akademik yang tinggi. Bisa saja kemampuan akademiknya "rendah" atau setara mahasiswa, tetapi dia tidak berlagak sok tahu di hadapan mahasiswanya. Dia juga tidak memosisikan dirinya sebagai pusat informasi atau pemangku kebenaran tunggal. Tapi, dosen tipe ini sering menzalimi mahasiswa (i) nya tanpa sengaja. Mahasiswa yang cerdas dan aktif bisa saja memperoleh nilai B minus, sebaliknya, mahasiswa tukang bolos, *beuo seuiet* (malas kuadrat) dan *teungak-ngak* alias suka ngorok di kelas tidak tertutup kemungkinan untuk mendapatkan nilai A plus. Dosen model ini meskipun sikapnya demokratis dan ramah, namun dia kurang perhatian terhadap mahasiswanya. Baginya mengajar hanyalah sebuah rutinitas semata. Dosen serupa ini

tetap dihormati oleh mahasiswa karena sikapnya yang humanis. Ada pun kekesalan dan kekecewaan kecil yang dialami oleh si mahasiswa akan pudar seiring perjalanan masa.

Ketiga, Dosen *Sok Mok*. Istilah *sok mok* sulit dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Secara bebas, kata *sok mok* dapat diterjemahkan sebagai sikap merasa diri paling pintar, paling benar dan sederatan "kepalingan" lainnya. Di hadapan mahasiswanya, dosen model ini akan mencitrakan dirinya sebagai "Imam Mujtahid Agung" yang tidak bisa dibantah sedikit pun. Di ruang kuliah ia juga berlagak layaknya panglima tentara, dan mahasiswanya diposisikan sebagai prajurit berpangkat "balok merah."

Dosen *sok mok,* dalam melakukan interaksi dengan mahasiswa sering menggunakan kata-kata yang kurang indah didengar, di antaranya: "keluar kamu," "kamu belum paham," "kamu kurang update," "kamu terlalu egois," "saya sudah berpengalaman," "saya sudah mempelajari ini puluhan tahun," "saya sudah biasa mengajar di kelas internasional," "penelitian saya sudah banyak" dan segudang kalimat lainnya yang bernada merendahkan mahasiswa dan meninggikan dirinya.

Ketika dikritik, dosen *sok mok* ini sangat mudah tersinggung. Demikian pula ketika mahasiswa mengajukan pendapatnya, dia hanya bersikap dingin sambil tersenyum sinis. Bahayanya lagi, dosen model ini akan melakukan kezaliman secara sengaja terhadap mahasiswa dengan cara "menyederhanakan" nilai yang diperoleh mahasiswa dalam perkuliahan. Kontrak belajar yang dibuat di ruang kuliah hanya berlaku bagi mahasiswa, sedangkan si dosen bisa sesuka hatinya. Kalau ada mahasiswa yang terlambat masuk, dia tidak segan-segan menutup pintu kelas. Tetapi giliran dia yang tidak masuk, mahasiswalah yang

"terpenjara" dan harus tetap menunggu di kelas. Untuk masalah nilai, dosen *sok mok* ini lebih suka melakukan penyeragaman. Biasanya seluruh mahasiswa akan diberi nilai B minus, tanpa pandang bulu. Adapun nilai C plus akan dihadiahkan kepada mahasiwa yang sering berbeda pendapat dengannnya.

Dosen *sok mok* memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda. Sebagiannya memiliki otak yang memang benar-benar cerdas, sedangkan sebagian yang lain justru memiliki kemampuan akademik yang rendah, untuk tidak menyebut *ulee boh leuping*. Misalnya, dalam penelitian lapangan, si dosen *ulee boh leuping* ini biasanya akan menyuruh mahasiswanya untuk mewawancarai buku.

Bagi mahasiswa, dosen *sok mok* akan dikenang sepanjang masa. Kata-katanya akan membekas di ingatan dan perilakunya akan selalu terbayang sampai jauh.

Maqam Mahasiswa

Sama halnya seperti dosen, mahasiwa juga memiliki maqam tersendiri. Maqam mahasiswa juga akan disederhanakan menjadi tiga tingkatan. *Pertama,* mahasiswa karismatik. Dia memiliki kemampuan akademik yang luar biasa dan sering disebut dengan "tukang kuliah." Cita-cita terbesar mahasiswa ini adalah mendapatkan IPK 4,5. Di ruang kelas, mahasiswa model ini biasanya selalu mendapat sanjungan dari dosen sebagai mahasiswa "*uswatun hasanah*."

Jika terjadi ketegangan antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa karismatik ini selalu saja menjadi penengah dengan cara membela dosennya. Jika ada mahasiswa lain yang "kurang beres" dengan secepat kilat mahasiswa karismatik tersebut

membuat laporan kepada dosennya. Mahasiswa karismatik dengan segala daya dan upaya akan selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri tanpa peduli kepada nasib kawan-kawannya. Ciri khas lainnya dari mahasiswa karismatik adalah kegemarannya dalam "menjilat" dosen.

Kedua, mahasiwa *Ulok*. Mahasiswa ini kebalikan dari mahasiswa karismatik. Dia sangat jarang masuk kuliah dengan berbagai alasan. Biasanya dia akan menujuk mahasiswa lain sebagai "asistennya" untuk teken absen. Jika pun dia masuk kuliah, kerjanya hanya tidur, keluar masuk ruang atau main game via android. Mahasiswa *Ulok* sering mendebat dan merendahkan dosennya di ruang kelas.

Pada saat ujian mata kuliah digelar, mahasiswa *ulok* biasanya tidak hadir dengan alasan macam-macam. Parahnya, ketika nilainya tidak keluar, dia akan memaki-maki dosennya dan mengarang cerita-cerita palsu untuk menjatuhkan kewibawaan dosen. Kadang-kadang mahasiswa *ulok* juga bersikap sok aktivis, sok orator ulung, sok konseptor dan berbagai jenis sok lainnya.

Ketiga, mahasiswa keren. Mahasiswa tipe ini tampak biasa-biasa saja, tidak terlalu cerdas dan tidak pula terlalu "lelet." Mahasiswa model ini mampu menjaga keseimbangan dalam setiap tindakannya. Di ruang kelas, dia menghormati dosennya sebagai seorang guru yang telah menyingkap tabir gelap di pikirannya. Jika pun hendak mengkritik dia akan melakukannya dengan santun sehingga wibawa dosennya tetap terjaga. Di luar kelas, mahasiswa keren juga akan tetap menjaga komunikasi dan silaturrahim dengan dosennya. Umumnya, mahasiswa model inilah yang akan memperoleh kesuksesan di kemudian hari, karena ia telah berada di maqam tertinggi.

Menjaga Keharmonisan

Setelah menyimak uraian di atas, setidaknya kita sudah tahu di mana posisi kita, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Dosen dan mahasiswa harus mampu menjaga keharmonisan sehingga hubungan keduanya tidak terbatas di ruang kelas, tetapi bisa berlanjut dalam hubungan yang lebih luas. Walau bagaimana pun, dosen adalah seorang guru, seorang "teungku" dan seorang "mursyid" yang harus kita hormati. Ada pun seorang mahasiswa, sehebat dan secerdas apa pun, kita adalah seorang murid dan anak didik yang harus siap dibimbing dan dicerdaskan.

Untuk menjaga keharmonisan antara dosen dan mahasiswa sebenarnya sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya. Kuncinya hanya dua, dosen *bek sok*, mahasiswa *bek ulok*. (***AT, 22 Oktober 2016***).

Sampai Kapan Kita Harus Lebay?

Dalam beberapa hari terakhir ini, nama Cut Nyak Meutia terus disebut-sebut. Media sosial pun tumpah-ruah dengan komentar terkait pahlawan wanita Aceh ini. Semua bicara tentang Cut Nyak Meutia. Tentu tidak ada yang aneh ketika Cut Nyak Meutia ini terus dibicarakan, sebab beliau adalah sosok berani yang telah berjuang mengusir *kaphe* Belanda dari tanah Aceh. Namun, diskursus tentang Cut Nyak Meutia yang berlangsung dalam beberapa hari ini tidak terkait sama sekali dengan aktivitas perjuangan beliau di masa lalu. Tapi, hanya sebuah ekspresi kekesalan sebagian anak negeri karena menurut mereka Cut Nyak Meutia telah "dilecehkan."

Menurut sebagian kalangan, kehadiran Cut Nyak Meutia dalam uang kertas baru adalah sebuah "pelecehan" sebab wujud Cut Nyak Meutia ditampilkan tanpa jilbab. Faktor inilah yang kemudian mendorong sebagian kalangan di Aceh melancarkan aksi protes. Berbagai argumen pun diembus guna mendukung keyakinan masing-masing. Sebagian kalangan beranggapan bahwa penampilan Cut Nyak Meutia tanpa jilbab di lembaran uang kertas baru tersebut dapat mencederai semangat penegakan syariat Islam di Aceh. Sementara sebagian kalangan

lainnya dengan semangat taqlidismenya mengajukan logika yang sulit dinalar, bahwa "tidak boleh tidak, Cut Nyak Meutia harus berjilbab."

Mencederai Syariat Islam

Dua pendapat di atas terus digulir dengan harapan berubahnya persepsi publik. Pendapat yang menyebut bahwa terpampangnya wajah Cut Meutia tanpa jilbab dapat mencederai semangat syariat Islam sepintas memang dapat diterima mengingat Aceh sedang gencar-gencarnya menerapkan syariat Islam. Di sisi lain, pendapat ini juga menandakan bahwa si empunya pendapat tersebut, seperti kata HAMKA, masih memiliki ghirah keagamaan. Dalam hal ini, harus kita apresiasi. Artinya, yang bersangkutan tidak ingin syariat Islam di Aceh tercederai hanya karena penampilan Cut Meutia tanpa penutup kepala. Tapi, kita juga harus tersadarkan, bahwa syariat Islam tidak hanya tercederai dengan uang kertas tersebut.

Adalah aneh, ketika kita begitu bersemangat melancarkan aksi protes terhadap munculnya wajah Cut Meutia tanpa jilbab dalam uang kertas, tetapi sebaliknya kita bersikap dingin terhadap beredarnya sejumlah VCD lagu Aceh yang jelas-jelas mengundang syahwat. Sampai saat ini, VCD yang menampilkan perempuan Aceh tanpa jilbab plus pakaian ketat sembari melenggak-lenggok pinggul masih saja bebas beredar. Hebatnya lagi, VCD lagu-lagu Aceh tersebut ditayangkan secara bebas di kedai-kedai kopi, bahkan sangat digemari oleh sebagian masyarakat.

Kita sepakat bahwa penampilan Cut Meutia tanpa jilbab dalam uang kertas tidak sesuai dengan spirit syariat Islam,

tetapi saya yakin bahwa penampilan Cut Meutia tanpa jilbab dalam uang kertas tersebut tidak akan mengundang syahwat bagi siapa pun, khususnya bagi insan-insan yang masih waras. Kondisi ini tentu berbeda dengan penampakan sebagian penyanyi Aceh yang tampil *bahenol* dan seksi dalam VCD yang beredar. Saya yakin, siapa pun yang menonton goyangan mereka akan terangsang syahwatnya, kecuali bagi mereka-mereka yang syahwatnya telah mati. Dengan demikian, sebelum kita memboikot foto Cut Meutia dalam uang kertas, tentu kita harus terlebih dulu memboikot "goyangan maut" sebagian penyanyi Aceh.

Taklidisme

Pendapat kedua mengatakan bahwa Cut Meutia memang berjilbab sehingga foto Cut Meutia yang ditampilkan dalam uang kertas baru tersebut adalah tidak pantas dan bahkan "melecehkan" Cut Meutia.

Akibat terlalu degil, malah ada *netizen* yang menulis statemen tak etis via status *facebook*: *dipike Cut Meutia lagee nek jih, jilhon dikeu Belanda* (dia pikir Cut Meutia seperti neneknya, telanjang di depan Belanda). Ini adalah kalimat paling "tololet" abad ini. Ketika sikap taqlidisme telah memuncak, maka yang lahir adalah apologi-apologi *dha'if* yang justru membunuh nalar. Orang serupa ini hendak memaksakan agar kenyataan sejarah haruslah sesuai harapannya sehingga tanpa sadar dia justru telah mengkhianati sejarah itu sendiri. Ini adalah sikap frustasi!

Sebenarnya, jika kita merujuk pada foto-foto perempuan Aceh tempo dulu, umumnya memang tidak menggunakan

jilbab sebagaimana jilbab yang dikenal saat ini di Aceh (jilbab syar'i). Secara umum, wanita Aceh tempo dulu hanya menggunakan kain penutup kepala, di mana rambut dan tubuh bagian depan (leher) tidak tertutup dengan sempurna. Demikian pula dengan Cut Meutia dan wanita Aceh lainnya, tidak ditemukan bukti-bukti bahwa mereka menggunakan jilbab layaknya model Iran atau pun Saudi.

Kondisi sebagian wanita Aceh yang tidak menutup kepala secara sempurna adalah kenyataan sejarah. Namun demikian, kita tidak memungkiri bahwa ada pula sebagian wanita Aceh yang menutup kepala secara sempurna dengan jilbab syar'i pada era 1920-an. Tapi secara umum wanita Aceh sampai dengan kemerdekaan Indonesia memang tidak memakai jilbab syar'i, apalagi pada masa itu sedang ngetrend *boh langgoi* (sanggul rambut).

Tidak hanya istri masyarakat awam, bahkan sebagian istri ulama-ulama di Aceh tempo dulu pun tidak menutup kepala dengan sempurna, hanya *ija sawak*. Kenyataan ini dapat kita saksikan sendiri dari foto-foto yang beredar. Sebagai contoh, istri dari Teungku Haji Hasan Krueng Kalee pada masa mudanya juga tidak menutup kepala. Demikian pula dengan istri Abuya Mudawali Al-Khalidi yang mudah kita temukan dalam sebagian foto juga hanya memakai *ija sawak* dengan sebagian rambut tampak keluar. Pemandangan ini dapat pula kita lihat dalam foto-foto lasykar wanita pejuang kemerdekaan di Aceh seperti lasykar Pocut Baren yang juga tanpa penutup kepala. Sekali lagi, ini adalah kenyataan sejarah.

Kenyataan bahwa sebagian wanita tempo dulu tidak menutup kepala dengan jilbab syar'i tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di Indonesia pada umumnya. Bahkan sampai

dengan tahun 1999, masih ramai wanita Aceh yang sama sekali tidak menggunakan jilbab dengan rambut dikepang dua.

Kenyataan Sejarah

Idealnya kita memang berharap agar foto Cut Meutia tersebut berjilbab syar'i, bahkan jika perlu model jilbab Iran atau Saudi. Tapi, kita tentunya harus cerdas memilah-milah antara kenyataan sejarah dengan harapan. Cut Meutia tidak menggunakan jilbab syari'i adalah kenyataan sejarah, demikian pula dengan isteri sebagian ulama di Aceh memakai *ija sawak* pun kenyataan sejarah yang tidak bisa kita ubah.

Kita boleh marah, boleh degil dengan menuduh nenek orang lain telanjang, tapi kita tidak akan mampu mengubah kenyataan sejarah yang sudah berlaku. Mengakui kenyataan sejarah adalah lebih baik daripada menabur khayal tanpa bukti. Mengakui bahwa Cut Meutia memang tidak terbukti menggunakan jilbab syar'i tidak akan pernah merendahkan kehormatan beliau.

Kita yakin dan percaya, bahwa Cut Meutia, Cut Nyak Dhien dan juga isteri ulama-ulama Aceh tempo dulu adalah orang-orang yang 'alim dan taat. Mereka adalah muslimah sejati meskipun hanya memakai kain penutup kepala sekadarnya. Bisa saja, pada zaman itu *ija sawak* telah dianggap sebagai sesuatu yang sangat syar'i. Bahkan dalam sebagian literatur disebutkan bahwa penggunaan jilbab syar'i seperti kita kenal hari ini baru merambah Indonesia pasca Revolusi Iran 1979.

Tersebab itu, kita tidak perlu lebay dalam menyikapi foto Cut Meutia dalam uang kertas yang akan beredar tersebut. Jika memang kita tidak *ridha* foto tanpa jilbab tersebut dipampang,

maka solusinya adalah meminta kepada pemerintah untuk tidak mencantumkan foto Cut Meutia. Baiknya foto Cut Meutia diganti dengan foto Teuku Umar atau Panglima Polim tanpa melibatkan pahlawan wanita. Dengan demikian persoalan akan selesai. (***AT, 22 Desember 2016***).

Menculik Kewarasan

Sebelumnya perlu diingatkan, bahwa dalam artikel ini saya tidak berada pada posisi mengabaikan isu penculikan anak yang telah menyulut kehebohan dalam beberapa hari terakhir, dan tidak pula pada posisi membenarkan isu tersebut yang telah berdampak pada lahirnya kekerasan-kekerasan baru di Aceh. Tulisan ini hanya mencoba mengurai benang kusut akibat informasi tanpa rawi yang menyebar liar sehingga meretas kewarasan sebagian kita. Informasi tak bersanad itu telah menyulut emosi sebagian masyarakat sehingga masyarakat pula yang harus menjadi tumbal dari "keganasan" saudaranya sendiri.

Dalam beberapa hari terakhir, media telah menyajikan sejumlah informasi terkait aksi pemukulan dan kekerasan terhadap para terduga penculik anak yang ciri-cirinya mengerucut pada sosok pengemis dan orang gila – di mana dua ciri-ciri ini diduga sebagai sebuah bentuk penyamaran. Akibatnya, sebagaimana dilansir beberapa media, saudara-saudara kita yang menderita keterbelakangan mental, sakit jiwa dan para pengemis menjadi terancam hidupnya. Isu penculik anak dan pola penyelesaian melalui kekerasan ini tidak hanya

terjadi di Aceh, tetapi juga di daerah lainnya. Bahkan di Depok dan wilayah lainnya di Jawa Barat telah memakan korban jiwa, di mana seorang gelandangan tewas dihakimi massa.

Serambi Indonesia (25/03/17) meriwayatkan bahwa seorang wanita gila ditangkap dan disirami bensin di wilayah hukum Lhokseumawe. Wanita itu diperlakukan layaknya penjahat besar dan bahkan pelipis kirinya terluka akibat dipukul massa. Sebelumnya, seorang warga Sumatera Utara juga dihajar massa sampai babak belur pada 22 Maret di Kuta Cane. Korban pemukulan bernama Ritua Harahap yang "dihukum" secara sadis hanya karena meminta air minum itu diduga mengalami kelainan jiwa. Beberapa hari sebelumnya, aksi main hakim sendiri ini juga terjadi di beberapa tempat di Aceh, seperti di Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Barat Daya.

Adapun terkait benar tidaknya isu penculikan anak telah dijawab secara tegas oleh Kapolri, bahwa informasi tersebut adalah *hoax*. Penegasan serupa juga sudah dilakukan oleh aparat kepolisian di beberapa daerah. Namun sayangnya, kepanikan masyarakat ternyata tidak mudah lekang. Hal ini terbukti, pasca keterangan Kapolri, aksi kekerasan terhadap orang asing dan orang gila yang diduga sebagai penculik anak terus saja berlanjut.

Salah Siapa?

Menyikapi isu penculikan anak, ada dua hal yang harus kita lakukan, *pertama,* meningkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi kejahatan, tidak hanya terhadap penculik anak, tetapi juga terhadap penculik ibu anak, ayah anak, dan juga penjahat-penjahat lainnya. *Kedua,* sebagai masyarakat sadar hukum

sekaligus insan beriman, langkah yang harus dilakukan ketika menemukan penjahat adalah melaporkan kepada penegak hukum. Menangkap seseorang yang dicurigai memang tidak bisa disalahkan sebagai salah satu bentuk kewaspadaan, tetapi melakukan kekerasan terhadap mereka, apalagi belum terbukti secara meyakinkan di depan hukum adalah tindakan yang dicela oleh undang-undang dan juga ditentang oleh agama.

Muncul pertanyaan, apakah kekerasan tidak dibenarkan sama sekali? Jawabannya adalah dibenarkan, dalam kondisi tertentu. Kekerasan hanya dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri, di mana kondisi kita benar-benar terancam. Sebagai contoh, ada seorang penjahat menodongkan senjata ke hadapan kita, kebetulan kita menyimpan rencong di pinggang, maka langkah paling tepat yang harus kita lakukan adalah menancapkan rencong itu ke jidat si penodong, bukan justru minta izin kepada si penodong untuk melapor polisi. Demikian pula ketika ada seorang pencuri tanpa senjata yang masuk rumah, tugas kita adalah menangkap si pencuri jika mampu, atau minimal berteriak, bukan justru membiarkan pencuri menguras barang-barang kita sambil bergumam dalam hati bahwa "saya anti kekerasan." Ini namanya *meubalek cak meutuka cok*.

Lantas bagaimana dengan kekerasan yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang diduga penculik anak, padahal tidak pernah terbukti? Menurut pendapat awam saya, tindakan kekerasan yang terjadi selama ini terhadap orang gila dan saudara kita yang mengalami keterbelakangan mental adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang manapun. Tidak ada satu ayat pun dalam undang-undang yang membenarkan perilaku anarkis semacam ini. Demikian pula

tidak ada satu dalil pun dalam Alquran dan Sunnah, serta tidak ada qiyas dan ijmak yang dapat digunakan untuk menjustifikasi tindakan barbarian serupa ini. Melakukan kekerasan atau pun pembunuhan terhadap orang lain, apalagi seorang muslim adalah adalah kejahatan besar yang akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Tak perlu ragu dan bimbang, karena ancaman Tuhan itu pasti.

Membunuh seorang kafir zimmi saja dilarang keras oleh Rasul, apalagi membunuh seorang muslim yang darahnya dilindungi oleh agama. Oleh sebab demikian, pihak pertama yang patut disalahkan dalam tragedi kekerasan terhadap terduga penculik anak adalah para penyebar riwayat palsu (*hoax*). Si penyebar *hoax* mungkin masih bisa tersenyum karena *hoax*nya menjadi viral dan laku keras, tetapi dampak dari perbuatan iseng tersebut telah merenggut nyawa dan merusak kewarasan sebagian masyarakat sehingga melahirkan perilaku-perilaku anarkis akibat kekhawatiran berlebihan.

Para pelaku kekerasan juga patut disalahkan karena mereka telah meninggalkan kewarasan dalam menyikapi kabar yang tak jelas sanad rawinya sehingga orang-orang tidak berdosa menjadi korban. Sebagai makhluk yang telah dianugerahi akal seharusnya kita mampu berpikir jernih dalam kondisi apa pun. Apakah mungkin seorang penculik anak itu berjalan sendirian untuk menculik hanya dengan bermodalkan kantong plastik? Mencuri anak ayam saja harus hati-hati, apalagi mencuri anak manusia.

Akhirnya kita harus yakin bahwa para korban adalah orang-orang yang teraniaya dan terusik hak-haknya akibat ulah segelintir oknum masyarakat yang kewarasannya telah diculik

oleh kabar bohong. Idealnya, kita memang harus tetap waspada dan siaga tanpa meninggalkan kewarasan. (***AT, 25 Maret 2017***).

Menjemput Mante

Kiranya perlu ditegaskan bahwa saya tidak dalam posisi membenarkan keberadaan Suku Mante dan tidak pula berkepentingan untuk menafikan eksistensi suku tersebut. Terlepas apakah suku tersebut benar ada atau hanya sekadar mitos, yang jelas pemberitaan terkait suku Mante telah melahirkan kehebohan baru, tidak hanya di Aceh, tetapi informasi tersebut juga telah menjalar dalam pemberitaan media nasional. Dan bahkan media asing pun turut mengulas tentang penemuan Mante di pedalaman Aceh. Akhirnya kita pun larut dalam Mante.

Baru-baru ini, tersiar kabar bahwa Pemerintah Aceh di bawah kendali Abu Doto juga telah membentuk tim khusus untuk melakukan penelitian terhadap keberadaan suku Mante di pedalaman Aceh. Kita tentunya patut memberikan apresiasi kepada Abu Doto, meskipun dirinya dalam kondisi "terombang-ambing" dan "digoyang" akibat aksi lantak dan lantik beberapa waktu lalu, namun Abu Doto tetap tegar dan bahkan masih sempat memikirkan Mante.

Menurut riwayat, salah satu pihak yang diandalkan oleh Abu Doto untuk mencari keberadaan Mante adalah ulama.

Menurut Abu Doto sebagaimana dilansir detik.com (30/03/17), pencarian Mante akan dilakukan dengan pendekatan gaib melalui ulama. Namun sayangnya, Abu Doto tidak memberikan penjelasan yang memadai terkait alasannya melibatkan ulama dalam pencarian Mante.

Sebagai masyarakat awam, saya menilai pelibatan ulama dalam pencarian Mante adalah sebuah usaha sia-sia. Alasan utama menyebut tindakan ini sebagai sia-sia karena gerakan mencari Mante bukanlah domain ulama. Melibatkan ulama dalam pencarian Mante secara tidak langsung akan memberi kesan kepada masyarakat awam bahwa ulama memiliki hubungan khusus dengan Mante. Kesan ini tentunya akan sangat merugikan ulama dan bahkan bisa menjatuhkan martabat ulama di mata umat.

Jika pun hendak dipaksakan pelibatan ulama dalam pencarian Mante, maka Abu Doto harus terlebih dahulu mengirimkan tim investigasi ke pedalaman Aceh guna melacak apakah dalam komunitas Mante ada ulamanya. Jika memang hasil investigasi melaporkan bahwa dalam komunitas Mante ada ulama, maka melibatkan ulama non Mante dalam pencarian adalah tindakan yang tepat. Artinya, ulama non Mante dapat memainkan perannya sebagai negosiator untuk kemudian berunding dengan ulama Mante agar komunitas Mante bersedia berbaur dengan masyarakat Aceh.

Ada pun terkait penggunaan ilmu gaib dalam gerakan mencari Mante, sebagaimana disebut Abu Doto, masih perlu ditinjau ulang dan jika perlu diseminarkan dengan melibatkan pakar-pakar ilmu gaib sehingga nantinya kita akan menemukan jawaban apakah penggunaan ilmu gaib dalam pencarian Mante akan benar-benar efektif atau tidak. Jika pun hasil seminar

menyimpulkan bahwa penggunaan ilmu gaib sangat efektif, namun pelibatan ulama dalam pencarian Mante tetap saja tidak bisa dibenarkan.

Jika memang hendak dipaksakan penggunaan ilmu gaib, maka akan lebih elok rasanya jika Abu Doto melibatkan dukun dalam pencarian Mante. Pelibatan dukun dalam gerakan "berburu" Mante via ilmu gaib tentunya lebih minim risiko jika dibanding dengan pelibatan ulama yang *notabene* guru umat. Untuk itu, baiknya Abu Doto tidak mengorbankan ulama dalam pencarian Mante, karena tugas ulama adalah membebaskan umat dari "ritual-ritual" gaib yang bertentangan dengan teks-teks agama.

Di sisi lain, jika memang Mante itu ada, maka bukan tugas kita untuk mengusik kehidupan mereka. *Toh* selama ini mereka bisa hidup nyaman di hutan yang bebas dari praktik-praktik merusak yang lazim kita lakukan di luar hutan. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebut Mante telah melakukan korupsi atau pun tindakan teror terhadap masyarakat Aceh.

Meskipun sebagian kalangan menyebut mereka sebagai penduduk Aceh asli, tapi tidak ada riwayat yang mengabarkan bahwa Mante akan melakukan demonstrasri dan makar terhadap penduduk non Mante. Mereka juga tidak pernah berdesak-desakan di kantor gubernur dan tidak pernah membuat kegaduhan agar proposal mereka dicairkan. Ketika anak-anak mereka sakit, mereka juga tidak pernah menyerbu rumah sakit dengan membawa kartu berobat gratis.

Mante juga tidak pernah menuntut agar mereka diberikan bendera sebagai simbol indentitas "Kemantean" mereka. Mante juga tidak pernah bercita-cita untuk menjadi anggota DPR dan

tidak pula bermimpi jadi gubernur, apalagi Wali Nanggroe. Mereka sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Mereka hidup terasing dan bebas dari kebisingan politik yang terkadang merusak kewarasan. Tersebab itu, biarkanlah Mante dengan kehidupannya.

Jangan lagi mengusik Mante, tapi marilahlah kita menjadi "Mante" yang mampu hidup tanpa mengusik, merusak, menipu, membunuh dan meneror. (***AT, 01 April 2017***).

Hikayat Penjilat

Sebelum terlalu dalam, baiknya kita ajukan satu pertanyaan. Apakah menjadi penjilat itu sebuah pilihan atau takdir? Sebelum menjawab, mungkin langkah pertama yang patut dilakukan adalah memperjelas di mana posisi kita ketika aksi jilat-menjilat itu kita lakoni. Dalam kondisi normal, ketika aksi jilat hanya dimaksudkan sebagai sarana memperkuat posisi guna memperoleh keuntungan, maka jurus jilat itu adalah pilihan. Sebaliknya, dalam kondisi sekarat, di mana gerakan jilat menjadi satu-satunya jalan mempertahankan posisi, tidak untuk mencari keuntungan, tapi hanya menghindari kerugian, maka dalam kondisi ini jilat menjadi takdir. Namun demikian, tesis ini masih terbuka untuk dikritik, sebab ia bukan ayat kitab suci.

Hardiman (2005), dalam bukunya *Memahami Negativitas,* menyebut penjilat sebagai manusia kosong yang cukup lihai menyembunyikan kekosongan itu dengan berlagak patuh. Aksi penjilatan, masih menurut Hardiman, adalah suatu aksi yang menggunakan instrumen-instrumen ketundukan guna merangsang kepatuhan targetnya. Sang penjilat berpura-pura patuh dengan maksud memerintah dan ia berlutut di

atas bumi agar tergetnya tersungkur mencium bumi. Sebagai sebuah teori, apa yang disampaikan Hardiman ini pun masih bisa dikuliti dan tak wajib diikuti.

Namun demikian, dilihat dari praktiknya, aksi jilat-menjilat pada umumnya memang dilakoni oleh manusia-manusia kosong yang telah menceraikan akal sebelum akal itu dikenalnya. Penjilat adalah orang-orang yang telah menggunting "kemaluannya" sebagai satu-satunya syarat menuju identitas baru – manusia bermuka tembok. Dalam kondisi inilah seorang penjilat bebas melakukan aksinya melalui berbagai jurus sehingga mata tuannya menjadi sayu dan akhirnya menunduk sembari mengangguk.

Aksi jilat-menjilat bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Aksi ini tidak mengenal tempat dan waktu. Setiap kita memiliki peluang yang sama untuk menjadi penjilat-penjilat yang sukses. Ketika nafsu telah memuncak, akal pun tertidur. Dalam kondisi ini otak tidak lagi berfungsi dan hati pun terkunci sehingga jiwa dibuai mimpi dan akhirnya khayal pun berlari-lari. Dalam dunia penjilatan, kejujuran sama sekali tidak berharga dan kemunafikan pun menjadi niscaya.

Para penjilat akan semakin jumawa ketika ia berhadapan dengan tuan-tuan lemah tak berdaya. Di hadapan tuan-tuan lemah ini, si penjilat tampil bagaikan pahlawan yang senantiasa menabur mantra penyejuk hati. Suara lembut dan gerak badan meyakinkan dari si penjilat membuat kita tidak sadar, bahwa dia adalah pembunuh berdarah dingin yang mencincang kewarasan. Dengan lidah manisnya, si penjilat menyembur mantra beracun dan menebar propaganda. Bagi hati yang galau, semburan racun itu dianggapnya sebagai harapan sehingga ia pun percaya.

Di hadapan kita, si penjilat berpura-pura tunduk dan patuh, tapi di belakang dia menabur jarum-jarum kebencian. Pada saat tuannya di puncak kejayaan, si penjilat senantiasa bersenandung menyanjung puja. Sebaliknya, ketika si tuan tersungkur layu, si penjilat pun berpaling muka sambil mencaci maki.

Nafsu penjilat tidak pernah mati. Ia terus hidup dan menjadi teman setia manusia-manusia kosong. Semakin kosong jiwanya semakin keras pula jilatannya. Sampai saat ini, para penjilat dalam segala wujudnya terus bergentayangan mencari mangsa. Dia mencari tuan-tuan lemah untuk dikelabui dan ditundukkan dengan jurus kepatuhan palsu. Si penjilat menjual kepatuhan agar tuannya patuh pada kehendaknya. Si penjilat juga mempersembahkan ketundukan sebagai sebuah strategi menundukkan tuannya.

Jika kita percaya di mana ada gula di situ ada semut, maka kita pun harus yakin bahwa di mana ada kuasa di situ ada penjilat. Setelah jilatannya kering, si penjilat pun akan meludah di hadapan kita. Saat itulah kita menangis. Tentunya ini adalah akhir yang tragis. Tersebab itu kenalilah para penjilat yang saat ini terus bergentayangan di sekitar kita. Atau kita sendiri seorang penjilat? (***AT, 08 April 2017***).

Adat dan Akai Burek Katek

Kata *akai* menurut Kamus Aceh-Indonesia (Aboe Bakar dkk, 1985) bisa dimaknai bermacam-macam. *Akai* dalam bahasa Aceh terkadang sinonim dengan kata *akal* dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam kondisi tertentu, masih menurut kamus, kata *akai* juga bisa dimaknai sebagai sebuah kecakapan atau daya upaya, sebagai contoh: *jih panyang akai* (dia panjang akal/ pandai). *Akai* juga bisa diterjemahkan sebagai sebuah sifat atau watak, seperti: *si Amat sit ka lagee nyan akai* (si Amat memang sudah demikian sifatnya). Sebagai bahasa yang kaya, kata *akai* dalam bahasa Aceh juga bisa didefinisikan sebagai perilaku, sebagai contoh: *jih brok that akai* (dia buruk sekali perilakunya).

Dalam percakapan sehari-hari, khususnya di wilayah pantai Timur Aceh, kita juga sering mendengar istilah *burek katek* yang dimaknai sebagai sebuah perilaku buruk atau jahat. Namun sayangnya, kata *burek* dalam kamus memiliki makna lain, yaitu burik atau berbintik kelabu dan tidak memiliki kaitan dengan perilaku seseorang. Sementara kata *katek* tidak terdapat dalam kamus Aceh-Indonesia. Dengan demikian, dapat diduga

bahwa istilah *burek katek* adalah kosa kata modern sehingga belum sempat dimasukkan dalam kamus.

Istilah *akai meuburek katek* sering disematkan kepada orang-orang yang berperilaku jahat, suka mengganggu, hobi membuat kekacauan dan tidak memiliki sopan santun. Dengan demikian, kiranya dapat dipahami bahwa penggunaan istilah *akai meuburek katek* dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai sebuah penggambaran perilaku seseorang yang perilaku tersebut tidak patut ditiru. Insan-insan dengan *akai meuburek katek* akan selalu ada dan terus hidup bersama kita. Dan bukan tidak mungkin dalam kondisi tertentu, kita pun mengidap penyakit *akai meuburek katek*.

Baru-baru ini, tersiar kabar melalui media sosial dan juga sempat dilansir oleh *tribratanewsaceh.com*, bahwa masyarakat Desa Mesjid Runtoh Kabupaten Pidie menangkap muda-mudi yang diduga telah melakukan mesum di sebuah rumah kontrakan pada 10/04/17 sekitar pukul 00.30 WIB. Dikabarkan pula bahwa kedua muda-mudi tersebut sempat dikenakan sanki adat oleh masyarakat setempat dengan memandikan air got saat dibawa ke menasah. Setelah prosesi hukum adat selesai, kedua muda-mudi tersebut diserahkan kepada WH yang disaksikan oleh personel Polsek Pidie, demikian dilaporkan *tribratanewsaceh.com*.

Sepintas, informasi di atas terkesan biasa saja. Tapi saya, menangkap satu frasa yang sempat diulang dua kali dalam berita tersebut, hukum adat. Tentu tidak hanya saya, kita semua yang membaca berita ini juga menangkap frasa serupa. Hasil tangkapan ini kemudian memaksa saya untuk kembali membuka kamus guna mencari makna adat yang dimaksud.

Kata adat dalam Kamus Aceh-Indonesia (Aboe Bakar dkk, 1985), diterjemahkan sebagai kebiasaan, kelaziman dan ketentuan. Kata adat juga bisa dimaknai sebagai sopan santun, sehingga penyebutan "tidak beradat" dapat dipahami sebagai tidak memiliki sopan santun.

Saya tidak tahu, adat dalam makna apa yang disitir oleh berita di atas. Jika adat dalam berita tersebut dimaksud sebagai sebuah kebiasaan, maka kita harus sepakat bahwa memandikan terduga pelaku maksiat adalah sebuah kebiasaan yang terus dipertahankan oleh sebagian kalangan di Aceh. Tentunya kejadian di Pidie bukan yang pertama, kejadian serupa juga terjadi di tempat lain dari waktu ke waktu.

Namun demikian, kita tentu tidak sepakat jika memandikan pelaku mesum dengan air got disebut sebagai adat dalam makna sebuah ketentuan atau aturan. Untuk mengetahui hal ini, tentunya kita harus membuka kitab-kitab adat terlebih dahulu. Muhammad Umar (2008), dalam bukunya *Peradaban Aceh (Tamaddun*) mengkasifikasikan adat Aceh ke dalam tiga bagian: *Pertama,* Adat *Tullah*, yaitu sebuah ketentuan yang bersumber dari Kitabullah dan Hadits sehingga tidak bisa diubah karena merupakan unsur syariat. Masuk dalam kategori adat ini, di antaranya: prosesi nikah sesuai syariat, shalat Jumat, shalat Hari Raya, dan juga peringatan hari-hari besar Islam seperti isra' mi'raj.

Kedua, Adat *Mahkamah,* yang meliputi: pemberian gelar, aturan berpakaian, tata krama, adat *meugo,* adat *meulaot,* adat *seuneubok*, adat *meukat*, adat *meuladang*, adat *meuglee*, adat *lhok* (pelabuhan), adat *lampoih*, adat *utoeh* (tukang), dll.

Ketiga, Adat *Tunnah*, adalah adat yang mengalami perubahan dan pertumbuhan dengan munculnya adat-adat baru yang dimunculkan oleh orang-orang kaya, di antaranya: adat *bi bu bidan,* adat *keumaweuh* (antar nasi pada orang hamil), adat *peutron aneuk*, adat *peukatan aneuk* (sunar Rasul), adat *intat linto* dan *tueng dara baro,* adat *manoe pucok*, adat *kanuri jirat* (kenduri kuburan), dll.

Selain itu, seperti disebut Umar, di Aceh juga dikenal istilah pengadilan adat yang melibatkan *geuchik*, *keujruen blang*, *panglima laot*, *peutua seuneubok*, *syahbanda* atau *imum mesjid* jika berkaitan dengan keagamaan. Pengadilan adat ini tidak dimaksudkan untuk memberikan hukuman, tetapi sebagai sebuah forum untuk mencari titik temu guna mendamaikan pihak yang berselisih.

Dari ulasan di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa memandikan pelaku mesum dengan air got bukanlah adat Aceh. Sampai dengan saat ini, saya juga belum berhasil menemukan referensi lain yang memasukkan "mandi air got" sebagai adat Aceh. Dengan demikian, para pelaku yang memandikan pelaku mesum dengan air got dapat disebut sebagai *hana meu adat,* dalam pengertian adat sebagai sopan santun. Artinya, memandikan pelaku mesum dengan air got adalah bagian dari aksi premanisme yang telah memperlakukan manusia tidak sebagai manusia.

Jika pun hendak dipaksakan *mano ie got* sebagai adat, maka dapat diduga bahwa ritual adat serupa itu sengaja dimunculkan oleh orang-orang yang mengidap *akai meuburek katek* sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini.

Orang-orang yang telah menganut *akai meuburek katek* sengaja menciptakan ritual-ritual aneh sebagai sebuah medium untuk memuaskan nafsunya dengan melakukan tindakan-tindakan yang mencemarkan rasa kemanusiaan. Bagi insan yang *akainya meuburek katek*, aksi memandikan orang lain dengan air got dianggap sebagai ajang hiburan untuk ketawa-ketiwi di atas penderitaan orang lain.

Anehnya, meskipun dia rajin memandikan orang lain dengan air got, tapi dia akan marah besar ketika orang lain melakukan hal serupa terhadap adiknya atau kakaknya. Biasanya si *akai meuburek katek* akan berujar: "*adak meudeh kon bek lageenyan*" (maunya jangan begitu), atau "*hanjeut meunan*" (tidak boleh begitu). Demikianlah *akai siburek katek* yang gemar "menjajah" orang lain, tapi akan murka ketika ia "dijajah."

Aceh sebagai daerah yang telah menerapkan syariat Islam, sudah semestinya meninggalkan perilaku *akai burek katek*. Segala bentuk pelanggaran syariat harus dibawa ke Mahkamah Syar'iyah untuk kemudian diadili dan diberi hukuman sesuai qanun syariat Islam, bukan justru dimandikan air got yang merupakan perwujudan adat *si burek katek*. (***AT, 15 April 2017***).

Jangan Seperti Lembu

Bek lage leumo (jangan seperti lembu). Demikian kata-kata yang diucapkan oleh orang tua dulu ketika kita meledakkan petasan di waktu Magrib. Pada waktu kecil, sebagian kita juga mungkin pernah mandi bareng dalam *kulah* mesjid (bak wudhu). Jika aksi ini diketahui Pak bilal, maka stempel *lagee leumo* pun akan segera tertancap di jidat kita. Demikian pula ketika disuruh mengaji, sebagian kita mungkin ada yang berpura-pura ke dayah, tapi tembus ke belakang, ke kolam, menangkap *bace* (gabus). Pada saat aksi kita digerebek oleh teungku, lagi-lagi kita dianugerahkan pujian eksotis, *bit keuneuk jeut keu leumo* (benar-benar mau jadi lembu).

Demikianlah kehidupan masa kecil yang unik, menyenangkan dan bahkan cukup membahagiakan. Meskipun dituduh sebagai *leumo*, kita senantiasa menyambutnya dengan senyuman. Bahkan mungkin ada sebagian kawan-kawan kita di waktu kecil yang lebih memilih menjadi *leumo* daripada duduk melingkar di balai sambil menghafal huruf *peunasab isem peurafa' khabar* di bawah ancaman *rante kunyet* (sejenis pecut tradisional).

Laqab *lagee leumo* yang disematkan ke pundak kita ketika masih kecil mungkin terbilang wajar, karena pada saat itu kita memang masih "setengah lembu." Bangsa lembu, sampai dengan saat ini masih bebas *'eek* dan *'iik* di sepanjang jalan tanpa harus permisi dan melihat kiri kanan disebabkan ketiadaan akal. Ini adalah kodrat mereka yang memang tidak dianugerahkan akal oleh Tuhan. Ada pun kita, ketika masih kecil juga dilanda minus akal (kurang akal) sehingga sebagian kita juga meniru lembu.

Namun demikian kita berbeda dengan lembu, karena lembu tetap pada keadaannya dari semula diciptakan sampai saat ini. Artinya, teori evolusi Darwin terbukti tidak mampu mengubah lembu-lembu tradisional menjadi lembu modern. Sebaliknya, kita terus berubah seiring perjalanan waktu dan bertambahnya usia. Kejahilan-kejahilan lama yang melekat di waktu kecil satu persatu lekang melalui pendidikan dan akhirnya kita pun menjadi manusia seutuhnya yang telah meninggalkan tradisi-tradisi kelembuan di masa lalu.

Jika ditilik, penggunaan istilah *lagee leumo* adalah bentuk stempel metaforis guna menggambarkan sebuah perilaku minus akal yang kita lakoni di waktu kecil. Dengan demikian, ketika usia beranjak dewasa sudah sepatutnya kita meninggalkan setiap bentuk perilaku yang meniru lembu.

Baru-baru ini, media Serambi Indonesia mengabarkan bahwa dua pengendara sepeda motor meninggal dunia tergilas mobil box colt di depan Markas Polsek Lembah Seulawah pada 13/04/17. Menurut informasi yang dilansir Serambi Indonesia, sepeda motor yang dikendarai Salamiah dan Salmah menabrak kawanan lembu di depan Mako Lamtamot, Lembah Seulawah. Akibat tabrakan tersebut, Salamah terpental dan terbanting ke

badan jalan sisi kanan sehingga korban langsung tergilas oleh mobil box dari arah berlawanan. Akhirnya dua nyawa melayang.

Ketika membaca berita ini, pikiran saya langsung tertuju kepada lembu yang saban hari melakukan parade di jalan raya, tidak hanya di Seulawah, tetapi juga di berbagai daerah di Aceh. Melihat fenomena ini, tentu tidak salah jika ada pihak yang menyindir bahwa di Aceh terdapat kandang lembu terbesar di dunia atau serendah-rendahnya terbesar di Asia Tenggara. Sampai saat ini, di beberapa daerah di Aceh, kita bisa menyaksikan sendiri lembu dan saudara-saudaranya seperti kambing dan *keubiri* bebas melenggak-lenggok ria di jalan raya.

Dapat dipastikan bahwa para lembu yang berkonvoi di jalan raya adalah lembu-lembu profesional dan sudah terlatih. Buktinya, mereka (para lembu) tidak pernah didampingi oleh tuannya. Dan bahkan tuan-tuan (pemilik) lembu ini akan tetap menjadi sosok misterius. Para pemilik lembu ini baru kelihatan berteriak-teriak ketika ada lembunya yang hilang di jalan raya. Sebaliknya, ketika lembunya tewas dan menjadi bangkai di jalan, si pemilik tetap berada dalam misteri.

Terlepas, sepakat atau pun tidak, saya berkesimpulan bahwa siapa pun dia, yang membiarkan lembu, kambing dan *keubiri* berparade di jalan raya, maka dia (si pemilik) belum berhasil meninggalkan masa kecilnya sehingga sampai saat ini dia masih meniru lembu alias *lagee leumo*. Jika anak kecil hanya meniru lembu (karena minus akal), maka si pemilik lembu justru telah benar-benar menjadi lembu. Bayangkan, sudah berapa nyawa melayang di jalan raya akibat gerombolan lembu, kambing dan *keubiri*? Sudah berapa banyak pengguna jalan yang cacat dan *patah-pate* akibat menabrak lembu?

Kita tentu tidak bisa menyalahkan lembu, karena lembu memang tidak memiliki akal sehingga mereka bebas saja bercanda ria di jalan raya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, di mana akal para pemilik lembu? Saya tidak menyalahkan pemerintah karena tidak berhasil menertibkan lembu. Menurut saya, pihak yang paling bertanggung jawab atas kematian orang-orang tak berdosa di jalan raya adalah para pemilik lembu. Bukan persoalan aturan, tapi persoalan kesadaran pemilik lembu.

Sebagian kita mungkin bisa berapologi bahwa sebagian lembu-lembu itu milik orang miskin yang tidak memiliki dana untuk membuat kandang. Tapi, perlu ditegaskan bahwa siapa pun yang melakukan kezaliman, baik miskin atau kaya adalah sama saja di hadapan Tuhan. Para pemilik lembu yang membiarkan lembunya berkeliaran adalah agen-agen kapitalis yang cuma menghendaki keuntungan dengan membuat kerusakan di muka bumi.

Kita senantiasa berdoa semoga Allah memberikan mereka petunjuk. Kita juga berharap kepada agen-agen kapitalis ini untuk segera bertaubat dan meninggalkan "tradisi" kelembuan mereka demi keamanan jalan raya. (***AT, 16 April 2017***).

Selamat Hari Kacingieng!

Seperti biasa, tanggal 21 April selalu saja diperingati sebagai Hari Kartini atau dalam bahasa kerennya, "Hari Ibu Kita Kartini." Bagi masyarakat Indonesia, Kartini adalah simbol perlawanan wanita terhadap perilaku diksriminatif kaum laki-laki. Kartini juga dianggap sebagai pahlawan emansipasi wanita. Oleh sebab itu tidak perlu heran ketika sosok-sosok wanita sukses di Indonesia juga digelari sebagai Kartini.

Kita sepakat saja ketika Kartini disimbolkan sebagai sosok wanita hebat di Indonesia, karena kita paham bahwa perjuangan Kartini memang cukup berat. Tentu tidak mudah bagi seorang perempuan Jawa *tempo doeloe* untuk melawan adat-istiadat dan dominasi kaum pria atas kehidupan mereka. Untuk memahami perjuangan Kartini, tentunya kita tidak bisa melepaskan sosok tersebut dari kondisi zamannya. Artinya, kita tidak bisa menilai perjuangan seorang Kartini dengan kondisi hari ini. Wanita sekarang mungkin bisa dengan mudah mengirim sms atau bahkan foto-foto panas sekali pun kepada teman laki-lakinya via *facebook* atau *WhatsApp*, misalnya. Tapi, di masa Kartini untuk menulis surat kepada noni-noni Belanda saja cukup sulit.

Namun demikian, kita tidak akan pernah sepakat jika hanya Kartini yang dianggap hebat. Ketidaksepakatan ini didasari oleh fakta-fakta yang menunjukkan bahwa di berbagai daerah di Indonesia juga pernah lahir dan hidup wanita-wanita yang tidak kalah dengan Kartini, atau bahkan lebih hebat. Di Aceh misalnya, seorang wanita tidak hanya pandai memasak dan "memasok", tapi lebih dari itu. Ramai wanita-wanita Aceh yang menjadi panglima perang dan bahkan menjadi pemimpin bagi kaum pria. Jika di Jawa *tempo doeloe* wanita hanya mampu menggendong anak, maka di Aceh para wanita justru menjadi Sultanah yang memimpin negeri.

Kacingieng

Uraian singkat di atas hanya sekadar basa-basi agar saya disebut nasionalis karena sedikit kenal dengan Kartini. Tentu akan dianggap aneh jika orang Indonesia tidak kenal Kartini, Namun demikian, kekaguman saya terhadap sosok Kartini tidak ada apa-apanya jika dibanding Cut Nyak Dhien dan Cut Nyak Meutia yang tidak hanya "halus" di kasur tapi juga mampu menampar penjajah. Jika Kartini masih mampu "bermanis muka" dengan noni-noni Belanda, maka perempuan-perempuan Aceh masa lalu, dalam kondisi sekarat pun masih sempat "melaknat" penjajah dengan sebutan *kafe budok*.

Nah, sekarang mari kita tinggalkan Kartini. Saya akan mengajak Tuan dan Puan untuk sejenak melihat kondisi sebagian wanita-wanita Aceh hari ini. Sebelumnya penting ditegaskan bahwa dalam melihat wanita, khususnya terkait pergaulan dan model pakaian, saya masih berpegang pada mazhab "ultra-konservatif" yang sangat menjunjung tinggi martabat wanita. Saya belum merasa bosan untuk terus

melemparkan kritik kepada segelintir wanita-wanita Aceh yang terkesan tidak menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan tentunya tidak sebatas menjaga "bagian bawah" dari "barang-barang ilegal." Tapi, penampilan dan model busana yang "melelang" aurat pun penting dijaga. Model pakaian yang tidak patut adalah pintu masuk yang mampu memantik birahi para penonton. Jika "bagian bawah" itu pendopo, maka aurat terbuka adalah gerbangnya.

Jika dulu kita mengenal Kartini sebagai simbol wanita hebat, maka sekarang kita disuguhkan dengan fenomena *kacingieng* sebagai simbol "wanita bebal." Gejala *kacingieng,* telah mulai diperankan oleh beberapa oknum wanita Aceh. Tidak hanya di kota-kota, tapi juga di pelosok desa dengan model dan gayanya masing-masing.

Kata *ngieng* dalam Kamus Aceh-Indonesia (Aboe Bakar dkk, 1985:636) diartikan sebagai melihat atau memperhatikan. Dengan demikian, kalimat *kaci ngieng* bermakna "coba kamu lihat" atau "coba kamu perhatikan." *Kacingieng* adalah sebuah strategi yang digunakan oleh segelintir "oknum wanita" untuk mengajak para penonton memperhatikan "barang-barang antik" yang mereka miliki. Oknum wanita ini berpakaian sekadarnya saja dengan model busana yang sangat sederhana dan bahkan minimalis. Dengan pakaian ini kemudian ia melenggak-lenggok di hadapan para "pemirsa." Bagi sebagian pemirsa yang sudah berpengalaman, pemandangan itu akan dianggap biasa saja. Tapi ada sebagian pemirsa yang ketika melihat "barang antik" terbuka, tanpa sadar dari mulutnya meleleh cairan bening alias *roe ie babah* (keluar air mulut?). Dan ketika ini terjadi, biasanya si oknum wanita akan berujar

"*pu ngieng-ngieng*? (apa lihat-lihat), padahal dalam hatinya dia berteriak "*kacingieng-kacingieng-kacingieng*..."

Sebagai daerah yang telah menerapkan syariat Islam, kita hanya punya dua pilihan. *Pertama,* menjaga anak-anak kita, istri kita dan keluarga kita agar terhindar dari praktik *kacingieng*. *Kedua,* jika pilihan pertama tidak mampu kita jalankan, maka kita terpaksa mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan Hari Kacingieng sehingga pandangan kita kepada "barang antik" itu tidak dibalas dengan *pue ngieng-ngieng*, tetapi disambut dengan ucapan selamat "Hari Kacingieng." (***AT, 21 April 2017***).

Agam Gatai

Beberapa tahun lalu, ketika dalam perjalanan ke Banda Aceh, saya menumpangi bus antarkota. Saat itu, saya mendapat jatah duduk paling belakang. Saya duduk berdampingan dengan seorang wanita bersama anak kecil. Si wanita tersebut adalah istri pak sopir. Bersama kami juga ada seorang kernet (*kinet*). Seperti biasa, ketika bus melaju, semua lampu dimatikan sehingga keadaan menjadi gelap.

Dalam perjalanan, meskipun agak gelap, saya berhasil menyaksikan sebuah pemandangan langka (setidaknya bagi saya). Saat itu, si kernet tampak "bercumbu" dengan si wanita yang sedang memangku anaknya. Kondisi jatah duduk memaksa saya untuk melihat pemandangan yang syahdu tersebut. Tidak ada pilihan lain karena saya duduk berdampingan dengan mereka. Dan mereka pun terus bercumbu dalam kegelapan sampai akhirnya saya pun tertidur akibat "mata lelah."

Ketika bus berhenti untuk makan minum, si wanita langsung turun menemui abang sopir yang tidak lain adalah suaminya. Mereka terlihat mesra sambil menyantap makanan. Si kernet juga duduk bersama mereka. Saya tidak tahu, apakah si sopir tahu kalau istrinya juga menjadi "santapan" si kernet

dalam bus. Seiring perjalanan waktu kisah itu pun seperti hilang dalam ingatan.

Kisah si kernet dan istri sopir seperti ternukil di atas kembali teringat pada saat saya membaca berita yang dilansir *acehtribunnews.com* terkait pemerkosaan anak di bawah umur di Aceh Tamiang. Dikabarkan bahwa seorang gadis di bawah umur diperkosa oleh seorang oknum sopir Jumbo. Tragisya lagi, aksi bejat ini turut dibantu oleh istri si pelaku. Ini adalah kebiadaban bertingkat yang dilakukan secara berjamaah oleh suami istri.

Mengenal Agam Gatai

Sebelumnya, dengan maksud menyambut Hari Kartini, saya telah menulis tentang sebagian oknum wanita Aceh yang larut dalam fenomena *kacingieng*. Kali ini, saya akan mengajak tuan-tuan untuk menjenguk saudara kembar *kacingieng* yang untuk sementara saya beri nama *agam gatai*. Istilah *agam gatai* ini sebenarnya sudah cukup familiar di telinga masyarakat kita.

Untuk memahami frasa *agam gatai* tidak mempan jika menggunakan pendekatan leksikal. Sebab pendekatan leksikal akan melahirkan makna yang kacau. Dalam bahasa Aceh kata *agam* bermakna laki-laki, sedangkan kata *gatai* bermakna gatal. Tentu akan sangat aneh jika *agam gatai* dimaknai sebagai lelaki gatal, meskipun maknanya berdekatan.

Isttilah *agam gatai* dalam pemahaman orang Aceh adalah sosok laki-laki yang suka selingkuh, gemar mengganggu wanita dan hobi melakukan berbagai tindakan asusila seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan. Secara historis, sosok

agam gatai telah hidup di dunia ini dari zaman dahulu kala di berbagai belahan dunia dengan nama dan istilah berbeda.

Lagee Leumo

Beberapa waktu lalu, saya juga sudah pernah menulis tentang lembu. Ditinjau dari segi perilaku dan sifat, *agam gatai* memang *lagee leumo* (seperti lembu) yang gampang saja melakukan pelecehan seksual dan bahkan pemerkosaan, tidak hanya di tempat sunyi, tetapi juga di tempat-tempat umum. Jika kita mau jujur, sebenarnya *agam gatai* lebih "binatang" dari lembu, sebab lembu tidak diberi akal, sedangkan *agam gatai* kebanjiran akal.

Meskipun tidak berakal, lembu masih dibutuhkan oleh masyarakat karena bisa diajak membajak sawah. Sebaliknya, *agam gatai*, meskipun sempurna akal, tetapi ia menjadi sampah bagi masyarakat. Jika lembu hanya mengotori ruas jalan dengan tahinya, maka *agam gatai* justru mengotori lingkungan dengan sikap hewani. Parahnya lagi *agam gatai* juga mencemari keturunan dengan nafsu kebinatangan. *Agam gatai* adalah hama dan parasit yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.

Perilaku *agam gatai* tidak hanya dilakukan oleh sopir dan kernet sebagaimana telah diulas di atas, tetapi siapa pun berpotensi menjadi *agam gatai*. Di perkantoran misalnya, saya pernah menyaksikan oknum PNS laki-laki yang menepuk pinggul oknum pegawai wanita. Perilaku ini sudah menjadi semacam hiburan. Anehnya yang kena tepuk pun santai saja dan hanya berkata "*adduh*."

Aceh sebagai wilayah yang telah menerapkan syariat Islam sudah saatnya melawan segala bentuk gerakan *agam gatai* yang dipraktikkan oleh peniru-peniru lembu. *Agam gatai* harus dikucilkan dari kehidupan masyarakat karena perilakunya yang rusak. Kepada orang tua kita berharap agar terus mengawasi anak-anak perempuannya dari ancaman *agam gatai*. Orang tua juga diharapkan agar mendidik anak laki-lakinya agar tidak menjadi *agam gatai* di kemudian hari.

Bahkan kita sendiri sebagai *agam* juga harus menghindari pergaulan dengan *agam gatai* agar tidak tertular penyakit ini. Atau kita sendiri juga *agam gatai*? (***AT, 23 April 2017***).

Mengusir Kepanikan

Tersiar kabar, Gubernur Kalimantan Barat diusir dari Aceh. Sekejap saja kabar ini pun beredar luas. Informasi ini juga sempat dirilis oleh beberapa media online di Aceh. Harianmerdeka.com (06/05/17) misalnya, mengabarkan bahwa puluhan aktivis FPI mendatangi hotel tempat menginap Gubenur Kalbar yang kononnya bernama Cornelis. Menurut Harian Merdeka, penolakan tersebut disebabkan oleh tindakan Cornelis yang disebut-sebut sering menolak kehadiran ulama ke Kalbar. Alhasil, masih menurut Harian Merdeka, Gubernur Cornelis – seperti diakui oleh pihak Hotel Hermes, akhirnya meninggalkan Aceh.

Media lainnya, hidayatullah.com menyebut aksi pengusiran Cornelis disebabkan oleh kasus pengadangan Ketua Umum DPP FPI, Shabri Lubis di Pontianak pada Jumat (5/5/17). Hal ini dikuatkan dengan keterangan Pangda LPI, Ahmad, yang mengatakan bahwa aksi pengusiran itu terkait dengan pidato Cornelis beberapa waktu lalu yang dinilai provokatif dan intoleran. Aksi pengusiran ini juga sempat beredar melalui video, di mana terlihat beberapa orang melakukan demonstrasi dan juga orasi guna menolak Cornelis di Aceh.

Sementara itu, kehadiran Cornelis ke Aceh disebut-sebut mendapat undangan dari Gubernur Aceh dalam rangka menghadiri Penas KTNA. Tentu tidak hanya Cornelis, gubernur dari provinsi lain juga turut hadir ke Aceh.

Menyikapi aksi pengusiran tersebut, beranda *facebook* pun penuh dengan ragam komentar. Pro kontra tidak dapat dihindari. Sebagian masyarakat menyatakan sepakat dengan aksi FPI yang mengusir Cornelis dari Aceh. Sementara sebagian warga Aceh lainnya justru menyatakan keberatan dan aksi ini dinilai mempermalukan Aceh. Dan komentar-komentar unik pun bermunculan di media sosial.

Senior saya, Risman Rachman, menulis: "*Di bumo Aceh, bui pun boleh hidup, dan baru diburu ketika menjadi hama*" (di bumi Aceh babi saja boleh hidup, dan baru diburu ketika menjadi hama). Saya tidak tahu apakah komentar ini terkait dengan aksi pengusiran atau tidak, tapi yang jelas, beliau mencoba menitip pesan bahwa Aceh terbuka untuk siapa saja (pengunjung) selama si pengunjung tersebut tidak membuat kekacauan.

Komentar yang lumayan *hot* datang dari Saiful Mahdi: "Sebagai rakyat Aceh, saya malu dengan perilaku oknum FPI yang mengusir tamu itu! Maafkan kami..." Dalam komentarnya, Saiful Mahdi sepertinya tidak sepakat dengan aksi pengusiran yang dilakukan oleh oknum FPI terhadap Cornelis. Tentunya Saiful Mahdi punya cukup alasan terkait pendapatnya ini.

Netizen lainnya, Mirza Ardi, menulis sebuah status yang cukup melankolis: "Nista dibalas menista, usir dibalas mengusir, benci dibalas membenci. Semua memang akan gila ketika sudah waktunya." Dalam komentarnya yang syahdu

ini, terlihat Mirza ingin mendamaikan suasana dengan cara mengedepankan kesantunan. Artinya, tidak semua keburukan harus dibalas dengan keburukan. Dan jika itu terjadi, tentu tidak ada bedanya antara kita dan mereka.

Seolah tidak ingin ketinggalan, Senator Aceh, Ghazali Abbas Adan, seperti dilansir Tribun Medan (08/05/17) juga menyesalkan insiden demo terhadap Gubernur Kalbar di Banda Aceh. Bahkan politisi senior ini juga menyebut tindakan pengusiran tersebut bukan budaya Aceh dan tidak mewakili masyarakat Aceh. Ghazali Abbas juga mengaku mendapat pengaduan dari masyarakat Aceh di Kalbar yang merasa tidak nyaman pasca penolakan terhadap Cornelis.

Selain komentar yang terkesan kontra terhadap aksi pengusiran, banyak pula bermunculan komentar yang justru sepakat dengan tindakan tersebut. Karena terlalu banyak, maka saya memutuskan untuk tidak mengutip tersebab ruang yang sangat terbatas. Namun demikian, keseluruhan komentar yang sepakat dengan pengusiran menisbatkan pendapatnya pada solidaritas muslim, di mana aksi pengusiran Cornelis sebagai bentuk pembalasan. Tentu yang namanya pembalasan, aksi tersebut telah dimulai sendiri oleh Cornelis. Singkatnya, yang diusir tersebut pada hakikatnya juga seorang pengusir.

Terlepas sepakat atau pun tidak sepakat, tapi saya mencoba mengajak kita semua untuk menghargai semua pendapat yang berkembang. Yang mendukung pengusiran tentu memiliki argumen yang kuat. Sebaliknya yang menolak pengusiran juga punya alasan yang cukup. Dan yang terpenting, baik penolak maupun pendukung adalah sama-sama masyarakat Aceh yang sudah pasti juga muslim. Jika si pendukung pengusiran mendasarkan keyakinannya pada agama, maka si penolak

pengusiran pun berpendapat sesuai teks-teks agama yang dipahaminya.

Dengan demikian, menyebut si pendukung pengusiran dengan label radikal adalah tidak bijak. Begitu pula halnya menuduh si penolak pengusiran dengan cap liberal pun salah kaprah. Sudah saatnya kita berhenti menjadi hakim atas pemikiran orang lain. Hanya karena seorang Cornelis kita pun larut dalam "perdagangan stempel." Lagi pula sampai saat ini tidak ada investigasi yang benar-benar akurat, apakah Cornelis meninggalkan Aceh karena diusir atau memang sudah waktunya pulang. Artinya ada misteri yang belum terkuak, tapi kita telah terlanjur siap dengan kesimpulan masing-masing.

Adapun terkait dengan aksi pengusiran Cornelis harus dilihat dari dua sisi. *Pertama,* Cornelis sebagai sosok yang diposisikan sebagai "musuh" terkait dengan sikapnyanya yang dianggap tidak pro umat Islam. *Kedua,* Cornelis sebagai tamu yang diundang oleh Gubernur Aceh. Dua sisi inilah yang kemudian melahirkan dua sikap yang saling bertentangan. Seharunya dua sisi ini dipandang secara adil sehingga penanganannya menjadi tepat.

Kita tidak secara serta-merta menyalahkan aksi pengusiran, tapi jika kita berpikir runut, maka pihak yang pertama sekali harus disalahkan dengan kehadiran Cornelis adalah Gubernur Aceh sendiri. Artinya, tanpa undangan, tentunya Gubernur Kalbar itu tidak akan pernah ke Aceh. Tapi sayangnya, kita hanya terpaku pada "undangan" dan sampai saat ini tidak ada seorang pun yang menggugat "pengundang." Akhirnya saya pun bingung, siapa yang lebih pantas disalahkan? Gubernur kita lagi kemana, ya? (***AT, 8 Mei 2017***).

Intelektual Garis Tombol

"Atas dasar pemikiran jang bersendikan adjaran Ilahi, maka Darussalam adalah lambang kedamaian dan tjinta-kasih, tempat mentjetak manusia jang beriman dan berbakti, tempat menggali ilmu pengetahuan untuk disumbangkan kepada ummat manusia, tempat membina Manusia Pantjasila jang berdjiwa besar, berpengetahuan luas dan berbudi luhur." (Ali Hasjmy, *Sepuluh Tahun Darussalam,* 1969).

Pada tanggal 17 Agustus 1958 berlangsung upacara besar dalam rangka perletakan batu pertama pembangunan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam oleh Wakil Pemerintah Pusat, Menteri Agama Republik Indonesia KH. Iljas, Panglima Kodam I Aceh Kolonel Sjamaun Gaharu, Gubernur Aceh A. Hasjmy dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tgk. H.M. Ali Balwy.

Hari itu merupakan awal terbinanya Kota Darussalam sebagai pusat pendidikan di Aceh guna melahirkan intelektual yang akan mengabdi kepada tanah lahirnya. Seperti disampaikan Ali Hasjmy dalam kutipan di awal tulisan ini, Darussalam adalah tempat mencetak manusia yang beriman dan berbakti dan juga tempat untuk menggali ilmu pengetahuan.

Universitas Syiah Kuala adalah kampus pertama yang lahir di Darussalam pada 1 Juli 1961. Dalam masa konsolidasi,

saat itu Universitas Syiah Kuala dipimpin oleh Kolonel M. Jasin yang juga Panglima Kodam Iskandar Muda. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 5 Oktober 1963, Menteri Agama RI juga meresmikan IAIN Djamiah Ar-Raniry di Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam dengan mengangkat A. Hasjmy sebagai Pj Rektor pertama.

Sekelumit ulasan di atas cukuplah sebagai medium untuk mengenang kembali lahirnya dua perguruan tinggi besar di Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam, sebuah perkampungan yang diharapkan mampu melahirkan kader-kader terbaik untuk mengangkat Aceh ke puncak kejayaan. Darussalam adalah lumbung tempat lahirnya pemikir dan ilmuan berwawasan modern. Dan sejak berdirinya, kedua *jantong hate* rakyat Aceh itu telah berhasil melahirkan generasi intelektual yang kemudian berkhidmat untuk Aceh. Dan generasi awal anak-anak Darussalam masa lalu telah sukses membangun Aceh baru pasca gerakan Darul Islam.

Dalam coretan sederhana ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak melihat generasi Darussalam kontemporer. Generasi pasca pengaruh PUSA meredup di Aceh. Pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah: ke arah mana intelektual kita saat ini melaju? Sudahkah harapan para pendahulu terwujud? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya sangat tergantung dari pojok mana kita melihat.

Adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa beberapa gelintir intelektual Darussalam saat ini telah terkurung dalam kamar-kamar jumud dan terbelenggu dengan pragmatisme ekstrem. Amat sedikit intelektual kampus saat ini yang benar-benar berkhidmat untuk tanah lahirnya. Beberapa gelintir intelektual Darussalam saat ini hanya memosisikan

diri sebagai tutor dengan kumpulan teori yang menyemakkan kepala. Mereka lebih memilih bersembunyi dan *beri'uzlah* dari segudang problematika sosial di tanah lahirnya.

Beberapa gelintir penggawa Darussalam di zaman ini cenderung memilih menjadi sufi dalam keramaian. Teman dekatnya hanyalah absensi dan tombol-tombol yang dipencet pagi dan petang agar periuk nasinya tak berguncang. Pandangannya hampa dan terhijab oleh bayangan angka kredit. Telinganya telah tertimbun oleh recehan-recehan sertifikasi. Dan jadilah mereka intelektual mati. Sebagiannya justru menjelma sebagai intelektual selfi dengan taburan kata bijak penuh filosofi di dinding *efbi*, sampai ia sendiri pun tak mengerti.

Tanpa sadar mereka telah menjadi intelektual garis tombol yang pengabdiannya telah dibobol oleh kepentingan dirinya, makan minum, angka kredit, sertifikasi dan pakaian kemegahan. Ketika mereka telah benar-benar sunyi, pada saat itulah intelektual terlantar akan bangkit mengisi ruang kosong yang mereka tinggalkan. Jangan biarkan Darussalam sunyi. Selamat istirahat intelektual mati! (***AT, 23 Mei 2017***).

PLN Tuli Peluit

Ramadhan pertama kampung saya gelap. Buka puasa perdana hari itu terpaksa menggunakan perasaan, karena stok lilin telah kosong. Bukan tidak ada persiapan, tapi karena terlanjur percaya kepada janji PLN, yang katanya Ramadhan tidak ada pemadaman. Tapi, kenyataannya PLN tetap *ulok*. Dan kita pun sudah terbiasa dengan *ulok* ala PLN.

Sepanjang sejarahnya, PLN memang dikenal *klo prip* alias tulis peluit. *Klo prip* adalah sebuah *maqam* tertinggi dalam strata kejahilan. Para pengidap *klo prip* bebas berekspresi tanpa harus takut kepada aturan. Lihat saja bagaimana bebasnya PLN melakukan pemadaman sesuka hatinya tanpa pernah dihukum.

Dalam melakukan aksinya, PLN selalu saja berada di atas hukum sehingga tidak ada satu pasal pun yang bisa menjerat mereka. Sedangkan kita, menerobos lampu merah di tengah kesunyian pun bisa kena "peluit." PLN adalah satu-satunya institusi yang memiliki kebebasan penuh di negeri ini. PLN tidak pernah salah dan tidak punya dosa. Yang ada hanyalah kesilapan bernuansa *"ulok"* yang bisa diselesaikan hanya dengan "klarifikasi."

Cuma PLN yang argumennya selalu saja diterima sebagai kebenaran aksiomatik, tanpa debat. Selain itu, kondisi mental PLN yang *klo prip* juga turut menurunkan tensi massa, di mana caci maki dan hujatan dari pelanggan selalu saja disikapi dengan santai. Tidak pernah PLN membalas caci maki, apalagi sampai memutuskan aliran listrik ke rumah pencaci. PLN selalu tampil sabar dan bahkan paling sabar.

Setiap kali melakukan pemadaman, PLN selalu saja menghadirkan berbagai argumen guna meyakinkan pelanggan terkait alasan-alasan pemadaman. Melalui argumen klasik, seperti tidak cukup arus, mesin rusak, dll – PLN terus berupaya melakukan justifikasi atas aksi pemadaman yang mereka lakukan.

Akhirnya, para pelanggan pun terpaksa menjadi insan-insan *jabariyah* yang senantiasa harus menerima bulat-bulat segudang alasan dari pihak PLN. Kondisi ini akhirnya telah menempatkan PLN pada posisi "tidak pernah salah." Para pelanggan dipaksa untuk memahami praktik-praktik *ulok* ala PLN. Sebaliknya, PLN justru tidak pernah mencoba memahami kondisi pelanggan yang tiba-tiba saja dilanda kegelapan.

Namun demikian, para pelanggan sendiri memiliki sikap berbeda dalam menilai aksi pemadaman yang dilakukan PLN. Sebagian besar pelanggan meluapkan kemarahannya melalui hujatan dan caci maki. Tapi sayangnya hujatan dari pelanggan ini tidak pernah membuat PLN berubah dan bahkan semakin *ulok*.

Sementara sebagian pelanggan lainnya mencoba bersikap bijak (atau mungkin sok bijak) dengan cara membenarkan aksi pemadaman oleh PLN dengan alasan tertentu. Tidak sedikit

pula para pelanggan yang tiba-tiba berlagak layaknya humas PLN yang berusaha menghadirkan berbagai argumen guna membenarkan aksi pemadaman.

Lucunya lagi, pada saat aksi pemadaman sedang marak, ada pula beberapa *netizen* yang memosting foto-foto pegawai PLN yang tersangkut di tiang listrik via media sosial. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan sikap empati dari pelanggan terhadap PLN yang katanya telah bekerja maksimal dan penuh risiko. Melihat foto-foto ini tentunya kita akan merasa iba sehingga kemarahan kepada PLN sedikit menurun.

Namun demikian, penampilan foto-foto kecelakaan yang menimpa pegawai PLN tidak bisa dijadikan alat guna menjustifikasi aksi pemadaman. Semua profesi pekerjaan tentunya memiliki risiko tersendiri. Lagi pula, para pelanggan tidak pernah menghujat pegawai PLN secara personal, karena pada prinsipnya mereka hanyalah pekerja yang dibayar. Hujatan dan kecaman para pelanggan ditujukan kepada PLN sebagai sebuah institusi yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan listrik pelanggan.

Sementara itu, dalam menyikap aksi pemadaman, ada pula pelanggan-pelanggan "sufi" yang berpura-pura sabar. Dengan bermodalkan hikayat usang, si pelanggan sufi menyatakan bahwa kakek-nenek kita dulu tidak pernah merasakan listrik. Tapi mereka masih bisa hidup dengan *panyot* dan *suwa* (obor). Mereka tidak pernah mengeluh seperti kita hari ini. Demikian hikayat yang sering dirawi oleh pelanggan-pelanggan sufi.

Hikayat-hikayat serupa ini sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi pemadaman. Kondisi kakek-nenek kita dulu tentunya

jauh berbeda. Pada saat mereka hidup, memang tidak ada ketergantungan terhadap PLN, dan bahkan pada masa itu, PLN pun belum tampak daun kupingnya. Dengan demikian adalah wajar jika mereka tidak mengeluh dan santai menggunakan *panyot*.

Kondisi hari ini, kita memang telah dipaksa untuk bergantung kepada PLN. Dan kita juga tidak mendapatkan aliran listrik secara gratis. Setiap bulan kita dituntut untuk membayar. Dan bahkan jika terlambat, PLN akan menindak tegas dengan melalukan pemutusan aliran listrik. Dengan demikian, kita tidak perlu sok bijak meminta para pelanggan untuk menyediakan lilin dan *panyot*.

Penggunaan lilin dan *panyot* baru bisa dilakukan jika memang PLN benar-benar tidak mampu lagi menyuplai aliran listrik. Dalam hal ini, PLN tentunya harus dengan gagah berani mengumumkan kepada rakyat bahwa PLN sudah menyerah sehingga masyarakat bisa kembali ke peradaban *panyot*. Tapi kenyataannya PLN masih tetap *ulok* dan *klo prip* dengan menjual janji sehingga masyarakat terus berharap. (***AT, 29 Mei 2017***).

Mahasiswa Genit

Belum lama ini, Gubernur Zaini Abdullah mendapatkan penghargaan dari sejumlah mahasiswa yang diserahkan pada acara buka puasa bersama di Pendopo Gubernur Aceh. Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan draft rekomendasi hasil Konferensi Aktivis Mahasiswa Aceh kepada Gubernur. Pada kesempatan itu, Zaini juga sempat menjelaskan berbagai keberhasilan pembangunan selama lima tahun kepemimpinannya (Serambi Indonesia, 19/06/17).

Tiba-tiba saja, aksi "genit" yang melibatkan BEM Unsyiah ini mendapat sorotan dari saudara-saudara mereka, para aktivis BEM beberapa kampus di Aceh. Seperti biasa, untuk membakar jerami (*jumpueng*) hanya butuh *sineuk aneuk keh* (sebiji korek api) dan akhirnya api pun akan menjalar ke angkasa. Hal ini pula yang dialami oleh BEM Unsyiah, awalnya aksi "genitnya" ditanggapi secara "genit" oleh satu perwakilan BEM (sebagai pemantik?) dan kemudian kecaman pun bertaburan hampir dari seluruh BEM di Aceh.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh menyebut penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Zaini sangat tidak layak, karena yang bersangkutan dianggap tidak

memberikan kontribusi yang mumpuni untuk pengembangan perguruan tinggi di Aceh. Kritik dengan nada lebih tinggi datang dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Hamdani. Menurutnya, BEM Unsyiah telah mencoreng wajah seluruh mahasiswa di Aceh sehingga BEM Unsyiah layak keluar dari perkumpulan BEM se-Aceh.

Jika dicermati, dua komentar petinggi BEM di atas juga lumayan genit. *Pertama,* Zaini dianggap tidak memberikan kontribusi dalam pengembangan perguruan tinggi di Aceh. Sayangnya, ketua BEM dimaksud tidak merinci kontribusi apa saja yang dibutuhkan perguruan tinggi di Aceh. Kalau kita mau adil, dalam hal kontribusi – jangankan gubernur, seorang rektor pun belum tentu berkontribusi dalam pengembangan perguruan tinggi yang dipimpinnya. Jika teori kontribusi ini dipakai, maka seorang rektor pun tak layak dihargai sebelum ia menunjukkan kontribusinya kepada mahasiswa.

Kedua, ketua BEM Fakultas Hukum Unmuha menyebut BEM Unsyiah telah mencoreng wajah seluruh mahasiswa di Aceh. Kita tentu sepakat bahwa istilah seluruh dan sebagian merujuk kepada jumlah. Dan jumlah ini tidak akan pernah kita ketahui tanpa didahului oleh proses perhitungan. Nah, sudahkah abang Ketua BEM FH Unmuha menghitung jumlah mahasiswa yang tercoreng wajahnya? Jika belum, maka komentar tersebut juga sebuah kegenitan.

Dalam klarifikasinya, Ketua BEM Unsyiah, Rahmad Faisal mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada Gubernur berasal dari BEM Unsyiah tanpa melibatkan delegasi yang mewakili universitas se-Aceh pada acara Konferensi Aktivis Mahasiswa Aceh (KAMA) III. Menurut mereka, piagam tersebut adalah bentuk penghargaan atas kerja keras dan

dedikasi Gubernur yang telah memimpin Aceh selama periode 2012-2017. Dengan adanya klarifikasi ini, maka "tudingan" pencatutan nama BEM se-Aceh oleh BEM Unsyiah menjadi tidak relevan dan gugur dengan sendirinya.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum Unsyiah, Ade Mulya, dengan tetap bersikap kritis dan mempertanyakan sikap BEM Unsyiah – dalam suratnya yang dirilis AceHTrend menilai pemberian penghargaan kepada Gubernur Zaini adalah sesuatu yang wajar, mengingat sang Gubernur telah bekerja keras dalam membangun Aceh dengan ikhlas. Kita sepakat saja dengan Ade Mulya yang menyebut gubernur telah bekerja keras, tapi terkait label ikhlas yang disematkan kepada Gubernur Zaini tentu masih berpeluang dikritisi agar tidak tampak genit, karena keikhlasan sulit diukur, apalagi dalam ruang politik yang sarat dengan *tulak-tarek*.

Seolah tidak ingin ketinggalan, dalam menyikapi hiruk pikuk BEM ini, mantan pengurus BEM IAI Al-Aziziyah Samalanga juga turut berkomentar melalui tulisannya di AceHTrend. Namun sayangnya, setelah beberapa kali membaca, saya masih gagal menangkap pesan yang disampaikan oleh Andi Saputra tersebut. Entah tulisannya terlalu genit, *wallahu A'lam*.

Bagi saya, apa yang dilakukan oleh BEM Unsyiah adalah sebuah ekspresi kegenitan yang bebas ditafsirkan sesuai selera penafsir. Demikian pula dengan reaksi yang ditunjukkan oleh beberapa BEM lainnya di Aceh pun sebuah parade kegenitan yang juga patut diapresiasi. Akhirnya, tulisan ini tidak memberi kesimpulan apa-apa, kecuali menambah kegenitan.

Di akhir tulisan ini, saya mengajak abang-abang mahasiswa di Aceh untuk menghindari kegenitan yang tidak pada tempatnya. Genit itu perlu untuk menambah kesyahduan, tapi jika salah menempatkan, kegenitan justru akan mengundang kekacauan. (***AT, 21 Juni 2017***).

Menyiram Bunga Kertas di Hari Raya Medsosiah

Kedatangan Ramadhan biasanya hanya disambut oleh orang-orang yang berpuasa, sebaliknya, kehadiran hari raya disambut dengan sangat meriah oleh setiap mereka yang merasa dirinya muslim, bahkan oleh mereka yang tidak berpuasa sekali pun. Meskipun sebagian kita bisa dengan mudah melupakan puasa, tapi hampir semua kita tidak mampu melupakan hari raya.

Di hari-hari pertama puasa, sebagian kita sudah mulai menghitung dan meraba-raba kalender untuk melihat kapan hari raya. Sebagian kita sudah memimpikan hari raya pada saat ritual puasa baru dimulai. Kegiatan puasa sering diistilahkan sebagai hari-hari perjuangan dan hari raya disimbolkan sebagai hari kemenangan. Dan setiap kemenangan tentunya tidak hanya dirayakan oleh para "pejuang," tetapi juga melibatkan para "pecundang" yang lari dari "medan tempur." Jika para "pejuang" merayakan kemenangan dengan penuh "kepuasan" karena telah sukses menyelesaikan perjuangan, maka para

"pecundang" pun turut bersorak-sorai sebagai perwujudan aksi *lhab darah*.

Pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling bahagia ketika hari raya tiba? Dalam perspektif teologis, kebahagian di hari raya adalah milik orang-orang yang berpuasa. Sementara dalam kenyataan sosiologis, para "pecundang" juga turut bergembira. Bahkan ekspresi kegembiraan mereka melebihi kegembiraan orang-orang yang berpuasa. Dan ini adalah fenomena umum yang tidak hanya kita jumpai dalam ritual ibadah, tetapi juga sering kita temui dalam kehidupan sosial.

Pihak lainnya yang turut merasakan kebahagiaan di hari raya adalah anak-anak. Sebabnya sederhana saja, karena anak-anak memperoleh beberapa keistimewaan di hari raya yang biasanya tidak mereka dapatkan di hari-hari biasa. Di antara keistimewaan itu adalah baju baru, mainan baru dan uang jajan lebih.

Mimpi terbesar anak-anak di hari raya adalah memakai baju baru yang telah disimpan dan dipeluk cium sejak sebulan lalu. Bagi anak-anak yang terlahir dalam keluarga yang mapan secara ekonomi, baju baru ini akan terus berganti dari tahun ke tahun. Ada pun anak-anak yang "ditaqdirkan" memiliki orang tua ekonomi lemah atau pun yatim, baju baru itu hanya boleh dipakai ketika hari raya dan disimpan kembali untuk hari raya berikutnya. Dan tidak jarang, satu baju baru dipakai dalam rentang waktu satu periode kepemimpinan politik. Sepuluh kali hari raya!

Aksesoris lainnya yang menemani perjalanan hari raya adalah tradisi minta maaf, bukan memberi maaf. Hal ini pun terbilang wajar, sebab meminta maaf lebih mudah dan bahkan

sudah mulai dipopulerkan oleh kalangan politisi. Sebaliknya, memberi maaf itu sulit, meskipun dirayu dengan sejuta tangis penyesalan. Uniknya, aksi memberi maaf diganti dengan gerakan *bullying*. Itulah kita, unik tidak pada tempatnya.

Selain itu, kemunculan peradaban maya juga telah turut menyemarakkan gairah hari raya. Seperti kita saksikan bersama, ketika Ramadhan berakhir, beranda *facebook* penuh dengan ucapan selamat hari raya. Ragam foto dengan penuh senyuman terpampang rapi di setiap postingan. Beraneka pantun penuh kalimat syahdu pun bertaburan layaknya sayembara akbar.

Peradaban maya telah melahirkan suasana baru dan mengantarkan kita menuju alam setengah mimpi. Ketika hari raya tiba, beranda *facebook* menjadi sesak dengan permohonan maaf. Bahkan media pesan semisal *WhatsApp* pun mendadak "koma" karena ucapan selamat yang mengalir deras tak terbendung.

Kondisi ini berbeda ketika kita masih hidup dalam periode "tradisional." Dulu, untuk mengucapkan selamat hari raya kita mesti berkunjung ke rumah-rumah. Kunjungan-kunjungan ini akan semakin mengikat tali silaturrahim dan menambah keakraban. Melalui tradisi berkunjung, selain bisa bertatap muka, kita juga bisa berjabat tangan, menikmati hidangan dan bahkan mendapatkan "jajan tambahan" jika membawa momongan.

Tapi, seiring bergeraknya zaman, kebahagian-kebahagian tradisional ini menjadi hilang dan berganti dengan peradaban maya yang menghadirkan kebahagiaan semu. Kita disuguhkan dengan ucapan-ucapan semu yang sama sekali tidak berbekas.

Kita juga dipaksa memandang senyuman-senyuman palsu yang meskipun manis tapi minus rasa.

Interaksi sosial dalam peradaban maya tak ubahnya seperti menyiram bunga-bunga kertas (hiasan). Sederas apa pun air yang kita sirami tidak akan pernah membuat bunga-bunga itu tumbuh. Bunga-bunga kertas tidak akan pernah mekar dan senantiasa abadi dalam kekeringan.

Dan, kita pasti sepakat bahwa silaturrahim di alam maya tidak akan pernah mampu menghadirkan rasa. Selamat hari raya medsosiah! (***AT, 25 Juni 2017***).

Para "Pemburu" Salib

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Kristen adalah salah satu agama misi, di mana para penganutnya diperintahkan untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Penyebaran misi ini dilakukan melalui berbagai strategi, baik melalui peperangan maupun melalui pendekatan kultural. Dalam praktiknya, upaya Kristenisasi juga dilakukan dengan pendekatan ekonomi guna menyukseskan misinya. Dalam sejarah, misi ini juga dijalankan dengan kekerasan.

Misi Kristen dengan pendekatan kekerasan paling populer di panggung sejarah terjadi di Spanyol (Andalusia) pasca runtuhnya dinasti Islam. Di masa modern, pola kekerasan ini di antaranya sempat dipraktikkan di California. Seperti dikisahkan Charles Kimbal (2013), sistem misi California yang dikembangkan oleh Junepero Serra sampai tahun 1782 melalui kerja sama dengan pejabat militer Spanyol telah sukses membangun 21 gereja Fransiskus dan dalam praktiknya telah memusnahkan masyarakat asli. Dua sampel tersebut merupakan noda hitam yang sukses diperankan oleh misi Kristen di panggung sejarah. Di Indonesia sendiri, misi Kristenisasi ini telah berlangsung sebelum Indonesia merdeka.

Sebagai muslim, melawan misi Kristenisasi adalah sebuah keharusan, apalagi jika yang dijadikan objek adalah muslim-muslim lemah iman. Namun demikian, perlawanan terhadap misi Kristenisasi juga harus melibatkan nalar. Artinya, gerakan perlawanan itu sendiri harus terukur, tepat sasaran dan tidak bias. Melakukan perlawanan terhadap Kristenisasi hanya dengan bermodalkan semangat buta tanpa data dan mengabaikan akal sehat justru akan memunculkan persoalan baru. Dan bukan tidak mungkin, jika tidak cermat, semangat menyala-nyala tanpa diiringi nalar akan melahirkan fitnah yang berujung kezaliman.

Sebagian kita sering terjebak dalam pandangan mata yang menipu. Berbekal pandangan mata kita pun larut dalam imajinasi liar. Kita tentu masih ingat ketika beberapa tahun lalu beredar sebuah postingan yang menyebut Kantor Gubernur Aceh mirip salib. Foto dari udara dengan objek kantor gubernur ini sempat memunculkan kehebohan di kalangan pengguna media sosial saat itu. Tanpa basa-basi, sebagian kalangan berkesimpulan bahwa pembangunan kantor gubernur memiliki kaitan dengan Kristenisasi. Sebuah tudingan liar berbasis khayal.

Tidak hanya itu, kita pun sering menyaksikan postingan serupa dalam beberapa waktu terakhir, di mana ada beberapa gedung pertokoan yang juga dituding mirip salib. Belum lama ini, ketika berlangsung peresmian Masjid Raya Baiturrahman juga sempat beredar foto tenda yang disebut-sebut mirip salib. Bahkan, pada 2016 lalu, kita juga sempat dibuat heboh dengan lambang baru UIN Ar-Raniry yang disebut-sebut mirip simbol Yahudi. Uniknya, informasi-informasi liar semacam

ini mendapat sambutan yang cukup meriah dari sebagian kalangan.

Beberapa hari lalu, tepatnya pada saat Idul Fitri juga sempat beredar sebuah foto seorang pria yang menggunakan baju koko berwarna merah dengan kancing mirip salib. Dalam foto yang beredar, sosok tersebut terlihat bersama gubernur terpilih. Meskipun tidak sempat memunculkan kehebohan, tapi keberadaan postingan-postingan serupa ini cukup mengganggu dan dapat merusak kewarasan. Ketidakmampuan mengontrol imajinasi liar akan mengurung kita dalam prasangka yang tidak berkesudahan.

Jika imajinasi liar ini tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin suatu saat akan muncul gerakan pembasmian palang jemuran karena dituding mirip salib. Buku matematika juga akan menemui ajalnya karena mengandung simbol-simbol mirip salib.

Anehnya lagi, penyebaran imajinasi liar ini tidak hanya dilakukan oleh "masyarakat awam," tetapi juga melibatkan sebagian "intelektual." Keterlibatan sebagian intelektual dalam menyebarkan *hoax* serupa ini tentunya akan berdampak pada munculnya kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan masyarakat umum.

Tanpa sadar, ketika mengeluarkan sebuah pendapat, kita sering terjebak dalam tradisi simplifikasi. Pola simplifikasi (penyederhanaan) sering dipakai oleh orang-orang yang malas berpikir untuk menciptakan sebuah stereotip. Misalnya, dia tidak tahu pasti apakah objek yang dilihatnya tersebut benar-benar salib atau bukan, tapi dia langsung menyederhanakan

dan melakukan generalisasi bahwa semua yang mirip salib sebagai salib.

Dalam kondisi lainnya, kita juga cenderung spekulatif dalam menyikapi sebuah fenomena sosial yang muncul di hadapan kita. Susanto (1985), dalam bukunya *Pendapat Umum*, menegaskan bahwa pemikiran spekulatif bertujuan untuk memberi kesan akan kebenaran dan keberanian seseorang kepada masyarakat umum. Pemikiran spekulatif cenderung bertentangan dengan logika karena argumennya didasarkan pada dugaan semata tanpa pembuktian.

Pandangan minus akal terhadap objek tertentu akan mengembalikan kita pada imajinasi anak kecil. Sekumpulan anak kecil yang memandang awan di langit sering bersitegang sesamanya akibat imajinasi mereka yang tidak serupa. Sebagian anak kecil menyebut gumpalan-gumpalan awan itu mirip kakeknya, sedangkan sebagian anak lainnya – dengan daya khayal yang lebih tinggi berkesimpulan awan yang bergerak di langit itu mirip kambingnya yang hilang.

Karena itu, kita harus mampu mengontrol imajinasi agar tidak merusak kewarasan yang dalam kondisi tertentu akan berdampak pada munculnya penyakit psikologis. Tugas kita "melawan" salib, bukan "memburu" salib. Dan sudah saatnya kegilaan ini kita akhiri! (***AT, 30 Juni 2017***).

Cambuk Garis Selfi

Aceh kembali dilanda isu seksi terkait wacana modifikasi hukuman cambuk yang kononnya muncul pasca pertemuan Gubenur dan Wakil Gubernur Aceh dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Menurut riwayat, hukuman cambuk yang selama ini dilakukan secara terbuka akan dilaksanakan secara tertutup. Wacana ini kononnya dimaksudkan agar para investor tidak takut menanamkan modalnya di Aceh.

Merdeka.com (13/07/17) dengan mengutip pernyataan wakil ketua DPRA Irwan Johan, menyebut gagasan modifikasi ini muncul dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Seperti biasa, isu ini kemudian menjadi viral sehingga masyarakat terbelah pada dua kutub. Sebagian menyatakan sepakat, sedangkan sebagian lainnya bersepakat untuk menolak.

Penolakan paling keras di antaranya datang dari ketua FPI Aceh, Muslem At-Tahiry (waspada.co.id). Menurut Muslem, hukum Allah tidak bisa dikotak-katik. Penolakan serupa juga datang dari Abu Mudi yang meminta agar Pemerintah Aceh menolak wacana modifikasi cambuk. Dalam keterangannya via *kabarpidijaya.com* (12/07/17), Abu Mudi menyebut wacana tersebut merupakan ide dari pentolan-pentolan non muslim

dalam pemerintahan Jokowi yang tidak menginginkan syariat Islam berjalan di Aceh. Secara lebih tegas, Abu Mudi menyatakan bahwa jika wacana tersebut diterima, maka Gubernur Irwandi tidak memihak kepada ulama dan mayoritas umat Islam di Aceh.

Sementara itu, Wagub Aceh, Nova Iriansyah, seperti dirilis portalsatu.com secara tegas menolak tudingan bahwa wacana modifikasi cambuk sudah final. Menurutnya, gagasan modifikasi tersebut masih sebatas wacana yang masih harus didiskusikan.

Namun demikian, kita tidak sepakat jika prosesi cambuk di depan umum dikaitkan dengan investor. Tentunya sangat sulit mencari titik temu antara cambuk dan investasi. Jika ada investor yang takut menanamkan investasinya hanya karena cambuk, maka investor serupa ini justru patut dicurigai. Oleh sebab itu argumen yang menyebut penerapan cambuk akan menghambat investor menjadi tidak relevan untuk didiskusikan.

Setelah menyimak berbagai pendapat yang berkembang, ada baiknya jika kita mencoba melihat gagasan modifikasi cambuk tersebut secara kritis. *Pertama,* dalam konteks politik, gerakan penolakan modifikasi cambuk terkesan telah disusupi oleh kepentingan politik yang dimaksudkan sebagai satu "pukulan" bagi Irwandi Yusuf yang baru saja terpilih sebagai gubernur. Hal ini setidaknya tercermin dari statemen beberapa pihak yang pada pilkada lalu berada dalam kubu politik berbeda. Pihak-pihak inilah yang terlihat begitu garang dalam menyuarakan penolakan. Dengan demikian, bukan tidak mungkin jika ada pihak-pihak yang mencoba menggunakan

"kesempatan emas" ini untuk "menyerang" Irwandi yang baru saja dilantik.

Kedua, dalam konteks teologis, muncul anggapan bahwa melakukan modifikasi cambuk sama dengan mengubah hukum Allah. Pendapat ini tentunya kurang tepat, untuk tidak menyebut keliru. Qanun tentang penerapan syariat Islam hanyalah sebuah produk hasil olah pikir manusia yang kemudian disepakati secara kolektif melalui parlemen. Artinya, qanun itu sendiri bukanlah hukum Allah, tetapi hanya sebuah interpretasi dari hukum Allah yang tentunya masih berpeluang diperdebatkan dan didiskusikan kembali. Dengan demikian, wacana modifikasi hukuman cambuk dan revisi qanun tidak bisa divonis sebagai melawan hukum Allah.

Ketiga, secara sosiologis penerapan syariat Islam di Aceh belum secara maksimal membangkitkan kesadaran personal dari kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya pelanggaran syariat yang dilakukan oleh oknum masyarakat dalam setiap sendi kehidupan. Penegakan syariat Islam di Aceh sampai saat ini masih bertumpu pada ancaman hukuman semata, sementara upaya mendidik masyarakat agar "sadar syariat" justru tidak menjadi perhatian. Dalam redaksi yang lebih ringan, masih ramai masyarakat kita yang *la ra'du* (*hana diteupu reudok*) dan tidak memahami pentingnya kesadaran personal dalam menjalankan syariat. Dalam kenyataannya, pelaksanaan syariat yang hanya berbasis hukuman seperti cambuk dengan melupakan aspek pendidikan pastinya tidak akan mampu memberikan dampak sosiologis bagi terbangunnya kesadaran. Akhirnya yang menjadi objek cambuk hanyalah orang-orang "*jahil*" yang melihat sampul qanun saja tidak pernah – apalagi membacanya.

Keempat, dalam praktiknya, eksekusi terhadap pelanggaran syariat selama ini masih terkesan diskriminatif dan hanya menyentuh kalangan "proletar," sedangkan para "borjuis" justru bebas melanggak-lenggok tanpa harus takut pada ancaman cemeti. Sepakat atau pun tidak, yang menjadi terhukum selama ini masih didominasi oleh *apa gampong*, *mawa-miwa, pakwa-yahwa,* anak-anak ABG yang belum fasih membaca *bismillah* dan insan-insan awam yang tidak punya relasi dengan penguasa. Merekalah yang selama ini menjadi "sahabat akrab" cambuk-cambuk yang berlebel syariat. Adapun kelas "borjuis" masih bebas melakukan korupsi, pemerasan dan pungli tanpa harus khawatir punggungnya dicambuk. Sampai saat ini, cambuk hanya menyasar kejahatan-kejahatan personal yang berlangsung tertutup di tempat terpencil nan sunyi semisal judi, khamar dan khalwat. Sebaliknya, cambuk terlihat tidak berdaya ketika berhadapan dengan penjahat-penjahat berdasi yang beraksi di "siang hari."

Di sebalik itu, prosesi cambuk yang berlangsung selama ini cenderung menjadi ajang hiburan untuk ketawa-ketiwi plus selfi-selfi. Kondisi ini menyebabkan aib yang seharusnya dikubur dalam-dalam justru menjadi viral. Bahkan ketika si "tersalah" telah bertaubat kepada Tuhannya, aib yang terekam melalui video dari tangan-tangan jahil akan terus tersiar melalui media sosial. Akhirnya prosesi cambuk di depan umum hanya menjadi tempat bertemunya dua rasa – malu bagi si terhukum – dan gembira bagi si penonton. Sebuah serimonial yang minus nilai.

Berpijak pada ulasan di atas, maka wacana modifikasi cambuk merupakan sebuah gagasan yang patut didiskusikan kembali. Gagasan ini harus dilihat sebagai wacana akademik

yang terbebas dari unsur-unsur politik. Sudah saatnya cambuk garis selfi ini dievaluasi demi terjaganya kehormatan kaum muslimin dan manusia pada umumnya. (***AT, 15 Juli 2017***).

Parade "Kegenitan"

Kita tentu memiliki pandangan masing-masing terhadap kata "genit." Demikian juga dengan saya. Bagi saya, kegenitan adalah sebuah bentuk kelatahan terstruktur dan sistematis, meskipun tidak masif. Dan semua kita berpeluang untuk genit. Di satu sisi, kegenitan dibutuhkan sebagai sebuah medium ekspresi. Bagi sebagian orang, menggunakan kegenitan sebagai media adalah sebuah keasyikan. Sementara di sisi lain, kegenitan justru dapat mengguncang kewarasan dan mematahkan akal sehat sehingga ia dipandang memuakkan. Terlepas di posisi mana kita berdiri, hampir setiap saat kita dihadapkan pada rupa-rupa kegenitan.

Kemarin (31/07/17), beranda *facebook* Aceh kembali disemarakkan oleh postingan seorang *nitezen* terkait "hadiah genit" yang disodorkan oleh oknum mahasiswa yang mengikuti sidang *munaqasha*h di salah satu perguruan tinggi di Aceh. Dalam postingannya, *netizen* tersebut menyatakan kekesalannya terhadap hadiah tak lazim yang diberikan kepadanya. Tidak hanya itu, *netizen* dimaksud juga mengkritisi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masuknya buah-buahan bergambar "tak layak" tersebut ke Aceh. Uniknya lagi,

di akhir postingannya, si *netizen* menyebut ada tulisan Cina pada buah tersebut. Dan di akhir postingannya dia menulis kata *kafe*.

Sontak saja, postingan *netizen* ini ramai diperbincangkan dan mendapat banyak komentar. Banyak pihak yang mengapresiasi postingan dari *netizen* yang belakangan diketahui sebagai salah seorang akademisi di Aceh. Bahkan, informasi genit ini turut dirilis oleh serambinews.com sehingga "tragedi" ini menjadi konsumsi publik. Dan sebagai bagian dari publik, saya dan siapa pun tentunya berhak menyumbang komentar terkait hadiah yang bernuansa genit ini.

Terlepas, kita sepakat atau pun tidak dengan postingan ini, tapi bagi saya, postingan serupa ini adalah salah satu bentuk "kegenitan" yang diperankan intelektual. Seharusnya hal-hal semacam ini bisa diselesaikan di ruang akademik tanpa harus membawanya ke luar arena sehingga akan memunculkan ragam penafsiran yang tidak perlu. Lagi pula, tidak begitu jelas, apakah hadiah genit ini didasari oleh faktor kesengajaan, atau justru hanya kelalaian belaka. Ada kekosongan informasi di sini.

Sebagai seorang intelektual, semestinya setiap penyelesaian masalah dilakukan dengan cara-cara yang lazim dalam dunia akademik, bukan justru diobral dengan kegenitan serupa. Anehnya lagi, yang bersangkutan di satu sisi menyatakan tidak sepakat dengan gambar yang tertera di hadiah genit tersebut, tetapi di sisi lain, yang bersangkutan justru turut menyebarkan gambar[2] tak layak itu. Di sini saya melihat ada sikap inkonsistensi yang seharusnya tidak terjadi.

[2] Gambar orang berciuman.

Kecuali itu, dalam peradaban maya, mungkin kita juga sering melakukan berbagai kegenitan yang tidak kita sadari. Bukan tidak mungkin, kegenitan-kegenitan yang kita munculkan ini kemudian berdampak pada lahirnya persepsi sebagian "fans" yang selama ini mengikuti postingan kita di media sosial. Jika sudah begini, patut diduga, bahwa persepsi inilah yang membuat sebagian "fans" kita tersentuh hatinya untuk sesekali bersikap genit. Nah, bisa jadi hadiah-hadiah "genit" yang diberikan kepada kita adalah sebuah produk kegenitan dari para *fans*. Untuk itu, seharusnya kita patut bersyukur, bukan justru bersedih dan larut dalam kekesalan.

Kita juga harus ingat pepatah kuno: "Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api." Berpijak pada pepatah ini, maka kita harus sepakat bahwa sebuah "kegenitan" tidak akan pernah muncul tanpa diawali oleh "kegenitan" yang serupa. Mari bergenit ria! (***AT, 01 Agustus 2017***).

Rokoknologi

Guru saya, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) – yang juga pemikir terkenal di Aceh abad ini – dan juga Indonesia, telah sukses merumuskan satu cabang ilmu baru guna memahami Aceh. Hasil ijtihad ilmiah KBA ini telah tersusun rapi dalam beberapa jilid buku yang beliau namai Acehnologi. Buku Acehnologi karya antropolog muda ini adalah salah satu buku penting yang harus dibaca minimal sekali dalam seumur hidup.

Tanpa bermaksud ikut-ikutan – meskipun sedikit latah, judul tulisan ini sengaja menjiplak pola Acehnologi yang telah dikonstruk secara sistematis oleh KBA. Sebagai salah seorang murid KBA, tentu wajar saja jika saya melakukan *tabarruk* akademik kepada guru saya. Jika kader-kader dayah tradisional melakukan *tabarruk* dengan cara mencium tangan – maka saya melakukan *tabarruk* dengan memeluk karya-karya guru saya. Ini adalah bentuk *tabarruk* metodologis yang masih tabu dalam lingkugan akademik – atau mungkin dianggap sebagai *bid'ah* akademis. Karena itulah saya memberi tajuk tulisan ini dengan Rokoknologi.

Namun demikian, saya harus sadar-sesadar-sadarnya bahwa secara metodologis, artikel Rokoknologi ini tidak sepenuhnya akademis – dan jauh dari tradisi ilmiah – dan bahkan mungkin bertentangan dengan "SOP" yang telah dirancang oleh para akademikus. Hal ini terbilang wajar, sebab bangunan keilmuan yang saya miliki tertinggal jauh ratusan juta kilometer dari akademikus semisal KBA. Tapi, kondisi ini menjadi titik aman, karena saya akan terbebas dari gugatan ontologis, epistimologis dan aksiologis dari mereka-mereka yang sok akademikus.

Jika Acehnologi kita ibaratkan seperti hujan lebat yang membasahi setiap jengkal bumi, maka Rokoknologi hanyalah titisan gerimis manja yang justru menidurkan. Rokoknologi adalah kepingan halus yang mungkin tertimbun dalam tumbukan tradisi Keacehan lainnya – sehingga ia terpental dari rumah besar Acehnologi yang telah diramu secara apik oleh KBA.

Saya harus jujur bahwa Rokoknologi ini lahir setelah saya membaca statemen Kepala Bappeda Aceh beberapa hari lalu – yang menyebut rokok sebagai penyebab kemiskinan. Sebuah statemen apologis-diskriminatif guna menutupi kegagalan mereka dalam menumbuhkan perekonomian di Aceh dengan cara melempar bola kepada para perokok.

Diskusi tentang Rokoknologi semakin menajam ketika saya menikmati sanger panas bersama senior saya, Risman Rachman di Solong Ulee Kareng (11/08/17). Dalam beberapa statusnya di *facebook,* Risman terlihat sangat gencar membahas rokok sebagai salah satu pintu memahami Aceh. Dari meja kupi inilah, Rokoknologi menjelma sebagai sebuah medium untuk menerjemahkan Aceh.

Untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam kehidupannya, sebagian masyarakat Aceh cenderung menggunakan simbol tertentu yang terkadang menjelma dalam bentuk *hadih maja*. Di antara *hadih maja* kontemporer adalah kalimat *sibak rukok teuk*, *rukok sibak teuk* dan *toh rukok sibak*.

Kalimat *sibak rukok teuk* menduduki strata tertinggi dalam menafsirkan sebuah fenonema di Aceh. Tidak begitu jelas, sejak kapan istilah *sibak rukok teuk* ini muncul dalam perbicangan masyarakat Aceh. Tapi yang jelas, popularitas kalimat ini mencapai puncaknya ketika konflik GAM-RI berkecamuk.

Istilah *sibak rukok teuk* sering digunakan oleh pihak GAM untuk memberi harapan kepada masyarakat bahwa perjuangan mereka akan segera berhasil. Dan ketika kesuksesan tersebut tidak datang juga, sebagian masyarakat sering mengolok dengan *sibak rukok beuso teuk* (sebatang rokok besi lagi).

Istilah *sibak rukok teuk* (sebatang rokok lagi) mengandung makna bahwa sebuah usaha yang sedang dirintis akan segera mencapai kesuksesan. *Sibak rukok teuk* dapat disepadankan dengan *sebentar lagi*. Dan dalam kenyataan sosial masyarakat Aceh, *sibak rukok teuk* tidak hanya menjadi monopoli GAM, tapi juga kerap digunakan oleh masyarakat umum sebagai simbol harapan.

Bicara *sibak rukok teuk* adalah bicara kesuksesan dan kejayaan. Semangat *sibak rukok teuk* adalah semangat yang terus menyala-nyala dan tidak pernah padam. Tidak hanya rakyat, pemerintah dan para politisi pun senantiasa bermain dengan *sibak rukok teuk*. Aceh akan maju dalam periode *sibak rukok teuk*. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi di Aceh

juga akan dicapai dalam rentang waktu *sibak rukok teuk*. *Pokoknya sibak rukok teuk* dan selalu *sibak rukok teuk*.

Jika *sibak rukok teuk* mencerminkan sebuah harapan yang akan terwujud, sebaliknya, *rukok sibak teuk* (rokok sebatang lagi) memberi tanda kemunduran. Sebungkus rokok yang kemudian menyusut menjadi *rukok sibak teuk* mencerminkan ketidakstabilan dan keterpurukan. *Rukok sibak teuk* mengindikasikan gagalnya pertumbuhan ekonomi dan menjadi kode bagi menjamurnya kemiskinan.

Dalam kondisi demikian, pemerintah seharusnya mengevaluasi diri, bukan justru menyentil para perokok sebagai tersangka utama penyebab kemiskinan. Pemerintah selaku penguasa harus bertanggung jawab melakukan berbagai langkah guna mencari tahu kenapa Aceh terjebak dalam kondisi *rukok sibak teuk*.

Jika kondisi *rukok sibak teuk* dibiarkan oleh pemerintah dengan menaburkan argumen berkualitas rendah maka kondisi ini justru akan semakin parah. *Rukok sibak teuk* akan segera berubah wujud menjadi *toh rukok sibak* (minta rokok sebatang). *Toh rukok sibak* menjadi tanda bagi kondisi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, pemerintah tidak boleh larut dalam keasyikan dan menari di atas angka-angka, tapi pemerintah harus sigap menyulap angka-angka tersebut guna menyelamatkan masyarakat dari kondisi *toh rukok sibak*.

Mengakhiri tulisan ini, kita berharap kepada penguasa baru di Aceh untuk tidak terlena dengan statistik yang menipu sehingga menambah kebingungan publik. Menyebut rokok sebagai penyebab kemiskinan adalah tindakan memblender perhatian publik demi menjaga marwah penguasa yang

mulai terkoyak. Dan bukan tidak mungkin, justru Bappeda yang selama ini gagal membuat perencanaan sehingga menyebabkan kemiskinan di Aceh. Jika memang Bappeda serius ingin memasukkan rokok sebagai indikator kemiskinan, maka tulisan di bungkus rokok yang selama ini terkait dengan kesehatan diganti dengan kalimat yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti "rokok dapat menyebabkan kemiskinan" – stempel Bappeda.

Rokok tidak selamanya menjadi simbol kemiskinan, tapi rokok juga bisa menjadi penanda maju mundurnya pertumbuhan ekonomi di Aceh. Rokok adalah salah satu pintu kecil memahami Aceh. Salam Rokoknologi. (***AT, 12 Agustus 2017***).

Menyembelih Keangkuhan

Tidak mudah melahirkan sebuah definisi yang akurat tentang apa itu keangkuhan. Juga tidak mudah melakukan identifikasi tentang siapa yang pantas disebut angkuh. Masing-masing kita merasa berhak mendefinisikan diri kita sendiri, sebab kitalah yang paling tahu tentang kita, bukan orang lain. Meskipun menolak didefinisikan, tapi anehnya, kita tetap merasa berhak mendefinisikan orang lain. Akhirnya, kita pun tenggelam dalam keangkuhan. Karena, perasaan "berhak" ini adalah manifestasi keangkuhan.

Nah, apa itu keangkuhan? Dalam sudut pandang teologis, keangkuhan adalah wujud dari "keimanan yang gagal." Kegagalan seseorang dalam mengenal Tuhan akan menempatkannya sebagai sosok kesepian sehingga ia pun ingin menjadi "tuhan," tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Dalam perspektif ini, keangkuhan adalah sebuah kehinaan. Mungkin tidak ada satu agama pun yang menilai keangkuhan sebagai perilaku terpuji, sebab agama itu sendiri mengajarkan "ketundukan."

Sementara dari sudut sosiologis, keangkuhan adalah ketidakmampuan beradaptasi dan berkomunikasi sehingga ia

terpental dari lingkungan sosialnya. Kondisi "keterusiran" ini akan melahirkan sosok yang mendefinisikan dirinya sebagai berbeda dari "yang lain." Alhasil, keangkuhan pun menjadi sebuah medium untuk mempertegas identitas keberbedaannya.

Ada pun dalam timbangan psikologis, keangkuhan adalah potret keterkejutan mental yang berdampak pada munculnya sikap ingin dipuja. Keterkejutan mental ini akan melahirkan kelatahan psikologis dengan perolehan kepuasan batin melalui sanjungan. Akibatnya, keangkuhan menjadi satu-satunya alat pemaksa guna memuaskan jiwa yang sakit.

Terlepas dari sudut mana kita memandang, keangkuhan adalah sebuah sikap frustasi dalam menerjemahkan realitas. Keangkuhan akan melahirkan manusia-manusia kosong, jauh dari Tuhannya, terusir dari lingkungan sosialnya dan tertekan jiwanya. Manusia-manusia angkuh senantiasa hidup dalam "keterasingan" dan kekal dalam "kesepian."

Keangkuhan adalah penyakit tertua yang telah mengiringi perjalanan dunia sejak awal-awal penciptaan. Keangkuhan pertama dan paling populer telah dideklarasikan oleh Iblis ketika ia enggan sujud kepada Adam. Ini adalah keangkuhan paling awal dalam sejarah dunia. Akibat keangkuhannya ini, Iblis pun dikutuk sehingga ia pun tenggelam dalam kecelakaan abadi. Bermodal keangkuhan ini pula, Iblis melakukan kaderisasi terhadap manusia – yang sejak awal telah dipersiapkan sebagai *khalifah* di muka bumi. Kader-kader Iblis inilah yang kemudian menebar keangkuhan di muka bumi.

Dalam praktiknya, keangkuhan tidak pernah melahirkan kejayaan. Sebaliknya, keangkuhan justru menjadi petaka. Keangkuhan teologis yang ditunjukkan Fir'aun misalnya, telah

membuatnya tenggelam dalam lautan. Keangkuhan ekonomik semisal Qarun pun telah menguburnya di dasar bumi. Demikian pula dengan keangkuhan etnis yang diperankan Yahudi telah memaksa mereka hidup dalam diaspora di masa lalu.

Dalam konteks kekinian, contoh paling dekat adalah keangkuhan Soeharto dengan rezim Orde Barunya yang akhirnya tumbang seketika. Keangkuhan militeristik yang dipraktikkan Soeharto selama 32 tahun akhirnya hancur hanya karena tekanan massa tanpa senjata. Demikian pula dengan keangkuhan sebuah kekuatan politik besar di Aceh beberapa waktu lalu – juga berakhir tragis dan menyedihkan – kalah tanpa suara.

Saat ini, kita juga tengah dihadapkan pada keangkuhan besar yang dipamerkan negara tetangga, Myanmar – yang kabarnya telah melakukan penindasan sedemikian sadis terhadap etnis Rohingya. Dari informasi yang beredar cepat, terlihat keangkuhan dahsyat yang semestinya dikutuk oleh seluruh penduduk bumi – yang saat ini terlihat diam membisu. Keangkuhan politik ala barbarian yang dipertontonkan Myanmar telah berbuah petaka bagi minoritas muslim.

Keangkuhan adalah petaka. Tidak ada keangkuhan yang abadi. Tersebab itu, sudah saatnya keangkuhan disembelih, *dicang-cang* dan *ditek-tek*. Mari membangun peradaban tanpa keangkuhan. Selamat Hari Raya Qurban 1438 H sembari memanjat sebaris doa untuk Rohingya yang saat ini tertindas akibat keangkuhan rezim penjagal. (***AT, 01 September 2017***).

Agama Bukan Celana Dalam

Pada tahun 1986, Indonesia pernah dihebohkan dengan perkawinan beda agama yang melibatkan dua orang artis populer masa itu. Jamal Mirdad yang kala itu berusia 25 tahun ingin mempersunting gadis pujaannya Lydia Kandou yang berumur 23 tahun. Rencana pernikahan kedua anak manusia ini – seperti dicatat Panji Masyarakat (No. 510/ 1986) sempat menghebohkan masyarakat Indonesia.

Dengan berpegang pada UU No. 1 Tahun 1974, Hakim Sri Endang Kawuryan memutuskan bahwa perkawinan kedua pasangan beda agama ini bisa dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, bukan di KUA. Menurut hakim, perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan. Alhasil, keputusan ini pun disambut pro-kontra oleh publik.

Dua paragraf di atas hanyalah pengantar guna mengasah ulang kecerdasan kita dalam beragama. Ada pelajaran besar yang bisa dipetik dari kisah Jamal Mirdad dan Lydia Kandou. Meskipun dua insan yang cukup populer di masanya itu telah terbenam dalam cinta, tapi keduanya tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Cinta tidak lantas membuat mereka bertukar agama. Mereka terus berusaha melakukan berbagai

langkah agar perkawinan dapat dilangsungkan dengan tanpa berdiskusi soal pindah agama.

Kisah ini tentunya sangat kontras dengan "tragedi" yang terjadi di Singkil baru-baru ini. Dalam riwayat beberapa media disebutkan seorang calon kepala desa di Singkil memilih untuk pindah agama karena diduga tidak bisa membaca Alquran. Jika ini benar, maka ini adalah sebuah pilihan yang cukup fantastis. Pilihan ini mengindikasikan jika yang bersangkutan memiliki kecerdasan di atas rata-rata.

Seperti kita ketahui, di Aceh, untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, baik kepala desa, bupati, gubernur atau pun anggota dewan dipersyaratkan untuk mampu membaca Alquran. Persyaratan ini masuk dalam ketegori kekhususan yang dimiliki oleh Aceh sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009. Persyaratan ini sendiri lahir dari semangat penegakan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh.

Bagi para calon pemimpin yang belum mampu membaca Alquran dihadapkan pada dua pilihan. *Pertama,* belajar membaca Alquran sebelum mencalonkan diri. Proses belajar ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika dilakukan oleh mereka-mereka yang telah mengalami tiga kali pubertas. *Kedua,* pindah agama agar persyaratan membaca Alquran menjadi gugur dengan sendirinya sebab persyaratan tersebut hanya dibebankan kepada muslim, tidak kepada non muslim. Proses pindah agama ini tentunya dapat dilakukan dalam waktu yang cukup singkat tanpa menghabiskan banyak waktu.

Bagi mereka yang memiliki intelegensi "rendah" biasanya akan menempuh jalan pertama sebagai solusi dengan cara

belajar membaca Alquran secara khusus. Sementara bagi mereka yang punya intelegensi "di atas rata-rata" cenderung memilih jalan kedua dengan cara pindah agama. Pilihan pindah agama untuk menghindari syarat membaca Alquran adalah pilihan paling cerdas yang tentunya jarang terpikir oleh masyarakat awam.

Apa yang dilakukan oleh calon kepala desa di Singkil, mengingatkan saya pada pengalaman pribadi lima belas tahun lalu. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Ramadhan. Waktu itu ketika sedang asyik-asyiknya bermain internet di sebuah warnet di Darussalam, seorang kawan memanggil anak kecil yang sedang bermain di luar warnet.

"Tolong belikan sprite di mini market," kata teman saya kepada anak kecil sembari menyodorkan uang. "*Abang hana puasa*?" tanya si anak kecil tersebut. "Abang Kristen, dek," sahut teman saya dengan nada suara agak keras. Dan anak kecil itu pun berlari girang ke mini market karena mendapat ongkos yang lumayan. Sambil meneguk sprite di samping saya, si teman berbisik: "*nyo hana trok bak hate, mayang sagai nak item blo*" (pengakuan saya Kristen hanya pura-pura agar anak itu mau membeli minuman).

Apa yang dilakukan oleh teman saya 15 tahun lalu ini adalah sebuah kecerdasan di atas rata-rata yang kemudian diulang kembali dengan pola berbeda oleh calon kepala desa di Singkil. Bagi pemilik kecerdasan di atas rata-rata ini, agama telah diposisikan seperti celana dalam yang bisa dia buka-pakai sekehendak hatinya. Jika (maaf) pantatnya gatal, celana dalam itu dia buka, kemudian ketika gatal pergi, dia pakai lagi.

Agama hanya dijadikan sebagai kedok untuk melindungi keinginan hatinya sebagaimana celana menuntupi *lolo*. Ketika dia dihadapkan pada kepentingan lain yang lebih besar, maka agama akan ditinggalkan begitu saja. Kelakuan ini sama saja dengan perilaku anak manusia yang mencampakkan celana dalam ketika ingin latihan tarian "si Unyil."

Kita semua tentu akan khawatir jika pola pindah agama dipraktikkan secara massal oleh oknum caleg yang ingin tampil pada pentas 2019. Indikasi ke arah ini terbuka lebar, sebab – seperti telah kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa oknum caleg dan oknum kepala daerah yang merasa tertekan dengan persyaratan membaca Alquran. Tekanan mental dan juga waktu belajar yang terbatas, secara psikologis dapat saja mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tidak masuk akal agar keinginannya tercapai.

Menyikapi kondisi ini, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh selaku penguasa yang bertanggungjawab dunia akhirat terhadap rakyatnya. *Pertama,* mendirikan Sekolah Alquran bagi para calon legislatif dan calon kepala daerah. Sekolah Alquran ini nantinya bertanggungjawab melahirkan para calon politisi yang mampu membaca Alquran dalam bahasa Arab, bukan bahasa latin seperti pernah terjadi beberapa waktu lalu.

Kedua, menghapuskan syarat membaca Alquran. Solusi ini tentunya akan dianggap tidak bijak dan merendahkan semangat penegakan syariat Islam di Aceh. Namun demikian, kita pun bertanggungjawab menyelamatkan oknum politisi yang bukan tidak mungkin akan meniru gaya calon kepala desa di Singkil. Jika syarat membaca Alquran justru menjadi penghalang dan menyebabkan seseorang memilih murtad,

maka menghilangkan persyaratan ini adalah pilihan yang patut dipertimbangkan.

Sebagai penutup, saya ingin menitip catatan kecil untuk kita semua bahwa agama bukan celana dalam! (***AT, 11 September 2017***).

Manusia Setengah Jadi

Dalam bukunya *Lembaga Budi,* Hamka (1980) menulis: "Orang yang setengah bodoh dan setengah pintar lebih berbahaya dari pada orang yang benar-benar bodoh dan yang benar-benar pintar sebab orang yang bodoh tidaklah sanggup mengatur maksudnya yang jahat dan orang yang pintar dan berpendidikan dihambat oleh pendidikannya buat mengatur kejahatan."

Kalimat ringkas dari Hamka tersebut cukup sederhana dan bisa dipahami oleh siapa pun. Kita tidak butuh *mufassir* andal untuk mengupas kalimat singkat ini. Sebab ia bukan syair pujangga yang maknanya tersembunyi, bukan pula kalimat filosof yang berbelit-belit.

Dengan kalimat sederhana, Hamka mencoba menitip sebuah pesan menarik untuk kemudian dikaji secara serius. Pola ini tentunya berbeda dengan gaya para akademikus yang menulis dengan kosa-kata "menjengkelkan," sehingga hanya dia saja yang mengerti. Kuat dugaan, para akademikus serupa ini mencoba merealisasikan kebingungan yang pernah diutarakan Sartre, bahwa: "Penulis besar adalah penulis yang tulisan-tulisannya salah dipahami pembaca." Sarte menyebutnya

sebagai *misunderstood*. Tentu ada banyak penulis serupa ini di sekeliling kita.

Hal sebaliknya ditunjukkan oleh Hamka – bahwa tujuan menulis adalah untuk dipahami, bukan *show of force lughawi* yang hanya menghadirkan kebingungan. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa ada semacam "penyakit" di kalangan akademikus kita – di mana ada kepuasan ketika tulisan-tulisannya membuat orang tercengang, bukan karena pesan yang bermakna, tapi karena dia telah sukses menghadirkan kebingungan. Berengsek!

Dalam tulisannya yang ringan, seperti dikutip di awal artikel ini, Hamka menyebut ada dua tipe manusia yang patut diwaspadai. Dua tipe manusia ini senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Sebab itu, sangat penting melakukan identifikasi secara cermat agar sosok mereka dapat dikenali.

Pertama, manusia setengah bodoh. Manusia semisal ini, menurut Hamka, lebih berbahaya dari manusia yang benar-benar bodoh. Kebodohan total adalah "anugerah" yang akan menyelamatkan si empunya dari merencanakan sebuah kejahatan. Hal ini terbilang wajar, sebab "kebodohan yang sempurna" akan mengurung seseorang dalam ketidaktahuan sehingga akan sulit baginya untuk merencanakan kejahatan dalam bentuk apa pun.

Sebaliknya, orang yang setengah bodoh – seperti disebut Hamka, akan mudah tergelincir dalam kejahatan, seperti mencuri, mencopet, merampok, dan kejahatan semisal lainnya. Praktik-praktik kejahatan semacam ini timbul akibat posisi intelektualitasnya berada pada *maqam* setengah bodoh. "Kebodohan minimalis" ini akan memberi ruang kepada

seseorang untuk merencanakan dan melakukan berbagai tindak kejahatan yang umumnya gagal di akhir sehingga sebagian besar pelakunya diekseskusi oleh hakim jalanan. Orang-orang setengah bodoh biasanya akan berhadapan dengan "setengah sukses." Sukses mencuri, tapi gagal membawa lari.

Kedua, manusia setengah pintar. Seperti disinggung Hamka, manusia setengah pintar lebih berbahaya dari manusia yang benar-benar pintar. Manusia yang benar-benar pintar, seperti halnya manusia yang benar-benar bodoh akan terselematkan dari tindakan-tindakan buruk. Dengan berbekal ilmu yang dimilikinya, manusia pintar akan terhalangi dari perilaku jahat. Pengetahuan yang ia miliki akan menjadi benteng penyelamat. Jika pun ada manusia pintar yang melakukan kejahatan, maka hampir dapat dipastikan bahwa dia telah berpindah ke *maqam* setengah pintar.

Seperti halnya manusia setengah bodoh, manusia setengah pintar pun patut diwaspadai. Kepintaran yang setengah akan mendorong seseorang melakukan berbagai kejahatan dalam level yang lebih tinggi dari sosok setengah bodoh. Tindakan korupsi misalnya, adalah tindakan yang hanya dilakukan oleh manusia-manusia setengah pintar.

Tidak hanya melakukan kejahatan, "kepintaran pancung" juga cenderung menyebabkan si empunya larut dalam rupa-rupa khayalan sehingga muncullah tindakan-tindakan aneh. Keanehan akibat setengah pintar pernah ditunjukkan oleh sekelompok orang yang tidak mampu membedakan patung di tempat ibadah dengan patung di tempat publik – akhirnya terpaksa dibungkus kain putih. Praktik setengah pintar juga sering dipamerkan oleh sejumlah oknum yang ingin berjihad dengan tangan kosong ke negeri orang.

Dengan berpijak pada klasifikasi Hamka, dapat disimpulkan bahwa "perkawinan" manusia setengah bodoh dengan manusia setengah pintar akan melahirkan sosok baru yang untuk sementara dapat kita sebut sebagai "manusia setengah jadi." Manusia setengah jadi, adalah sosok setengah manusia – setengah bukan. Nah, manusia setengah jadi inilah yang senantiasa membuat kerusakan dan menebar kekacauan di muka bumi. Mungkin Aung San Suu Kyi masuk kategori ini. (***AT, 15 September 2017***).

Teungku Landok

Sehebat apa pun, se'alim apa pun dan sekarismatik apa pun, *teungku* juga seorang manusia yang kepadanya dititipkan nafsu oleh Sang Pencipta. Namun berbeda dengan "rekan-rekan" kita dari kalangan hewan – selain nafsu, manusia juga dilengkapi dengan akal budi sebagai garis pemisah antara kita dan "bapak-bapak" berkaki empat.

Hamka (1956) dalam salah satu bukunya menegaskan bahwa seorang ulama besar sekali pun, dia tetaplah manusia biasa yang tidak lepas dari berbagai kekurangan, memiliki nafsu dan butuh makan minum. Sebab itu, kita dilarang memosisikan manusia melebihi status kemanusiaannya.

Apa yang dialami oleh seorang *teungku* di Tanah Luas Aceh Utara baru-baru ini yang kononnya telah melakukan aksi pencabulan terhadap santriwatinya semakin membuktikan bahwa *teungku* juga manusia biasa. Informasi terbaru, *teungku* oknum pimpinan pesantren yang sempat menjadi DPO polisi ini sudah menyerahkan diri. Oknum *teungku* tersebut ini juga mengakui bahwa dirinya pernah menyetubuhi santrinya beberapa bulan lalu.

Teungku serupa ini cocok dinamai sebagai *teungku landok*. Dalam Kamus Aceh-Indonesia (Aboebakar dkk, 1985) kata *landok* sama dengan *randok* yang memiliki makna "bandot." Dalam perbincangan sehari-hari, istilah *landok* (*randok*) atau bandot sering diasosiasikan dengan sikap seseorang yang suka menggoda atau berlagak romantis tidak pada tempatnya.

Dengan sikap "lugu" (lebih tepat *lhok gong*), *teungku landok* mengaku bahwa sebelum melakukan adegan "si Unyil" dengan santrinya, dia telah berjanji akan menikahi santri tersebut. *Teungku landok* juga mengaku khilaf dan ingin bertaubat. Mungkin *teungku landok* berpikir bahwa salah satu syarat taubat adalah melakukan "khilaf." Artinya, tanpa "khilaf" taubat tidak sempurna.

Dalam konteks kekinian, kata "khilaf" telah menjadi semacam sandi yang diucapkan dengan wajah lesu sebagai strategi menarik simpati. Ada semacam kecenderungan pada sebagian kalangan bahwa sandi "khilaf" akan merontokkan sebagian dosa. Dan kita harus sepakat bahwa "khilaf" serupa ini adalah "khilaf" yang didramatisir. Akibat makin maraknya "khilaf" semisal ini, akhirnya muncullah *meme* unik seperti: "*Ayuk bang...siapa tau kita khilaf*."

Uniknya lagi, tidak hanya khilaf, *teungku landok* dengan sangat polos juga mengakui jika dirinya aktif mengonsumsi ganja dalam dua tahun terakhir. Tapi lucunya ia merasa tidak mengalami ketergantungan dengan ganja, meskipun telah dikonsumsi selama dua tahun. Pengakuan polos nan lugu ini hampir serupa dengan pengakuan orang gila bahwa dia tidak gila, tapi hanya kurang waras.

Perihal mengonsumsi ganja, tentunya tidak hanya dipraktikkan oleh oknum *teungku landok* di Aceh Utara, tapi juga sering kita temui pada oknum-oknum *teungku* lain yang dengan bangga dan "gagah perkasa" mengakui pernah mengonsumsi ganja. Pernah suatu ketika, seorang oknum *teungku* menceritakan kepada saya bahwa dirinya aktif mengonsumsi ganja ketika masih mengaji. Menurutnya mengonsumsi ganja akan memberi semangat.

Sementara itu, jika diselisik, tindakan khilaf yang dilakukan *teungku landok* di Aceh Utara bukanlah peristiwa pertama di Aceh, apalagi di Indonesia. Ada banyak oknum-oknum *teungku landok* yang berkeliaran mencari mangsa. Di antara peristiwa paling populer di Aceh terjadi di Pidie beberapa tahun lalu. Waktu itu, seorang *teugku landok* yang juga oknum pimpinan dayah di Pidie juga sukses melakukan aksinya di beberapa tempat di Aceh.

Menyimak berbagai peristiwa yang melibatkan *teungku landok*, muncul pertanyaan: kenapa para korban (mangsa) tunduk saja ketika ia "dilandoki?" Jawaban paling aman adalah "ketaatan." Asumsi ini diperkuat dengan fakta bahwa hampir mayoritas santri bersikap "tunduk" kepada gurunya. Atau mungkin ada satu keyakinan bahwa dosa yang dilakukan oleh oknum *teungku* akan mudah diampuni sebab ia "dekat" dengan Tuhannya.

Tapi, untuk menenangkan hati dan membuang segala curiga dan duga-duga, sekali lagi kita harus sepakat bahwa *teungku* juga manusia biasa. Seperti kata Hamka, setelah dia makan, dia akan ke belakang untuk mengeluarkan sesuatu yang berwarna lain. Demikian pula dengan persoalan syahwat. Setiap manusia normal, termasuk *teungku* tentu saja "radarnya"

akan berguncang ketika ada pesawat asing yang lewat. (***AT, 30 September 2017***).

Maling Berserban

"Penampilan adalah tipuan paling mujarab." Kita boleh saja tidak sepakat dengan "tudingan" ini, tapi dalam kenyataan sosiologis, kita senantiasa disuguhkan dengan segudang bukti – yang menguatkan kesimpulan ini. Kita sering kali terkesima dengan penampilan dalam beraneka ragam wujudnya. Dalam kondisi ini, mata menjadi satu-satunya hakim yang mengetuk palu kebenaran. Sedangkan hati dan akal budi kehilangan perannya.

Seorang laki-laki remaja yang terpaut hatinya kepada seorang gadis, rela meminjam sepatu aladin, jas berdasi dan kenderaan mewah guna "memperdaya" gadis incarannya. Dan si gadis yang telah lumpuh akalnya pun akan tertunduk layu dengan rayuan dan penampilan si laki-laki yang pada hakikatnya sedang menipu. Tipuan mata yang berlangsung terus-menerus ini pada akhirnya akan menumbuhkan keyakinan bagi si gadis untuk menerima setangkai bunga dari laki-laki remaja berpenampilan necis. Dan petaka pun akan segera hadir ketika hubungan mereka berlangsung jauh dengan hilangnya sepatu aladin dan jas berdasi.

Di zaman multimedia, gerak tipu penampilan ini pun menemukan wujudnya yang baru. Fasilitas edit foto via android menjadi senjata baru dalam menyilapkan mata. Seorang gadis yang dalam kehidupan nyata belum "laku-laku" akan berupaya mempertajam keanggunannya dengan efek kamera yang menipu. Foto-foto dengan mata sayu, pipi mulus, bulu mata lentik plus senyum nan syahdu pun melanggang ria di beranda *facebook*. Akhirnya, pemuda-pemuda jomblo pun terganggu radarnya menyaksikan wajah-wajah bergaya peri. Dan celaka pun akan segera hadir ketika mereka bertemu mata. Wajah peri yang tadinya berseri berganti rupa Nini Pelet sehingga langkah pun tersurut seribu.

Tidak hanya dalam dunia remaja yang penuh dengan aroma romantisme, gerakan tipu mata pun sering pula masuk dalam ranah teologis. Si '*alim* bisa tampak *jahil* hanya dengan penampilannya yang tak terurus. Dan si *jahil* pun akan terlihat *'alim* dengan style *ridak* dan peci layaknya Pak Haji. Kondisi serupa ini terjadi sebab mata telah meniggalkan akal sebagai alat uji yang otoritatif.

Pernah suatu ketika, seorang kakek tua berpeci putih dengan janggut memanjang ke bawah duduk di bawah tenda pada acara pesta perkawinan. Di tengah kesibukan melayani tamu, si kakek yang masih kerabat pemilik rumah didatangi oleh seorang pemuda – yang kemudian diketahui sebagai cucunya. Si anak muda tersebut mencium dan memeluk tangan si kakek. Mungkin sudah lama mereka berpisah.

Pemandangan penuh keakraban tersebut ternyata sukses "menipu" segerombolan tamu lainnya. Mereka pun berbondong-bondong mendekati sang kakek dan mencium tangannya beberapa lama. Untunglah si cucu langsung melerai

agar mereka tidak berlama-lama mencium tangan kakek, sebab kondisinya sudah sangat lemah dan tidak sanggup berdiri lama. Rupanya, gerombolan tamu tersebut mengira si kakek adalah ulama besar dengan penampilannya yang mirip syaikh di tanah Arab.

Baru-baru ini, kita juga dikejutkan oleh kejadian pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang ibu muda di Lhoksukon. Koran Serambi Indonesia (12/10/17) mengabarkan seorang ibu berusia 24 tahun disekap seorang pria yang kononnya berprofesi sebagai peminta sumbangan untuk dayah. Akhirnya, harta milik korban pun dicuri oleh oknum peminta sumbangan – yang entah peminta sumbangan betulan, atau cuma maling yang menyamar.

Style pakaian yang digunakan para peminta sumbangan pada umumnya terlihat seperti *teungku* dengan kopiah plus *ija ridak*, bahkan sebagian juga menggunakan sarung – sebagai penegas identitas. Style pakaian serupa ini tentunya akan sangat mudah menipu mata siapa pun. Sehingga tidak aneh, ketika "pasukan sumbangan" ini masuk ke rumah-rumah, si empunya rumah tidak menaruh curiga. Dengan demikian, "pasukan" ini dapat bergerak bebas menyusur lorong-lorong perkampungan dan gang-gang perkotaan. Tapi, maling tetaplah maling, meskipun berpenampilan layaknya santri atau Pak Haji.

Kondisi ini sama saja seperti oknum kader-kader partai yang membawa "panji-panji Islam" di gedung perwakilan rakyat. Meskipun mereka "bertakbir" siang dan malam, jika hobinya mencuri, tetap saja dia akan menjadi koruptor. Bukan tidak mungkin jika kopiah haji dan butiran tasbih di tangannya hanyalah "kartu sulap" pengecoh mata.

Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan kecil, bahwa penampilan adalah alat tipuan paling mujarab. Tersebab itu berhati-hatilah dengan "parade penampilan" agar kita terselamatkan dari gerak tipu mereka, khususnya para "maling berserban." (***AT, 15 Oktober 2017***).

Sultan Atau Su Tan?

Pada 6 Novemver 2017 lalu, Laksamana Malahayati resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Penganugerahan Gelar Pahlawan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Penetapan ini disambut dengan "gegap gempita" oleh masyarakat Aceh. Betapa tidak, Malahayati adalah perempuan tangguh yang disebut-sebut sebagai laksamana perempuan pertama di muka bumi. Tentu ada kebanggan yang tak terperi menyambut kabar gembira ini. Beberapa media melaporkan bahwa plakat gelar pahlawan tersebut diterima oleh salah seorang keturunannya, Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nuralam yang saat ini bermukim di NTB.

Namun di sebalik itu, mungkin karena larut dalam kesyahduan sejarah Aceh masa lalu yang gilang gemilang di bawah kendali para Sultan nan perkasa, terbesitlah keinginan dari sebagian kalangan agar keturunan para sultan yang bermukim di tanah seberang dapat pulang ke Aceh. Tidak hanya itu, ada pula keinginan dari beberapa gelintir masyarakat

Aceh, khususnya para *netizen* yang berhasrat agar posisi Wali Nanggroe juga diduduki oleh keturunan Sultan.

Artikel ini hanya akan mengupas terkait isu ini saja dan sebisa mungkin diusahakan agar tidak meluas sehingga menambah kepeningan. Di satu sisi, keinginan sebagian kalangan yang hendak menghidupkan semula istilah sultan dan sultanah di Aceh memang dapat dimengerti sebagai sebuah penegasan identitas Keacehan – yang mungkin pasca kembalinya GAM ke pangkuan Ibu Pertiwi – identitas itu telah mulai terendam.

Tapi di sisi lain, memunculkan kembali istilah sultan dan sultanah di Aceh, pasca revolusi sosial yang telah menumbangkan "penguasa-penguasa feodal" dan melahirkan Aceh modern adalah sebuah usaha yang justru membawa Aceh bergerak mundur jauh ke belakang. Lagi pula, era kesultanan di Aceh telah selesai dan berakhir dengan ditawan dan dibuangnya Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Syah. Jika pun ada pihak-pihak yang mengaku dirinya sebagai sultan pasca Sultan Aceh terakhir, maka dapat dipastikan sebagai sultan palsu. Sebab tidak ada sultan setelah sultan terakhir.

Dan sebelumnya, oleh Sultan Aceh, kepemimpinan politik dan jihad guna melawan penjajah Eropa, dalam hal ini Belanda, telah pula diserahkan kepada kaum ulama yang dalam sejarah Aceh nan panjang telah menjadi mitra dan "pengawas" bagi para sultan. Saat itu, kepemimpinan jihad diserahkan kepada Teungku Chiek Ditro sebagai perwakilan dari kaum ulama. Kepemimpinan trah Tiro ini terus berlanjut sampai wafatnya Teungku Maat Ditiro.

Dalam tahapan selanjutnya, kepemimpinan di Aceh terus berada di tangan para ulama yang pada abad 20 dipegang oleh Teungku Chik Muhammad Dawud Beureueh, seorang ulama yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Daud Beureueh, sebagaimana halnya para ulama pendahulunya adalah sosok yang tetap berpegang teguh pada titah Sultan Aceh untuk terus melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya kolonialisme di Aceh.

Kepemimpinan Dawud Beureueh dalam revolusi kemerdekaan di Aceh memiliki persambungan sanad yang berurat akar pada misi jihad yang digelorakan oleh Teungku Chiek Ditiro – yang dalam kenyataan sejarah adalah sosok yang ditunjuk oleh Sultan sendiri. Fakta lainnya, bahwa kaum ulama yang dimulai dari Teungku Chiek Ditiro sampai dengan Teungku Chiek Dawud Beureueh sama sekali tidak pernah menujukkan pengkhianatannya kepada Sultan Aceh, meskipun di masa Abu Beureueh, era kesultanan itu sendiri telah berakhir.

Dan sejarah juga mencatat, bahwa awal keruntuhan Kesultanan Aceh justru disebabkan oleh "pengkhianatan" beberapa gelintir *ulee balang* yang dalam kehidupan sosial politik masa itu telah memosisikan diri sebagai raja-raja kecil yang secara *de facto* menguasai daerahnya masing-masing. Saat itu, Sultan Aceh hanya menjadi simbol belaka di tengah kerumunan raja-raja kecil yang diperankan *uleebalang*.

Dengan demikian, jika kita ditanyai orang: "Siapakah yang berkhianat terhadap Sultan Aceh?" Jawabnya adalah "raja-raja keci" yang dalam tahapan selanjutnya terus berkompetisi dengan kaum ulama – yang merupakan pelanjut titah Sultan nan setia. Dan peran raja-raja kecil ini semakin tergerus ketika Belanda terdesak oleh mendaratnya pasukan Jepang di Aceh.

Kedatangan Jepang menjadi awal dari robohnya mahligai dan singgasana raja-raja kecil di Aceh.

Sampai dengan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, kepemimpinan politik *de facto* di Aceh tetap berada di bawah kendali kaum ulama. Ada pun raja-raja kecil kian terdesak posisinya. Keterdesakan ini kian memuncak pada saat dan pasca Revolusi Sosial yang tidak hanya meruntuhkan kekuasaan *uleebalang* di Aceh, tapi juga menyisakan "cerita pilu" yang cukup menyedihkan.

Sultan dan Wali Nanggroe

Beberapa paragraf di atas hanya sebatas pengantar belaka guna memahami posisi sultan *uleebalang* dan ulama di Aceh. Uraian ini menjadi penting menimbang ada sebagian *netizen* yang terjebak dalam perdebatan *hapit ale puntoeng* yang diakhiri dengan *teumeunak* dan *ceumarot* ketika logikanya ternyata tumpul.

Hal ini terlihat jelas ketika ada sebagian kalangan yang menuding kaum ulama bertanggungjawab atas runtuhnya kesultanan di Aceh. Pernyataan ini selain bertentangan dengan kenyataan sejarah, juga disebabkan oleh lemahnya daya nalar. Dan patut diduga, penyakit serupa ini biasanya diderita oleh mereka-mereka yang gemar meminum "koyok," padahal seharusnya koyok itu ditempel, bukan diminum.

Sementara itu, keinginan sebagian kalangan agar posisi Wali Nanggroe diduduki oleh keturunan sultan juga terlihat lucu dan menggelikan. Secara tidak langsung, gagasan liar ini menjadi awal dari upaya halus guna "membubarkan" Lembaga Wali Nanggroe yang selama ini masih ditanggapi pro-kontra.

Jika memang sultan akan kembali dijadikan simbol adat di Aceh, maka sepakat atau pun tidak, Lembaga Wali Nanggroe harus "undur diri" dan digantikan dengan Lembaga Kesultanan Aceh.

Dari diskusi yang berkembang, khususnya di jagat maya, tersiar sebuah harapan dari sebagian kalangan bahwa kejayaan Aceh akan kembali di bawah naungan sultan. Harapan serupa ini tak lebih dari sebuah igauan belaka. Sama halnya seperti anak-anak yang membeli kerupuk menggunakan kepingan uang lima rupiah. Tidak hanya persoalan nilai "lima rupiah" yang untuk membeli pecahan permen saja tidak cukup, tapi fisik uang tersebut juga sudah tidak laku di pasar-pasar modern. Benar, pecahan lima rupiah pernah berjaya di masanya, tapi tidak untuk zaman ini.

Lagi pula, keberadaan sultan di alam demokrasi seperti sekarang ini tidak akan membawa dampak apa pun bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Kehidupan sosial masyarakat Aceh yang egalitarian tentu akan "terganggu" dengan keberadaan sultan dan perangkat-perangkatnya – yang bukan tidak mungkin akan melahirkan kasta-kasta baru di Aceh yang kemudian bermuara pada kembalinya feodalisme.

Dan, dalam konteks kekinian, kedudukan sultan yang hanya sebagai simbol belaka sama saja dengan menipu diri. Sultan tanpa kuasa adalah "sultan palsu." Dan akhirnya hanya kan menjadi "Su Tan," sosok tanpa ada suara. (***AT, 14 November 2017***).

Sajadah, Kepanikan dan Kelatahan

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud memantik api yang telah mulai padam oleh berlalunya waktu. Tapi hanya sekadar usaha menjaga kewarasan agar kepanikan dan kelatahan tempo lalu tidak lagi terulang. Sadar atau pun tidak, kita telah larut dalam kelatahan dan kepanikan yang sama sekali kurang penting. Kita ingin terlibat dalam segala hal. Memang tidak ada larangan, tapi pola *geureubak-geureubuk* (tergopoh-gopoh) tentu akan membuat kita *tersuruek* (gagal fokus).

Beberapa hari lalu, masyarakat Aceh, khususnya Bireuen, baik yang menetap di alam nyata maupun alam maya, terlihat ikut berpartisipasi dalam meramaikan satu "tragedi" yang terjadi di RS Fauziah Bireuen. Para perawi berita pun terlihat aktif menyemarakkan satu "insiden" kecil nan halus yang melanda awak RS Fauziah Bireuen saat menerima tim akreditasi pada 15 Desember 2017 dengan pola "framing" masing-masing.

"Sajadah digunakan sebagai alas kaki." Kira-kira demikian nada beberapa tajuk riwayat yang berkembang. Tentu saja tajuk berita serupa ini akan menuai respons emosional dari publik.

Bagaimana tidak, sajadah yang biasanya dipakai untuk shalat telah dijadikan alas kaki. Publik marah, geram dan merah muka.

Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh (LEMKASPA) sebagaiamana dicatat lintasnasional (16/12/17) misalnya, menyebut kejadian tersebut telah "melukai hati rakyat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai Keislaman."

Uniknya lagi, seperti dirilis AceHTrend (17/12/17), Kepala RSU Fauziah Bireuen justru mengaku disabotase agar nama baiknya tercemar. Sementara hasil konfirmasi dari *kabarbireuen* (16/12/17), pimpinan RS meminta maaf dan menyebut kejadian itu bukan kesengajaan. Dan hasil penelusuran AceHTrend seperti dicatat Muhajir Juli juga menyinggung tentang keretakan internal di RS Fauziah yang telah muncul sebelumnya.

Seperti biasa, pro-kontra dan kecaman pun terus bergulir menyisir beranda-beranda *facebook* yang tak pernah sepi dengan ragam isu yang terus berkeliaran. Semua merasa benar dengan pendapatnya. Dan semua pendapat itu patut dihargai sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun, kondisi akan runyam, jika "insiden" tersebut dihubungkaitkan dengan agama, sebab emosi publik akan mudah terpancing dengan "framing" bernuansa negatif dari beberapa media yang belum tentu tepat.

Dari ragam komentar yang bergulir, hampir semua *netizen* "sepakat" bahwa telah terjadi "pelecehan" terhadap sajadah karena digunakan sebagai alas kaki. Tapi apakah benar sajadah telah dijadikan alas kaki? Apakah definisi sajadah itu? Dan apa pula *ta'rif* dari alas kaki?

Sayang, pertanyaan penting yang menjadi titik poin ini tidak pernah terjawab. Tidak ada satu pun komentator yang

mencoba menjelaskan pengertian dua terma *majhul* ini. Yang terjadi adalah penghukuman dan vonis tanpa pengadilan, tanpa hakim, tanpa pengacara. Akhirnya "terdakwa" terduduk layu di hadapan tuan "jaksa" yang telah merebut palu dari tangan hakim.

Sajadah

Secara sederhana kata *sajadah* dapat diartikan sebagai tikar atau karpet alias alas yang dipakai untuk sujud. Sementara sujud (*sajada*) itu sendiri bermakna berlutut atau bersimpuh dengan kepala mengarah ke bawah. Sedangkan tempat sujud disebut dengan *masjid* (*isim makan*)

Pemaknaan *sajadah* dalam pemahaman Melayu masih berkait erat dengan makna *sajadah* dalam Bahasa Arab. Kita memahami *sajadah* sebagai alas untuk shalat, baik ukuran kecil atau pun besar. Dengan demikian, setiap sesuatu yang digunakan untuk alas shalat bisa saja disebut sebagai *sajadah*, sebab tidak ada persyaratan dalam agama bahwa *sajadah* harus bergambar kubah masjid atau tiang mesjid. Bahkan shalat di atas *sajadah* yang bergambar jika mengganggu konsentrasi (kekusyukan) justru tidak dianjurkan. Penting juga diingat bahwa tidak ada kewajiban menggelar *sajadah* ketika shalat, sebab dahulu Rasul dan sahabatnya justru melaksanakan sujud di atas tanah, tanpa sajadah dalam pengertian hari ini.

Sajadah yang ada saat ini hanyalah hasil kreativitas manusia, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan *'aqidah*. Kemudian apakah *sajadah* itu simbol agama? Jawabannya tentu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Selama ini,

sajadah telah dianggap sebagai simbol agama melalui tradisi turun-temurun, bukan melalui ayat-ayat Tuhan.

Kemudian apa itu alas kaki? Pada prinsipnya, sesuatu itu disebut sebagai alas kaki apabila ia melekat terus menerus pada kaki. Sebagai contoh paling populer adalah sepatu dan sandal. Kita tentu sering menemukan peringatan di tempat-tempat tertentu: "Dilarang menaikkan alas kaki." Kira-kira bagaimana kita memahami peringatan ini? Apakah karpet masuk dalam larangan ini?

Orang-orang normal tentu akan memusatkan perhatiannya pada sandal dan sepatu ketika berhadapan dengan peringatan tersebut. Rasanya belum, dan tidak akan pernah ada orang yang berkesimpulan bahwa kita dilarang memakai tikar atau karpet. Dengan demikian, penyebutan alas kaki kepada *sajadah* adalah tidak tepat. Sebab *sajadah* tidak mungkin berubah menjadi alas kaki.

Jika hanya karena berjalan di atasnya kemudian benda tersebut dinamakan alas kaki, maka lantai dan jalanan yang kita pijak tiap hari pun boleh disebut alas kaki. Jika kita sepakat dengan model penyimpulan seperti ini, maka kita harus jujur, bahwa bukan saja tim akreditasi RSU Fauziah yang menginjak *sajadah* sebagai alas kaki, tapi kita pun saban hari melakukan hal yang sama ketika memasuki mesjid. Artinya, sampai dengan detik ini belum ditemukan seorang pun yang masuk mesjid menggunakan kepala untuk menghindari menginjak sajadah.

Dan jika dihitung secara matematis, maka penggunaan *sajadah* sebagai alas kaki (pijakan) durasinya lebih lama jika dibandingkan penggunaannya sebagai alas kepala (untuk sujud). Untuk membuktikan teori ini, semua kita bisa

melakukan observasi langsung di masjid-masjid. Hal ini penting guna mengurangi tensi kelatahan.

Sementara itu, seperti kita lihat, saat ini telah banyak bangunan rumah-rumah besar dan juga perkantoran yang di bagian atasnya disertai atap setengah bundar yang menyerupai kubah mesjid. Kira-kira siapa berani menjamin di dalam rumah-rumah itu tidak terjadi perjudian, zina atau sejenisnya?

Dan siapa pula berani memastikan bahwa di kantor-kantor pemerintah yang di atapnya dilengkapi kubah tidak terjadi tindakan korupsi dan sebangsanya? Tapi, apakah kemudian kita pernah menuding hal tersebut sebagai sebuah pelecehan terhadap agama? Bahwa telah terjadi perjudian atau pun korupsi dalam masjid, sebab ia memiliki kubah? Di sinilah pentingnya kewarasan.

Namun demikian, tulisan ini tidak secara otomatis membenarkan mentah-mentah tindakan awak RS yang pada praktiknya telah menyalahi etika umum. Tindakan awak RS, baik sengaja atau pun tidak tentunya patut dievaluasi guna mengurangi kepanikan. Apa yang terjadi di RS Fauziah beberapa hari lalu hanyalah sebuah ekspresi kepanikan dari ketidaksiapan mereka menghadapi tamu.

Masih "lumayan" mereka menggelar karpet shalat (*sajadah*) untuk tamu, meskipun sangat tidak etis. Tapi publik juga tidak akan kalah heboh jika awak RS saat itu tiba-tiba menggelar tikar jemur padi. Protes pasti meledak.

Beginilah jadinya jika sesuatu dilakukan dengan *geureubak geureubuk*, pasti *meusuruek*. (***AT, 19 Desember 2017***).

Tentang Penulis

Khairil Miswar, S. Pd. I., M. Ag lahir di Desa Cot Bada Baroh, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Aceh, pada 24 Juli 1981 dari pasangan Drs. Tgk. H. Ismail Sarong dan Hj. Mudiah Affan (almarhumah). Pada usia 27 tahun penulis menikah dengan Linda Zahrianur, S. Si dan dikaruniai tiga anak: Sameer Al-Qarni, Syahira Fathul Kirami dan Syiza Ghazia Rihani.

Penulis menempuh pendidikan formal di MIN Cot Bada (1987-1993), MTsN Matangglumpangdua (1993-1996), MAN Peusangan (1996-1999), Diploma Dua IAIN Ar-Raniry (1999-2001), Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab (1999-2004/ tidak selesai), STAI Al-Muslim (2005-2013) dan terakhir Pascasarjana UIN Ar-Raniry Konsentrasi Pemikiran dalam Islam (2014-2019). Pendidikan non formal dijalani di Dayah Darussa'dah Teupin Raya Cabang Cot Bada (1987-1998).

Penulis belajar menulis autodidak sejak di MTsN Matangglumpangdua (1993) setelah dipengaruhi oleh guru

Bahasa Indonesia, Bapak Jafar Syamsuddin. Saat itu penulis memiliki hobi menulis di buku diary, buku catatan dan di sampul album foto. Penulis pertama sekali mengirimkan tulisan ke media pada 2007. Saat itu dimuat di Tabloid SUWA yang beredar terbatas di Aceh. Sejak 2011 mulai menulis di Harian Aceh, Harian Pikiran Merdeka, Harian Serambi Indonesia, Harian Rakyat Aceh, Tabloid Modus, Majalah Santunan, Harian Waspada Medan, Harian Analisa, dan beberapa media online seperti hidayatullah.com, republika.co.id, AceHTrend.com dll.

Sejak 2015 menjadi penulis tetap di kolom *Tuanku Nan Kacau* yang tayang di AceHTrend.com. Buku yang sudah terbit: *Habis Sesat Terbitlah Stres; Fenomena Penolakan Wahabi di Aceh* (Padebooks, 2017); *Syariat dan Apa Ta'a; Fenomena Sosial Keagamaan di Pasca Konflik Aceh* (Padebooks, 2017); dan *Demokrasi Kurang Ajar* (Zahir Publishing, 2019). Buku *Senandung Jampoek* yang ada di tangan pembaca adalah buku keempat.

Saat ini penulis sedang menyelesaikan buku *Mazhab Hamok; Fenomena Kekerasan Atas Nama Agama di Aceh* dan buku *Wahhabi di Mata Orang Dayah*. Buku disebut terakhir berasal dari tesis master penulis di Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Penulis dapat dihubungi via email: khairilmiswar@yahoo.com; Facebook: Khairil Miswar; Twitter: @khairilmiswar1 dan WA: 081360660766.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYAIKH NURUDDIN AR-RANIRY
BANDA ACEH

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Dayah Darussa'adah
TEUPIN RAYA – GLUMPANG TIGA – PIDIE
ACEH – INDONESIA

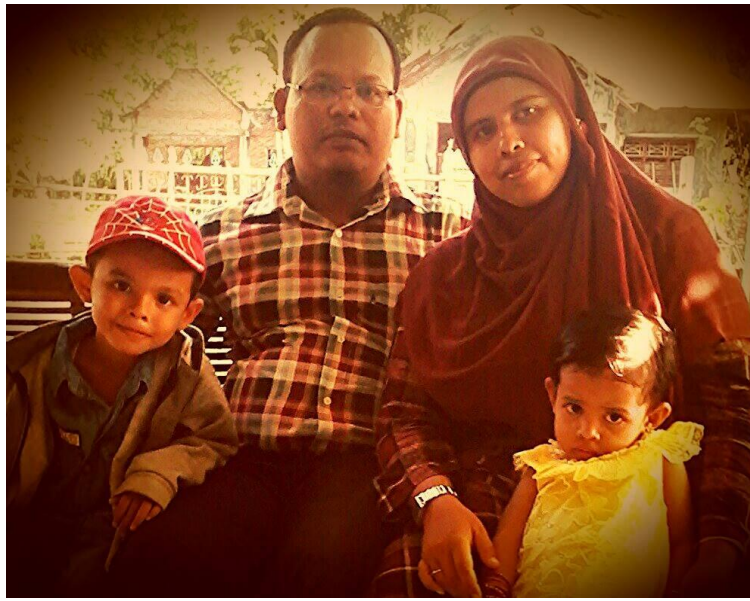

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT SULTAN ISKANDAR MUDA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH – ACEH – INDONESIA
https://pmiiuinary.wordpress.com

Senandung Jampoek

Kolom Tuanku Nan Kacau

Berasal dari kalangan kelas menengah terdidik, Khairil Miswar adalah sosok yang tidak pernah bisa tidur bila belum menyampaikan aspirasinya. Melalui tulisan-tulisannya, guru yang tidak bisa diatur oleh sistem di luar UU ini, selalu menyuarakan perlawanan terhadap perihal yang menurutnya tidak ideal. Buku ini adalah kumpulan kegelisahan yang sempat ia catat dan kemudian tayang di aceHTrend. Tulisannya bernas.

[Muhajir Juli, CEO aceHTrend, Direktur Utama Kawat Publishing]

Di Aceh kritik sosial bukanlah hal baru. Jejaknya ada hingga jauh ke masa-masa nan jauh. Saking jauhnya, kritik sosial di Aceh sudah pada level seni, ada dalam wujud Hikayat Jampoek, dan kini hadir dalam bentuk Senandung Jampoek oleh Khairil Miswar.

[Risman A. Rachman, Komisaris PT Media Rubrika Utama, Mantan CEO AceHTrend].

Kawat Publishing

9 786025 059179